

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TANGGAL 5 JANUARI 2012

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
PULAU KALIMANTAN

RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU KALIMANTAN

KETERANGAN GAMBAR

Skala 1 : 500.000
 0 2,5 50
 Kilometer

BATAS ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan / Kota Lainya
- Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Landas Kontinen
- Batas Landas Kontinen (BLK)
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)
- Batas Laut Teritorial (BLT)
- Batas Laut Teritorial, perlu kesepakatan (BLT)
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI

- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
- Lintas Penyeberangan Antarnegara
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Pulau Kalimantan dengan Provinsi di Luar Pulau Kalimantan
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Pulau Kalimantan
- Jaringan Penyeberangan Sabuk Utara
- Jaringan Penyeberangan Sabuk Tengah
- Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk
- Jaringan Transportasi Sungai
- Jaringan Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Jalan Bebas Hambatan
- Jaringan Jalur Kereta Api
- Jaringan Jalan Lintas Utara
- Jaringan Jalan Lintas Tengah
- Jaringan Jalan Lintas Selatan
- Jaringan Jalan Pengumpan

**RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU KALIMANTAN
KETERANGAN GAMBAR**

Skala 1 : 500,000

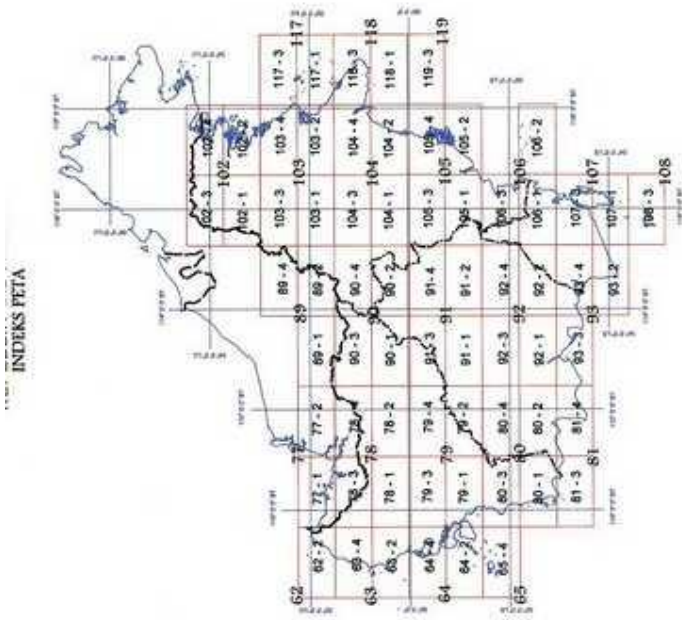


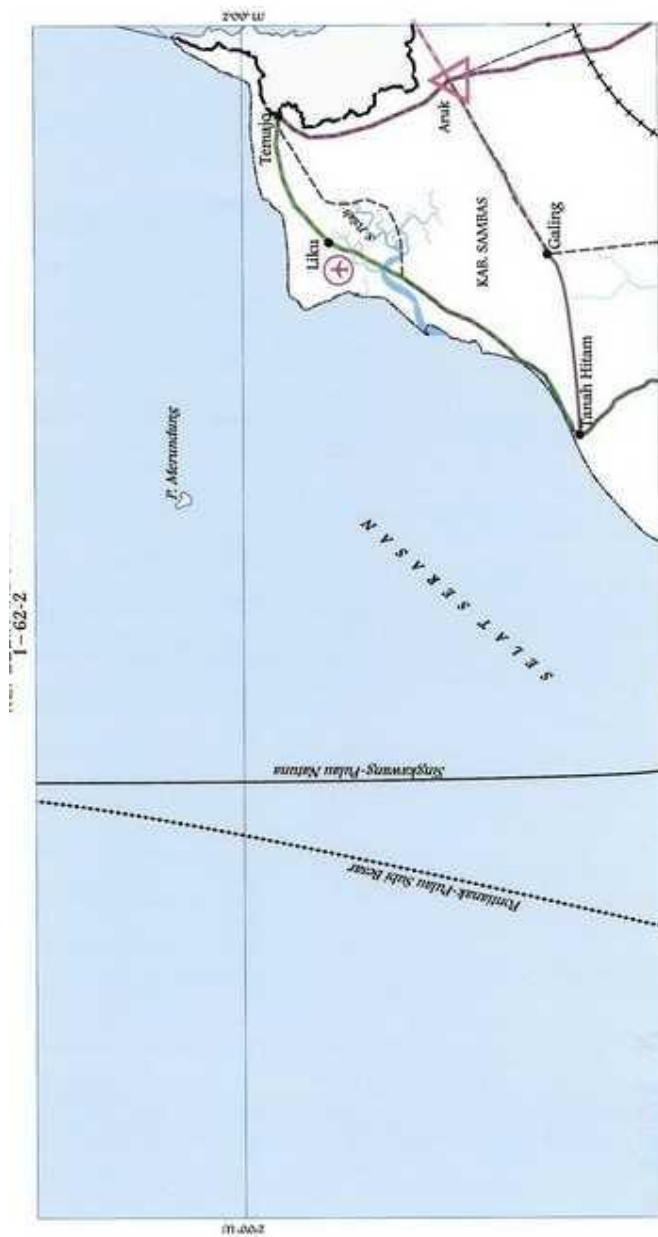
SUMBER PETA :

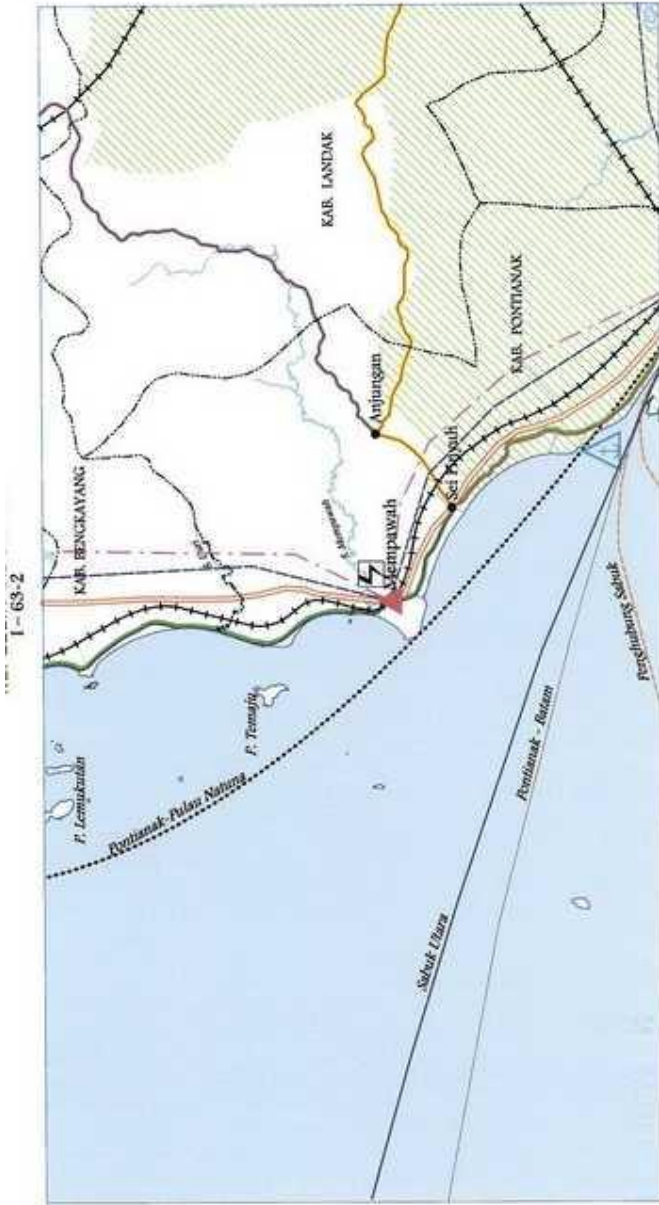
1. Peta Rupabumi Indonesia, skala 1 : 250.000, BAKOSURTANAL, 2000.
2. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, BAKOSURTANAL, 2009.
3. Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, 2006.
4. Rencana Induk Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, 2010.
5. Permen PU No. 11A Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, 2006.
6. Peta Batimetri skala 1 : 1.000.000, BAKOSURTANAL, 2004.

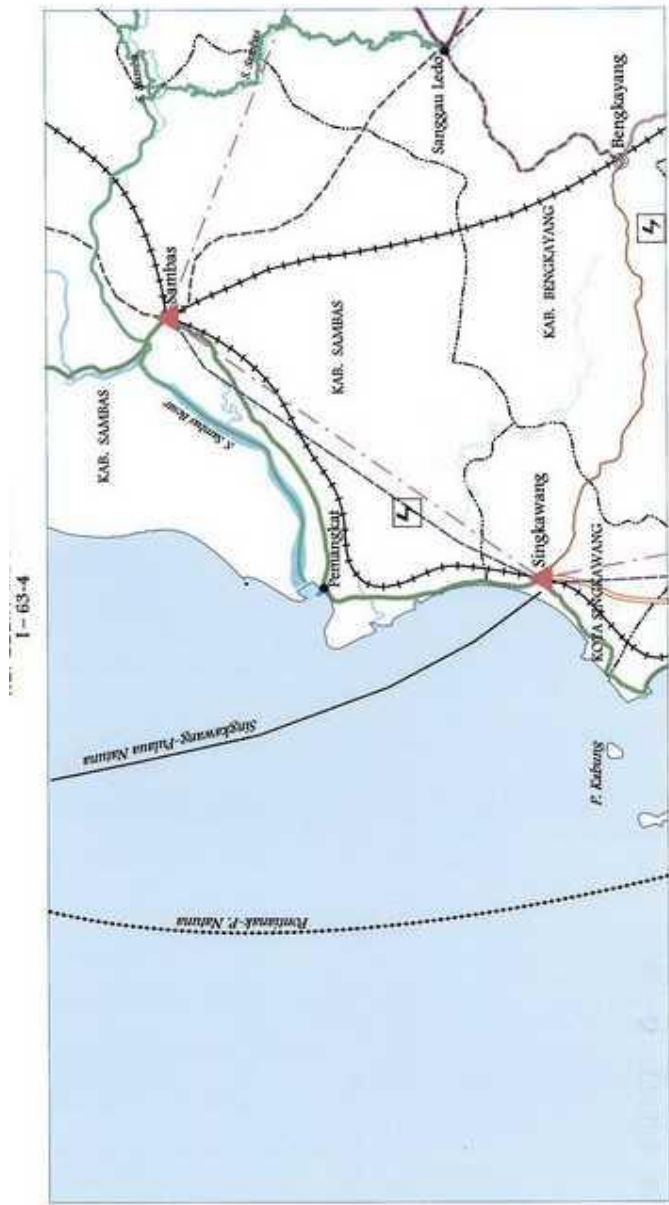
RIWAYAT PETA :

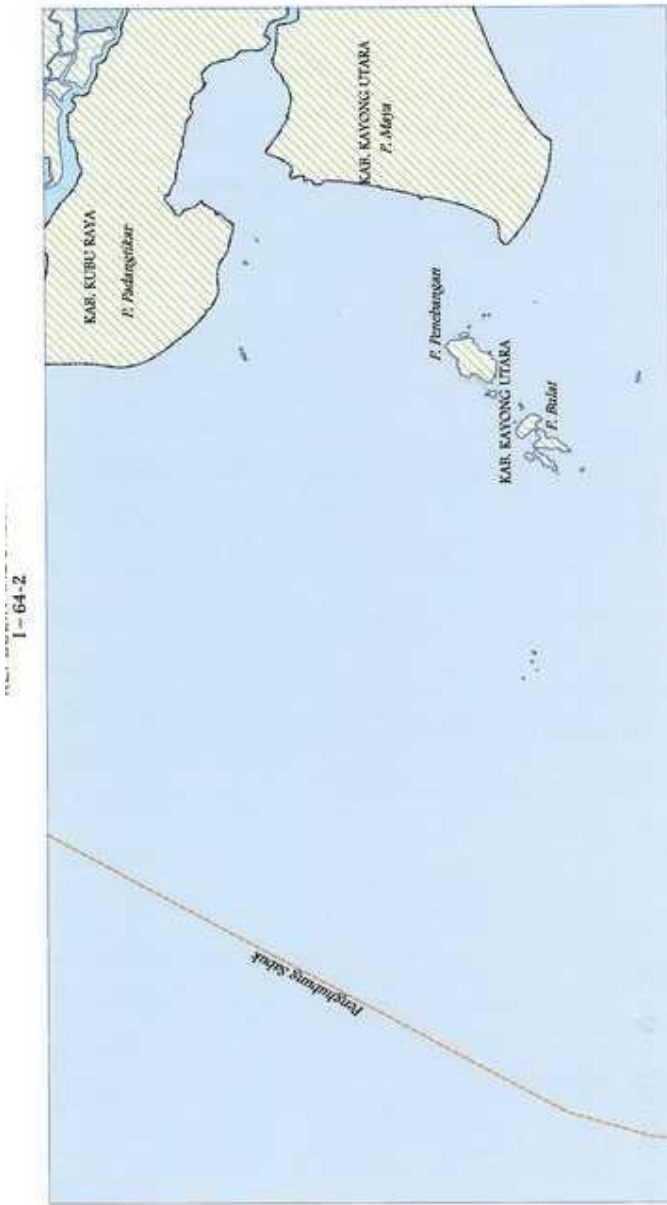
1. Kedalaman informasi peta adalah skala 1 : 500.000.
2. Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaaahan mikro.
3. Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional.
4. Hasil kajian Tim Teknis Rencana Tata Ruang Pulau dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

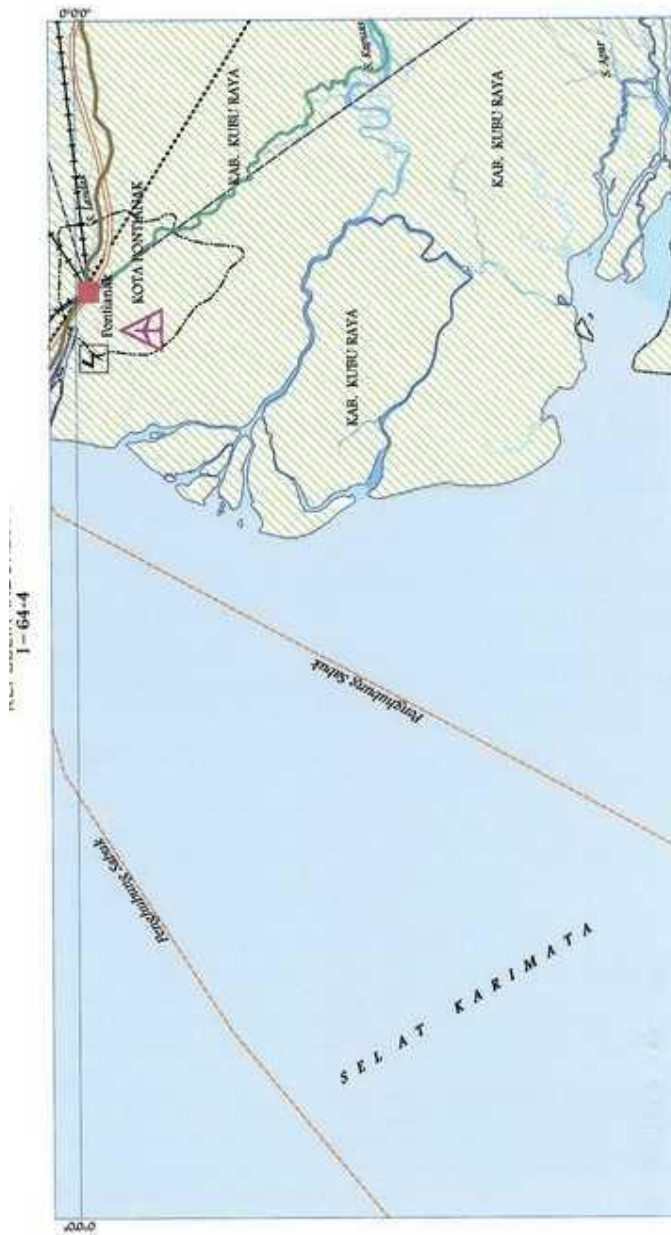


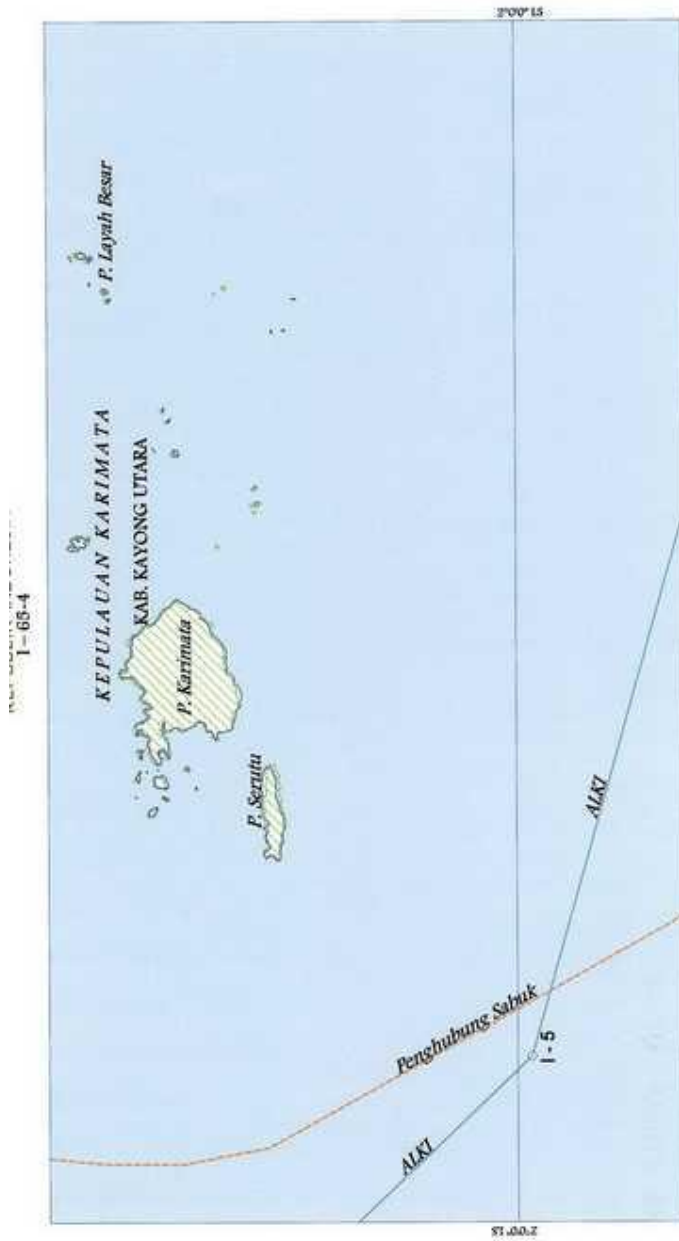


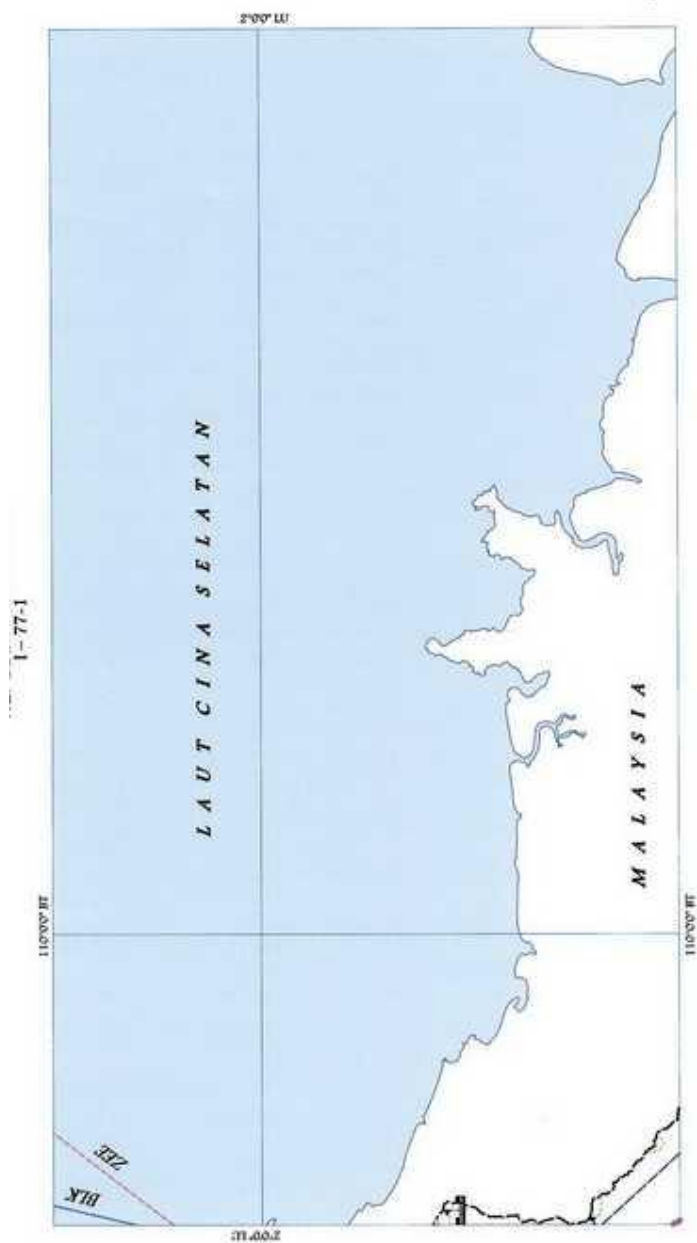


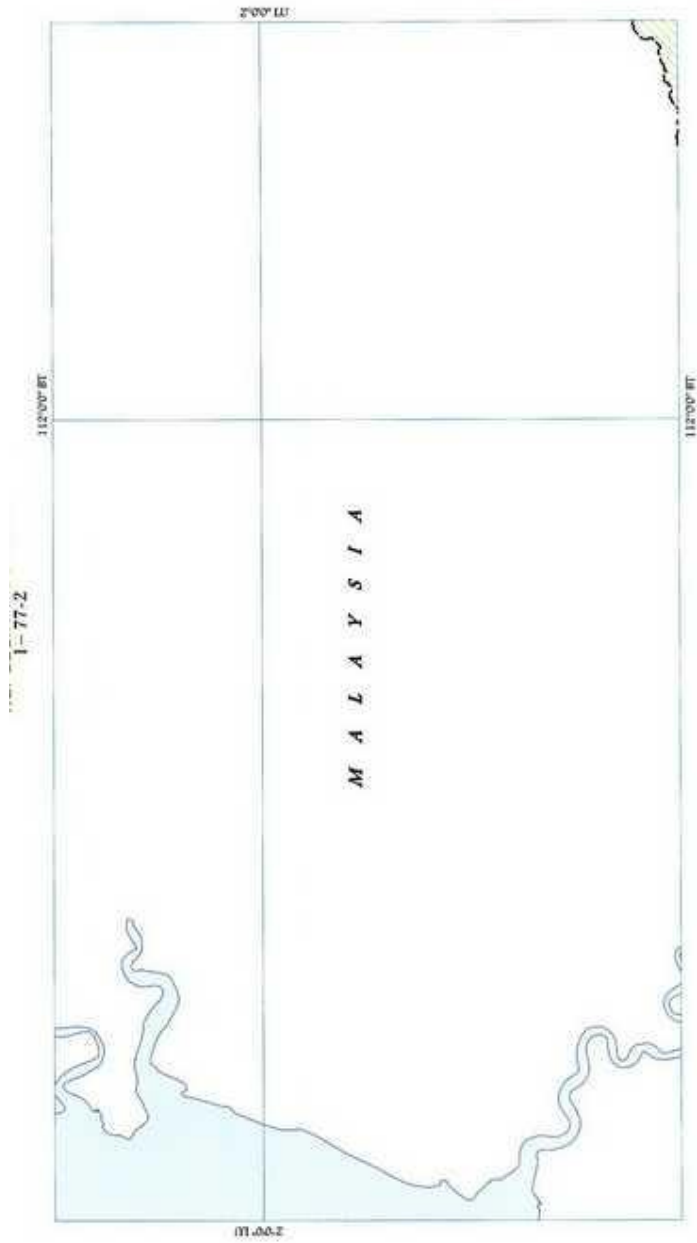


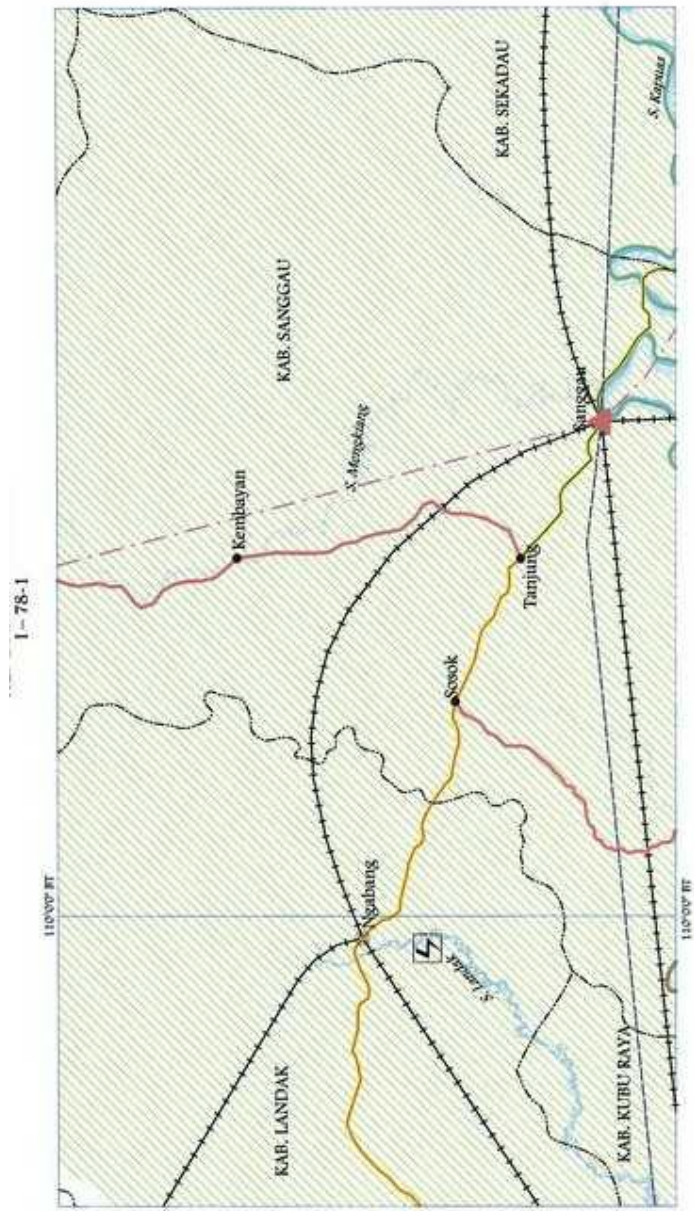


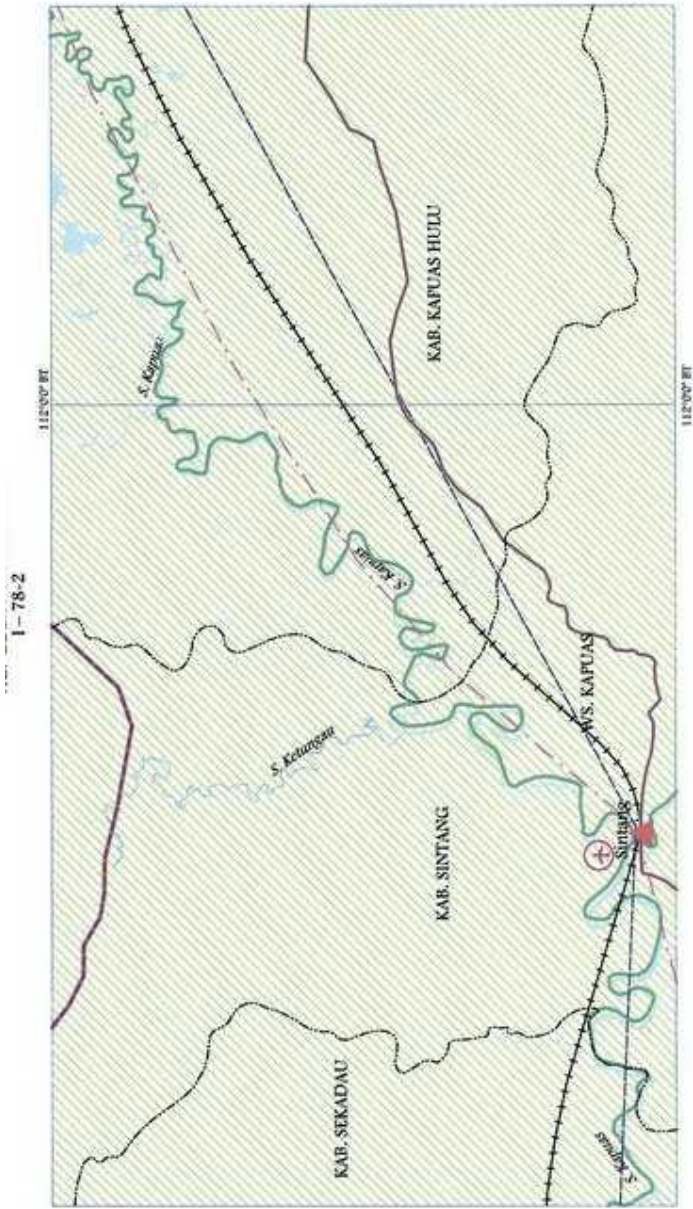


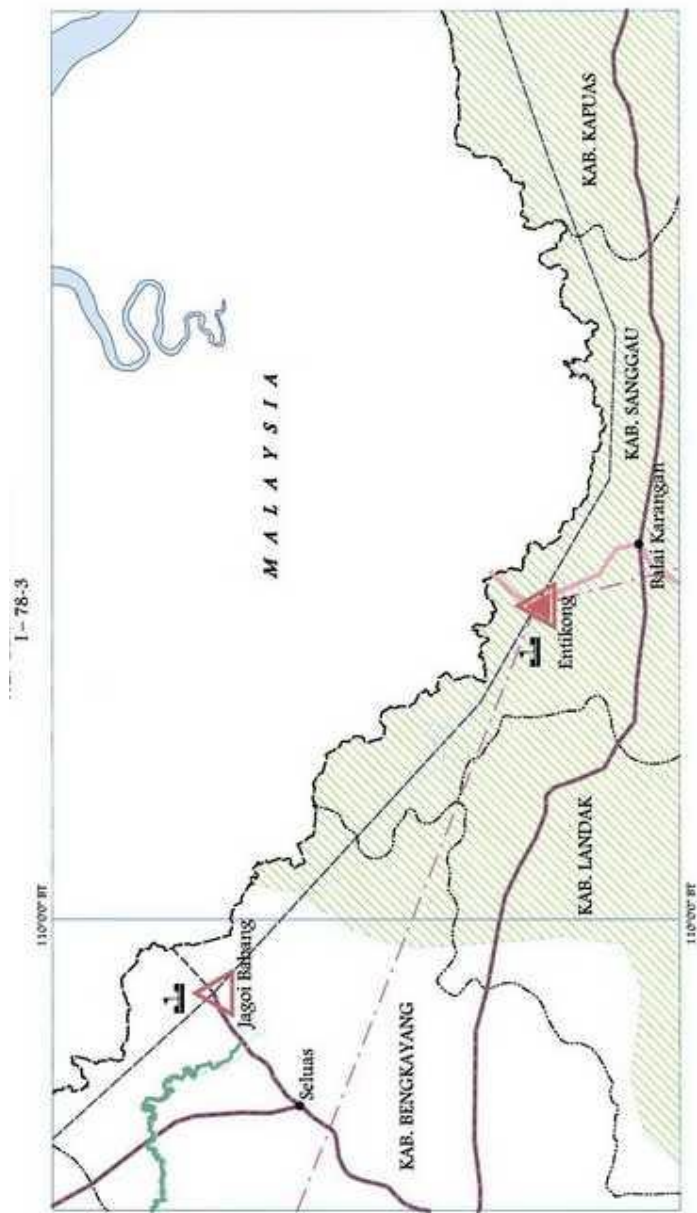


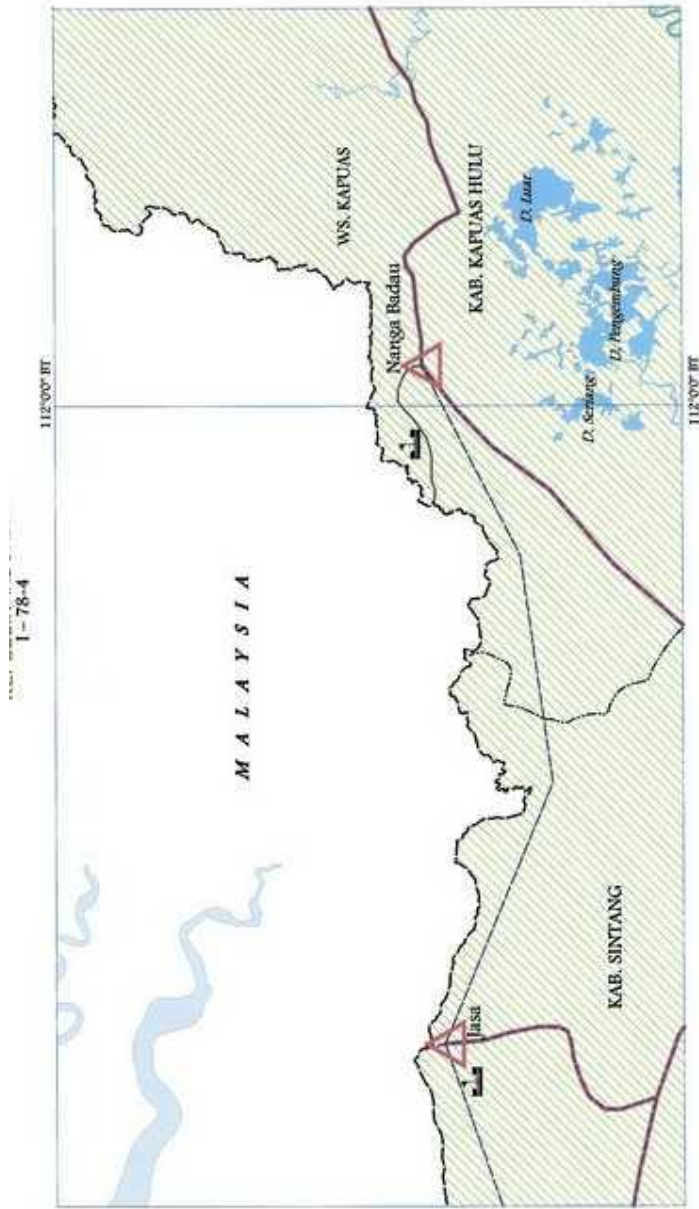


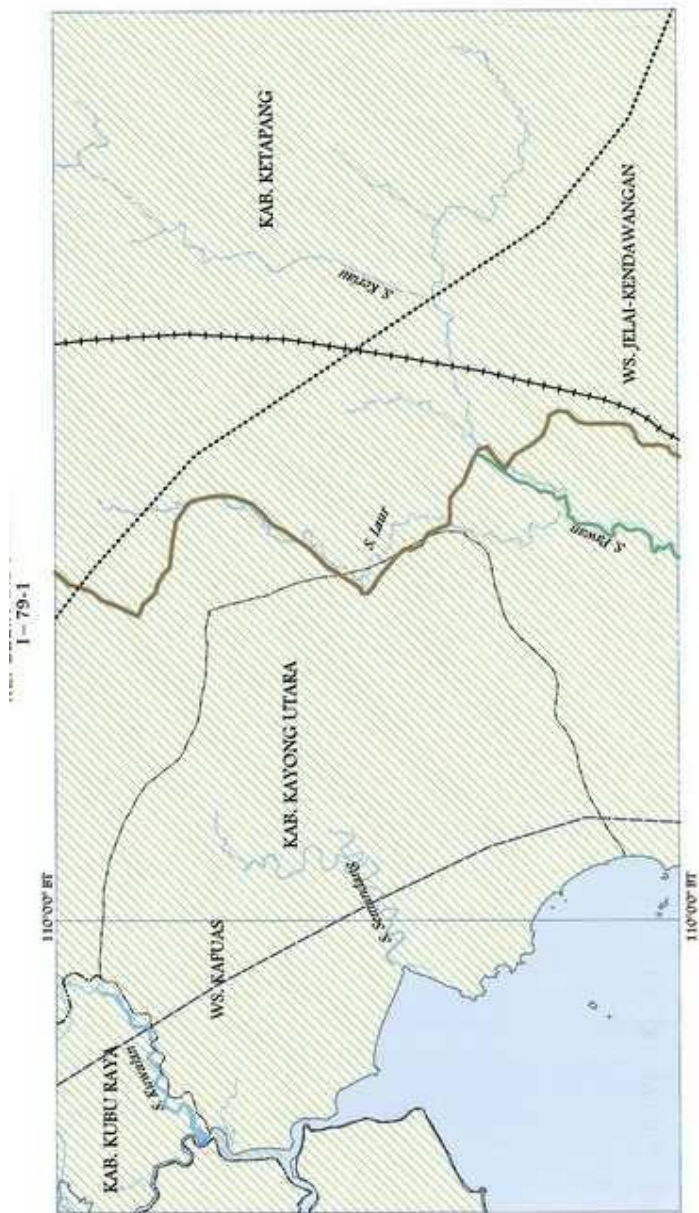


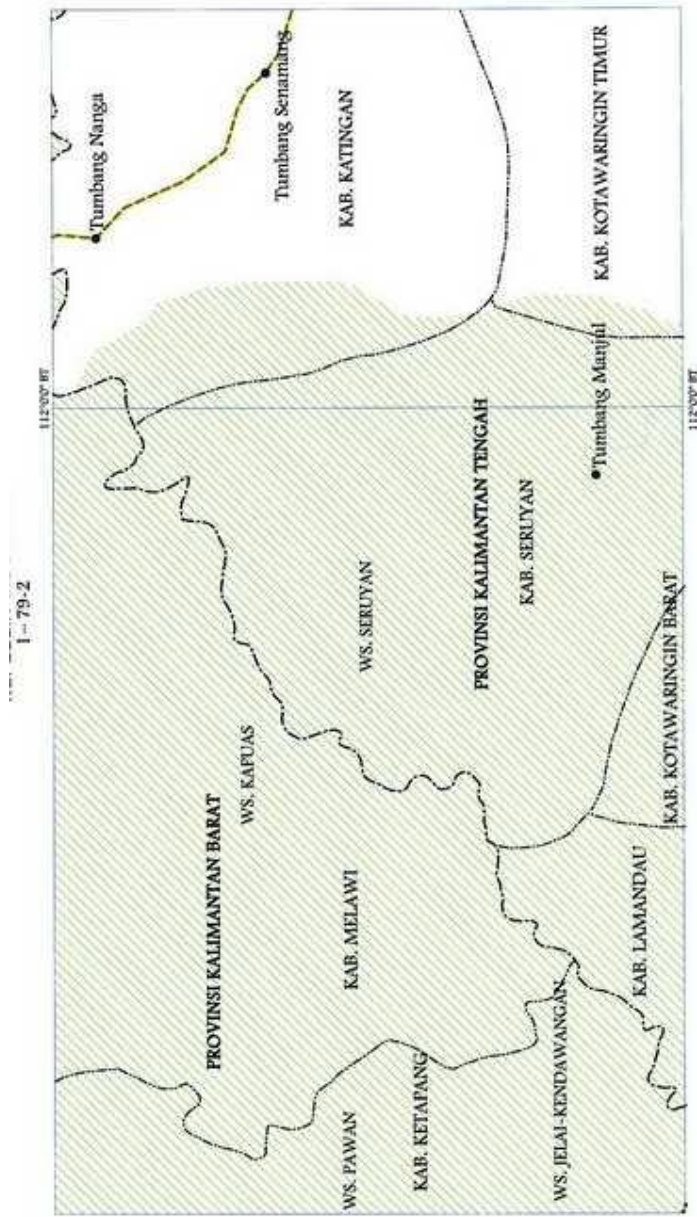


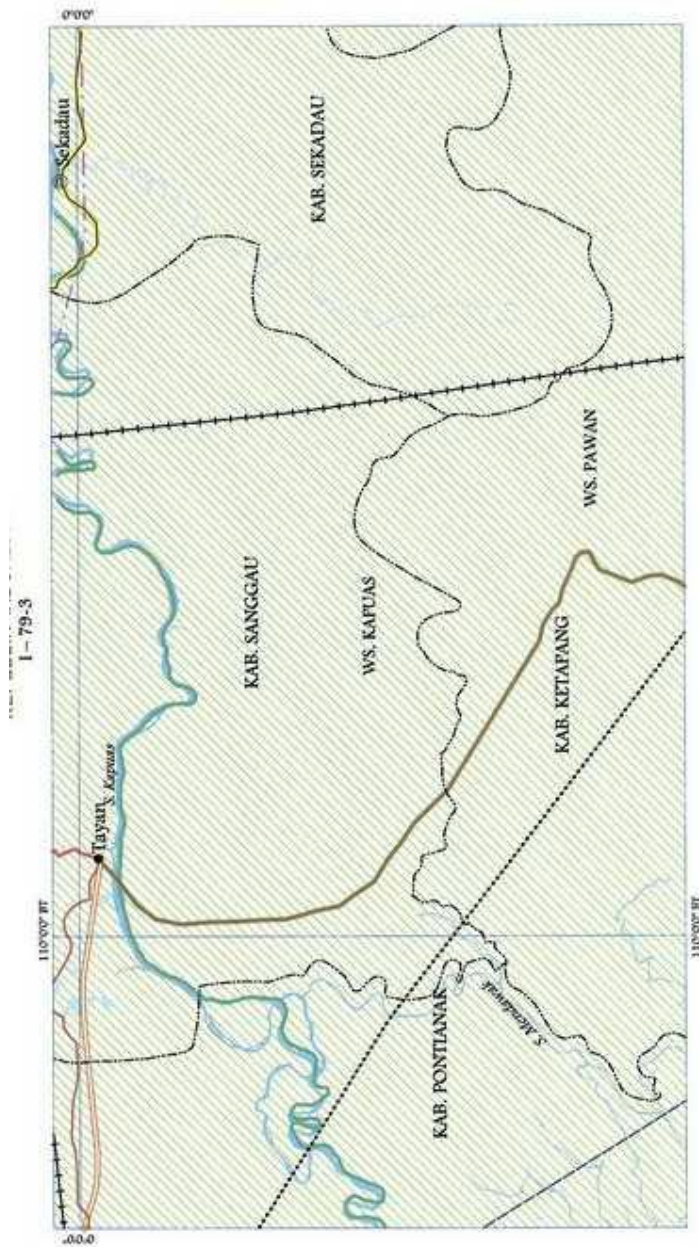


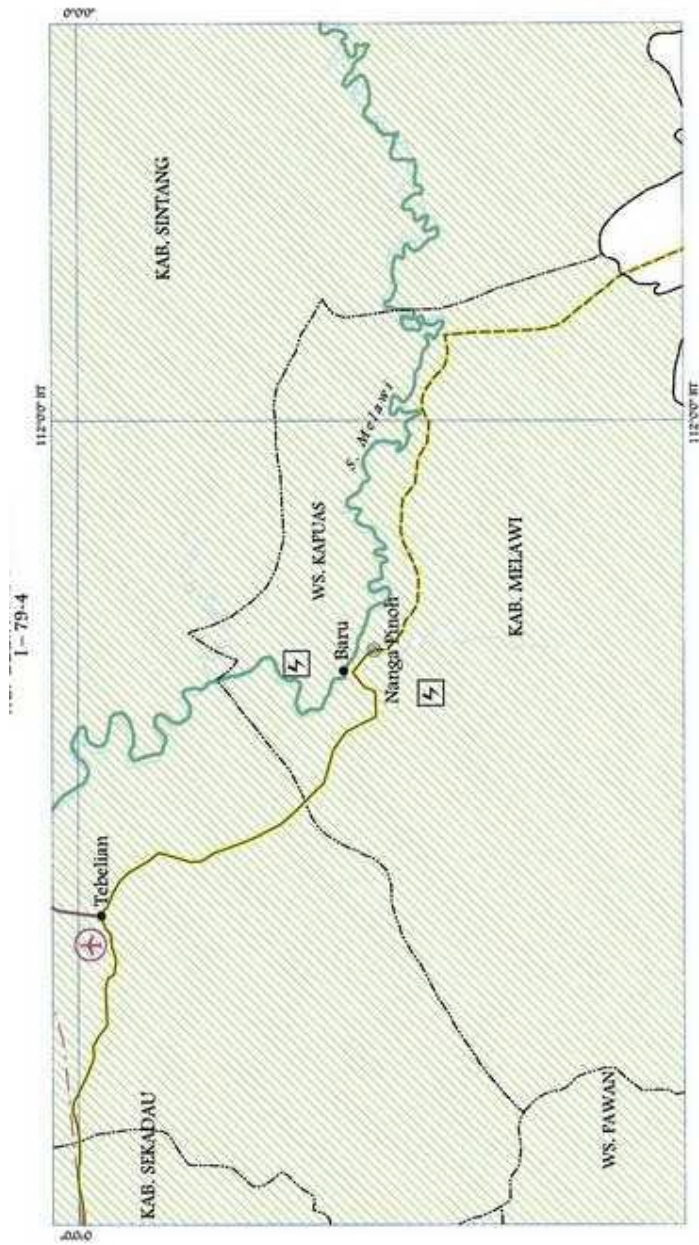


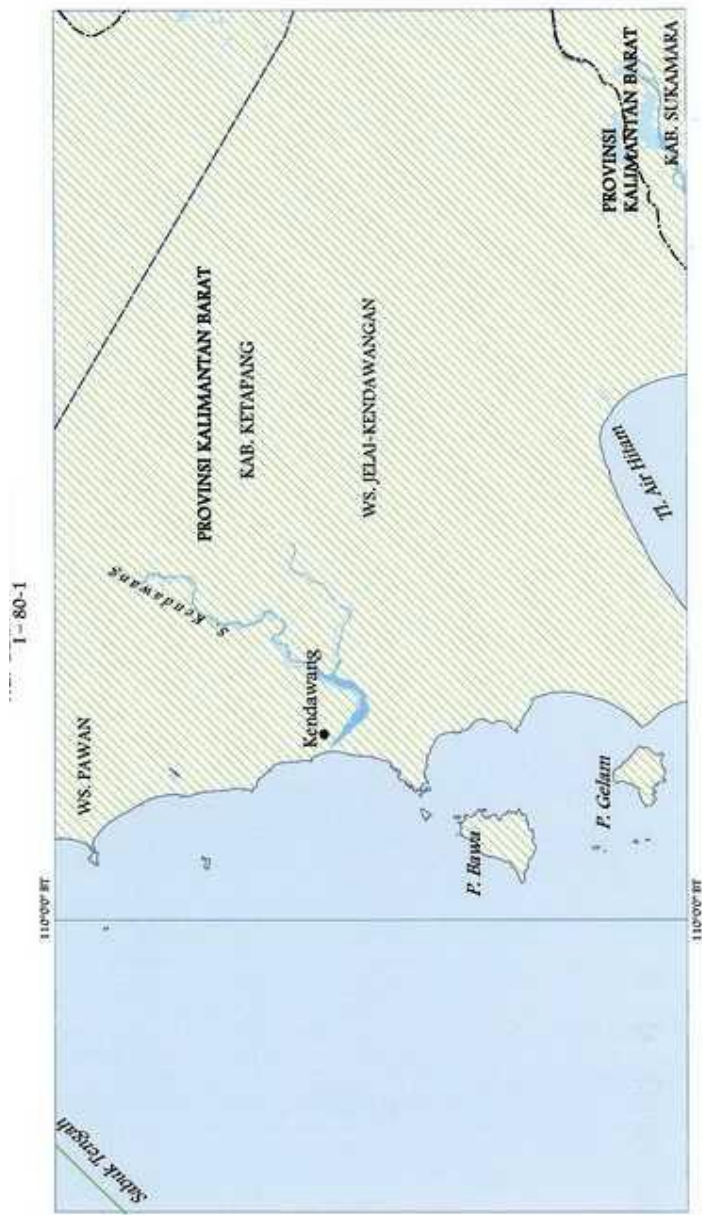


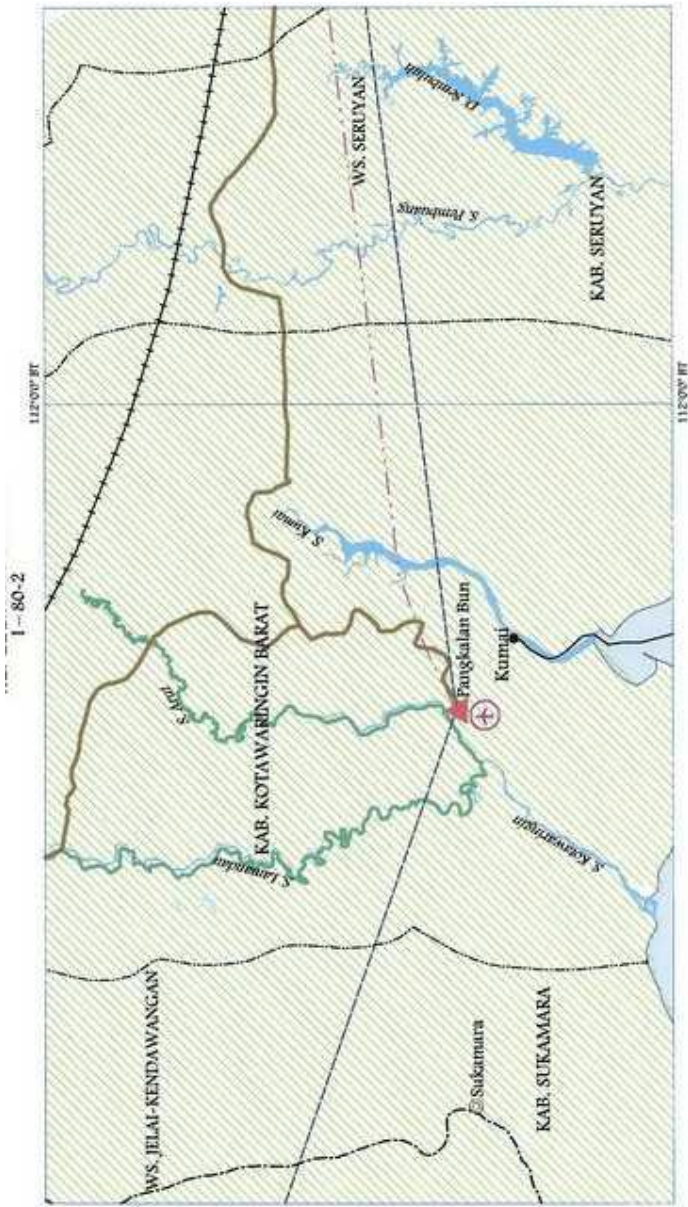




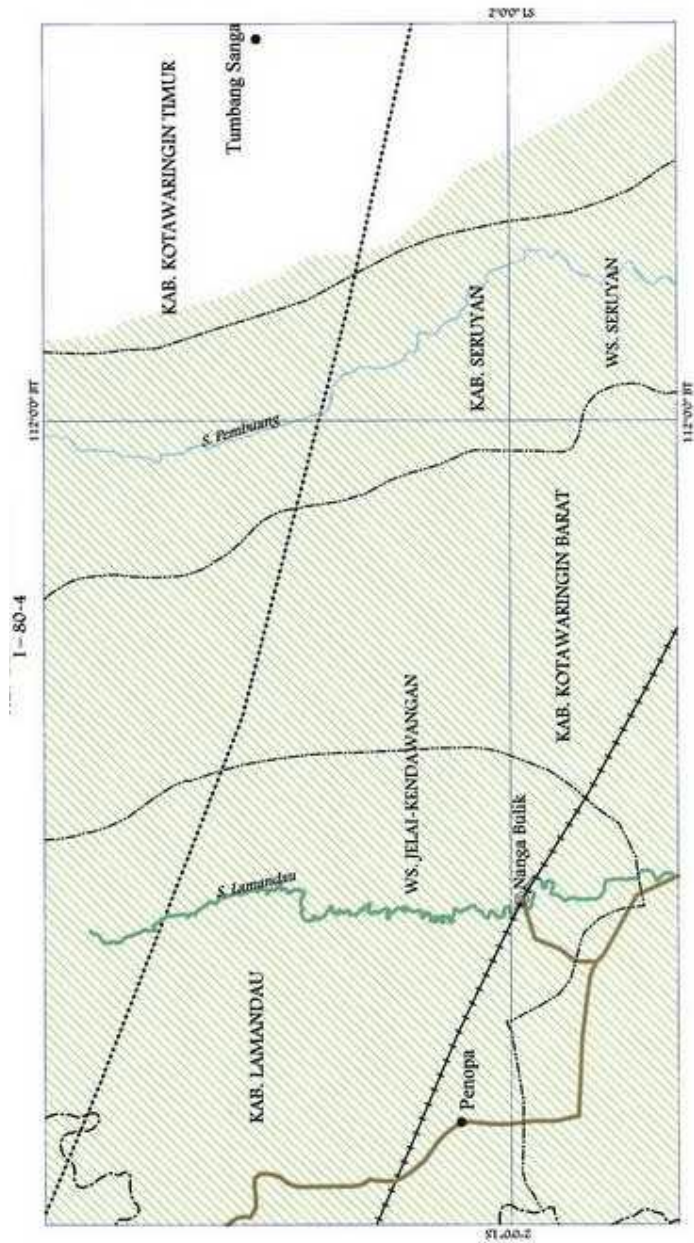




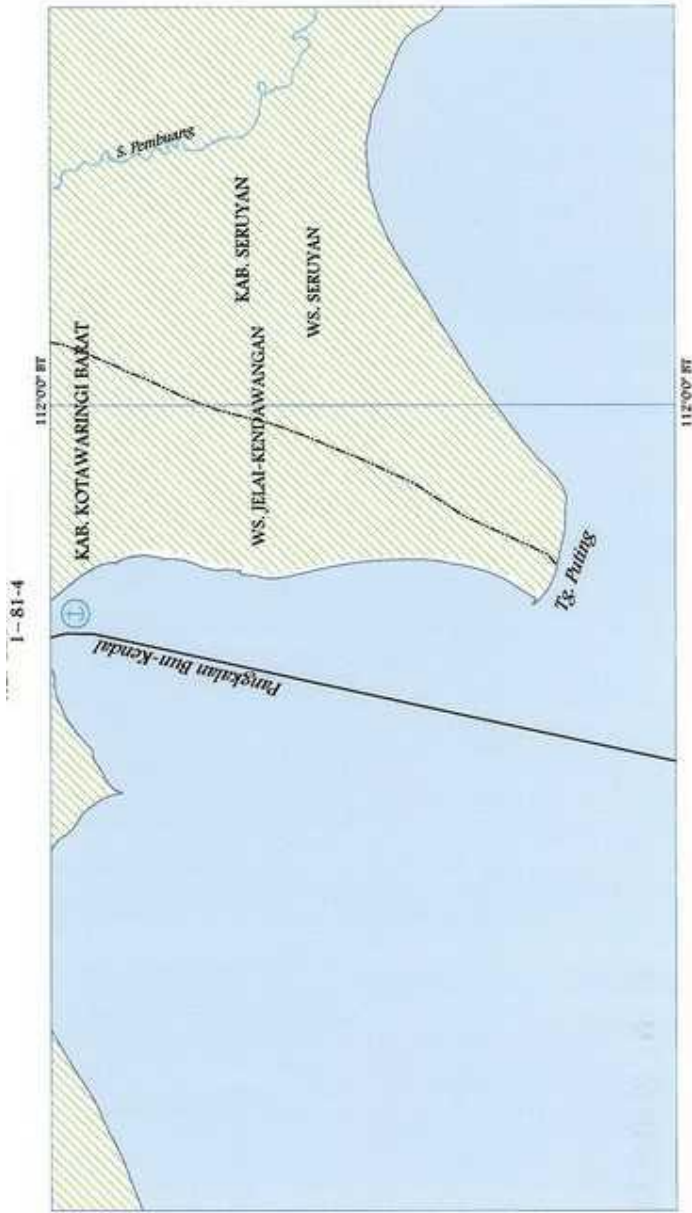


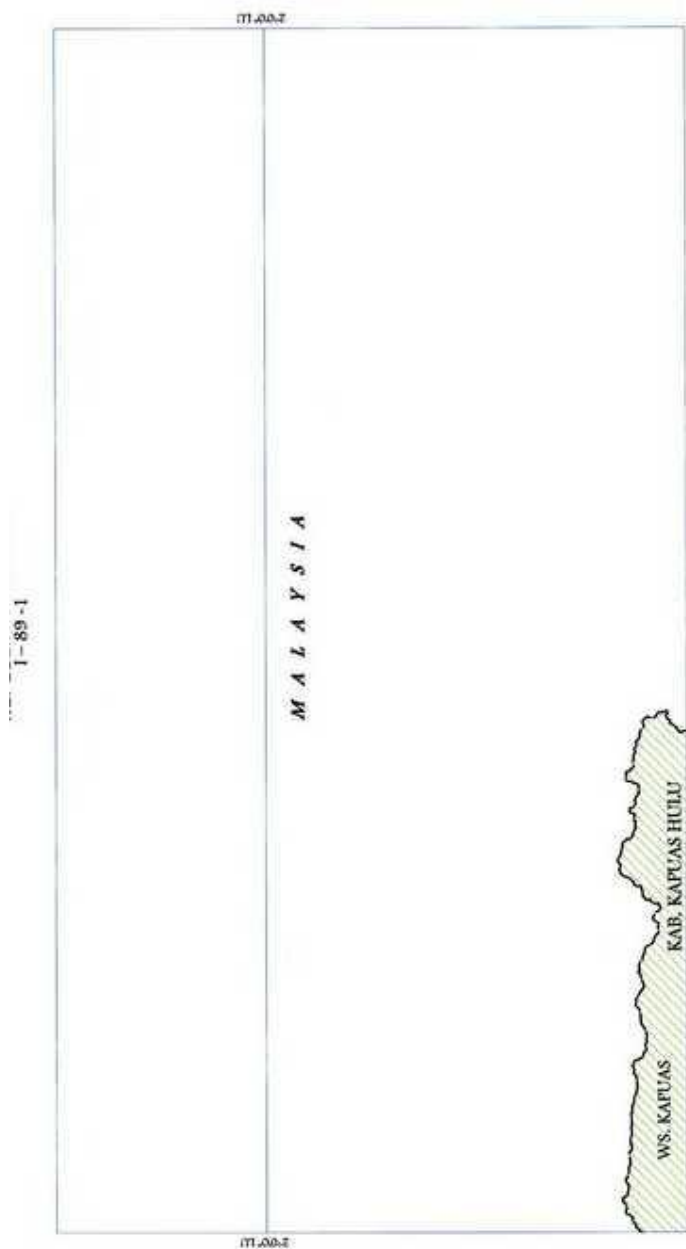


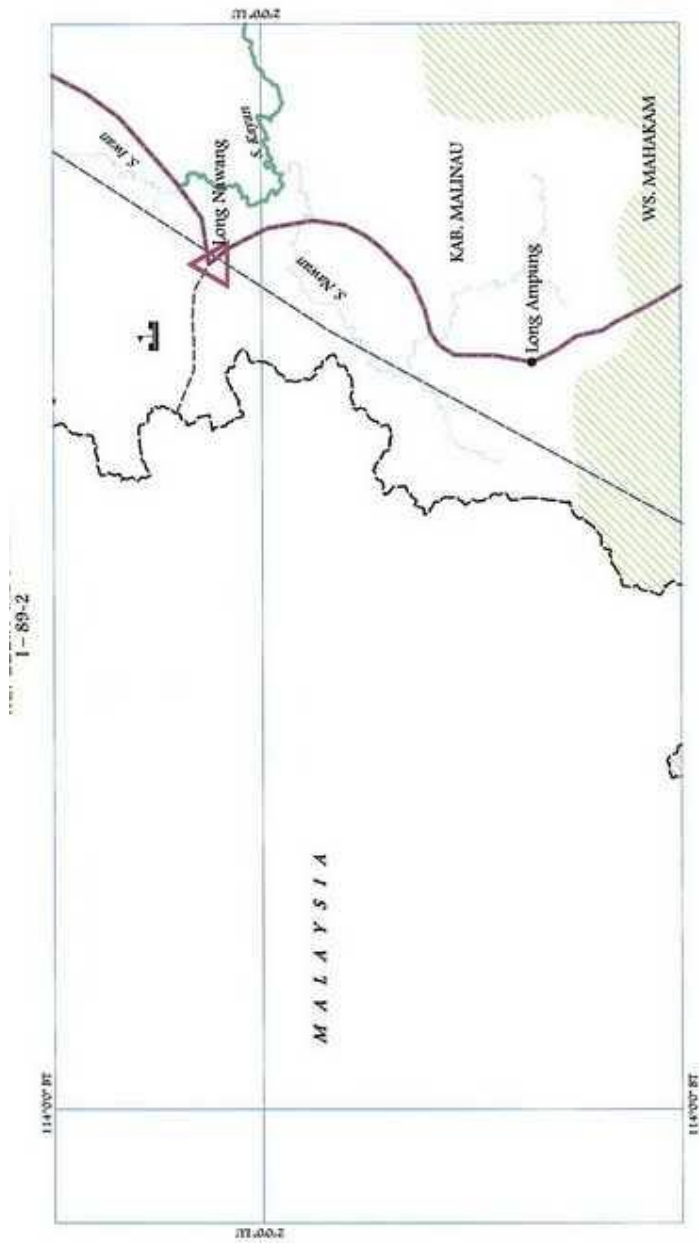


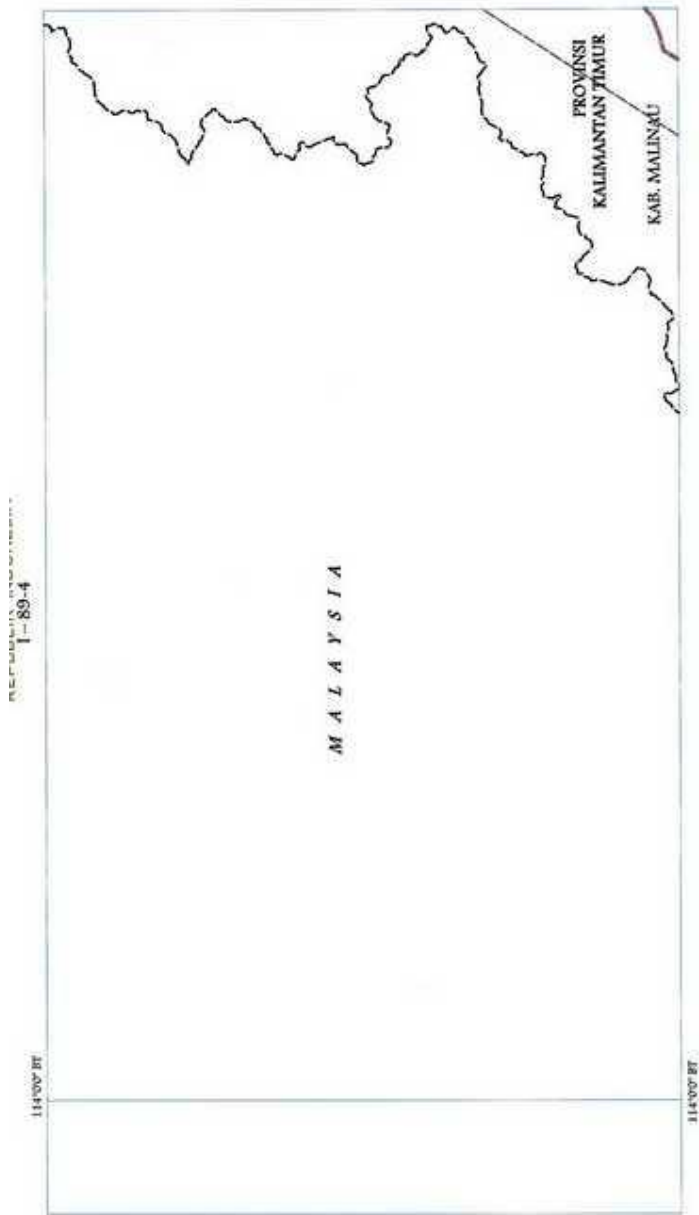




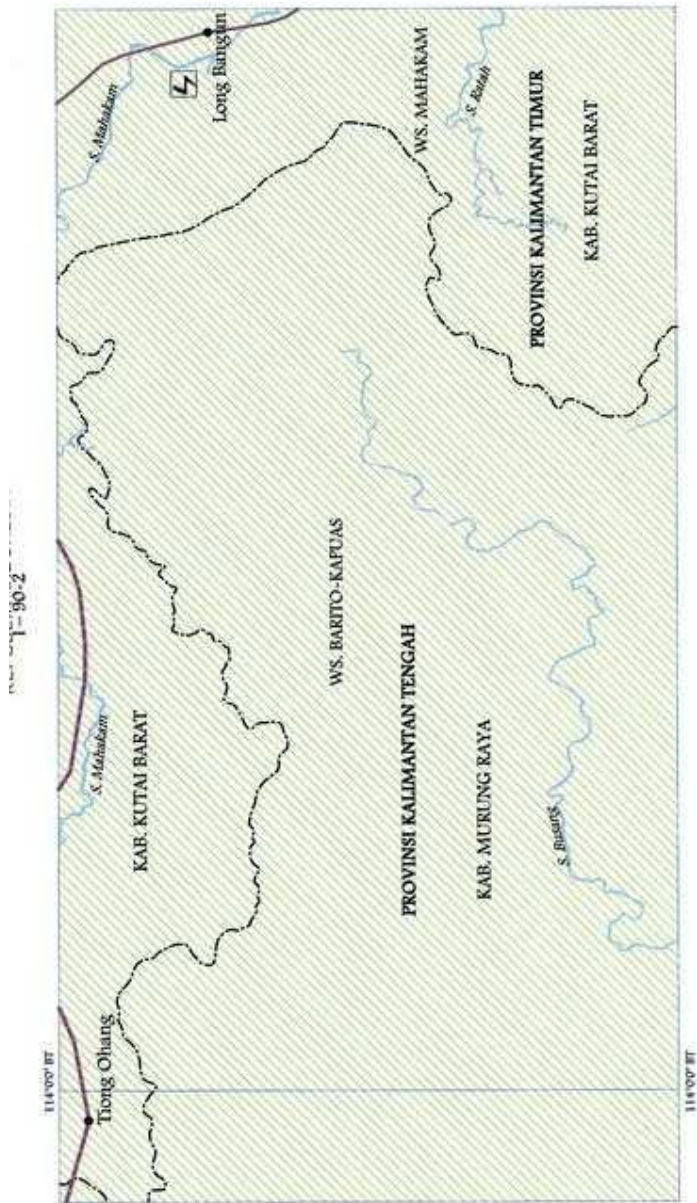


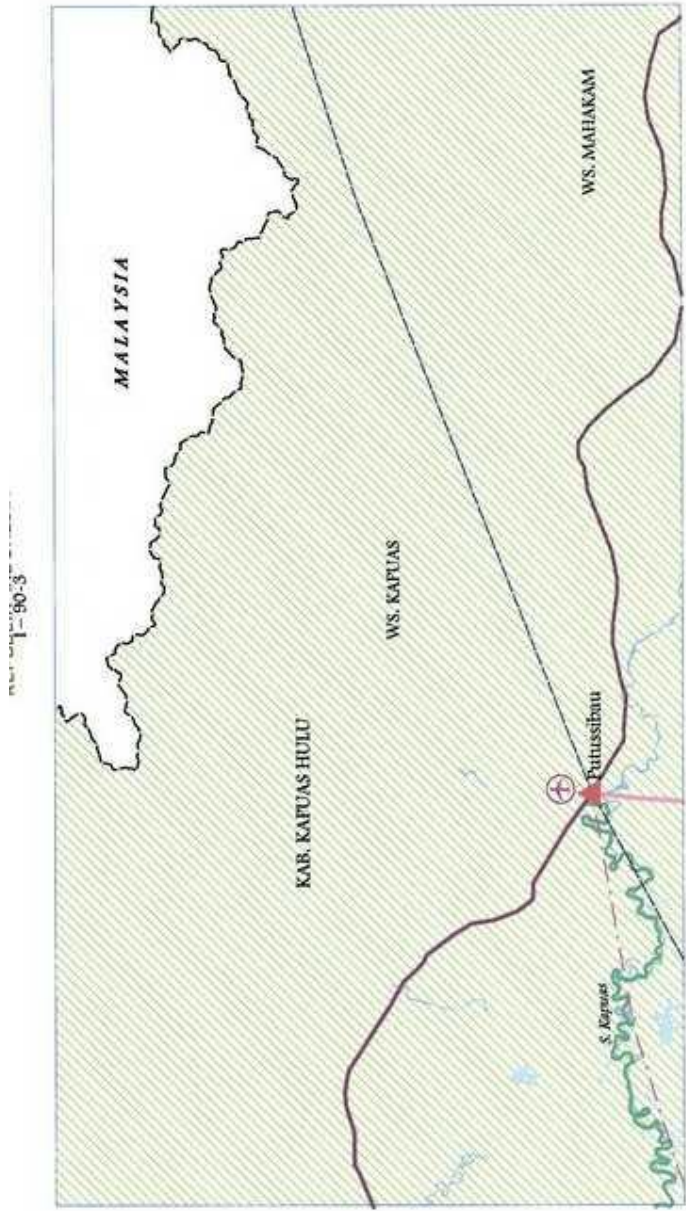


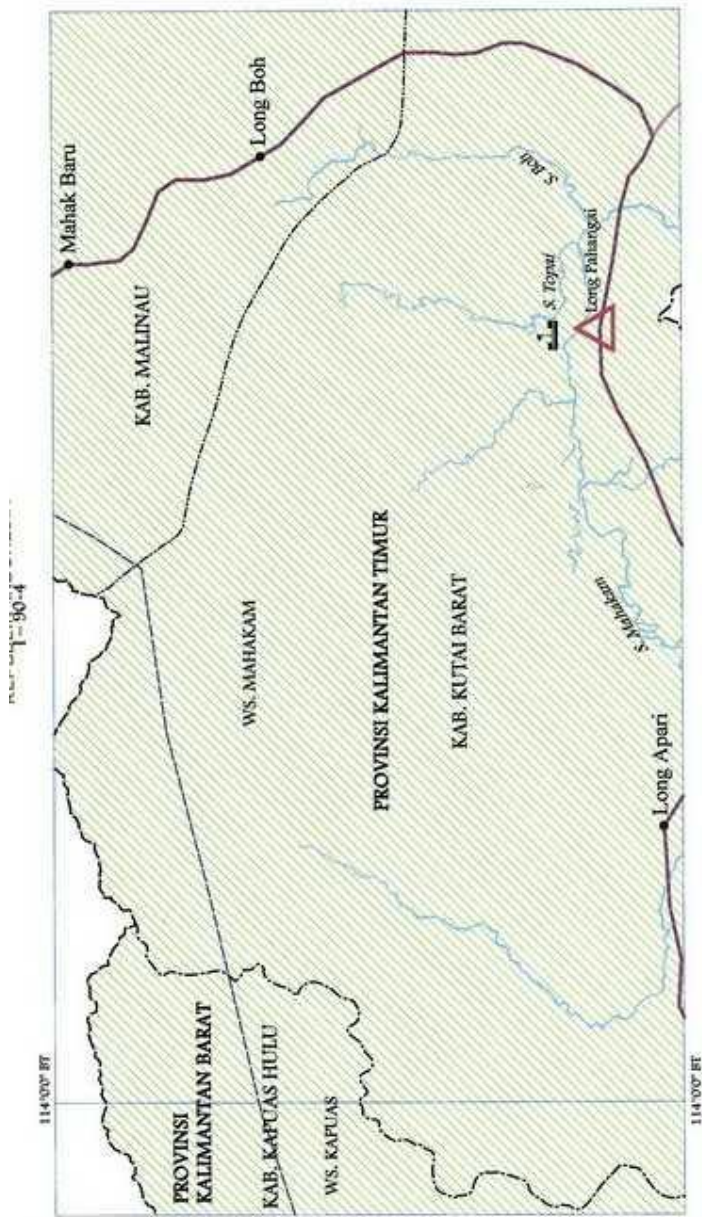


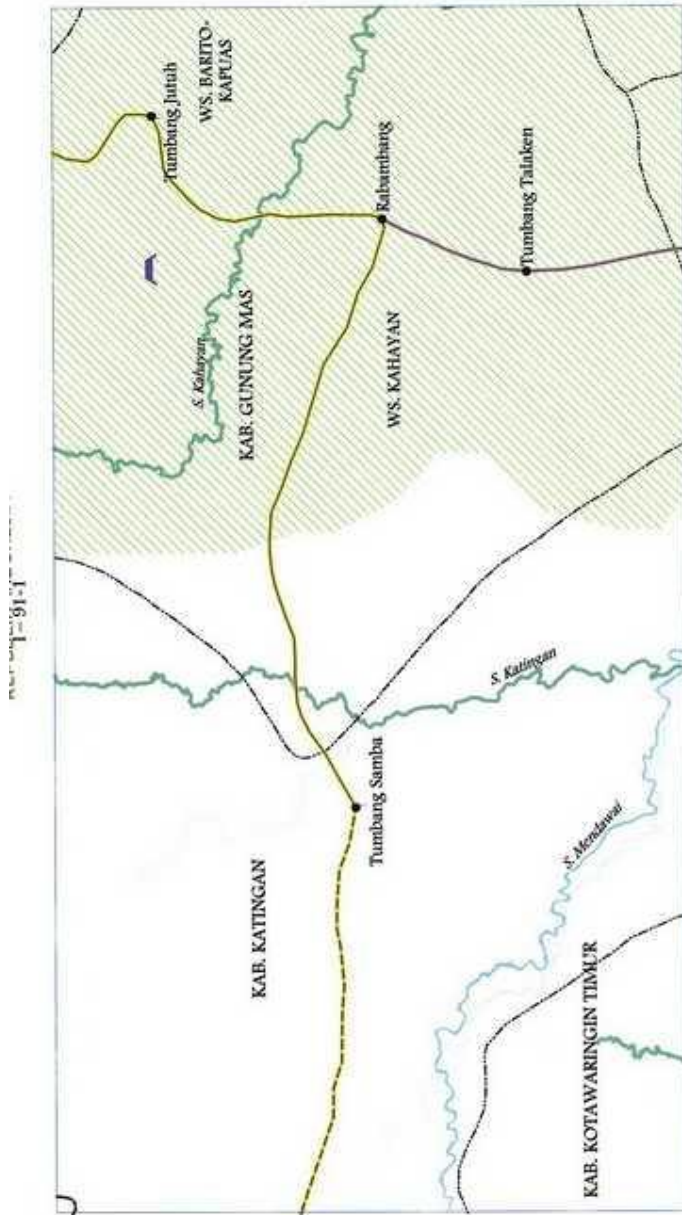


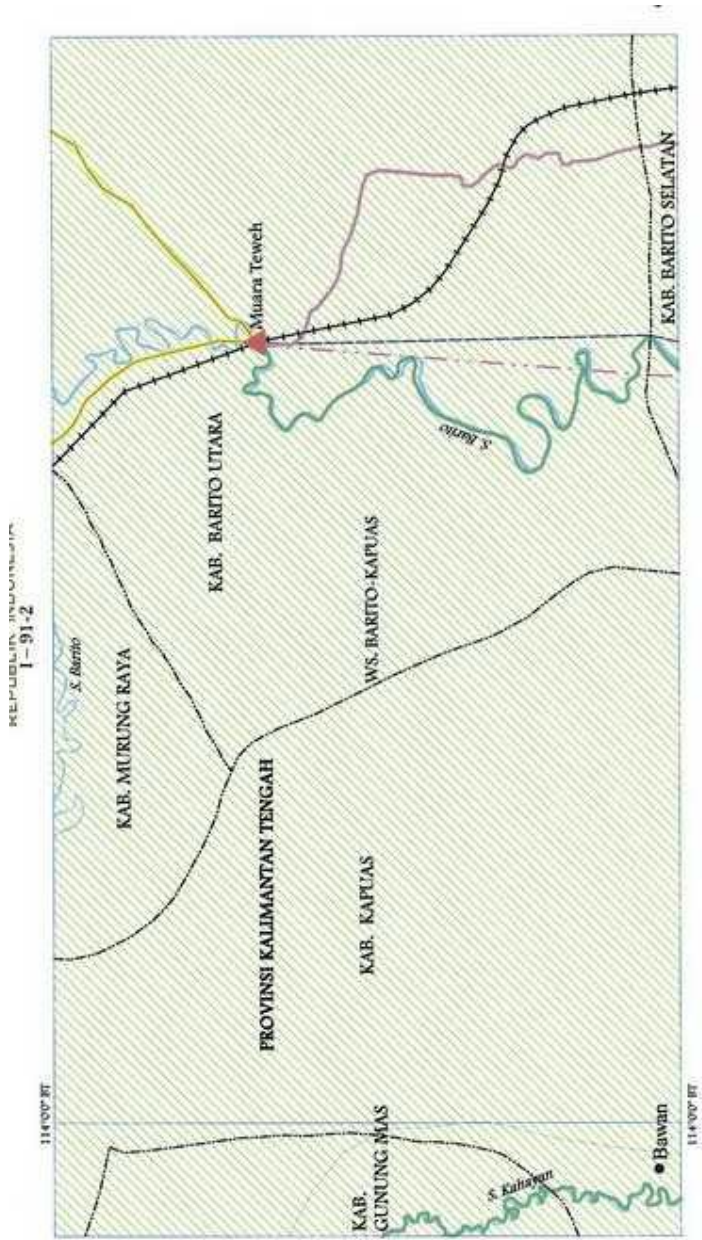


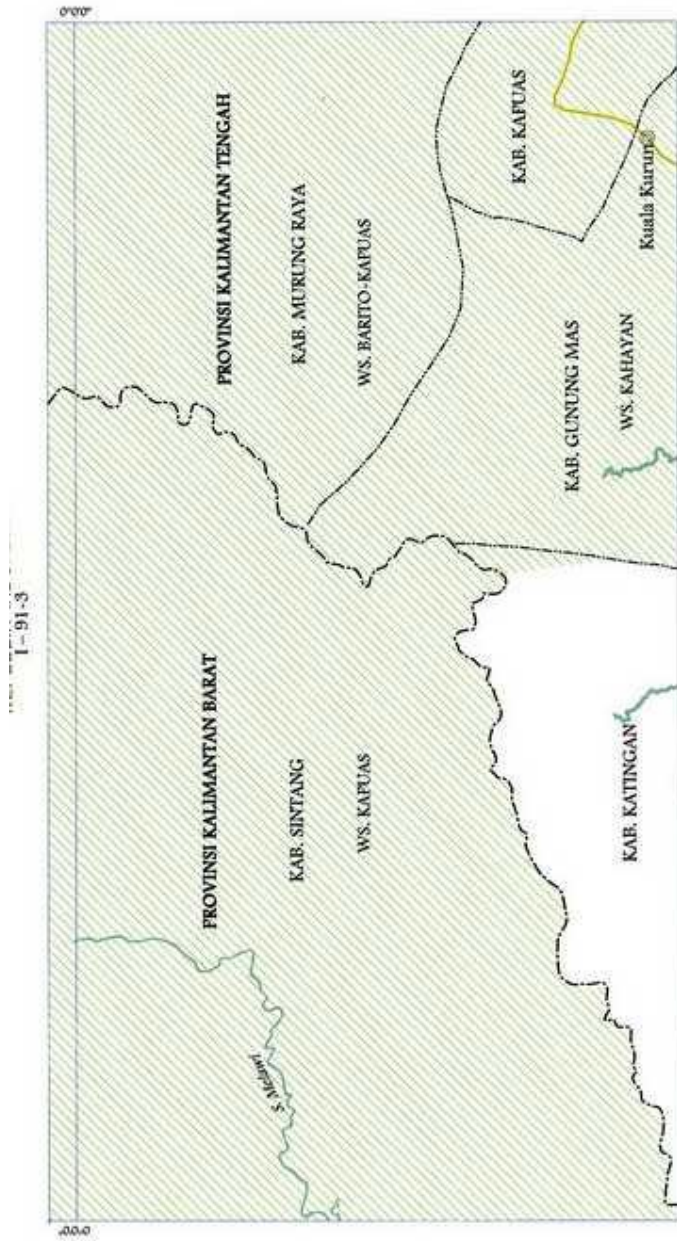


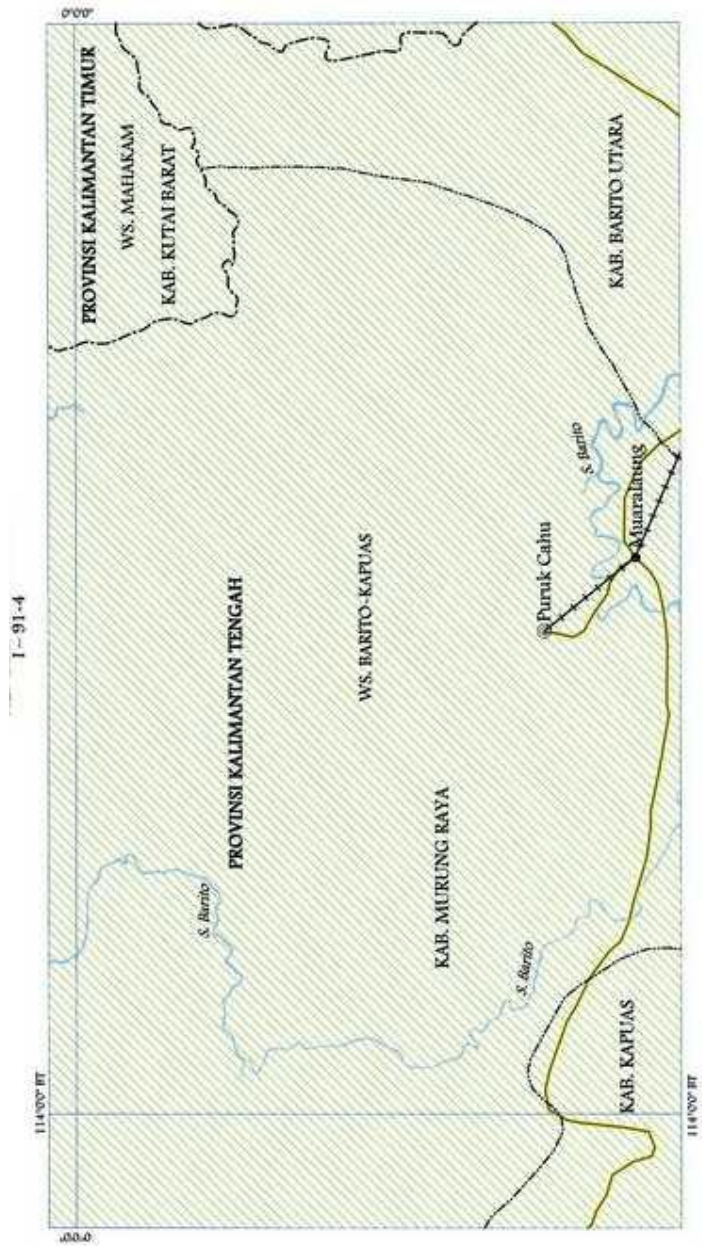


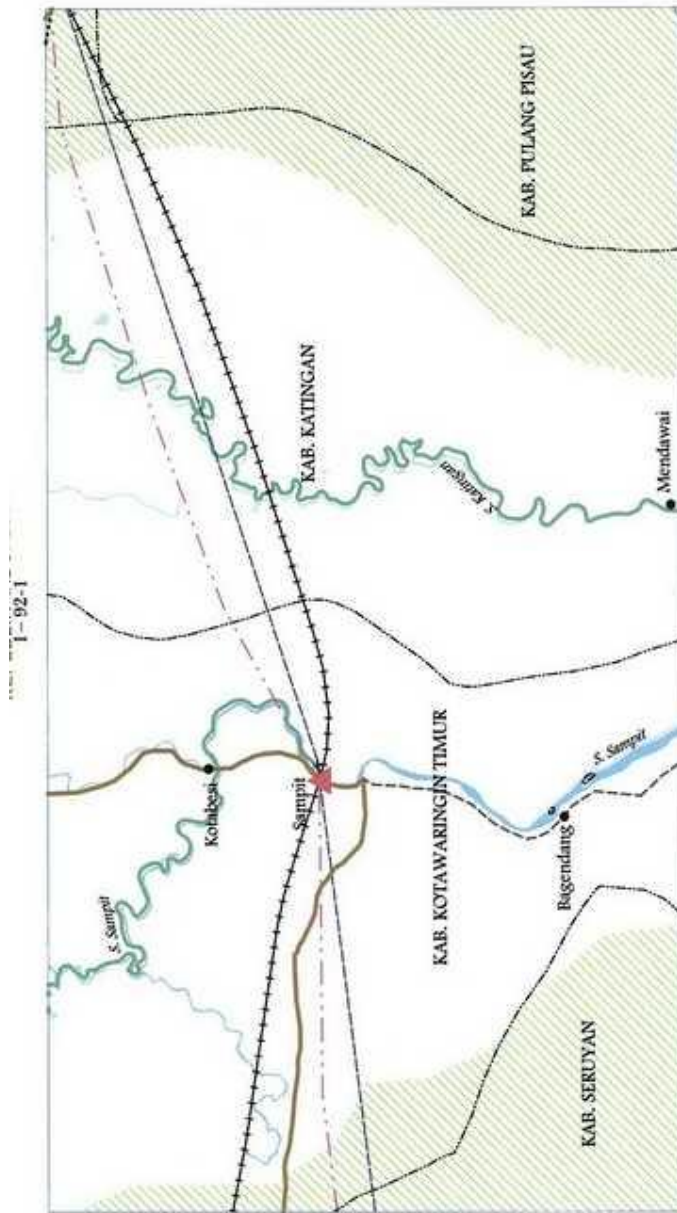


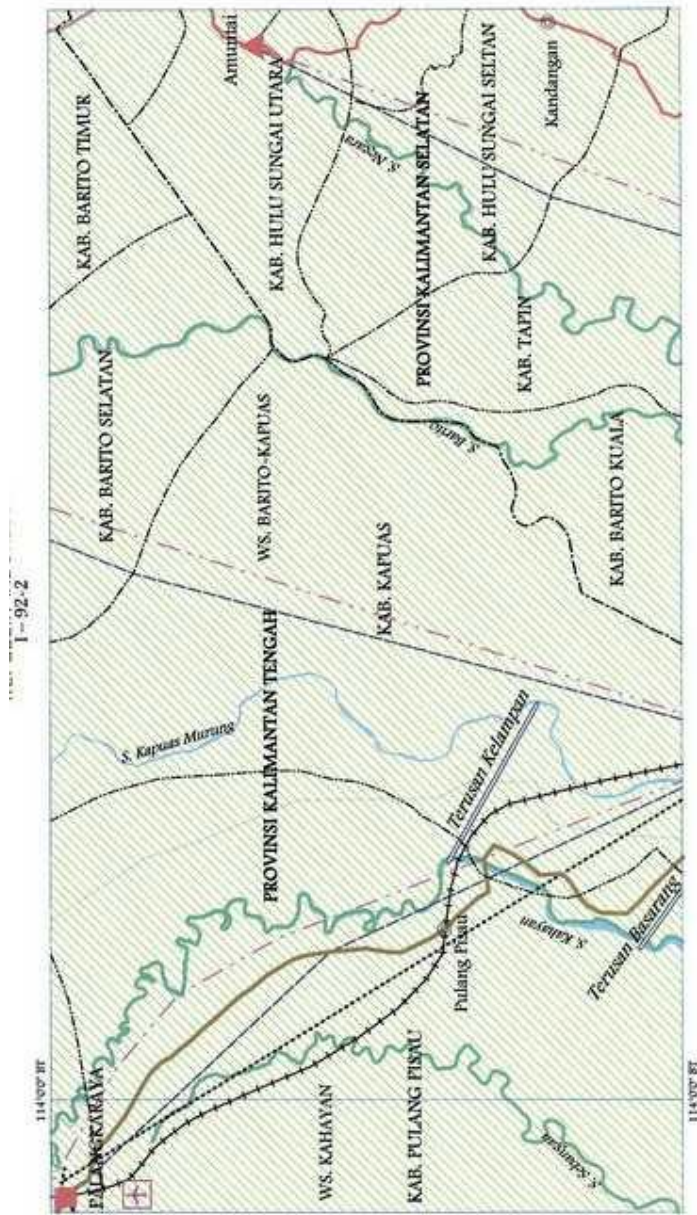


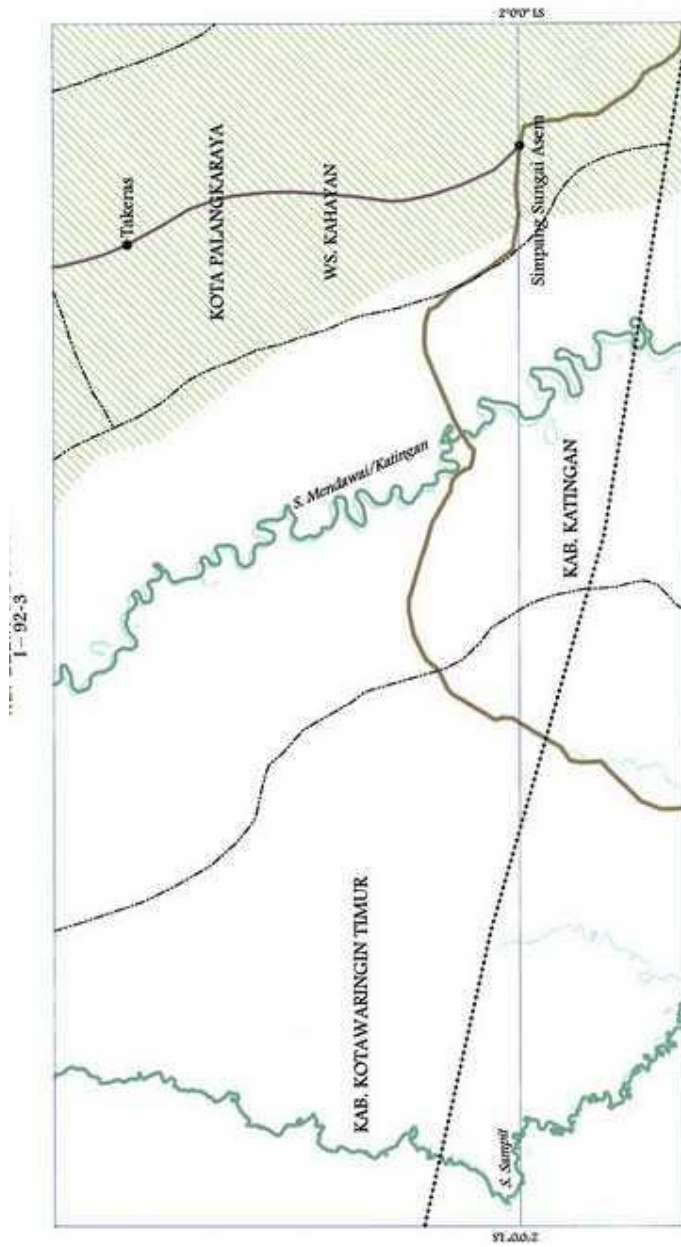


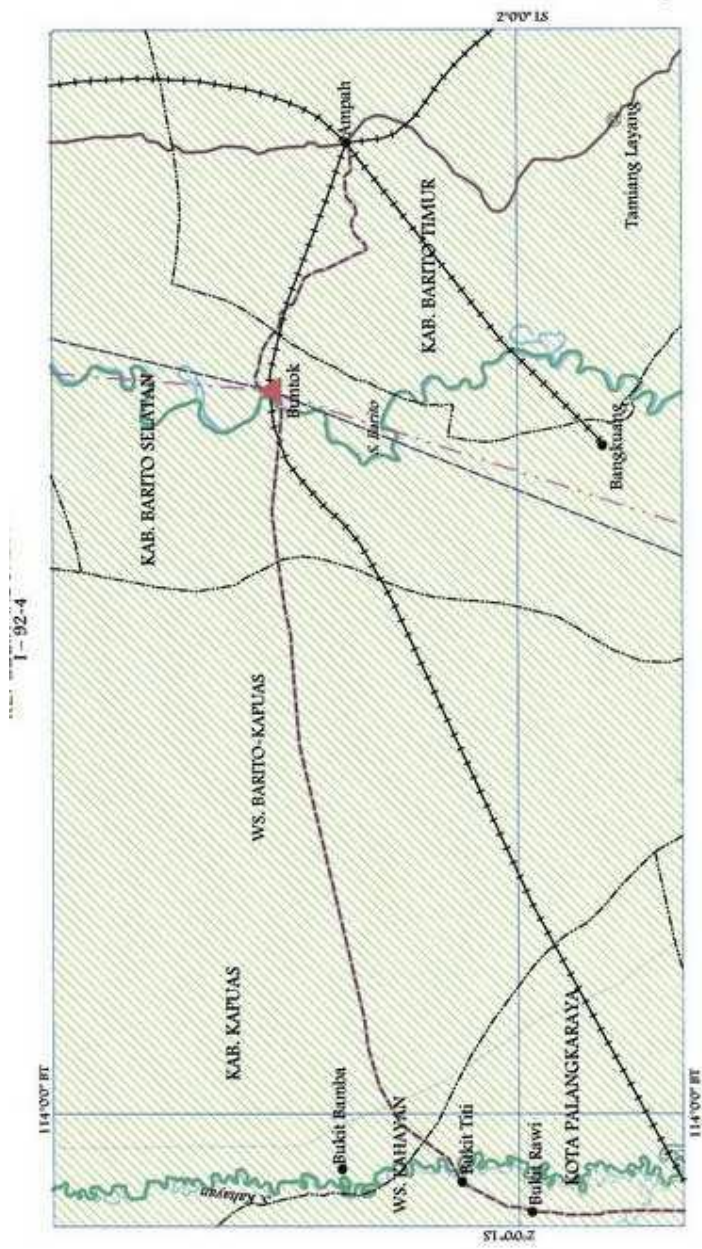


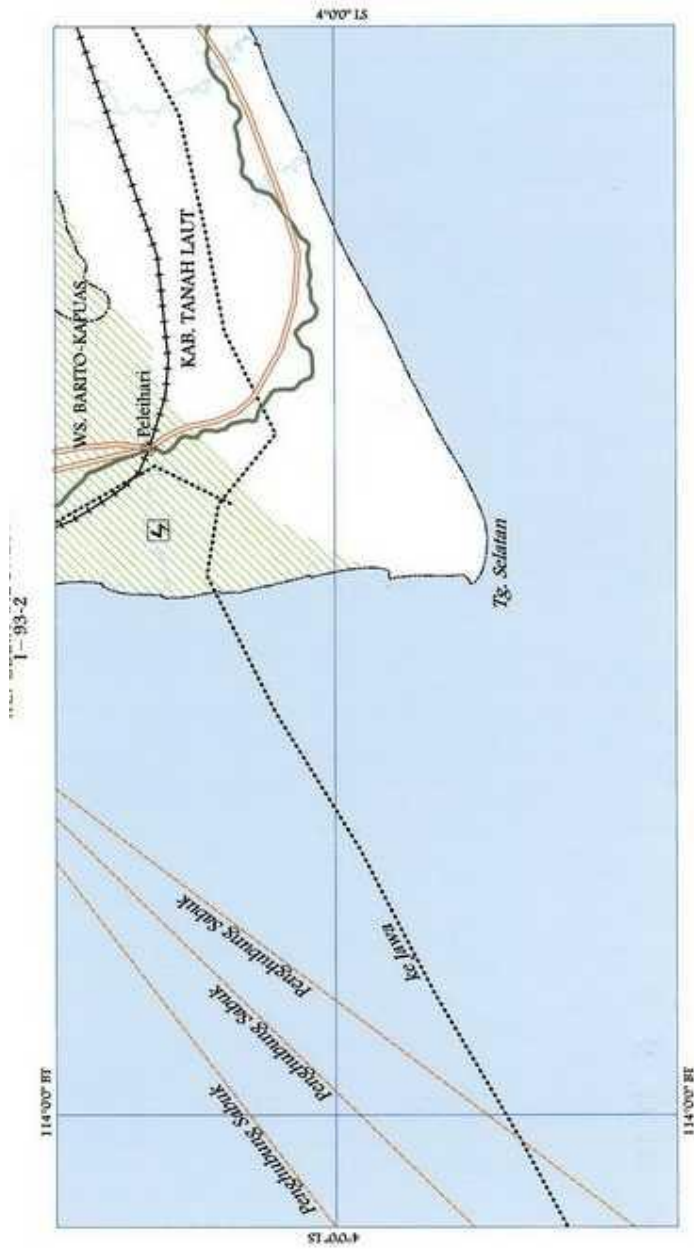


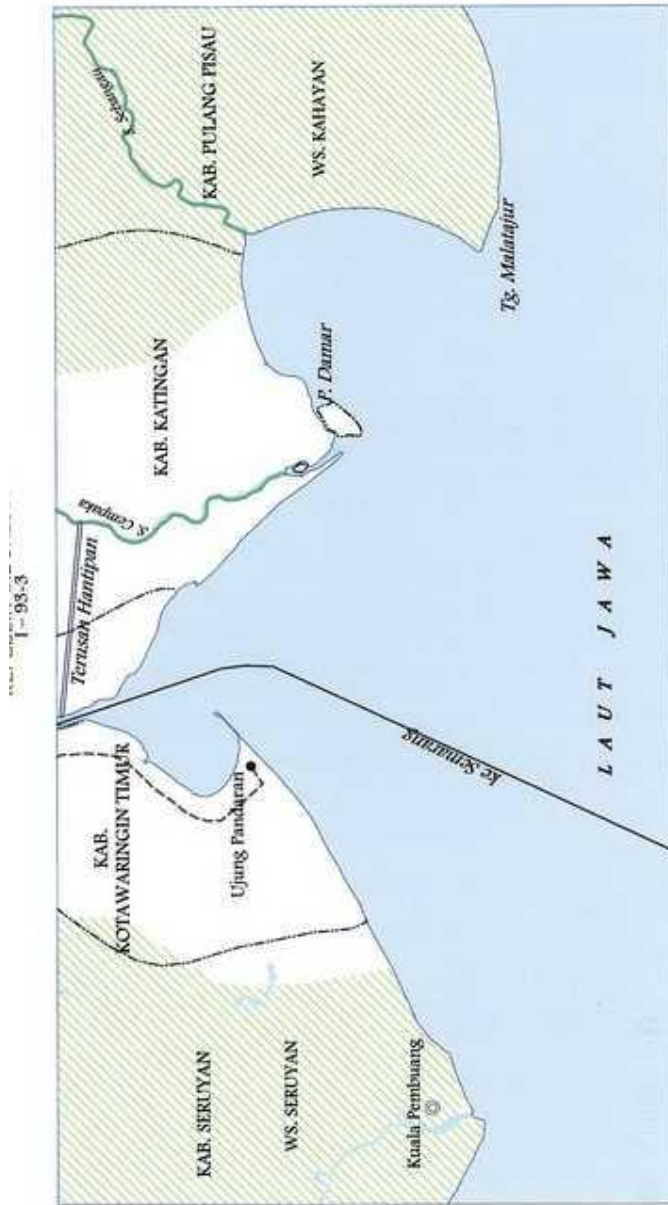


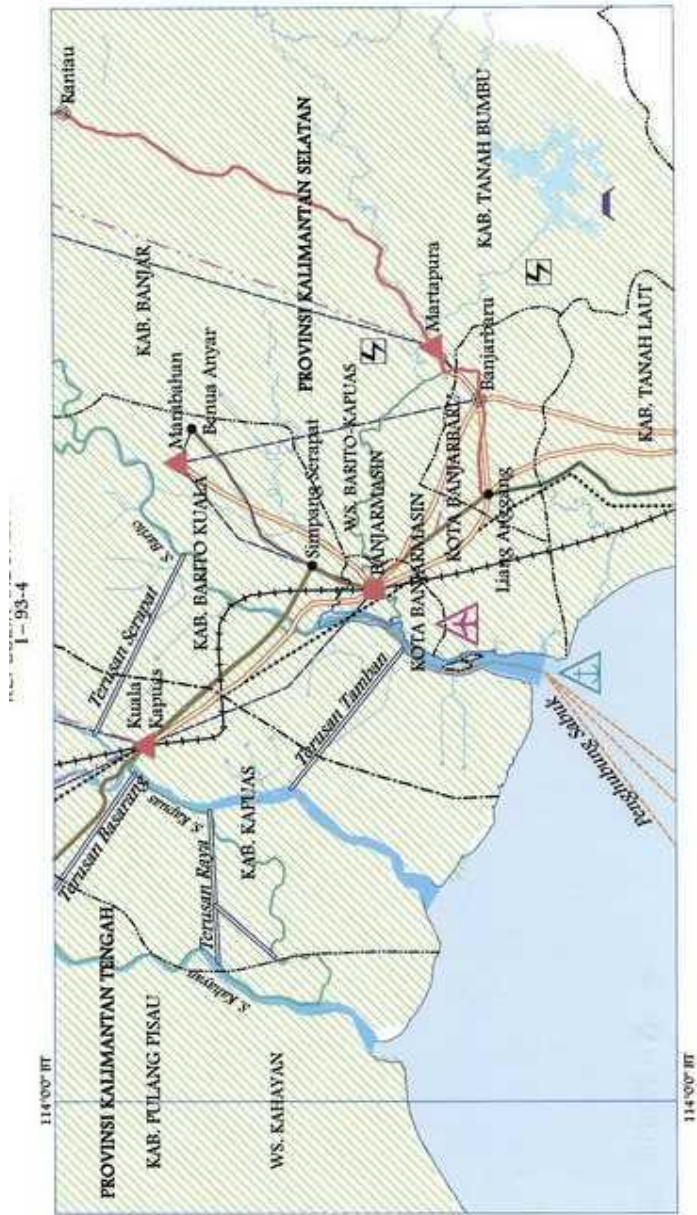


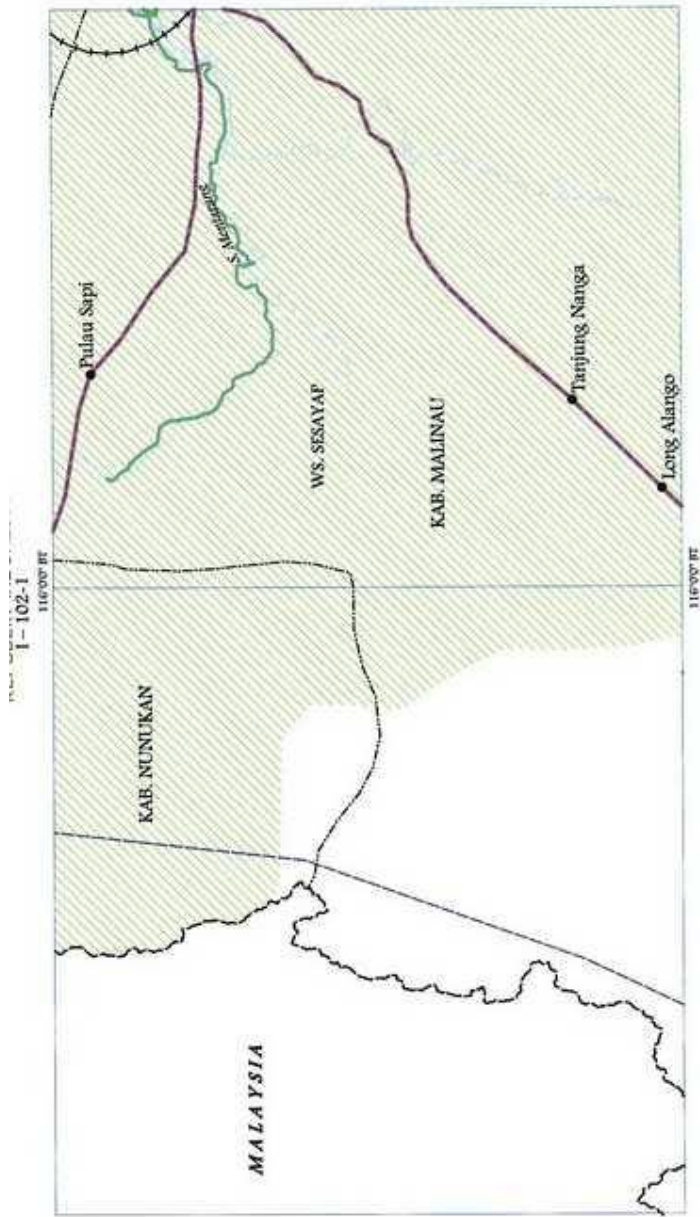


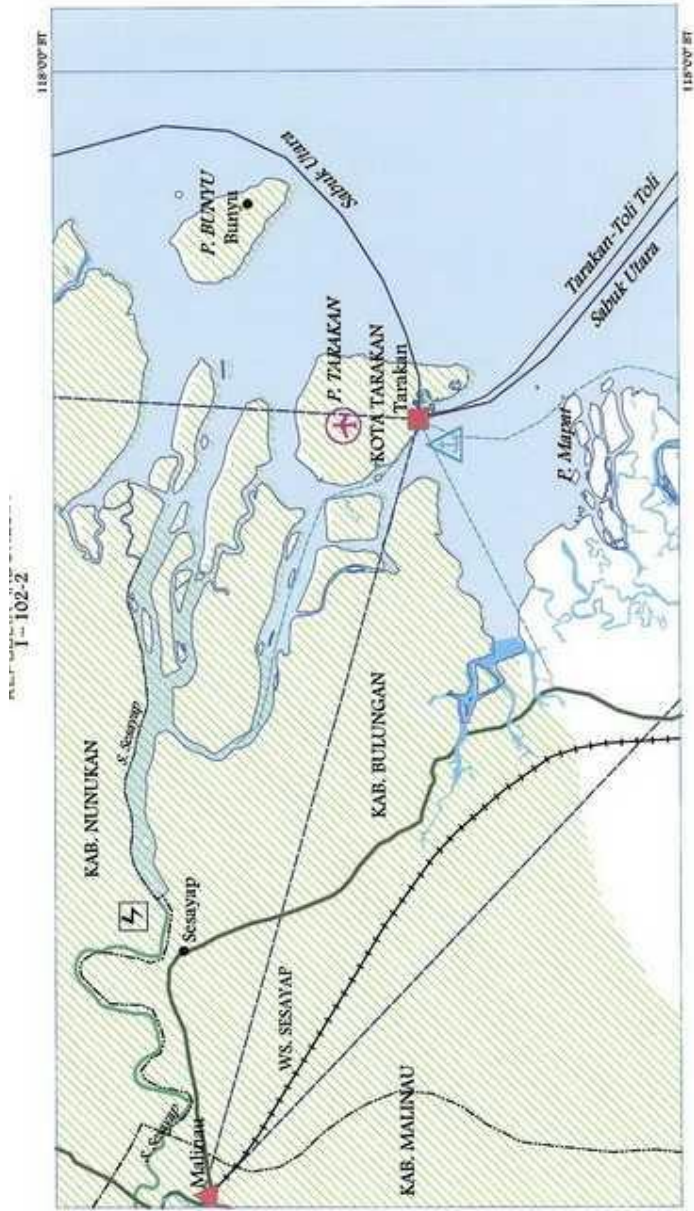


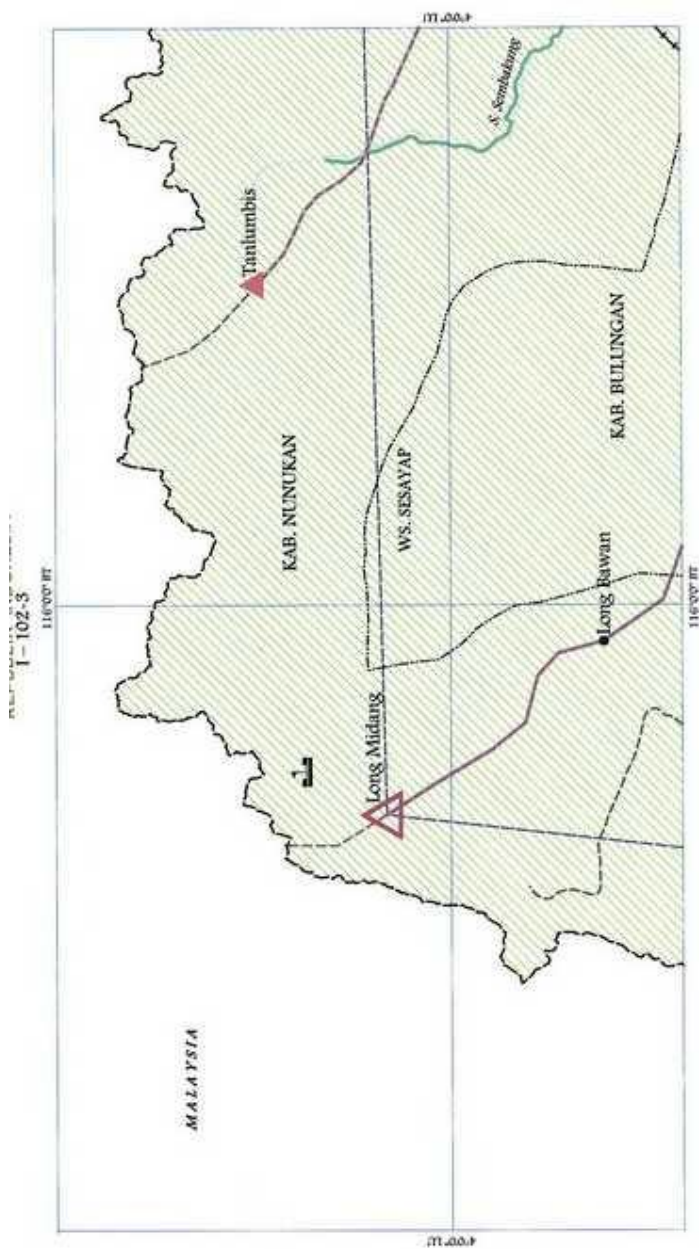


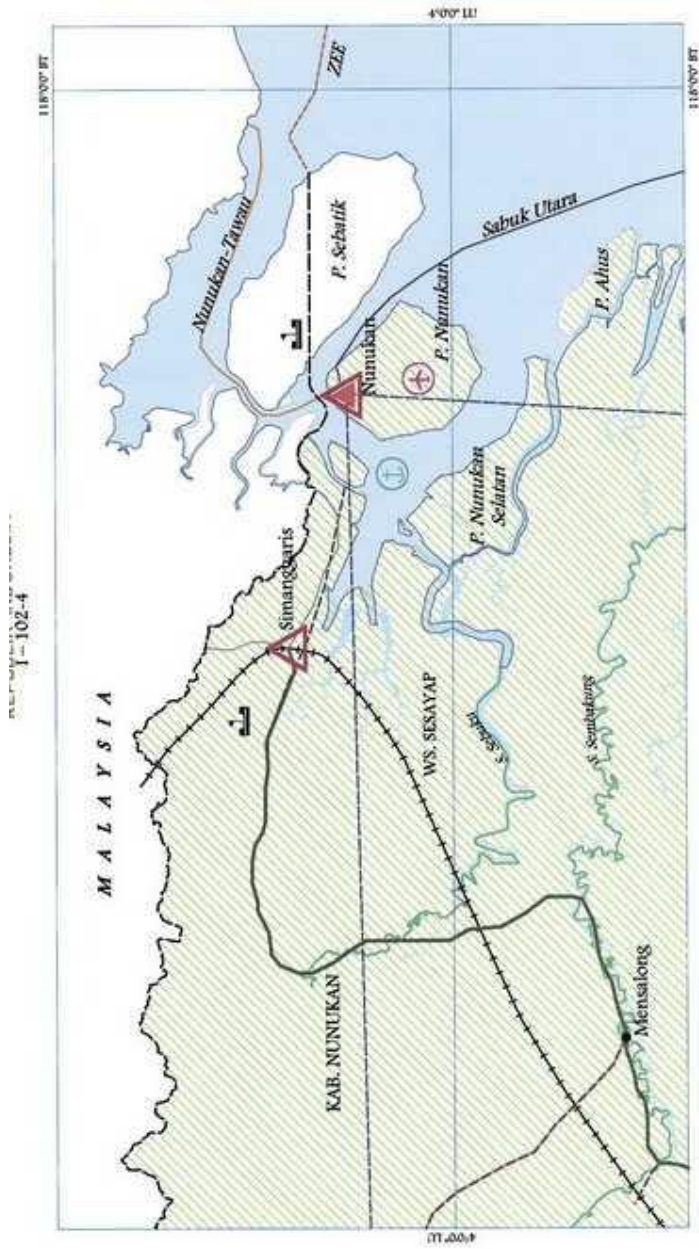


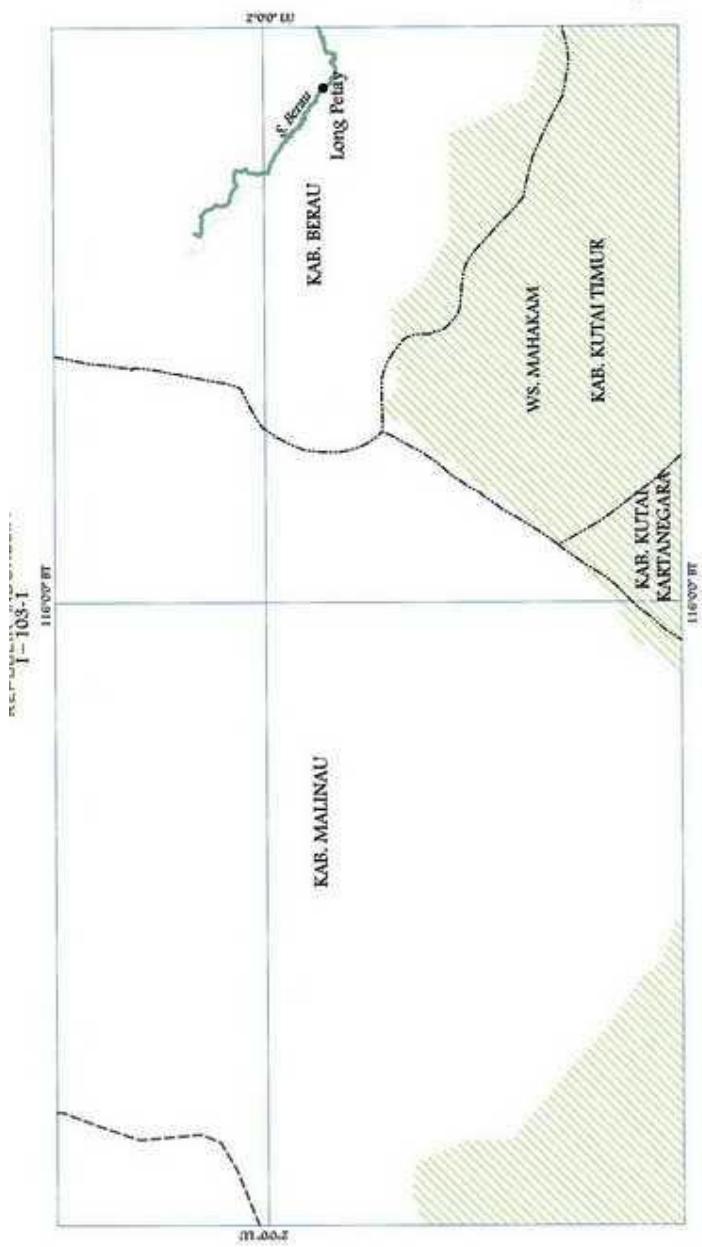


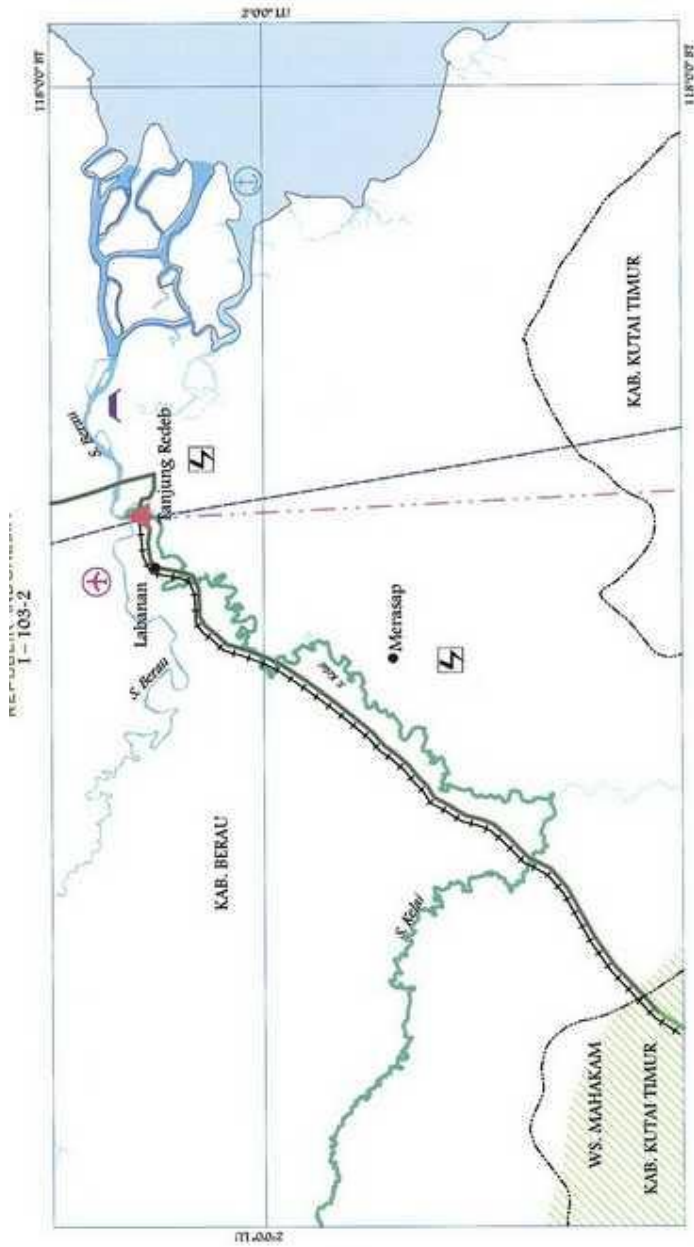


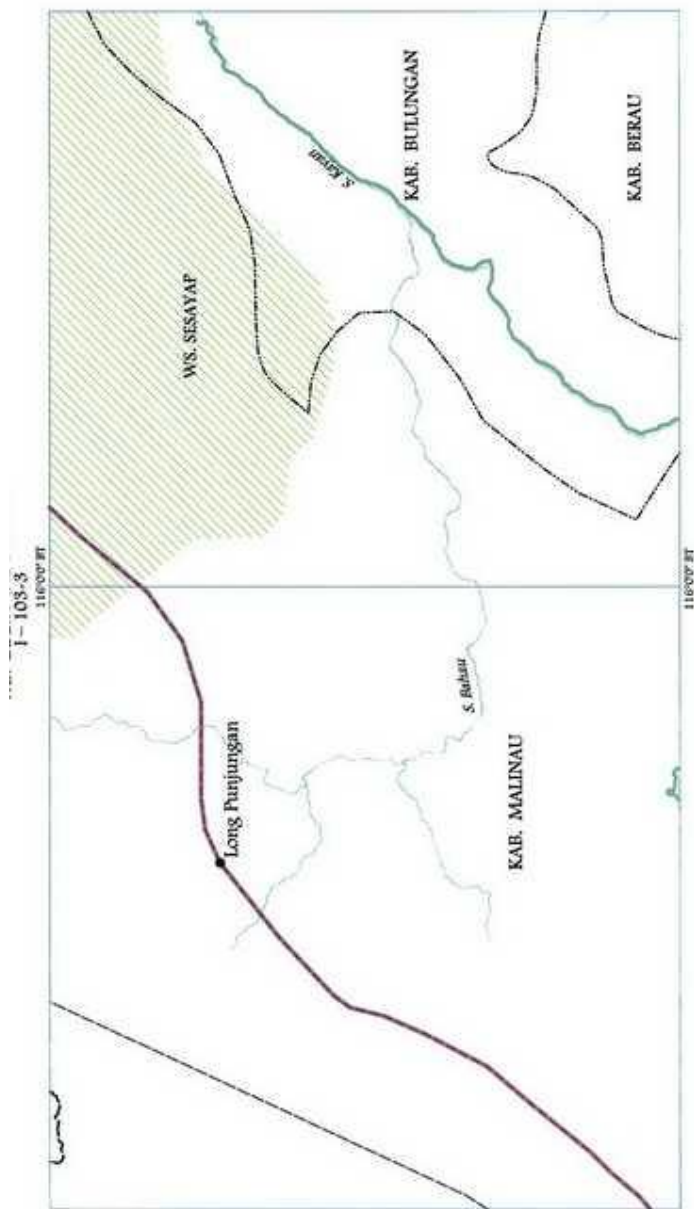


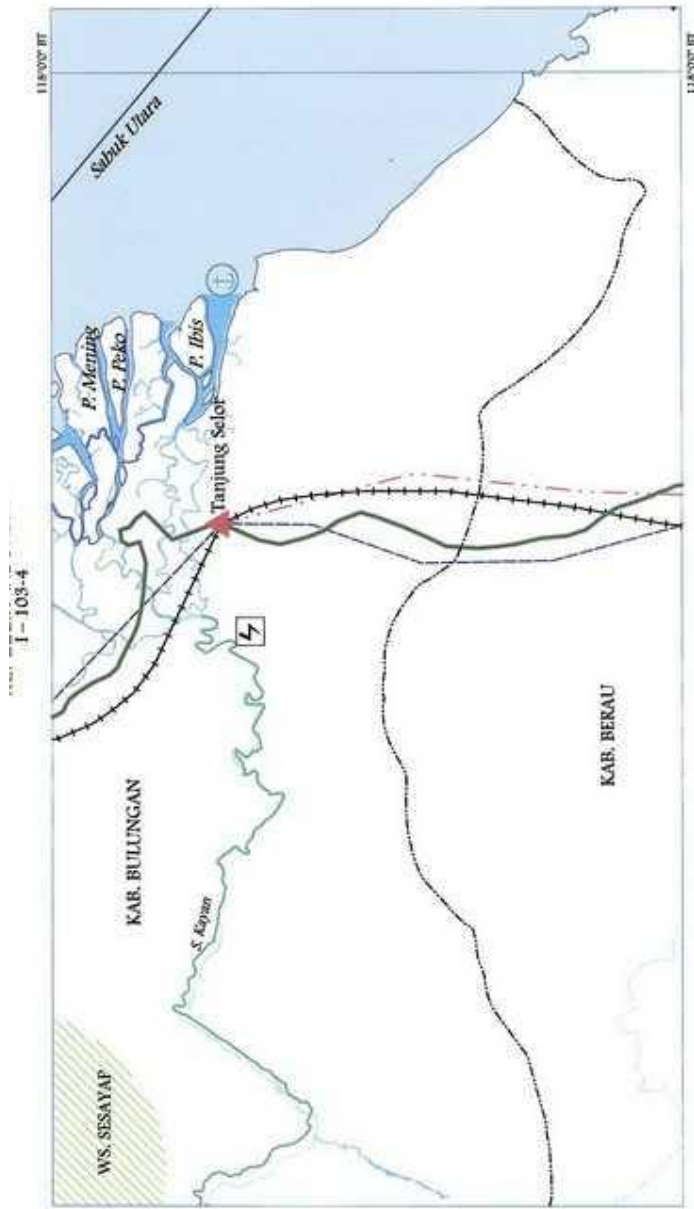


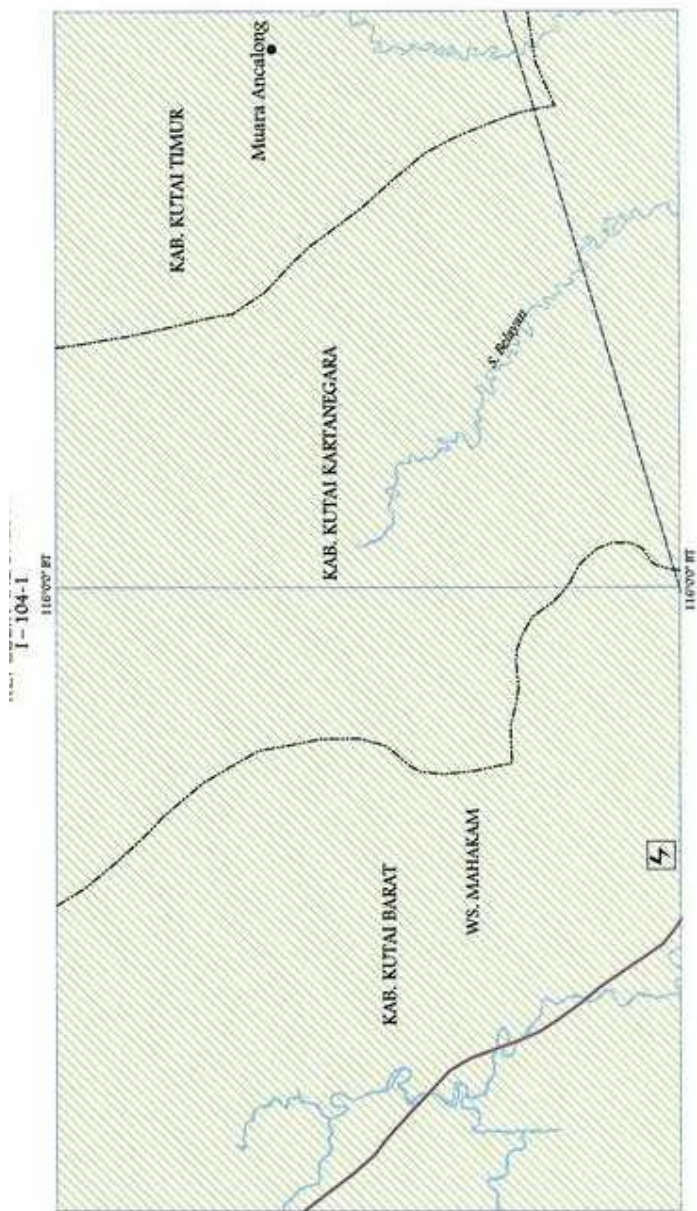


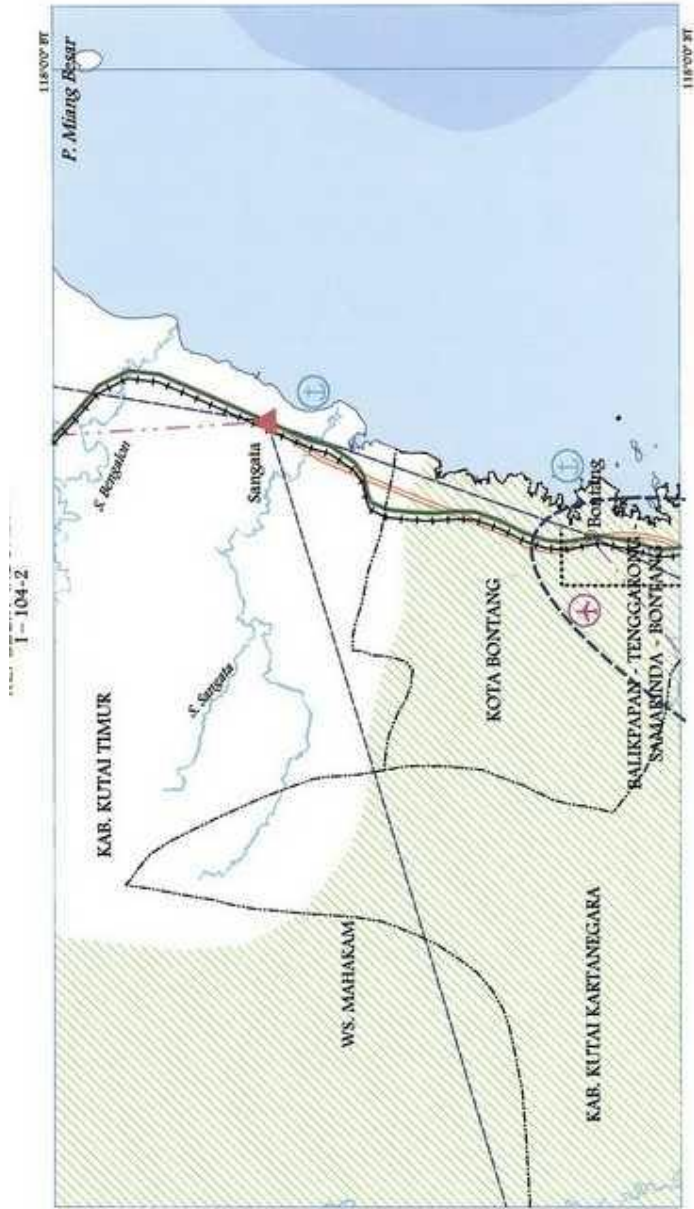


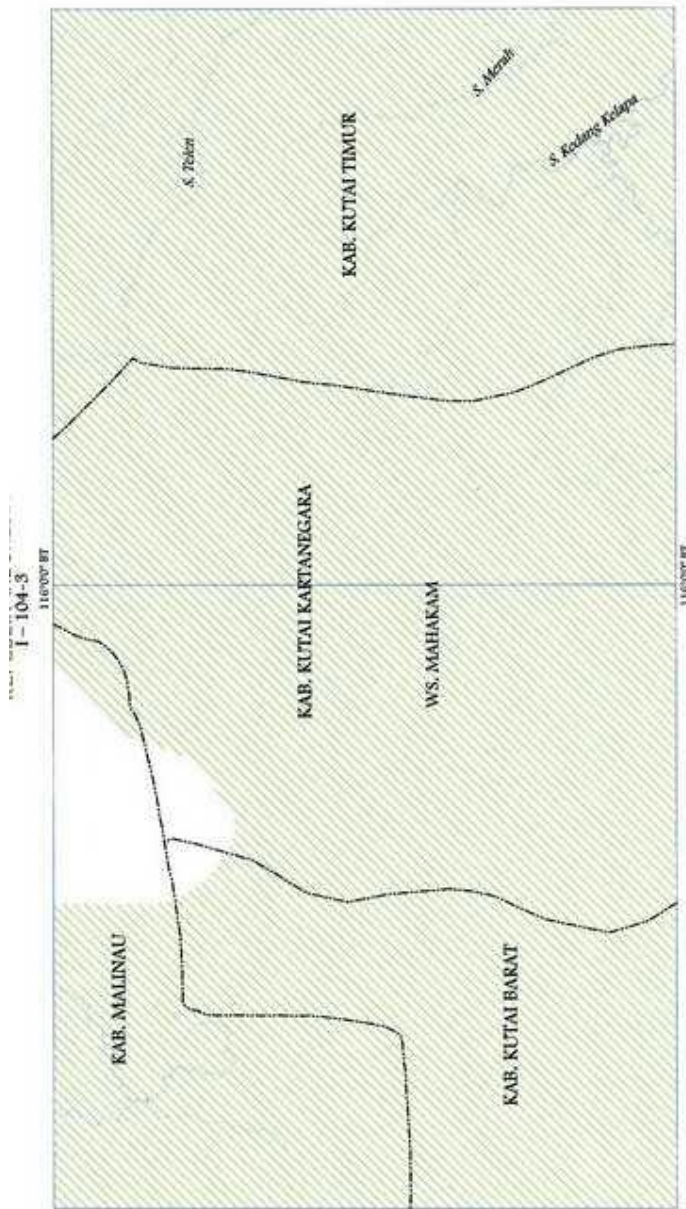


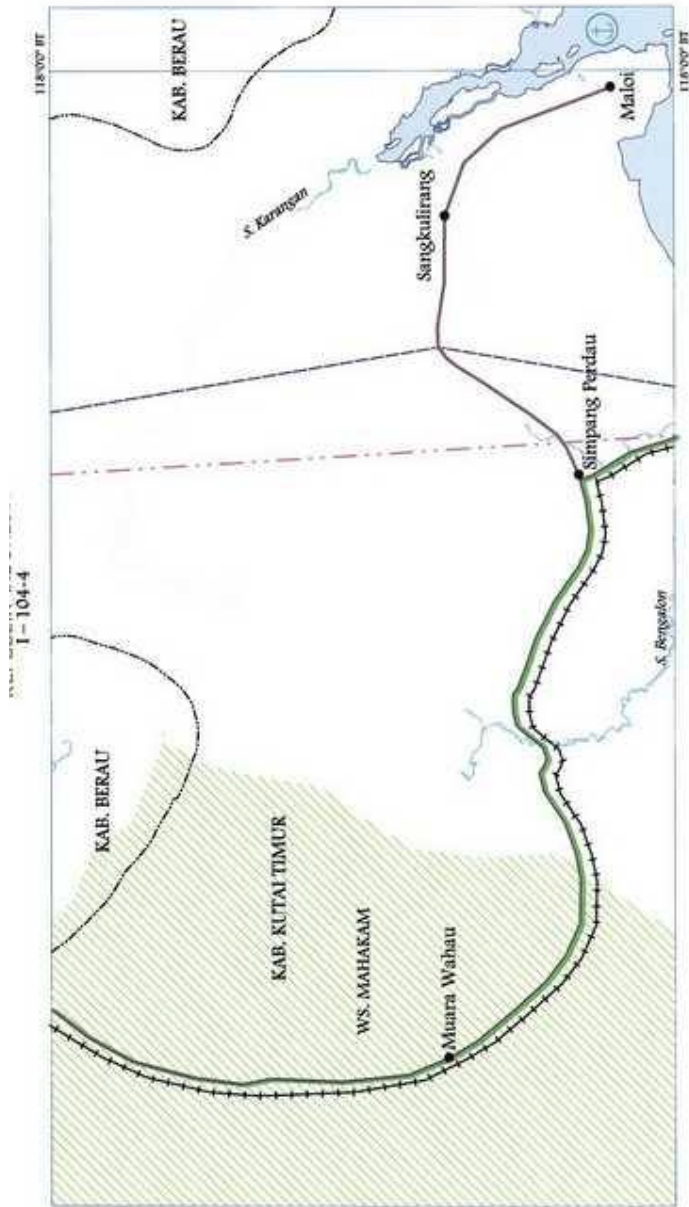


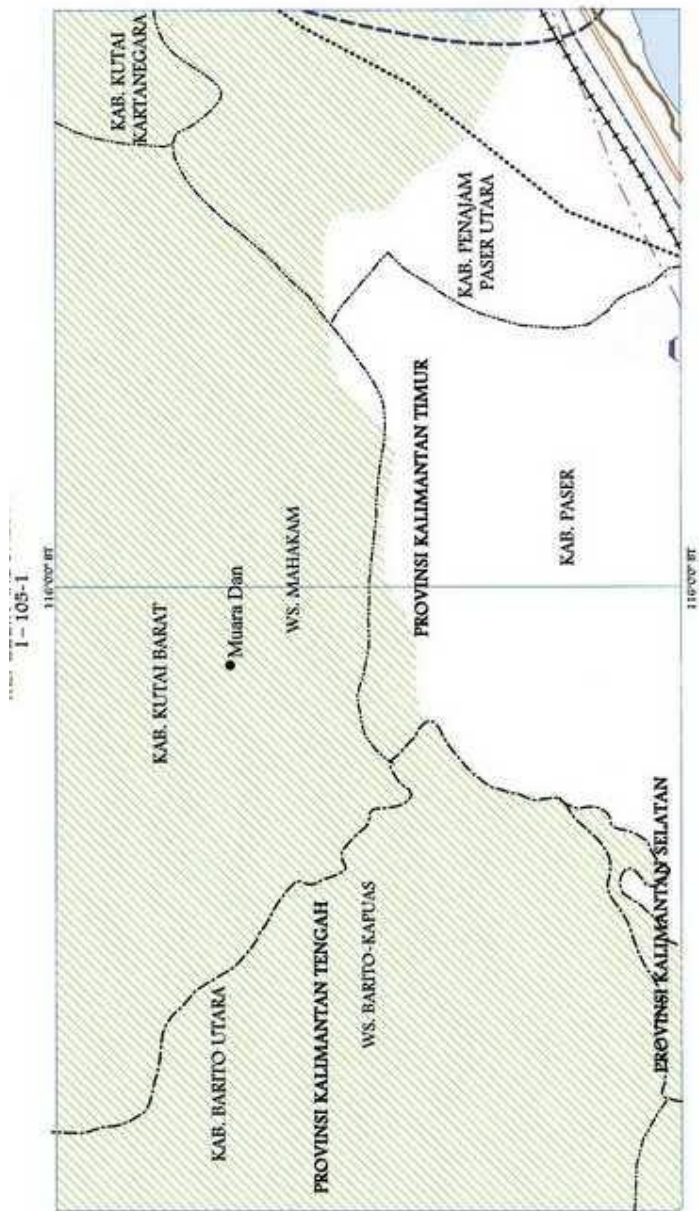




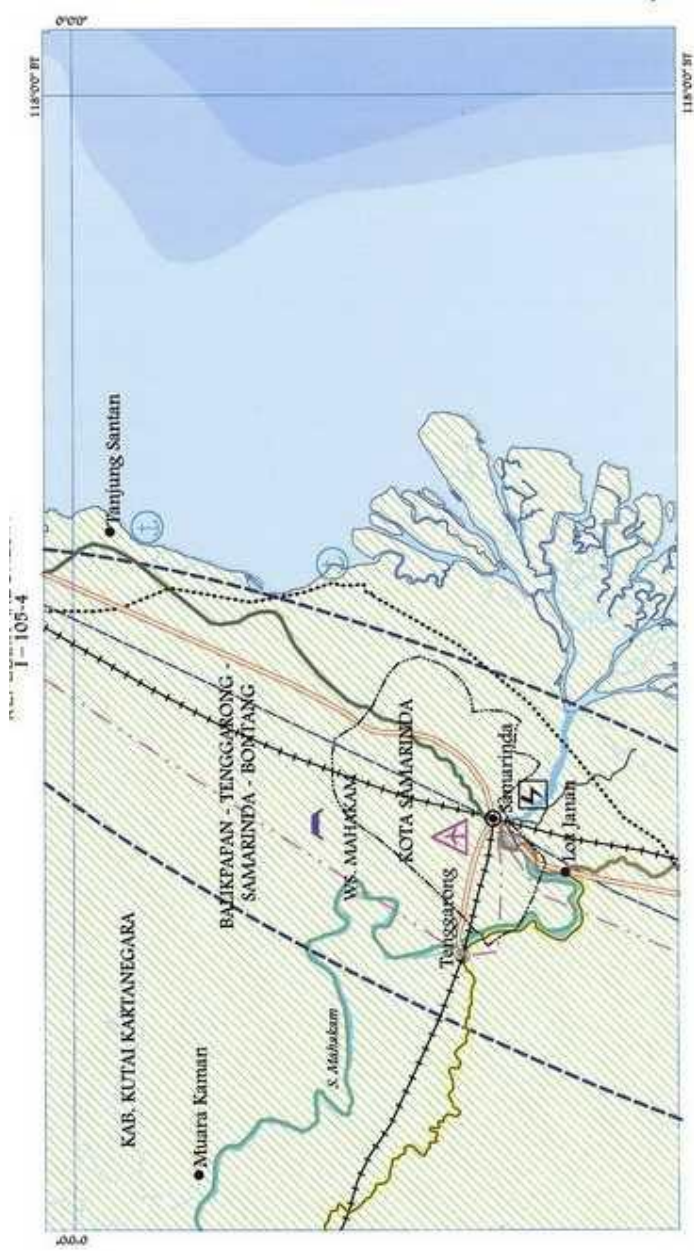


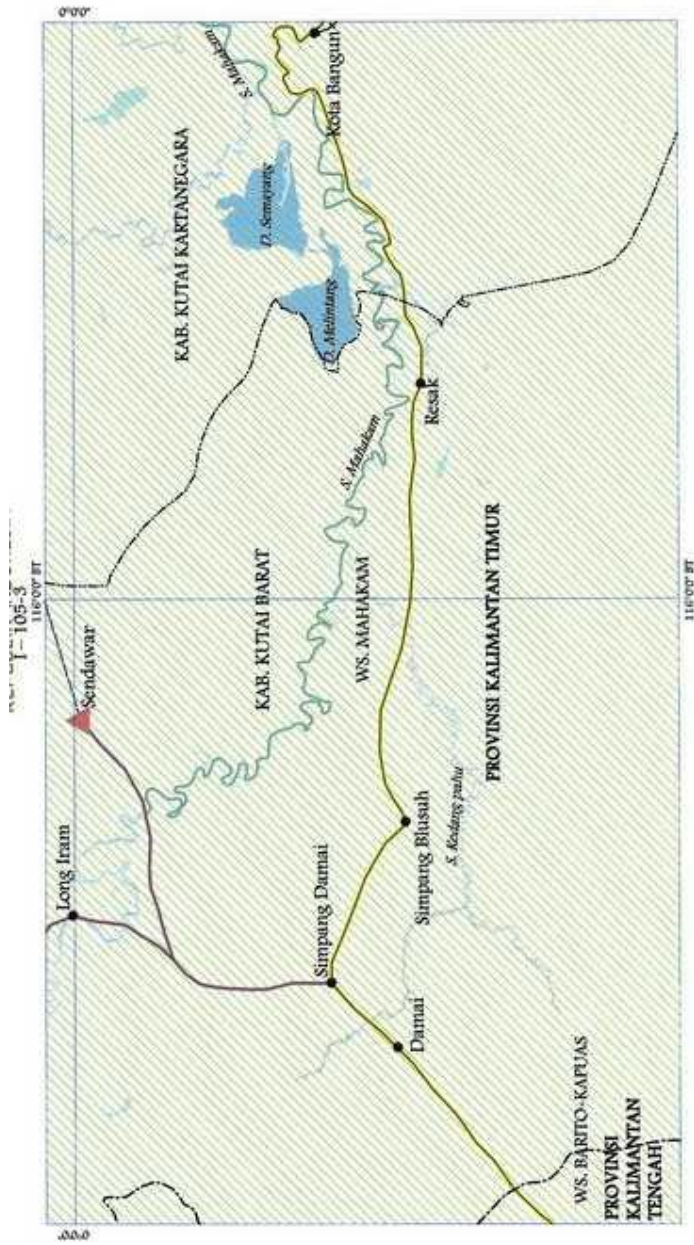


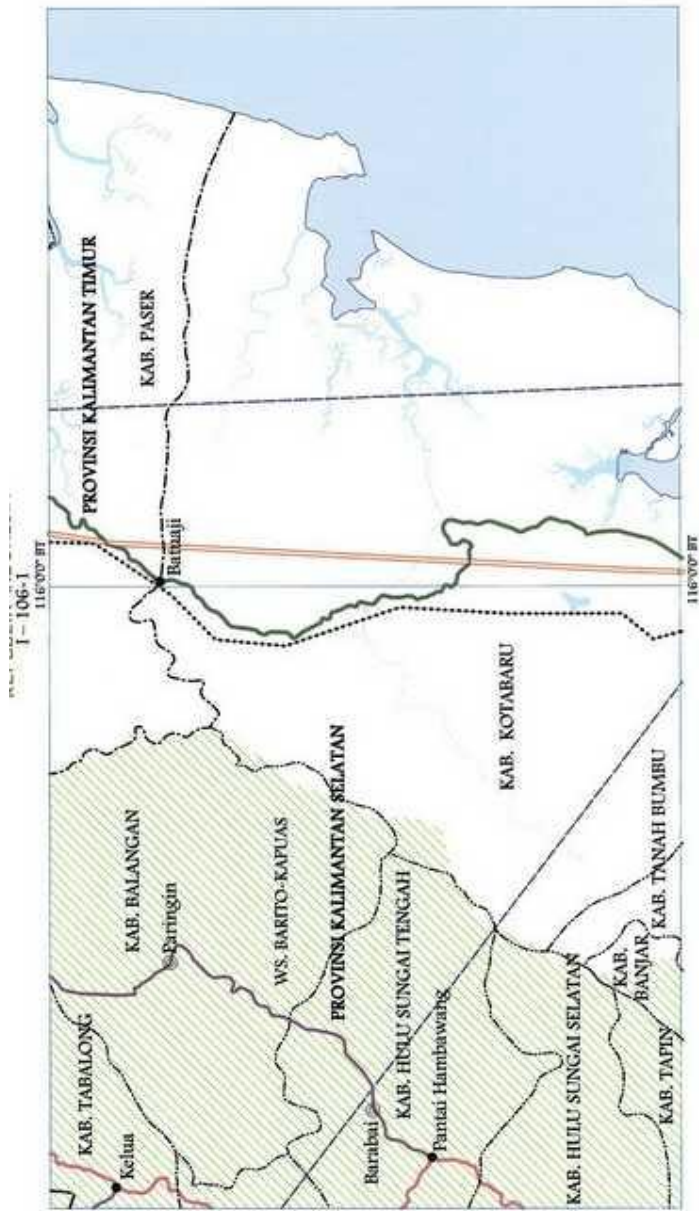


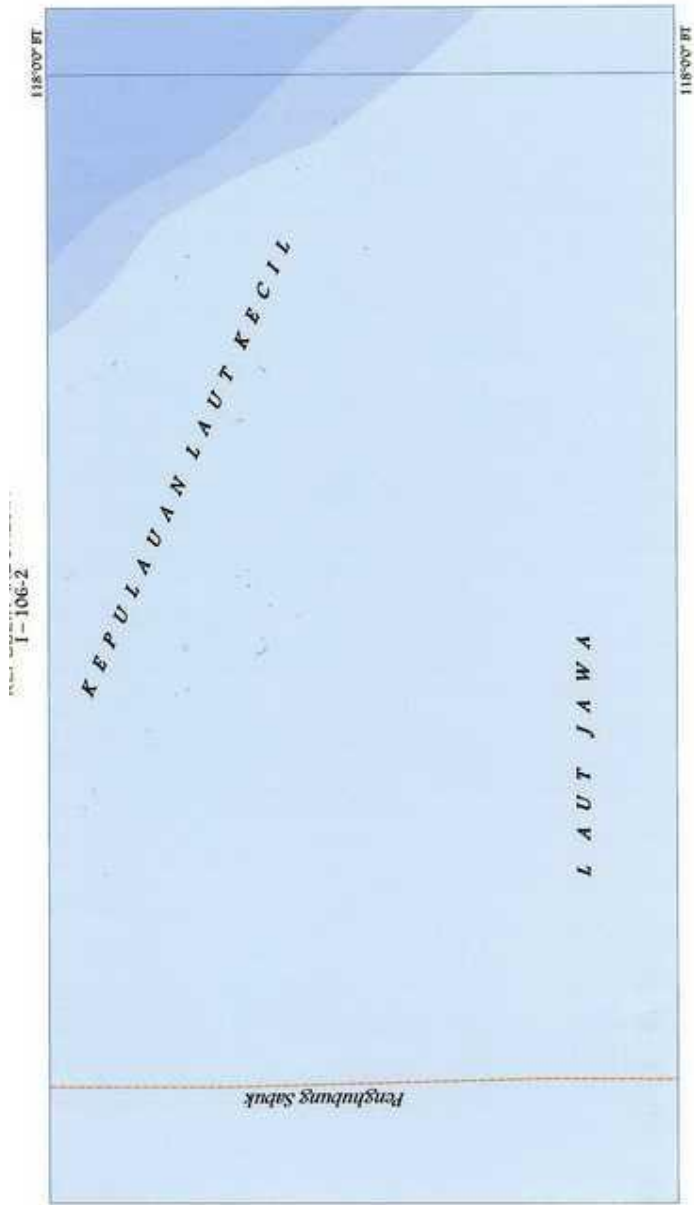


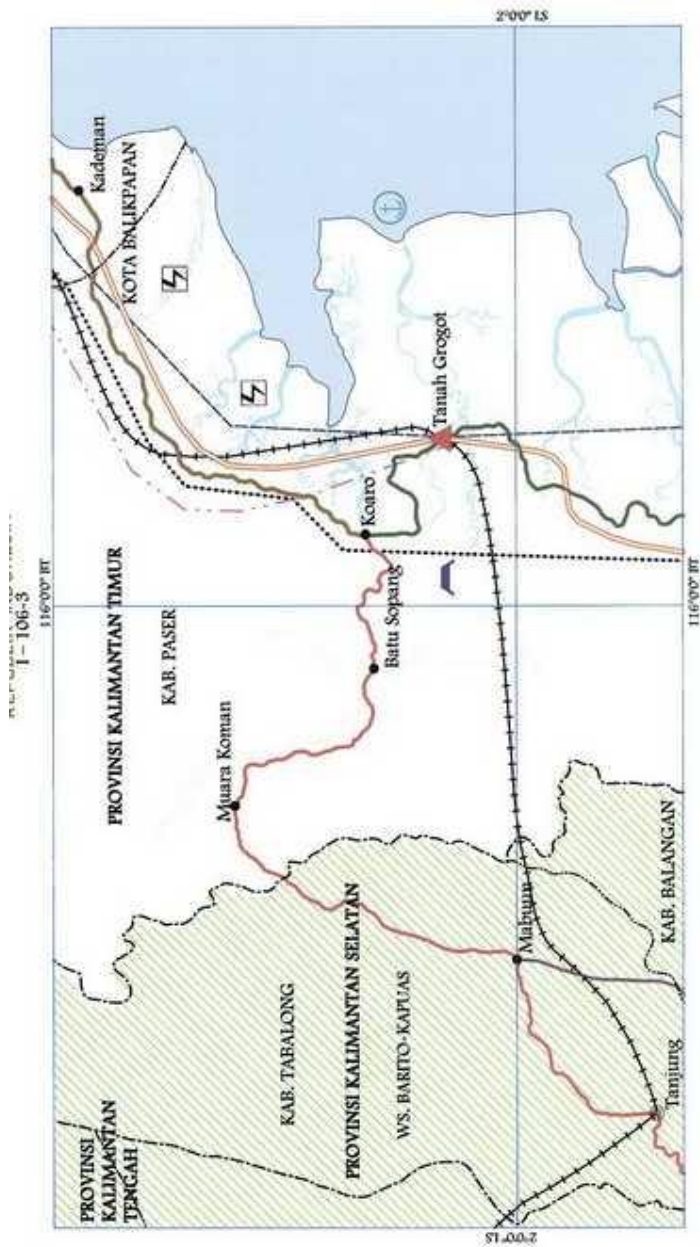




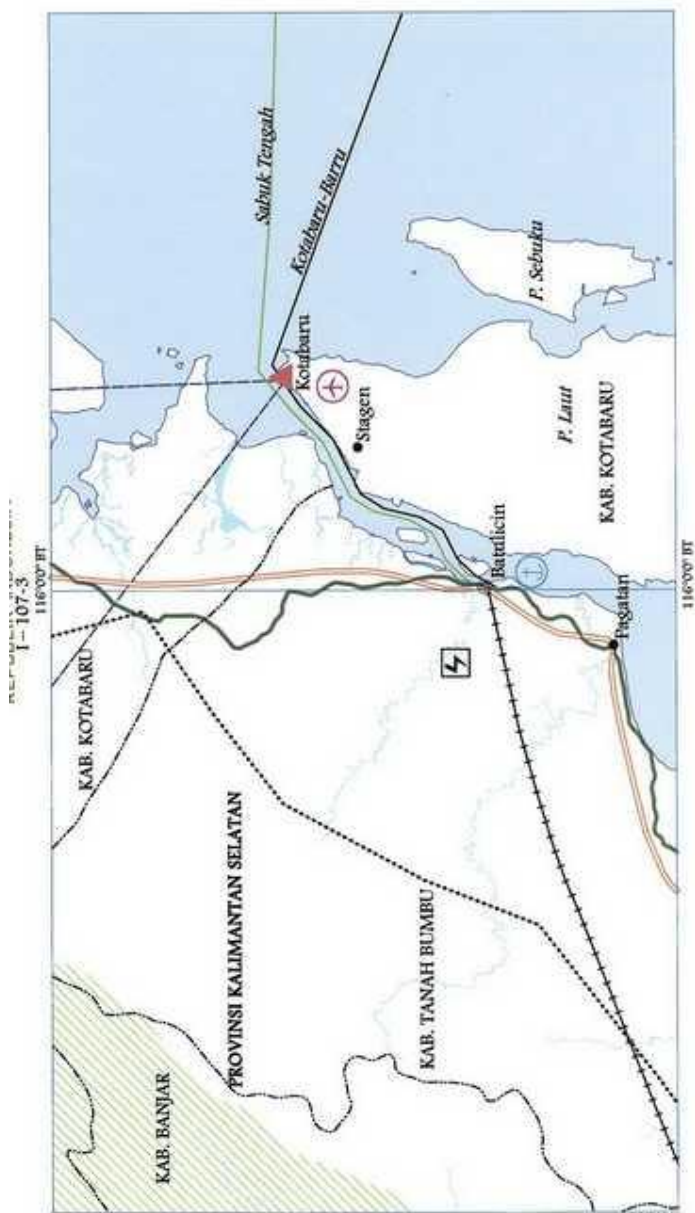


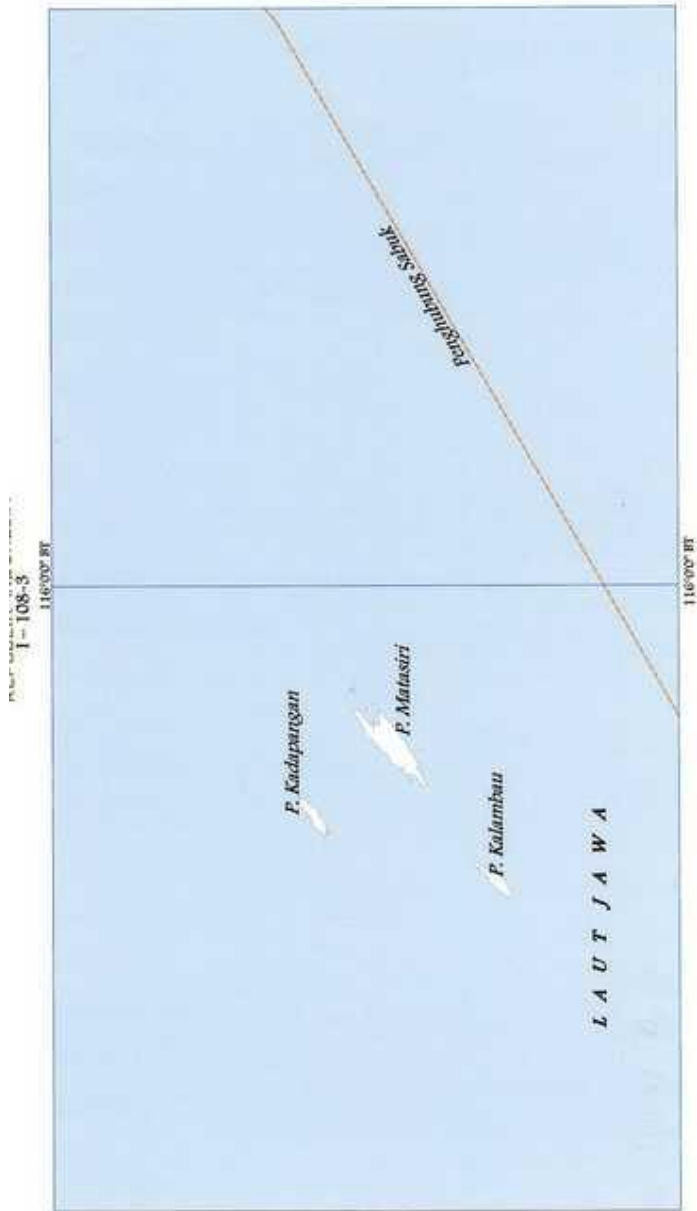


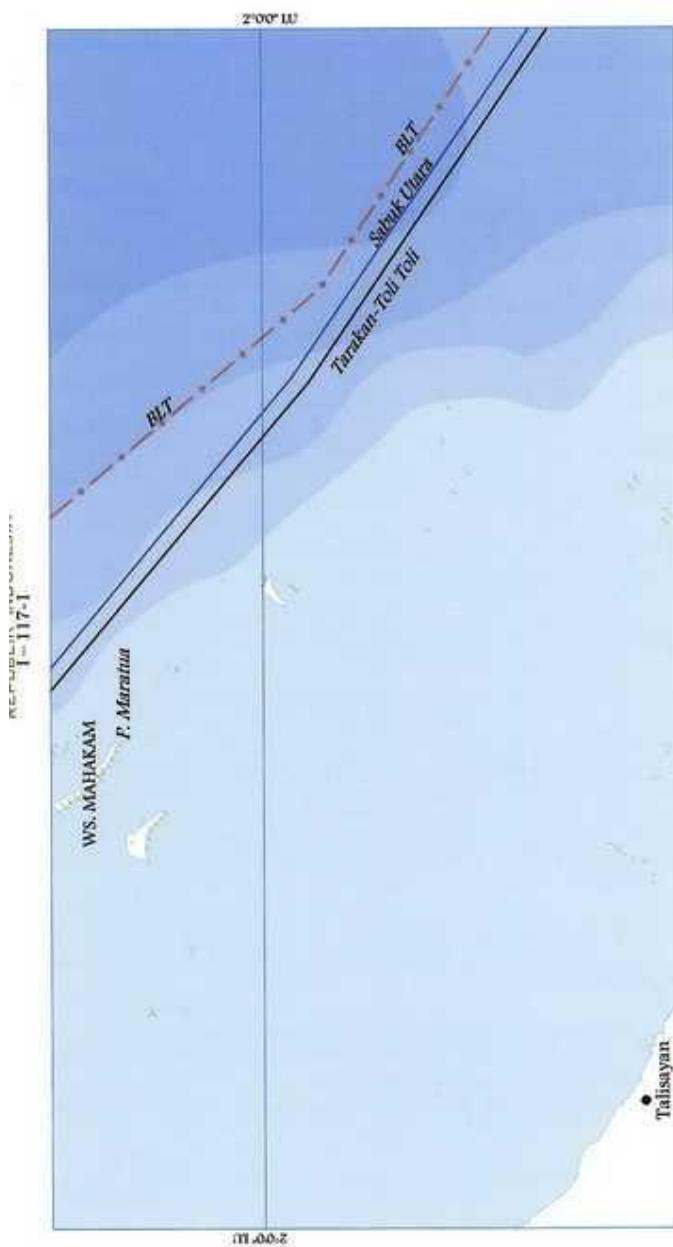


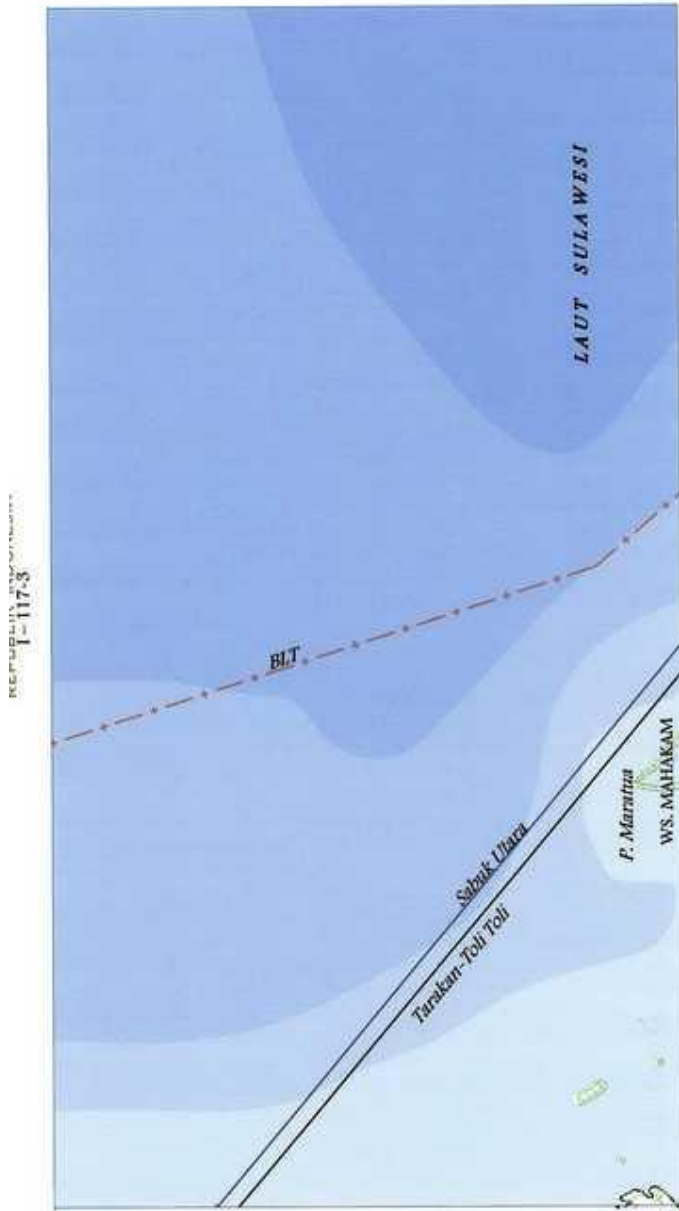


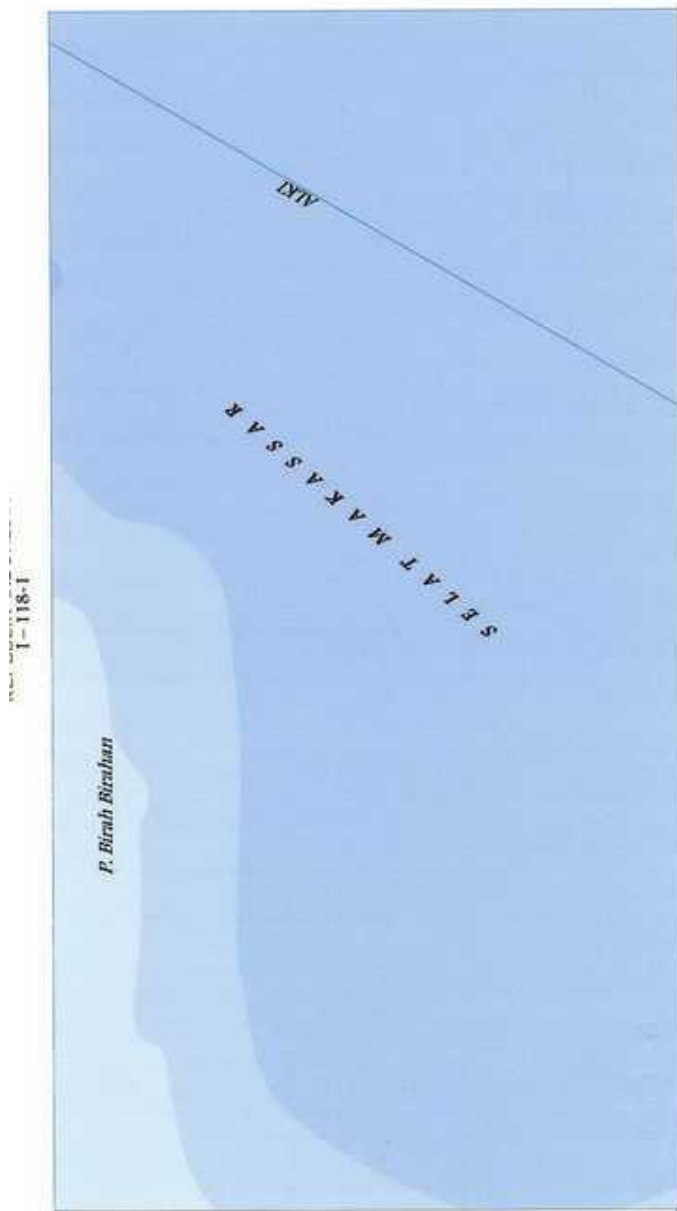












F-118-3





PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL

**PETA RENCANA POLA RUANG
PULAU KALIMANTAN**

SUMBER PETA :

1. Peta Rupabumi Indonesia, skala 1 : 250.000, BAKOSURTANAL, 2000.
2. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, BAKOSURTANAL, 2009.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, skala 1 : 250.000, Kementerian Kehutanan, 1999/2000, telah diperbaharui berdasarkan SK Pelepasan Parsial dan Hasil Rekomendasi Tim Terpadu tahun 2010.
4. Peta Kawasan Pertanian, skala 1 : 1.000.000, Kementerian Pertanian.
5. Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2008.
6. Peta Batimetri skala 1 : 1.000.000, BAKOSURTANAL, 2004.

RIWAYAT PETA :

1. Kedalaman informasi peta adalah skala 1 : 500.000.
2. Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telahaan mikro.
3. Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional.
4. Hasil kajian Tim Teknis Rencana Tata Ruang Pulau dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

RENCANA POLA RUANG PULAU KALIMANTAN

KETTERANGAN GAMBAR

Skala 1 : 500.000

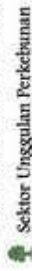


KAWASAN ANDALAN DARAT

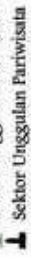
- 1 Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya
- 2 Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya
- 3 Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya
- 4 Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya
- 5 Kawasan Andalan Sanggau
- 6 Kawasan Andalan Sampit-Pangkalian Bun
- 7 Kawasan Andalan Buntok
- 8 Kawasan Andalan Muarataweh
- 9 Kawasan Andalan Kuala Kapuas
- 10 Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya
- 11 Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya
- 12 Kawasan Andalan Batulicin
- 13 Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya
- 14 Kawasan Andalan Sangkulirang-Sanggata dan Muara Wahau (Sasumawa)
- 15 Kawasan Andalan Tarakan-Tanjung Selas-Nurukan-Pulau Bunyu-Mullinau (Tabaribuma) dan Sekitarnya
- 16 Kawasan Andalan Bontang-Samarinda-Tenggarong-Balikpapan Penajam dan Sekitarnya (Bonsantebajam)

KAWASAN ANDALAN LAUT

- 1 Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya
- 2 Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya
- 3 Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang
- 4 Kawasan Andalan Laut Pulau Laut
- 5 Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya



Sektor Unggulan Perkebunan



Sektor Unggulan Pariwisata

PUSAT PERKOTAAN

- Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan/Kota Lainnya

**RENCANA POLA RUANG PULAU KALIMANTAN
KETERANGAN GAMBAR**



LEGENDA :

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Landas Kontinen kesepakatan, telah diratifikasi
- Batas Landas Kontinen (BLK)
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)
- Batas Laut Territorial (BLT)
- Batas Laut Territorial, perlu kesepakatan
- Jaringan Jalan
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

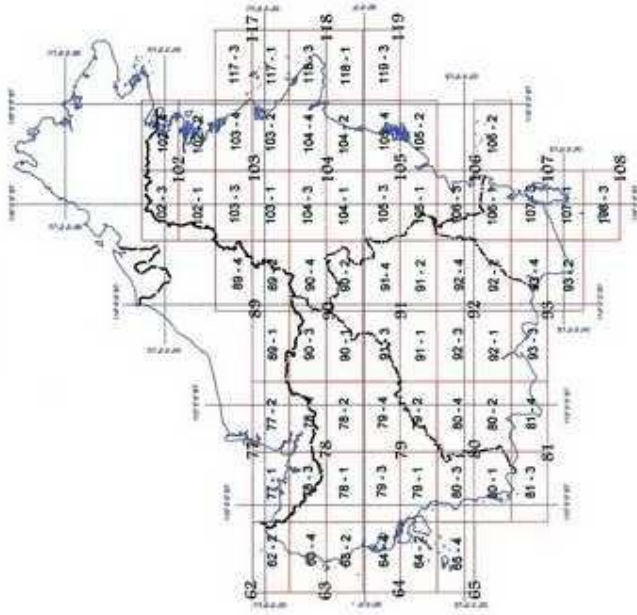
KAWASAN BUDI DAYA

- Kawasan Peruntukan Kehutanan
- Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral dan/atau Batubara, Masih dimungkinkan kawasan Peruntukan Lainnya dalam Rencana Tata Ruang yang Lebih Detail
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Minyak dan/atau Gas Bumi, Masih dimungkinkan Kawasan Peruntukan Lainnya dalam Rencana Tata Ruang yang Lebih Detail
- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Budi Daya Lainnya

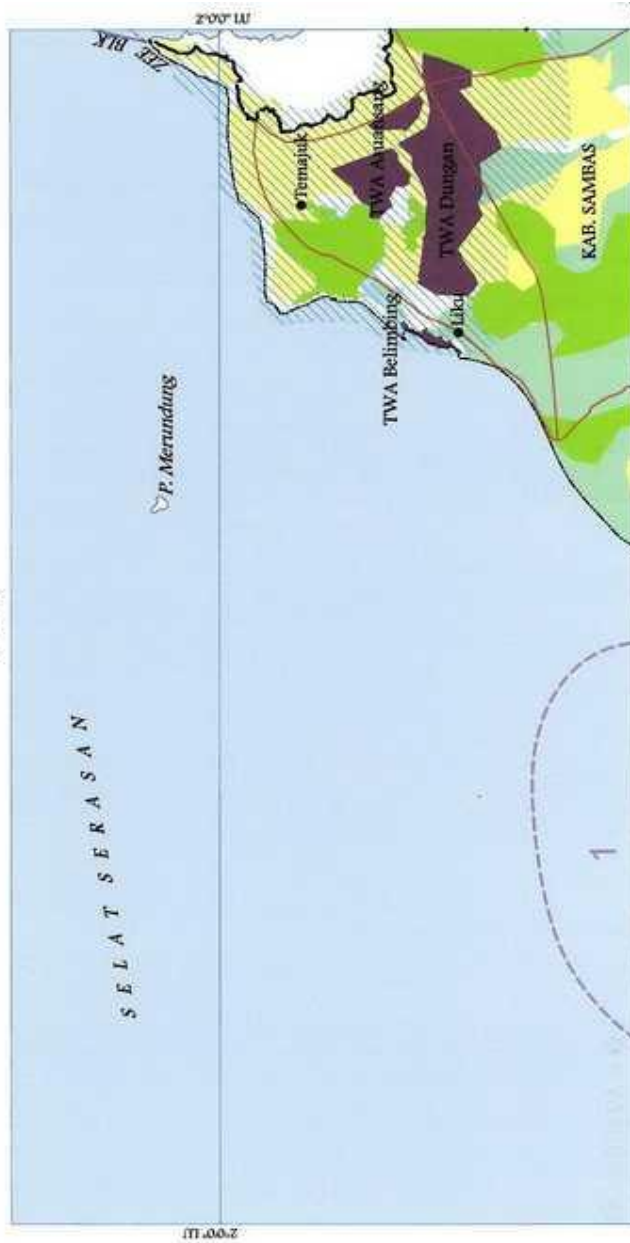
KAWASAN LINDUNG

- Kawasan Hutan Lindung
- Suaka Margasatwa
- Cagar Alam
- Taman Nasional
- Taman Wisata Alam
- Taman Hutan Raya
- Taman Buru
- Taman Nasional Laut
- Taman Wisata Alam Laut

INDEKS PETA

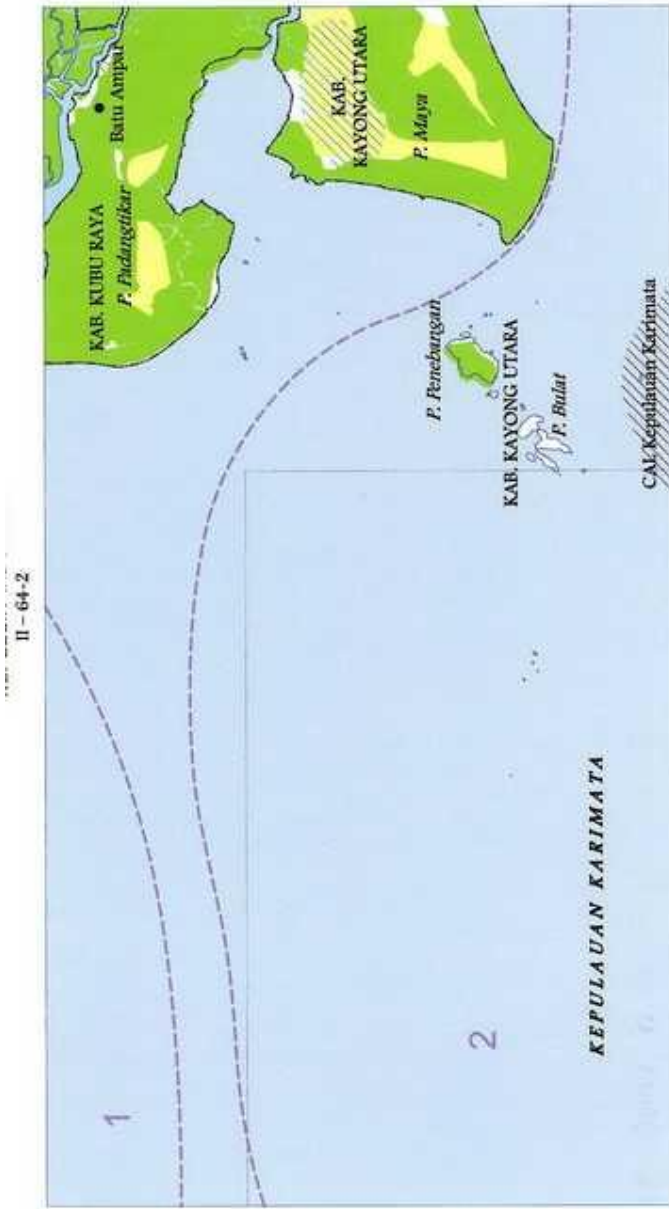


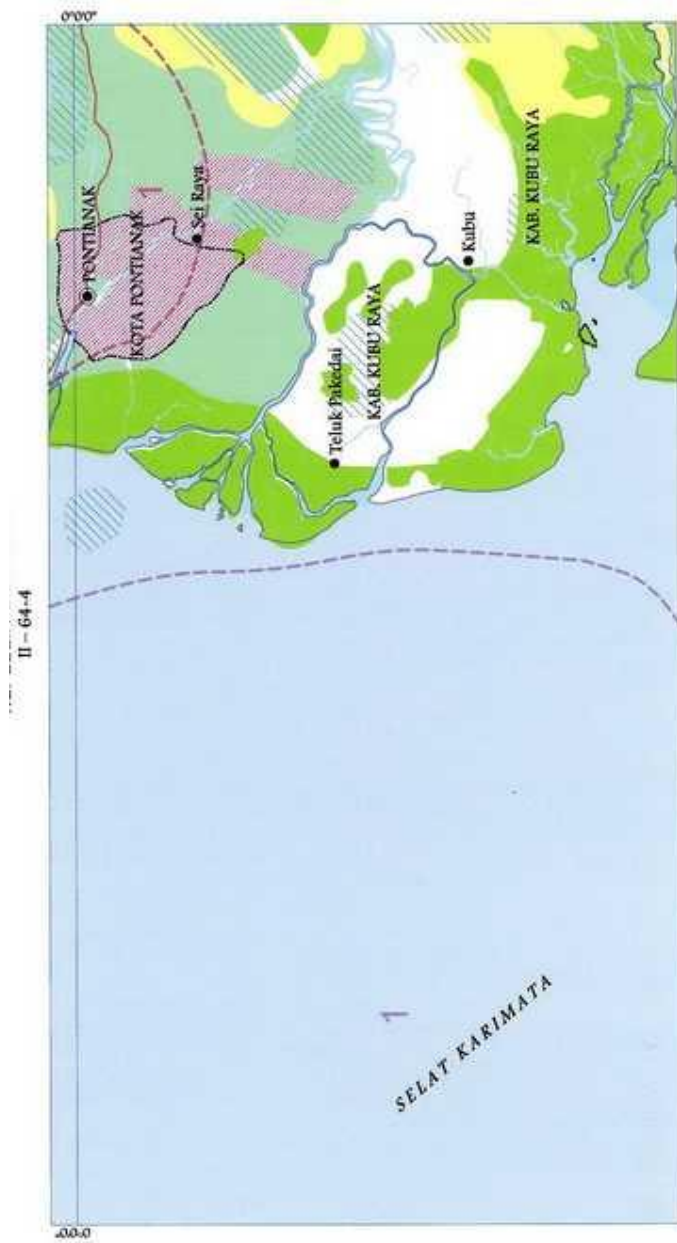
II-62-2

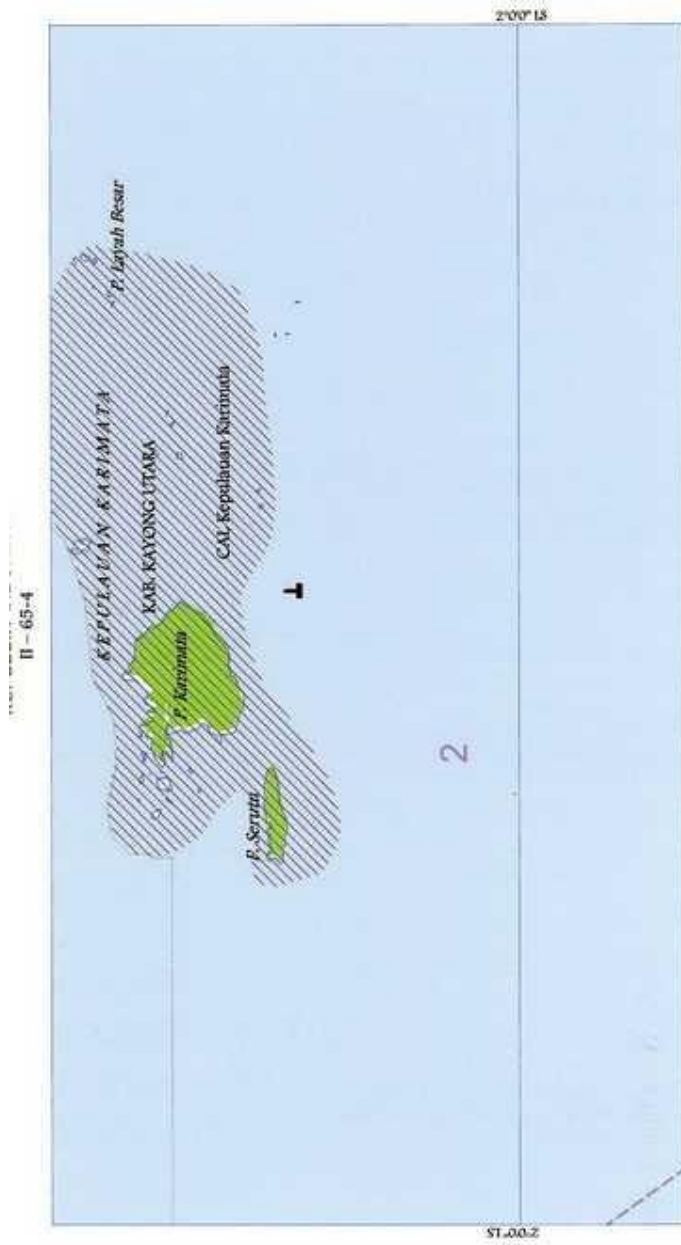


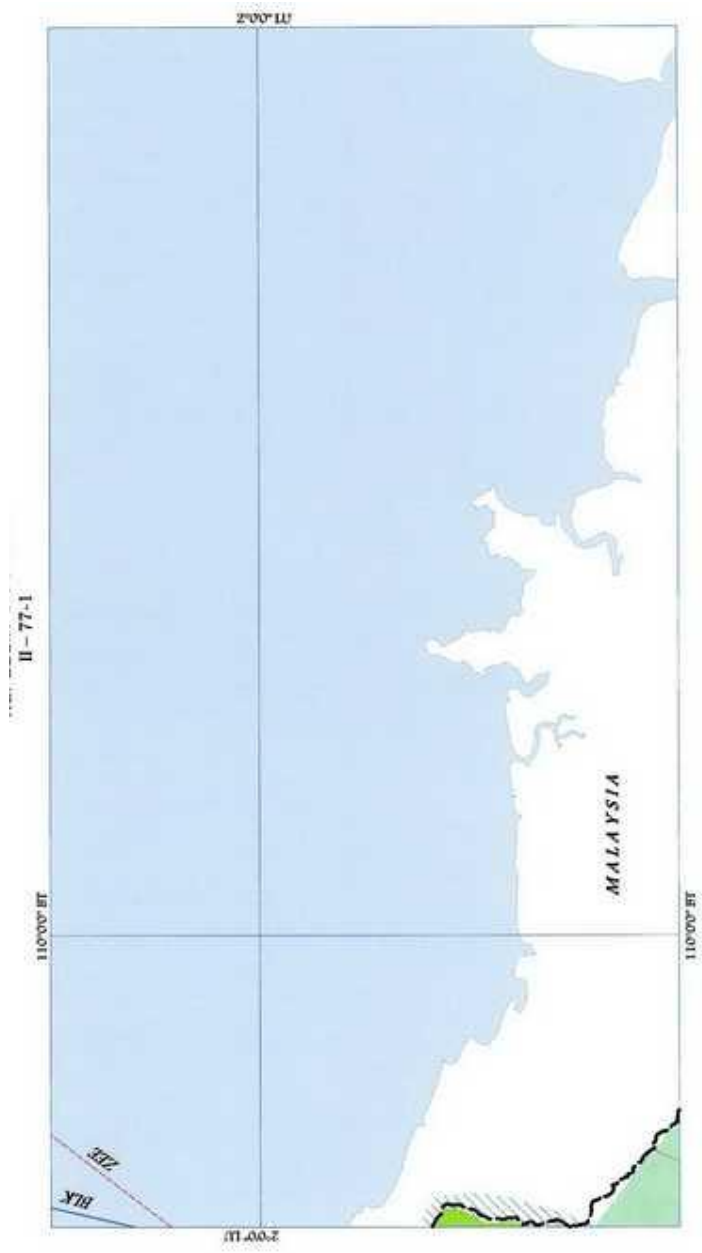


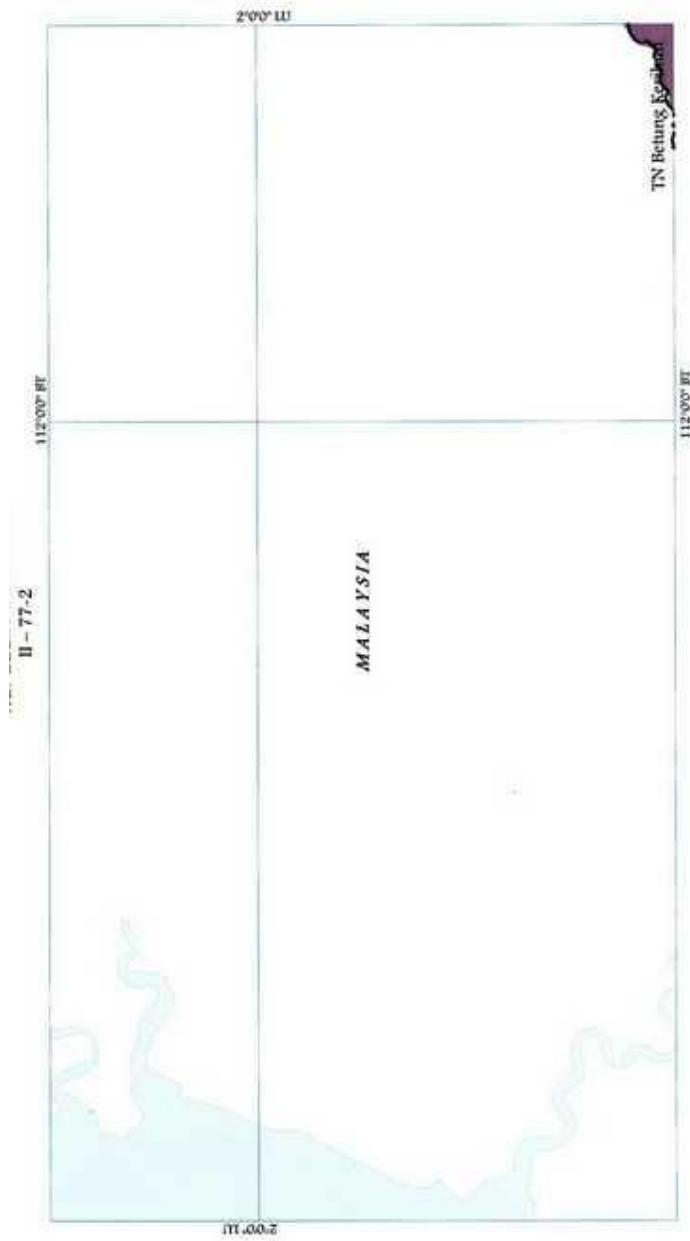


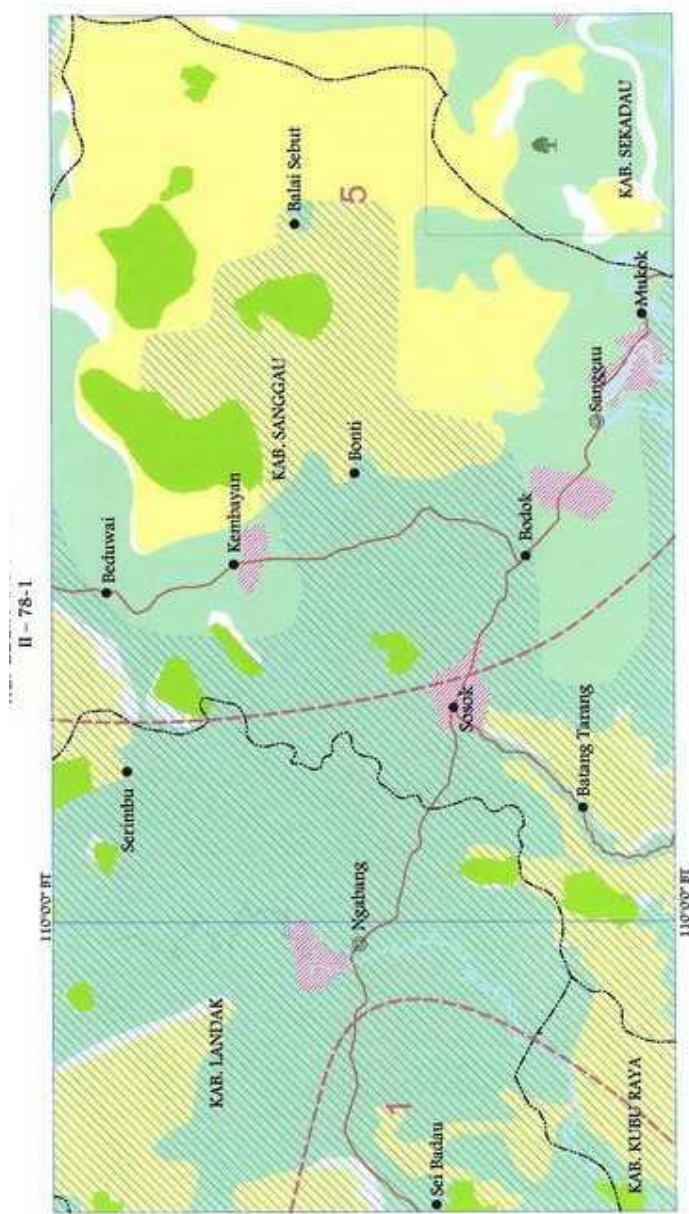


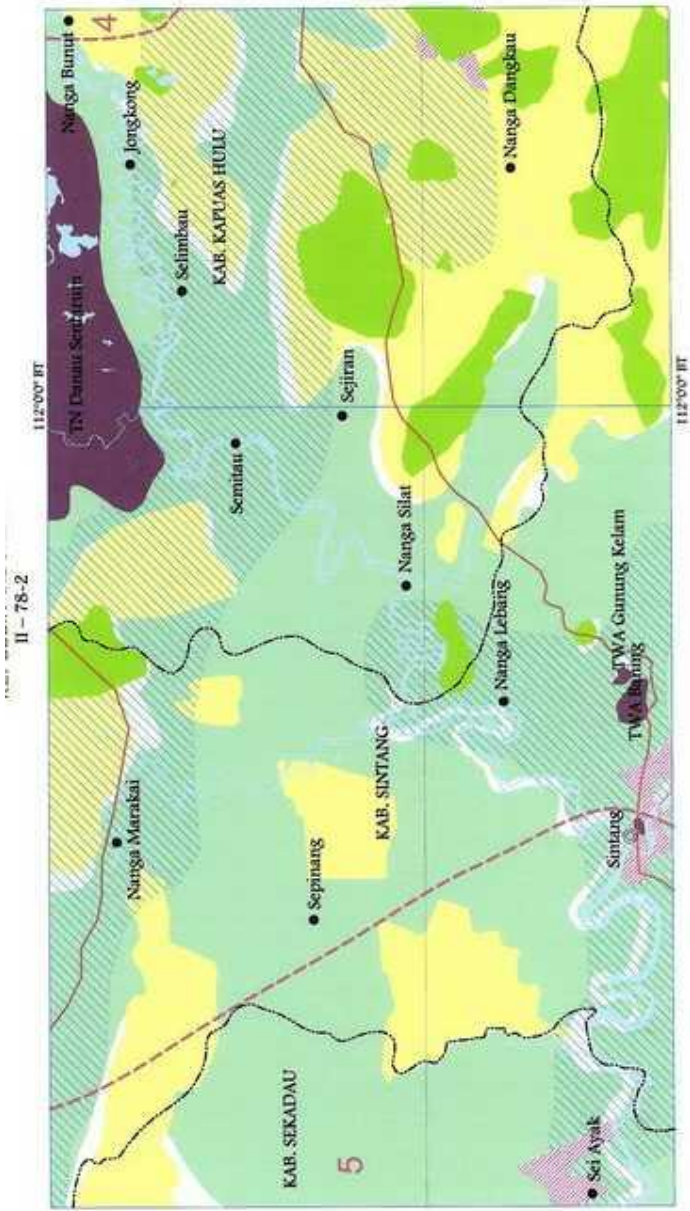


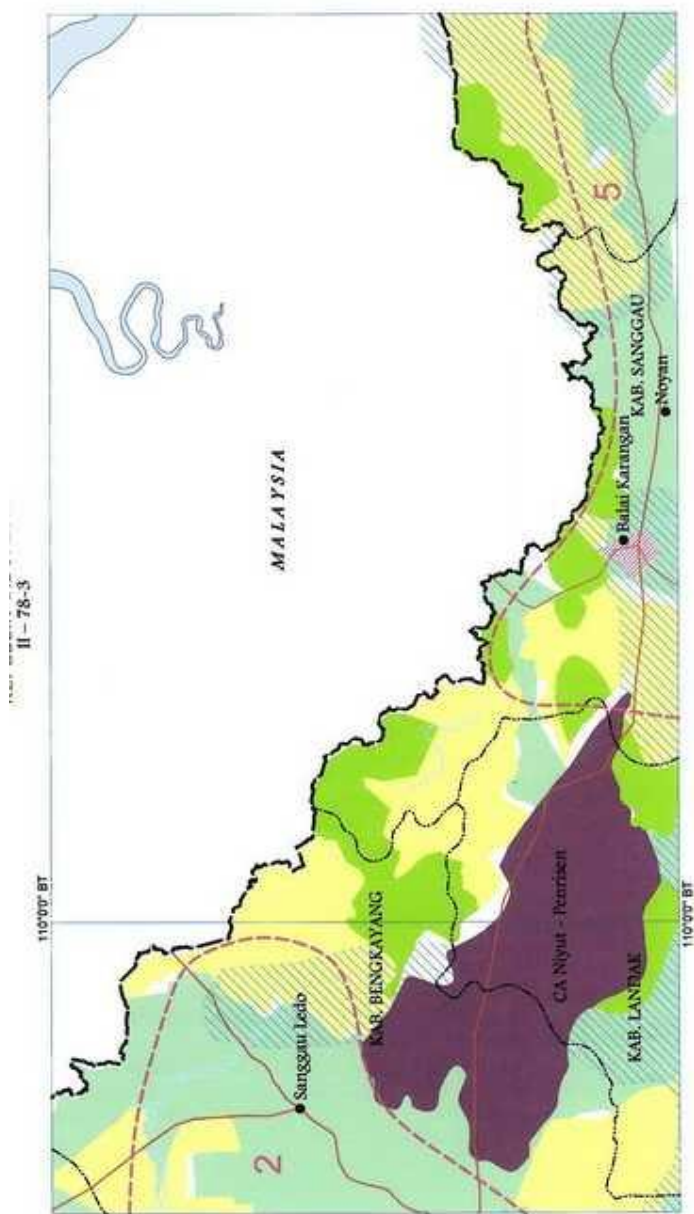


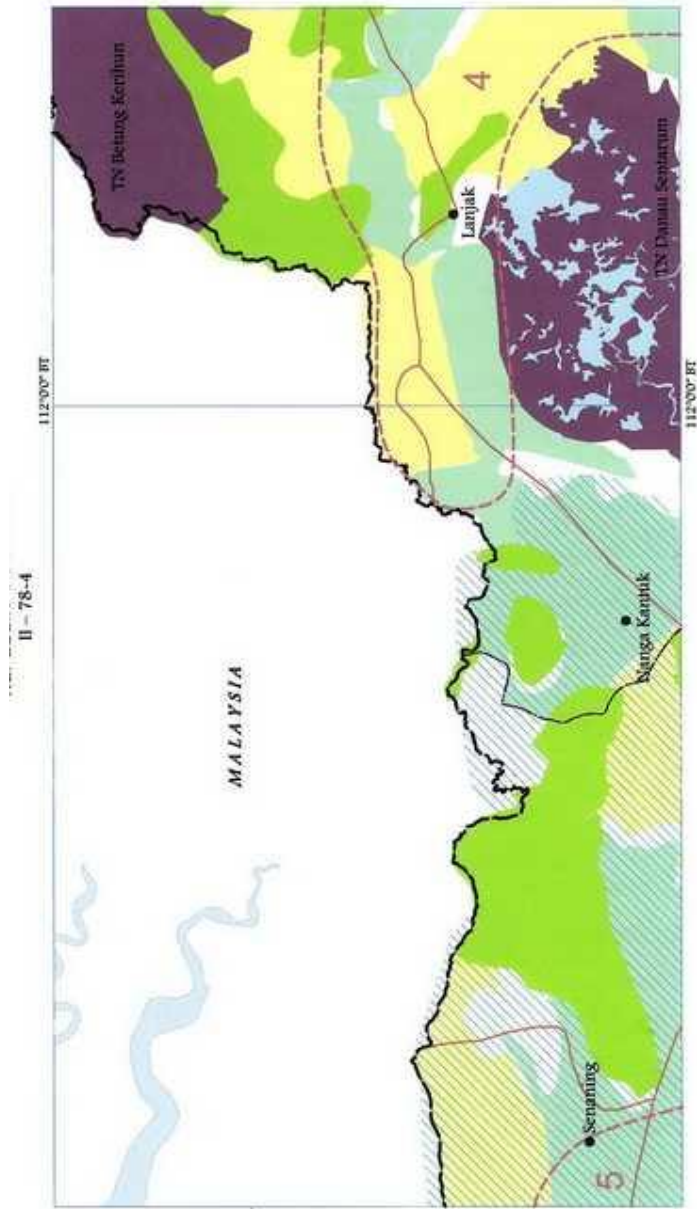


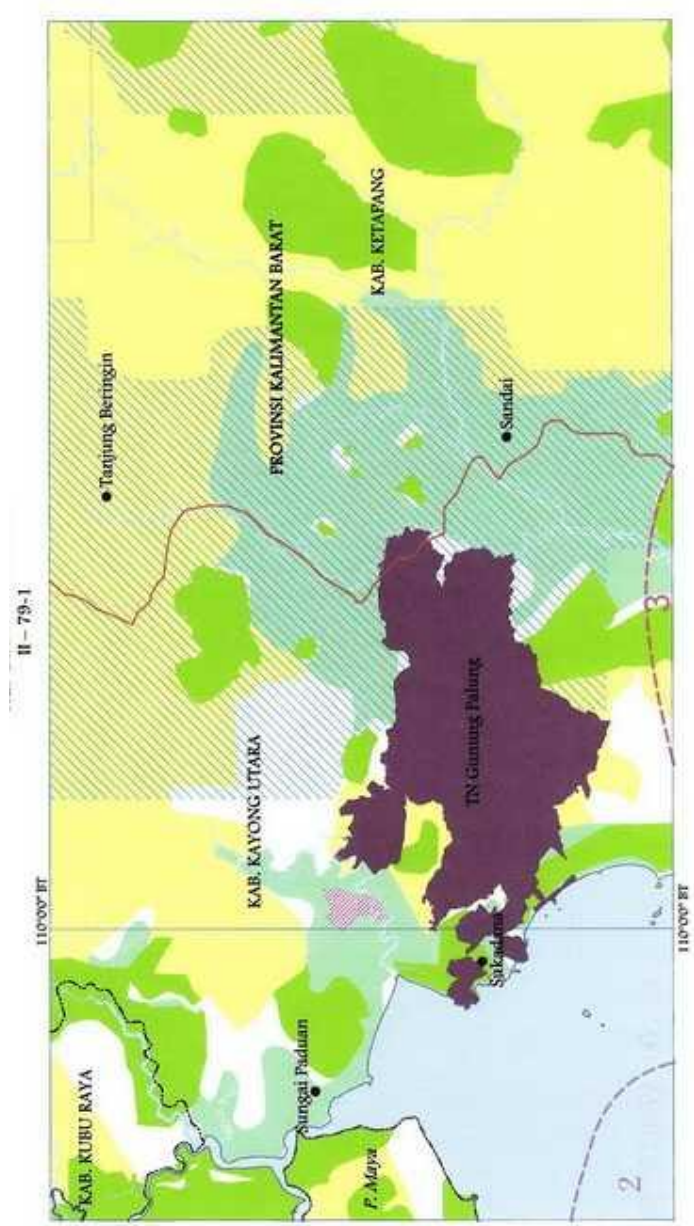


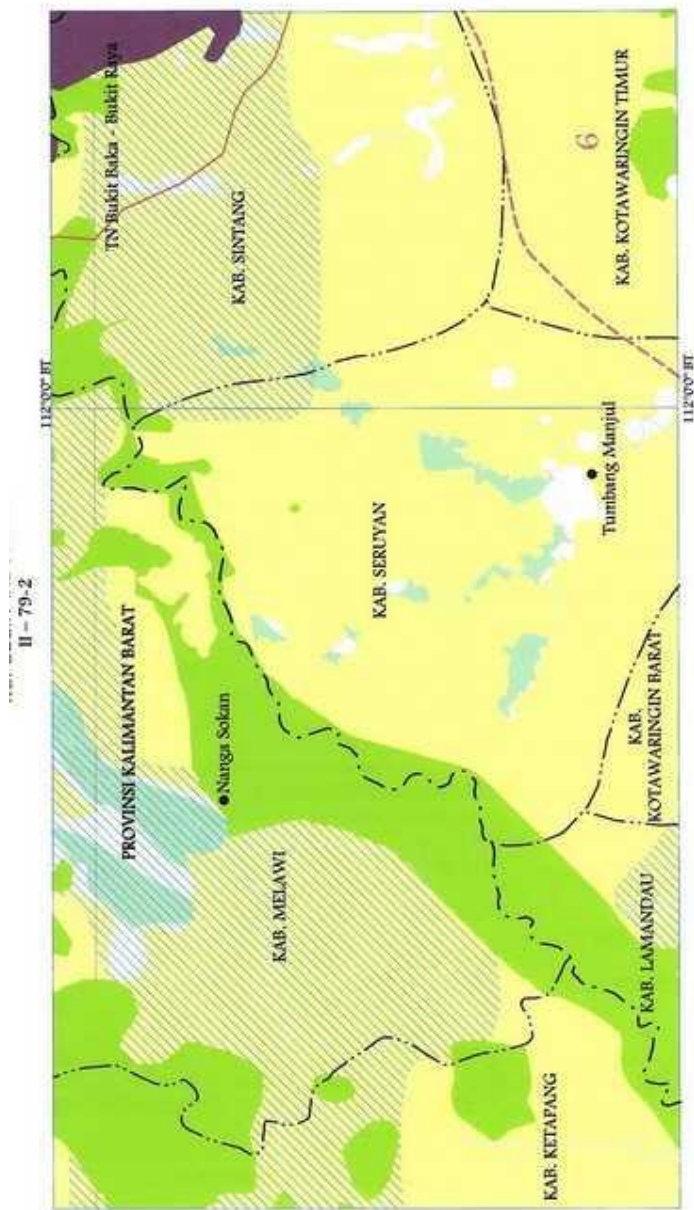


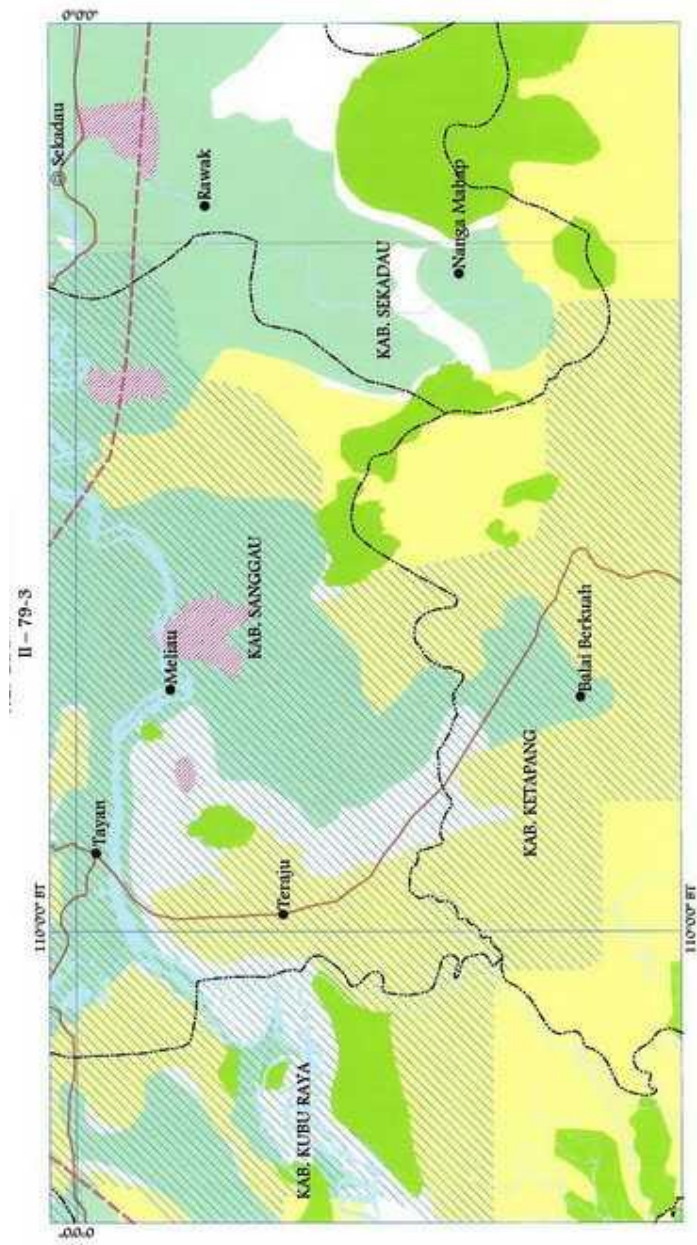


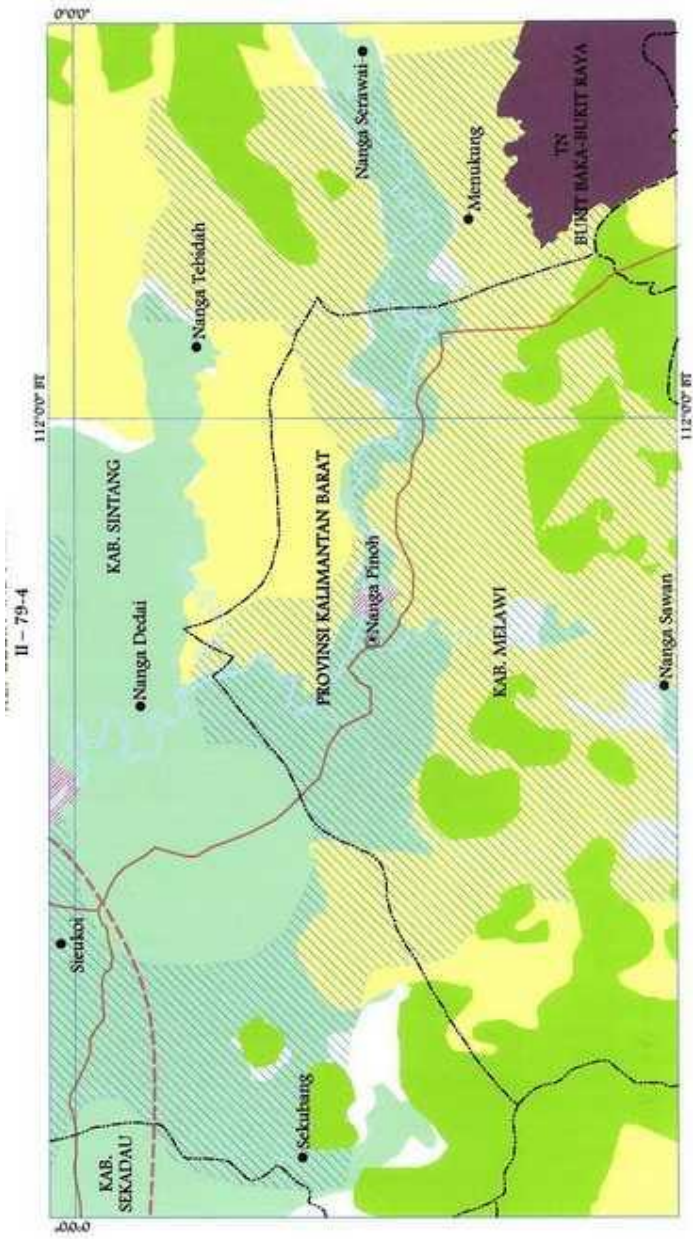


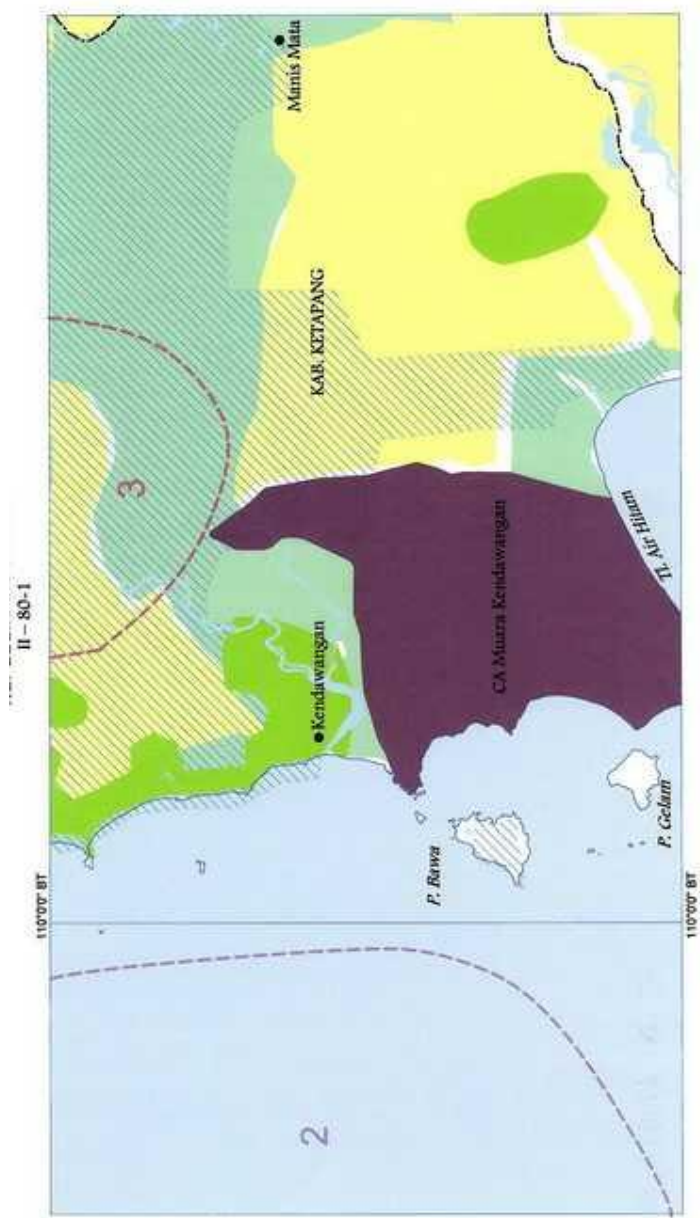


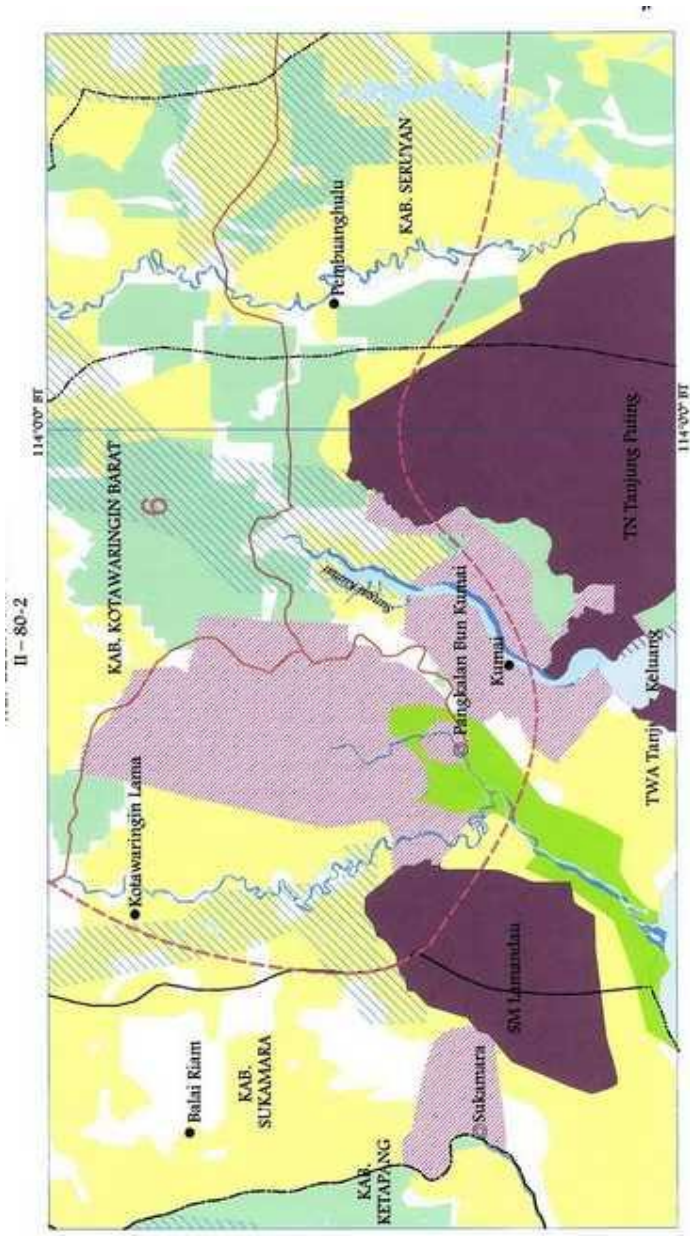


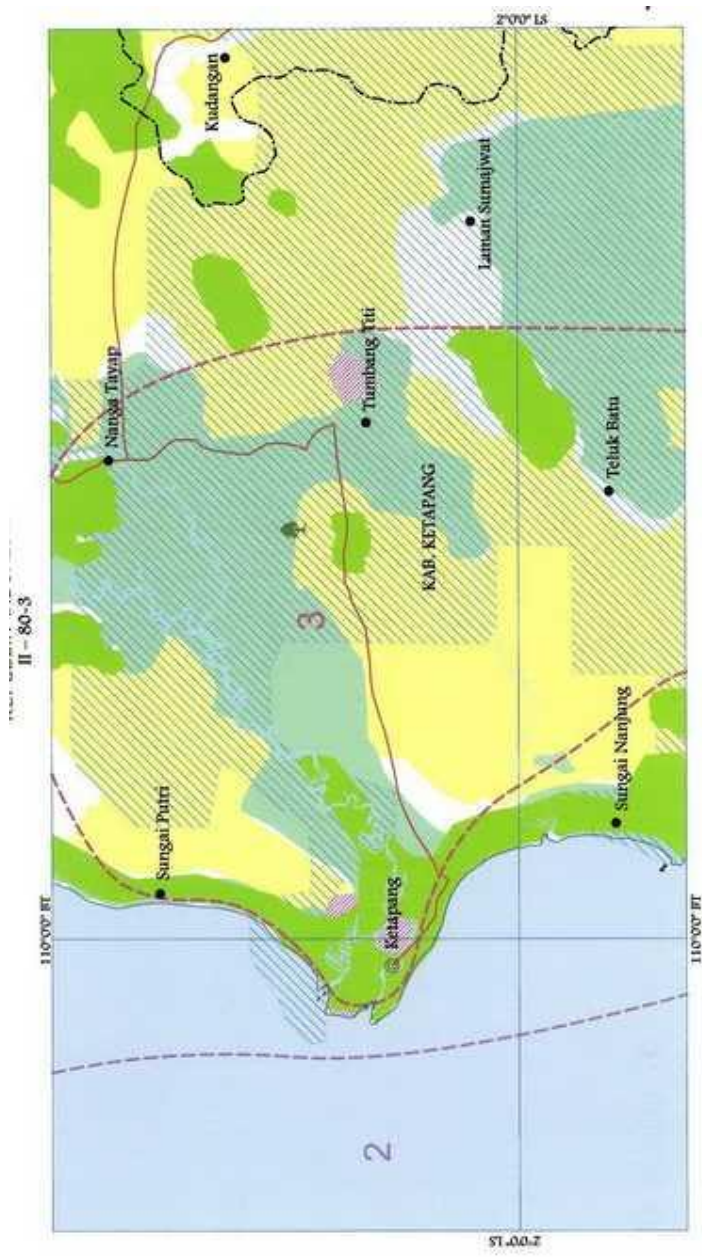


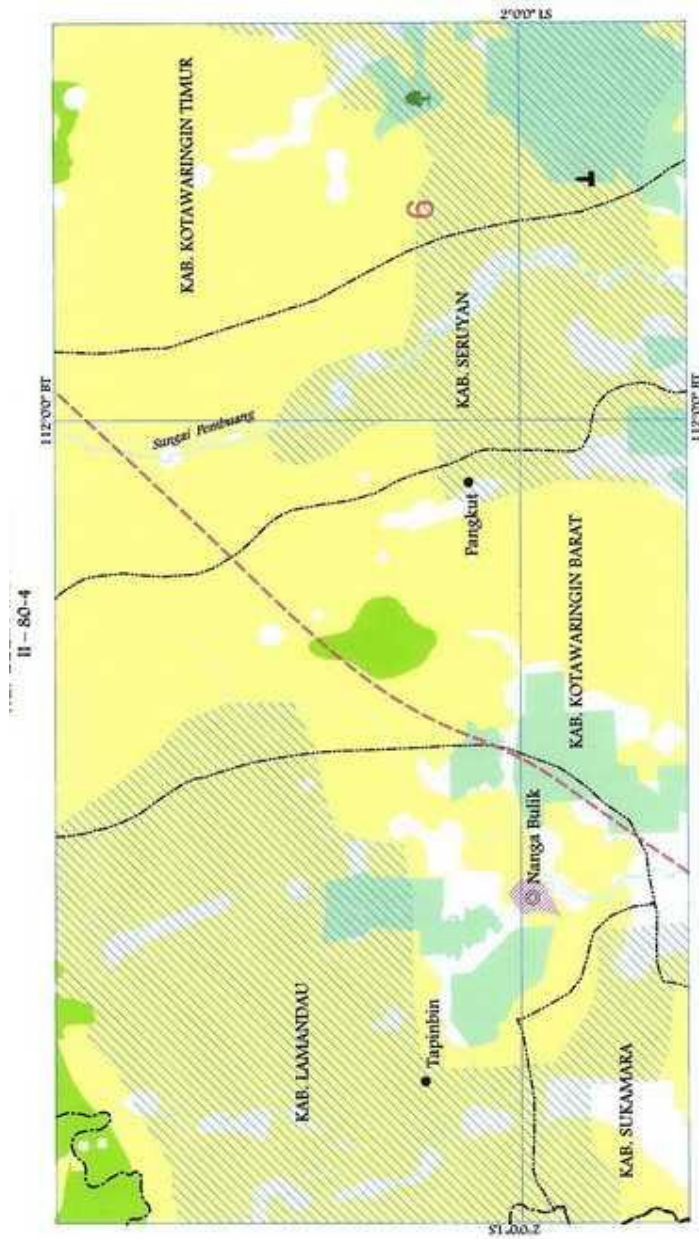


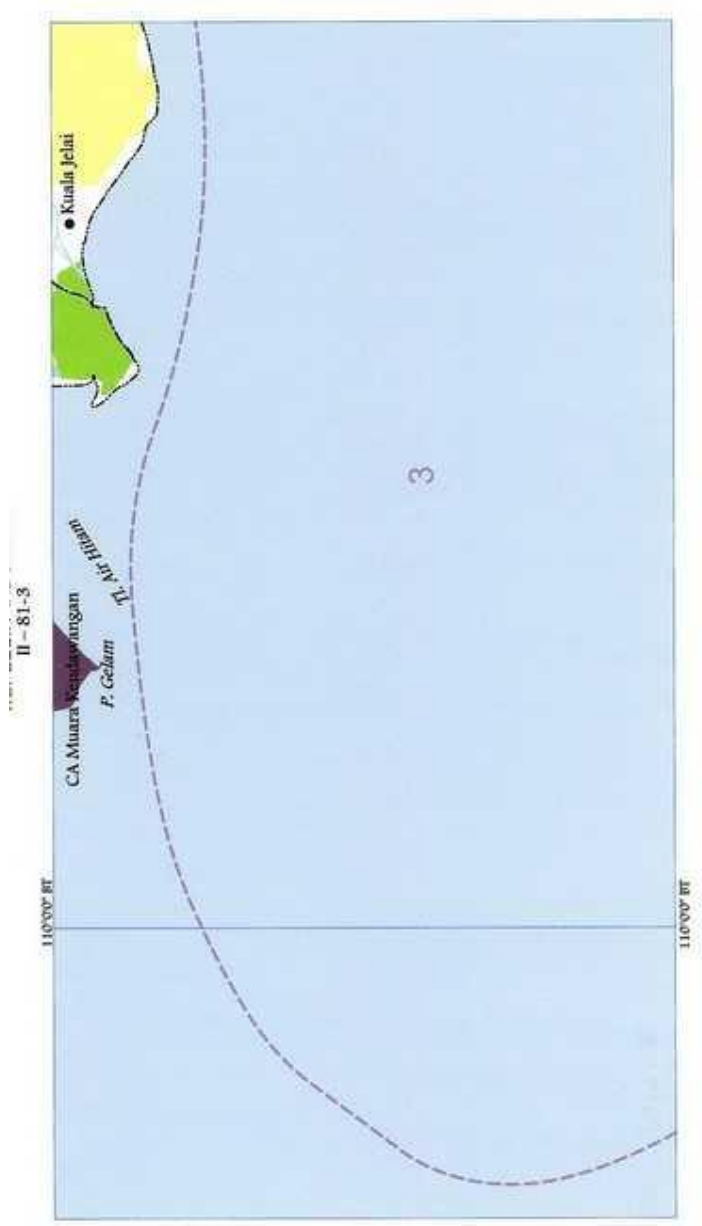


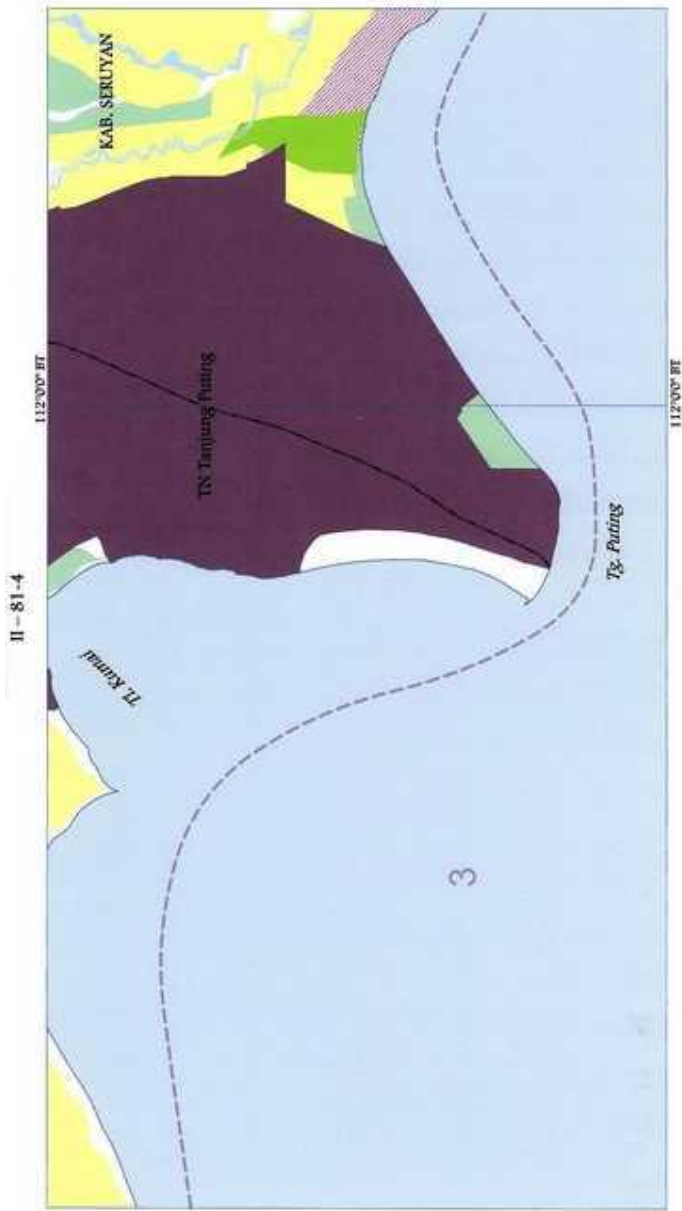


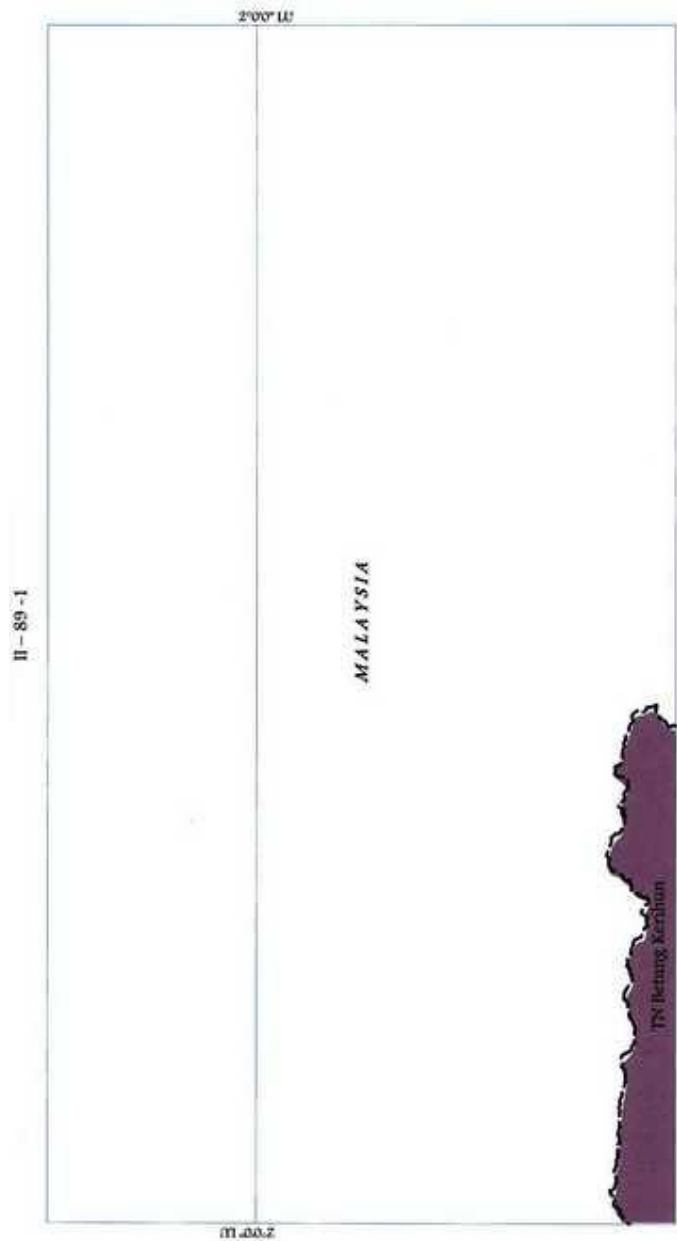


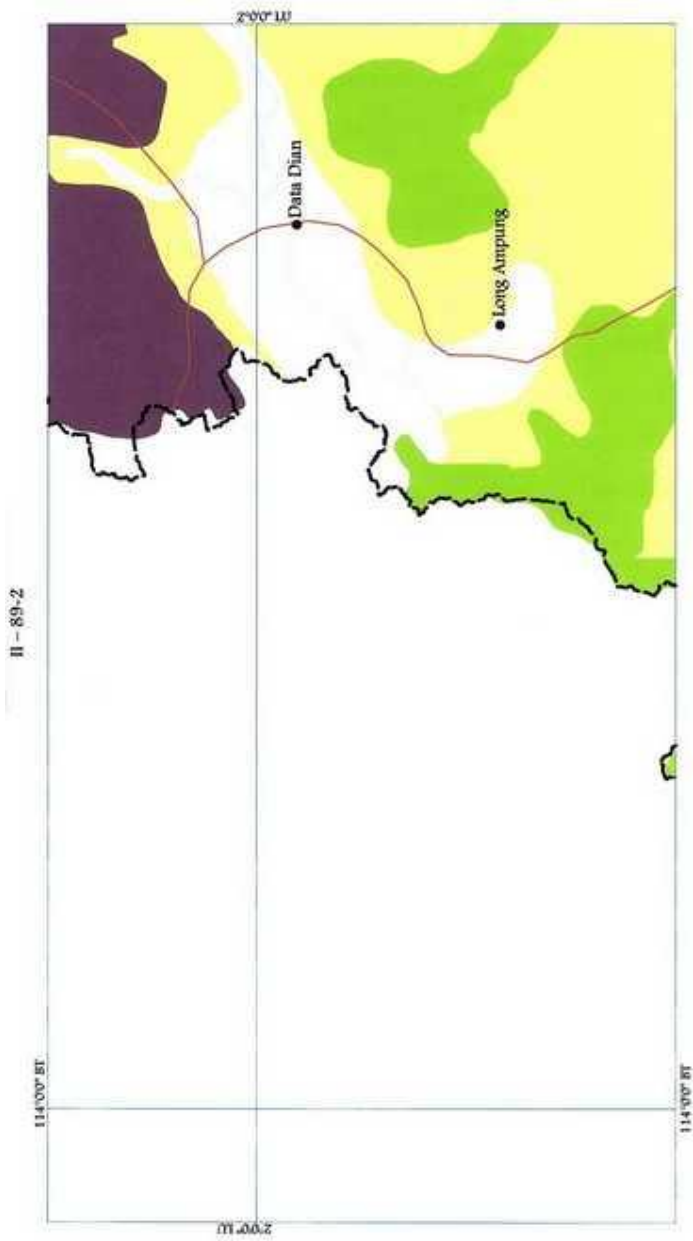


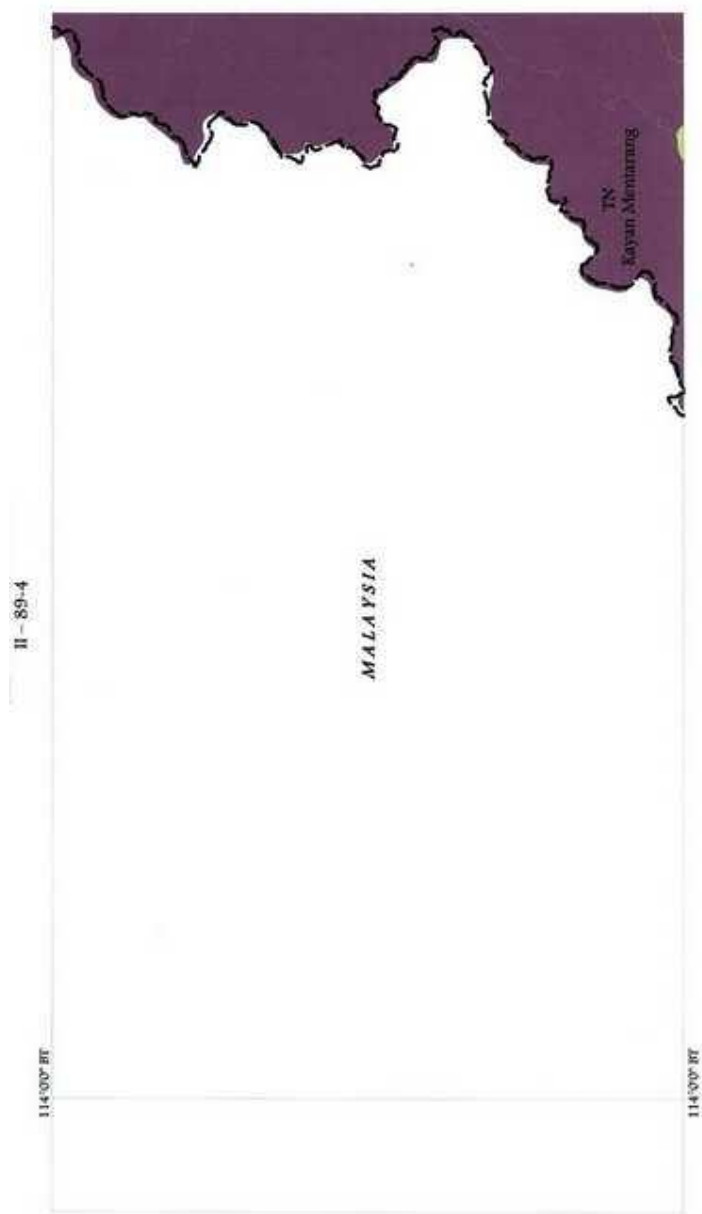




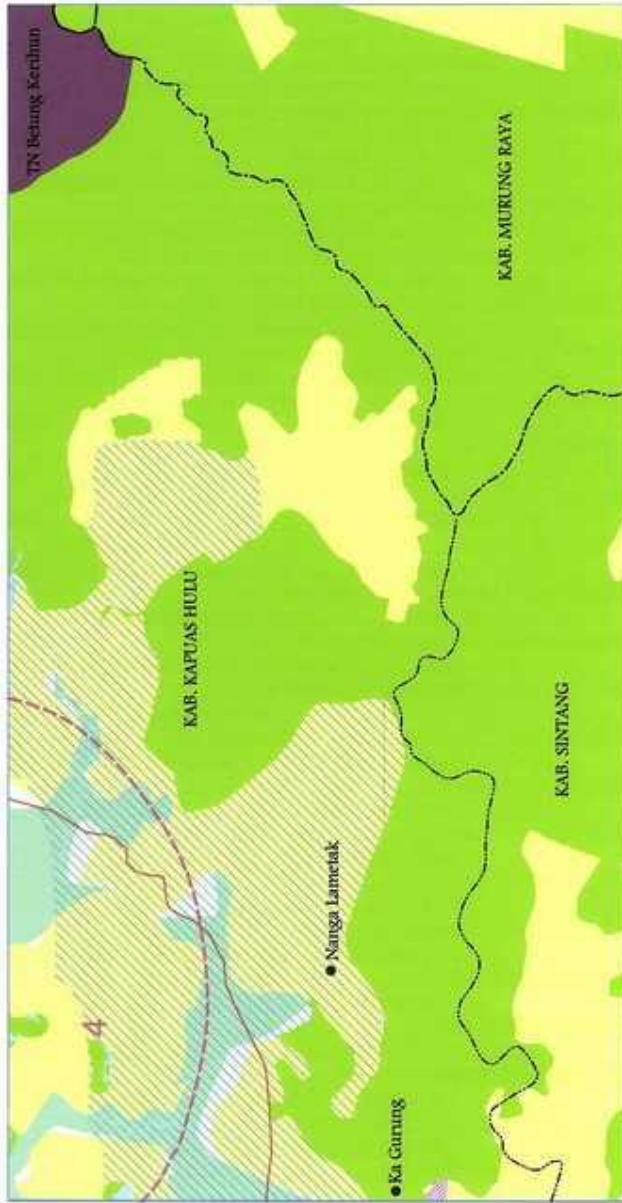


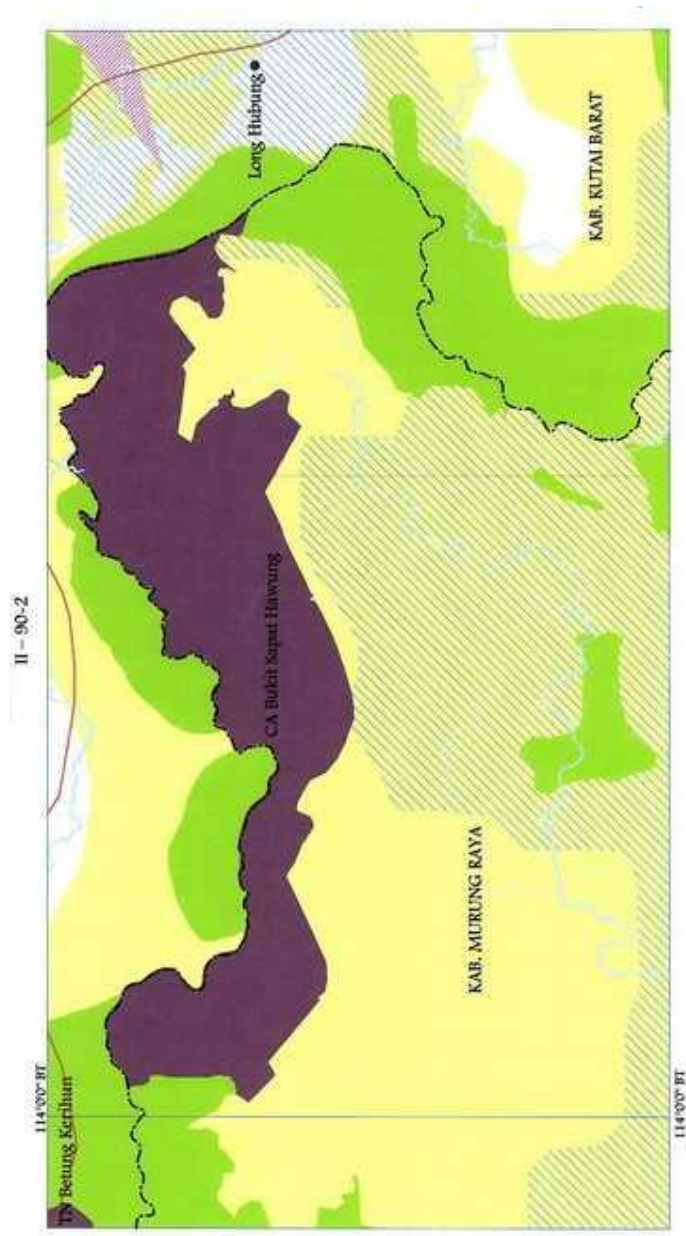


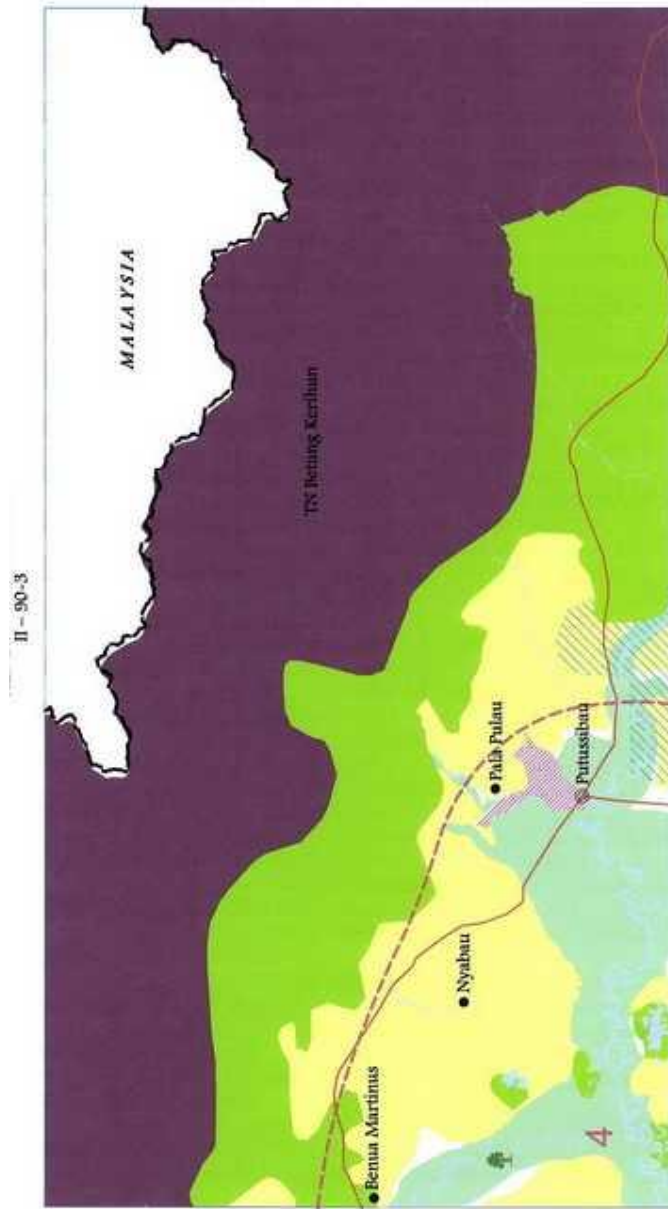


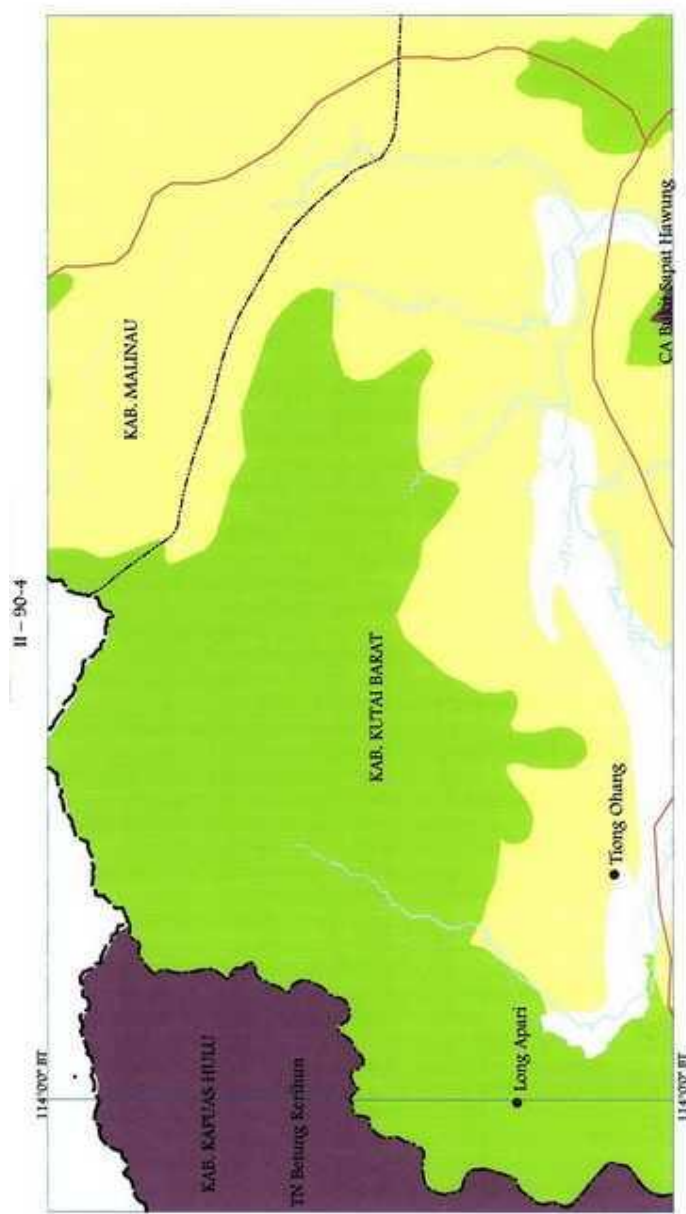


II-90-1



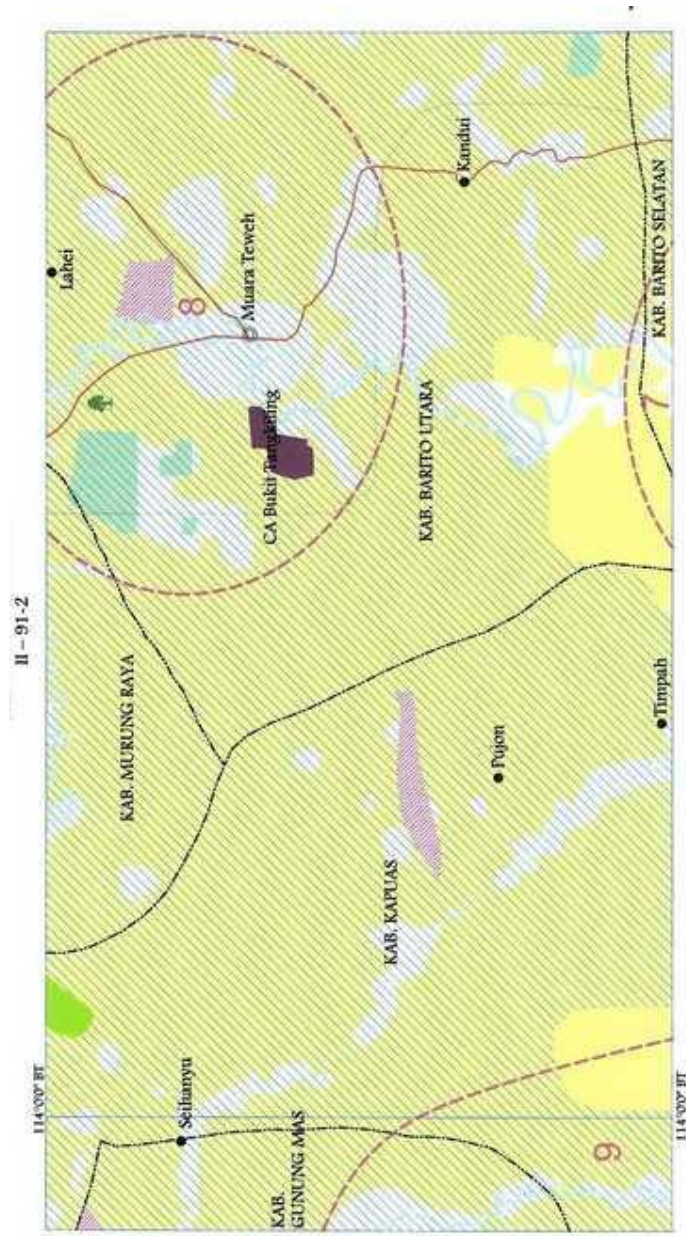


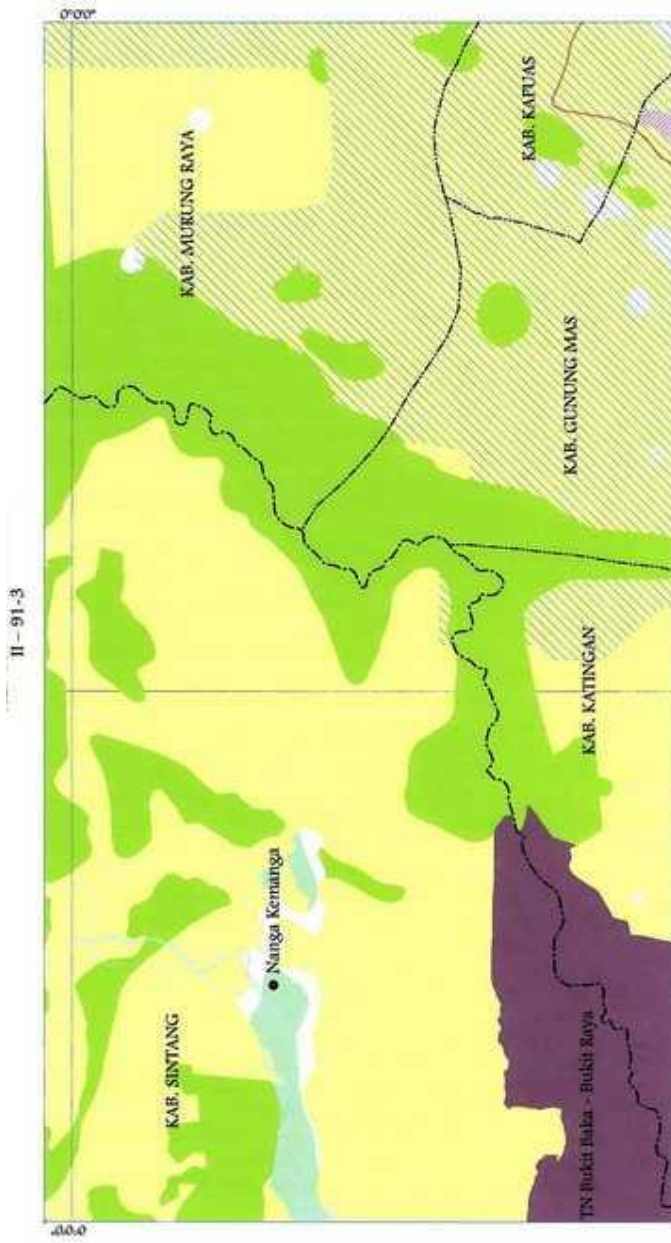


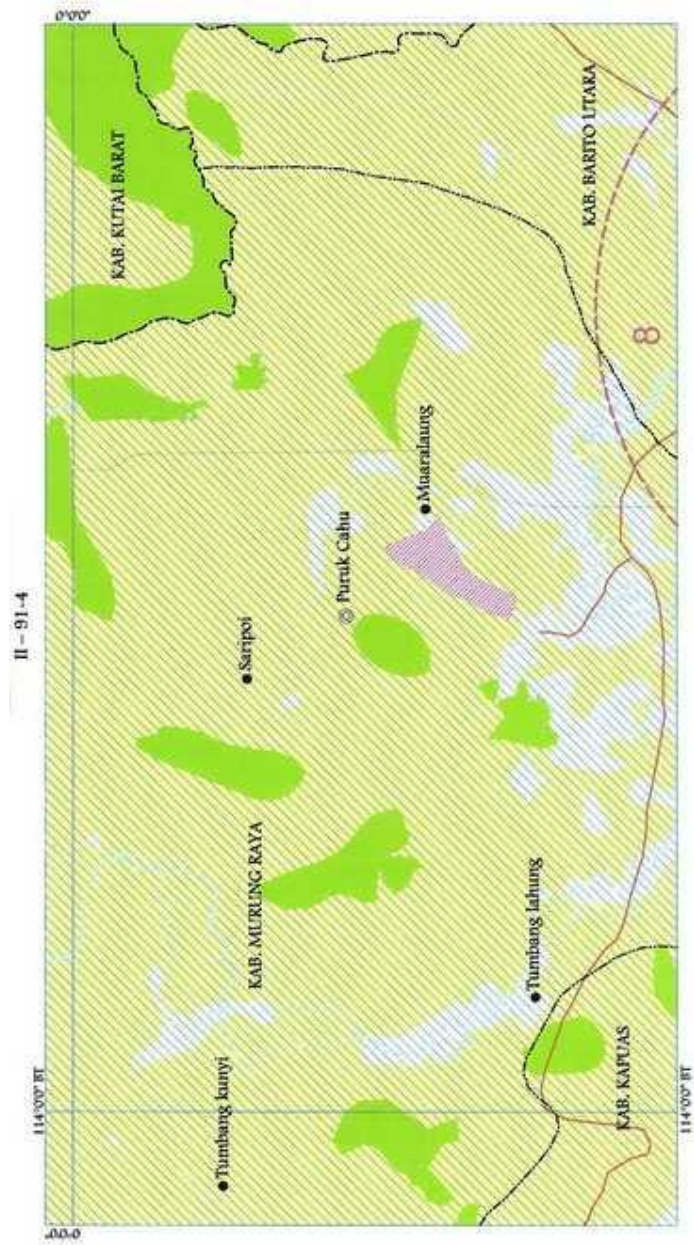


II-91-I

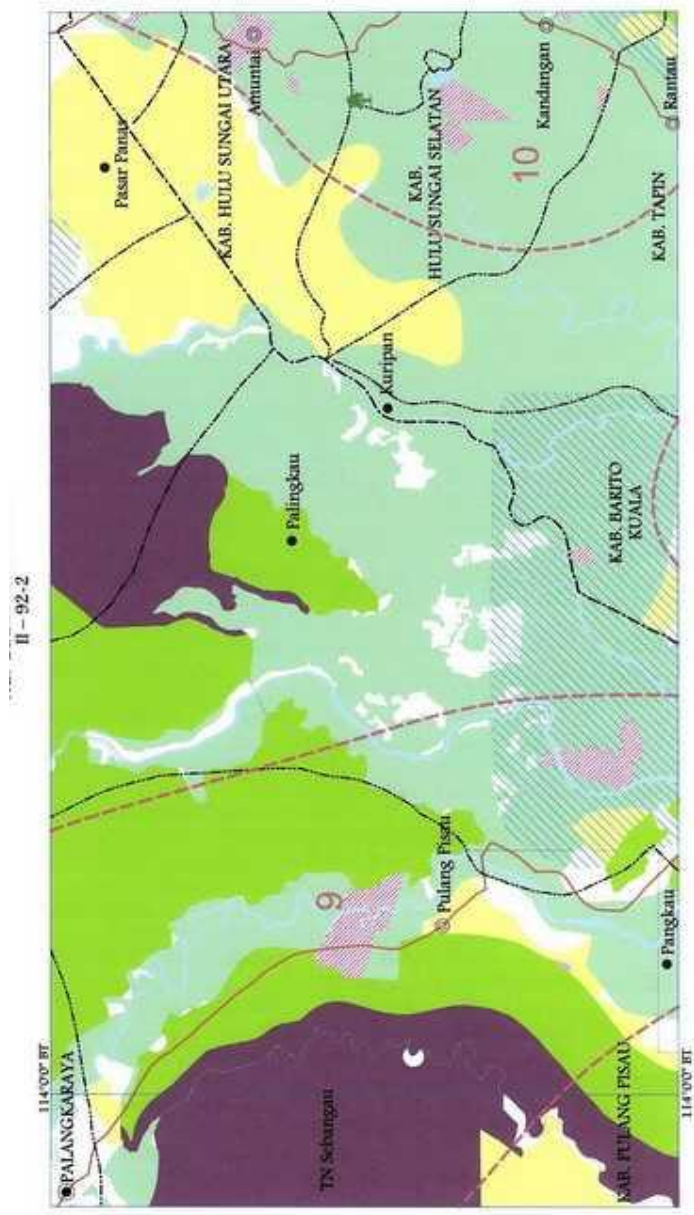


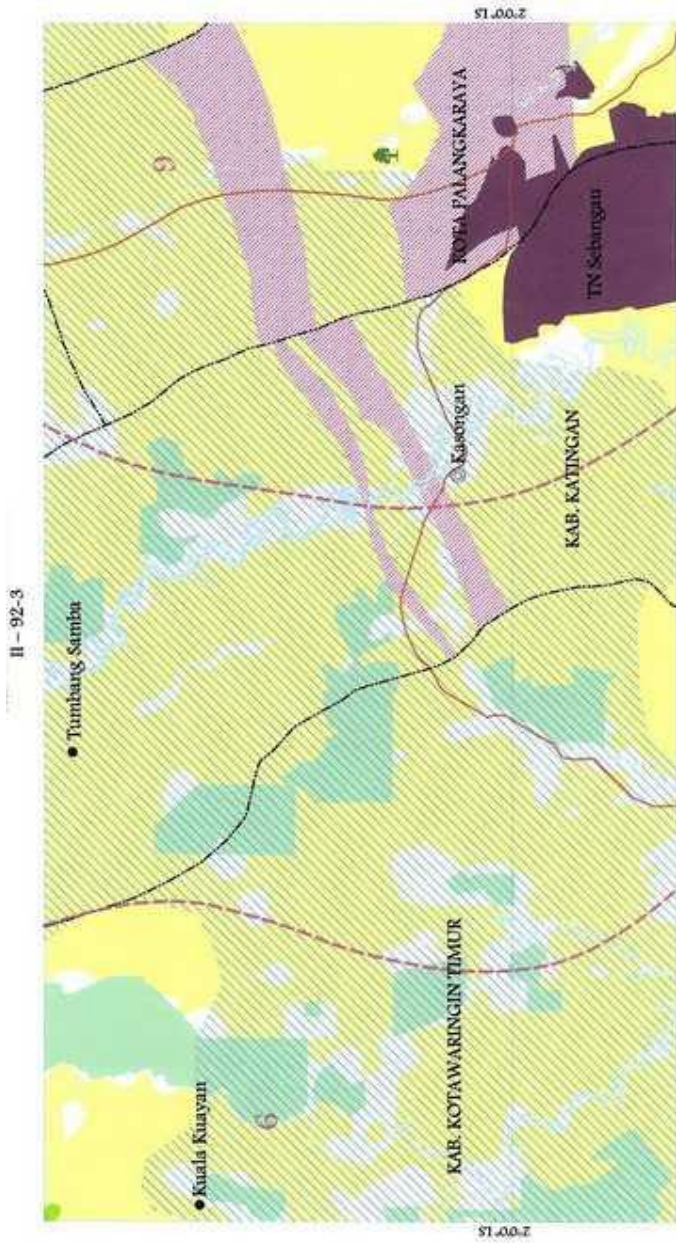


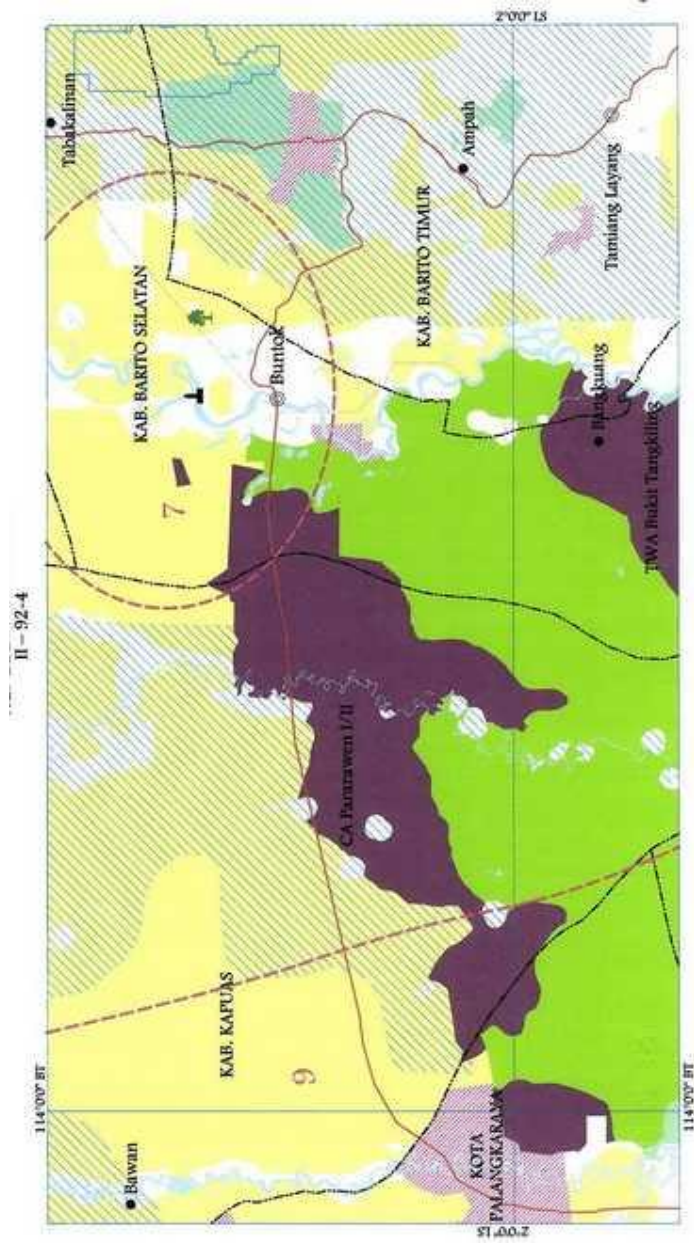




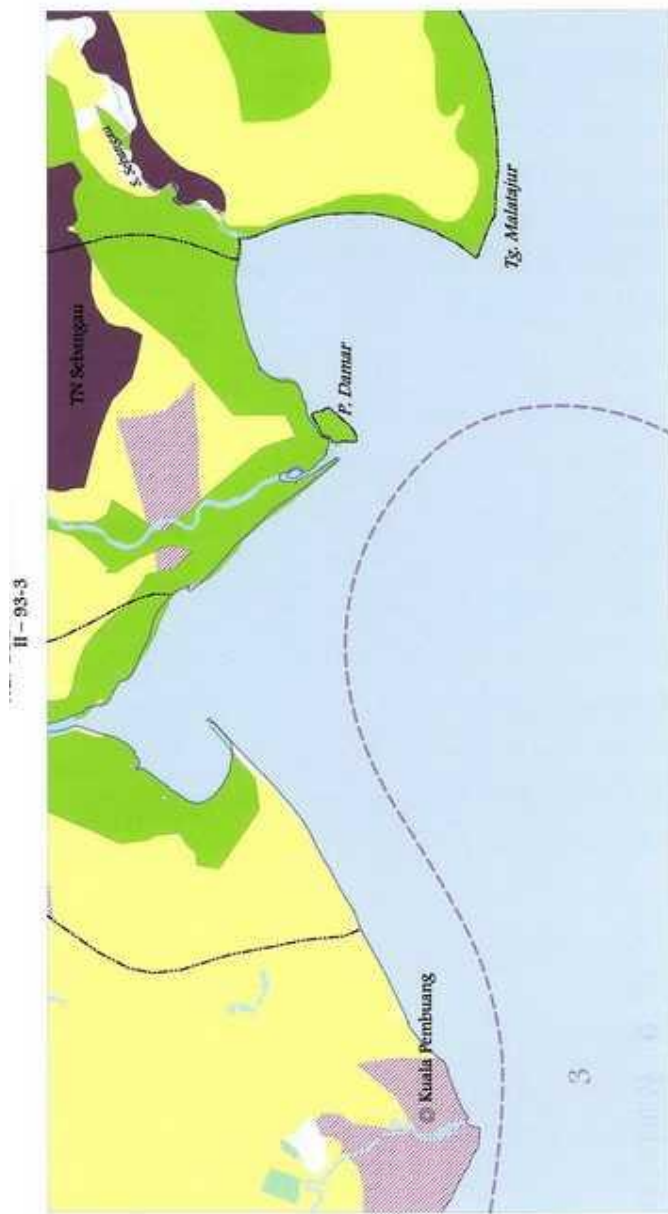


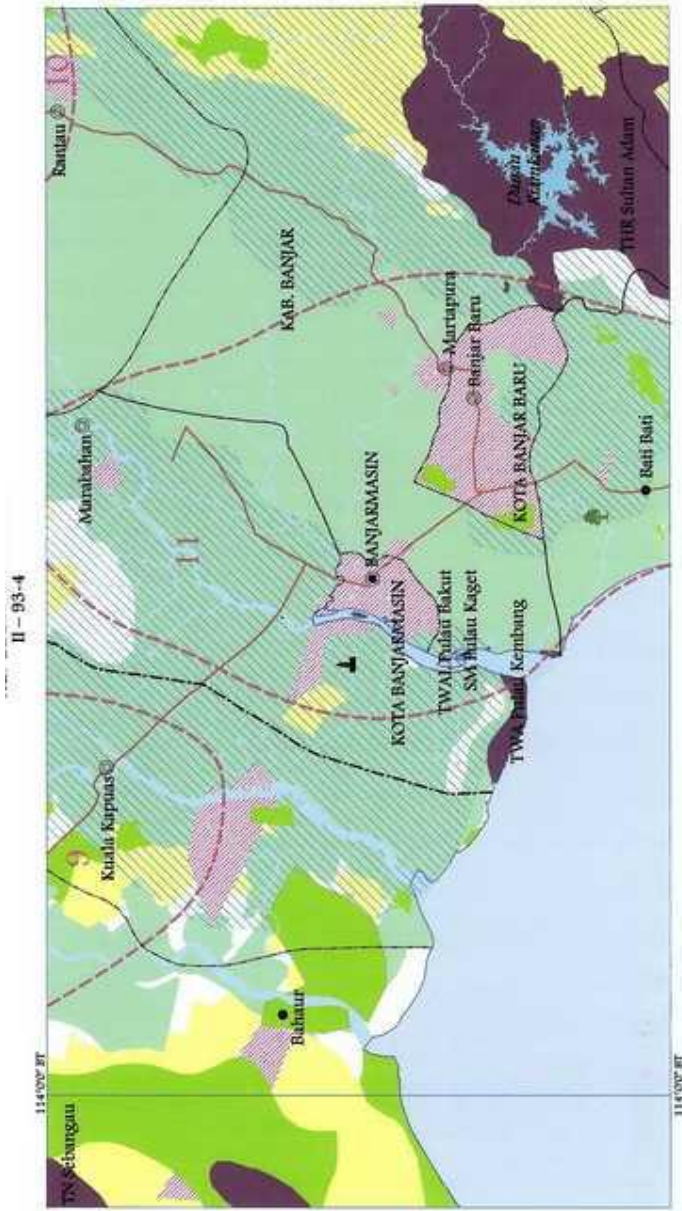


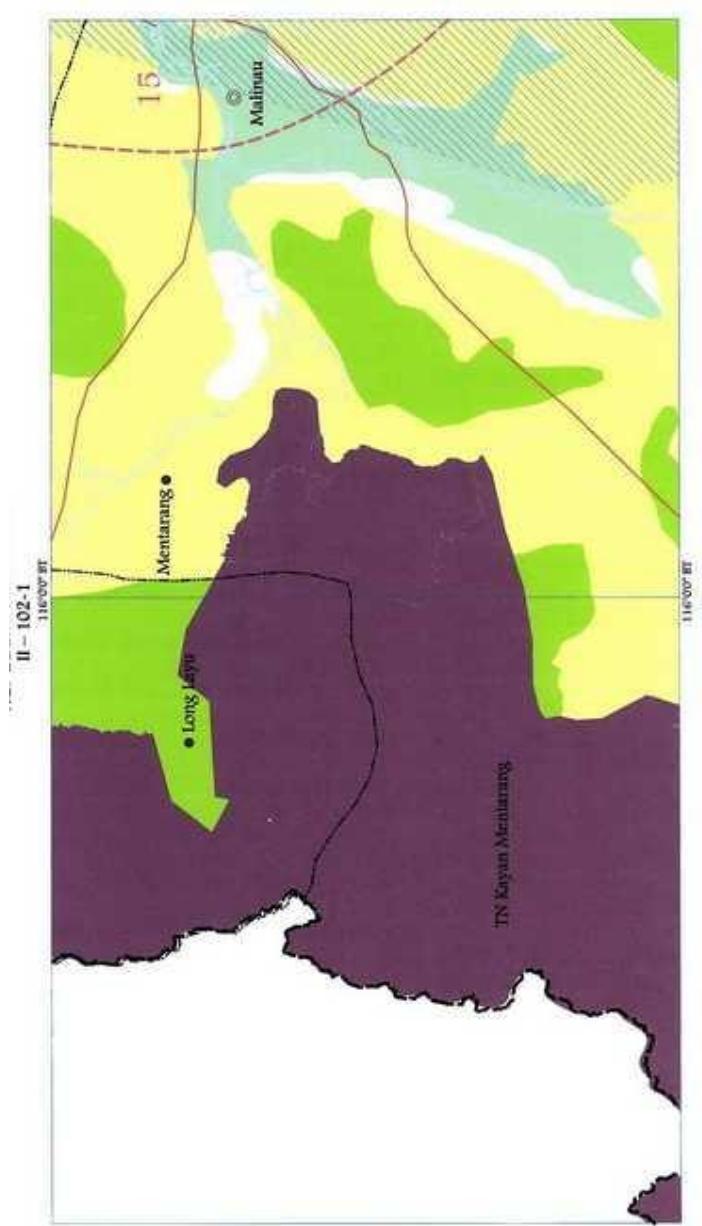


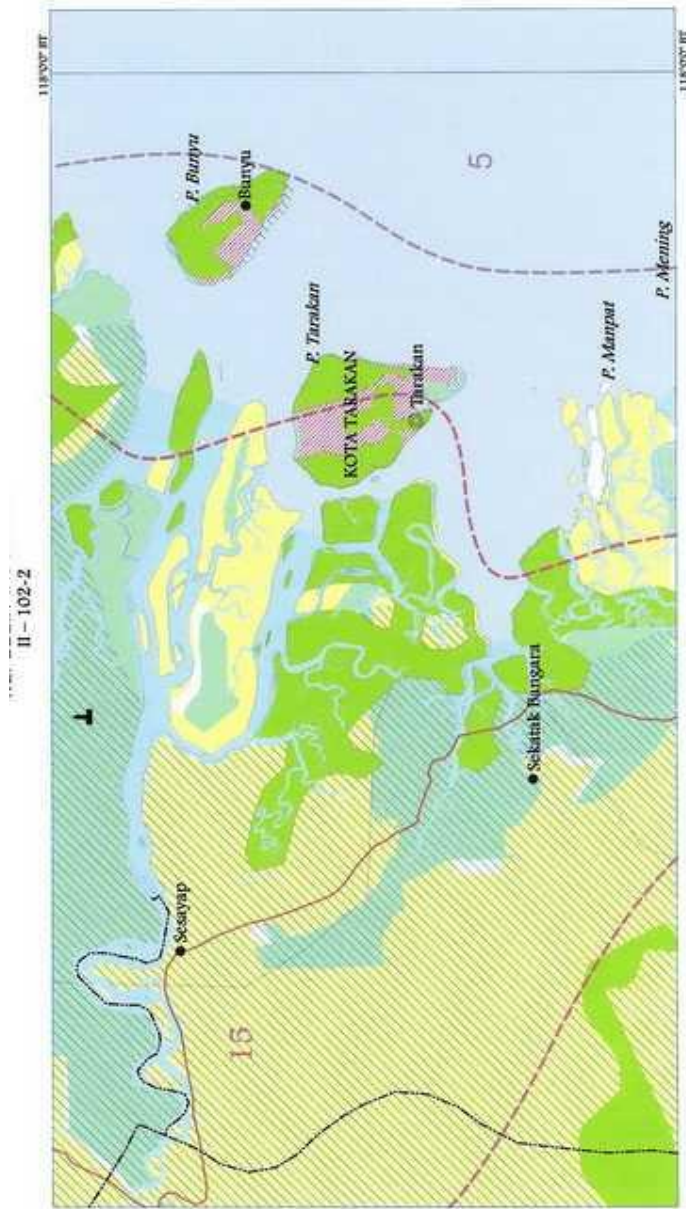


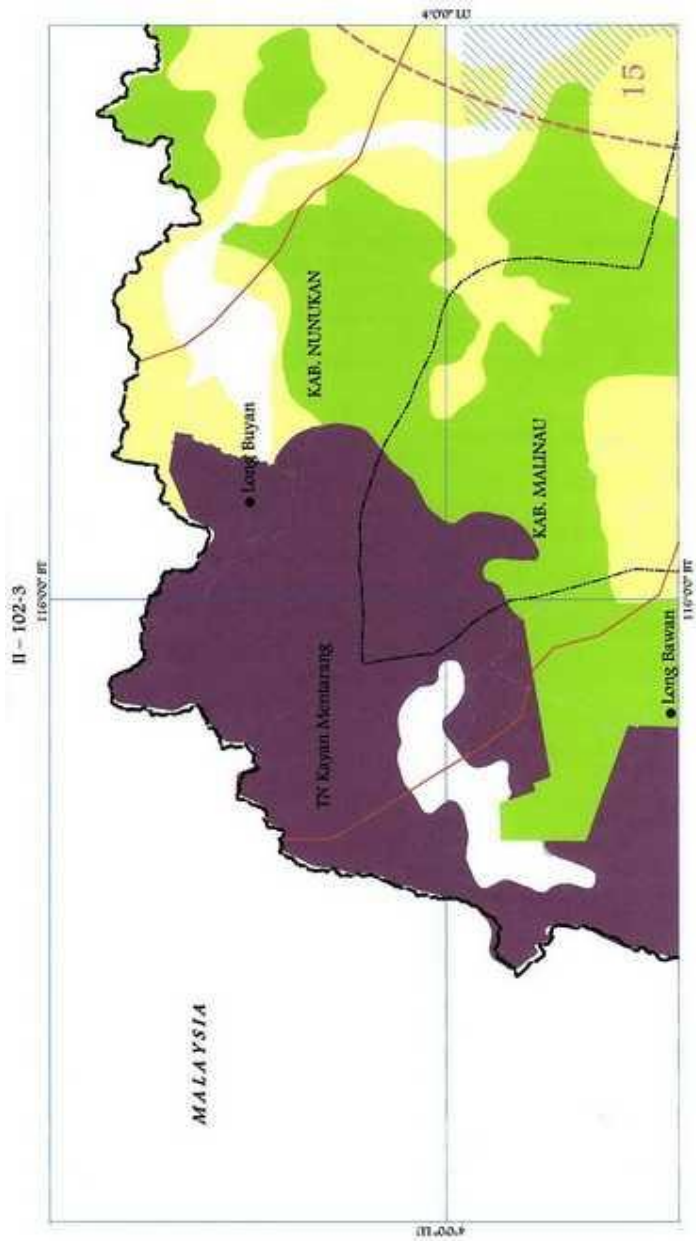


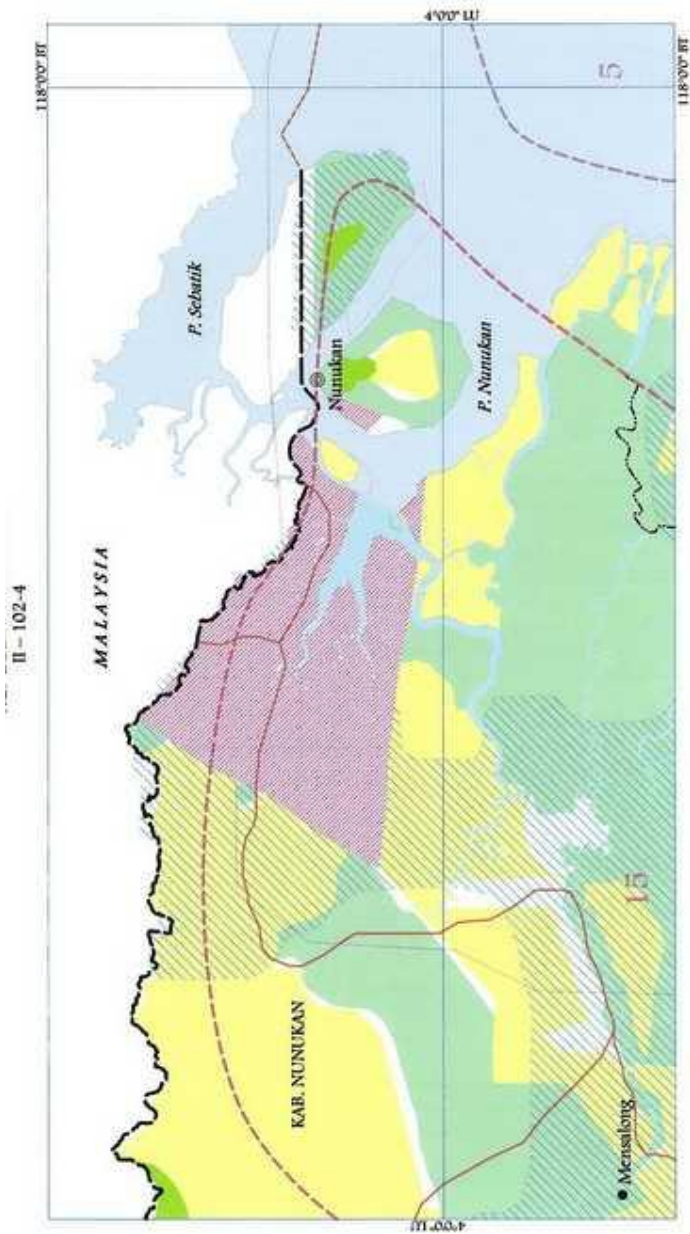


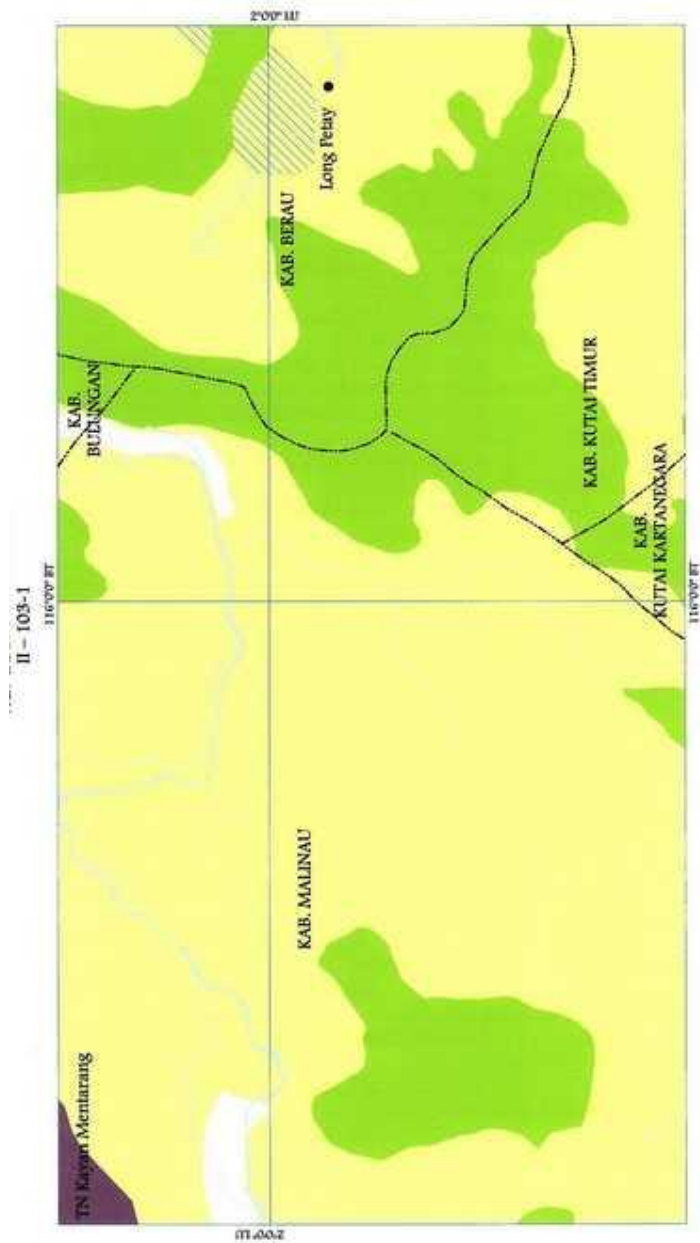


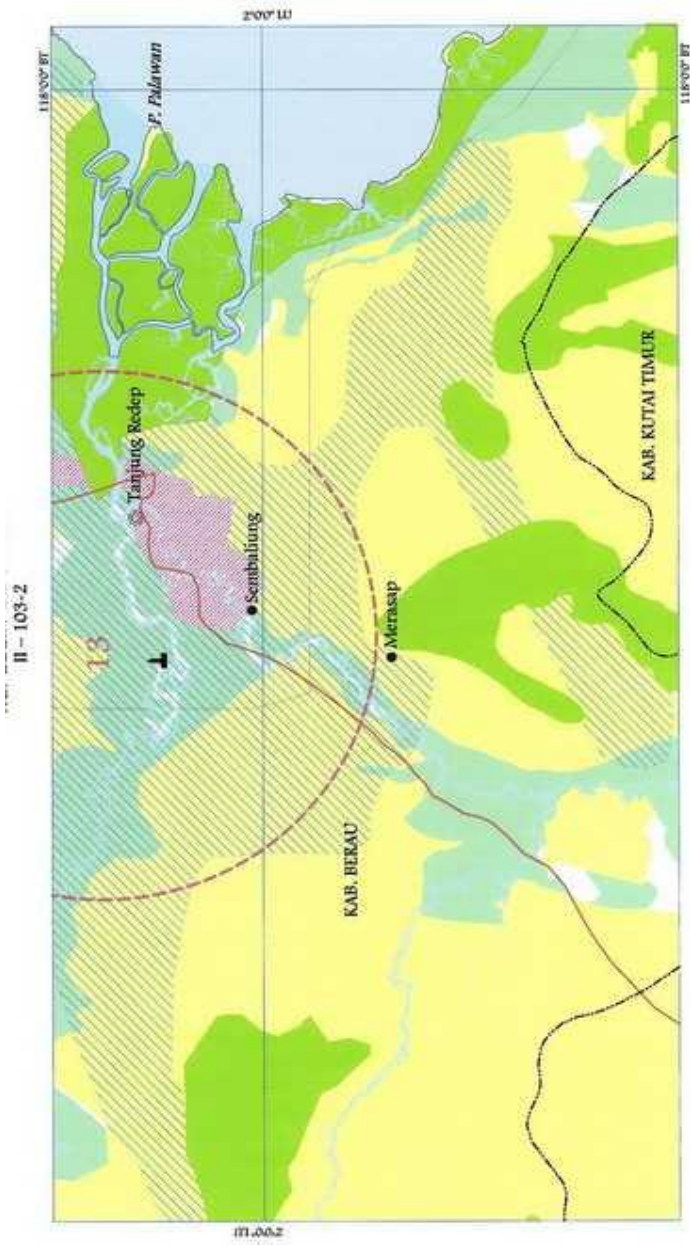


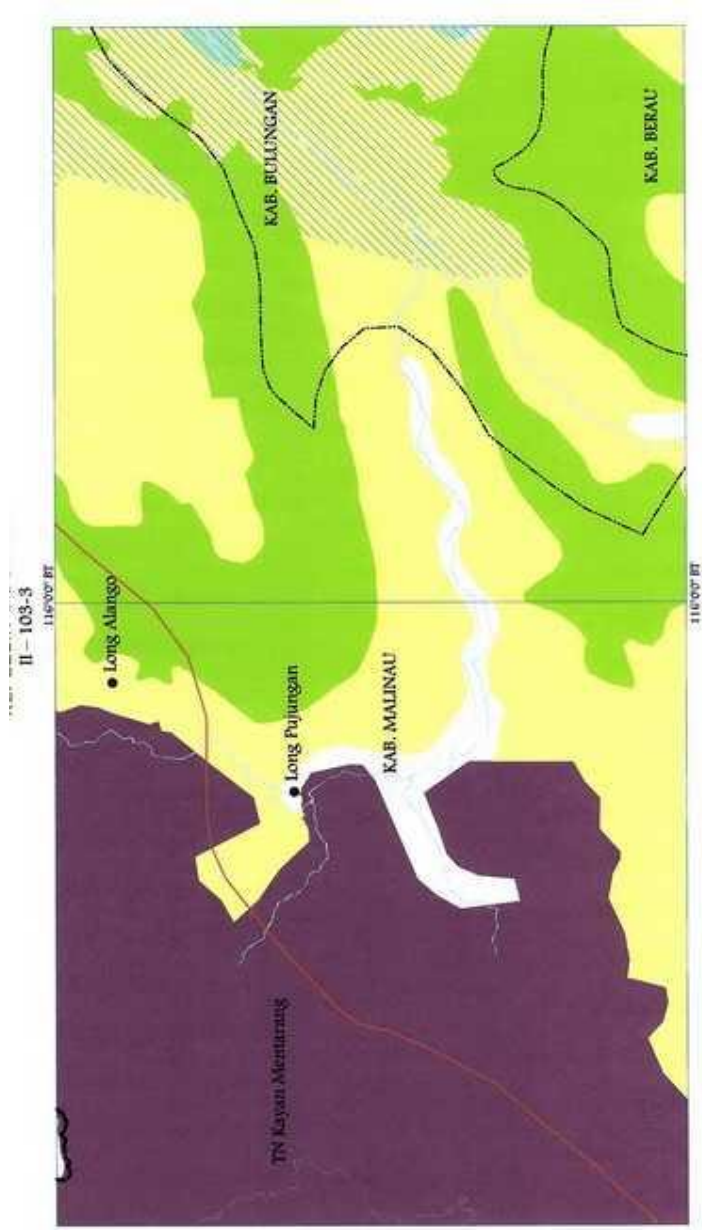


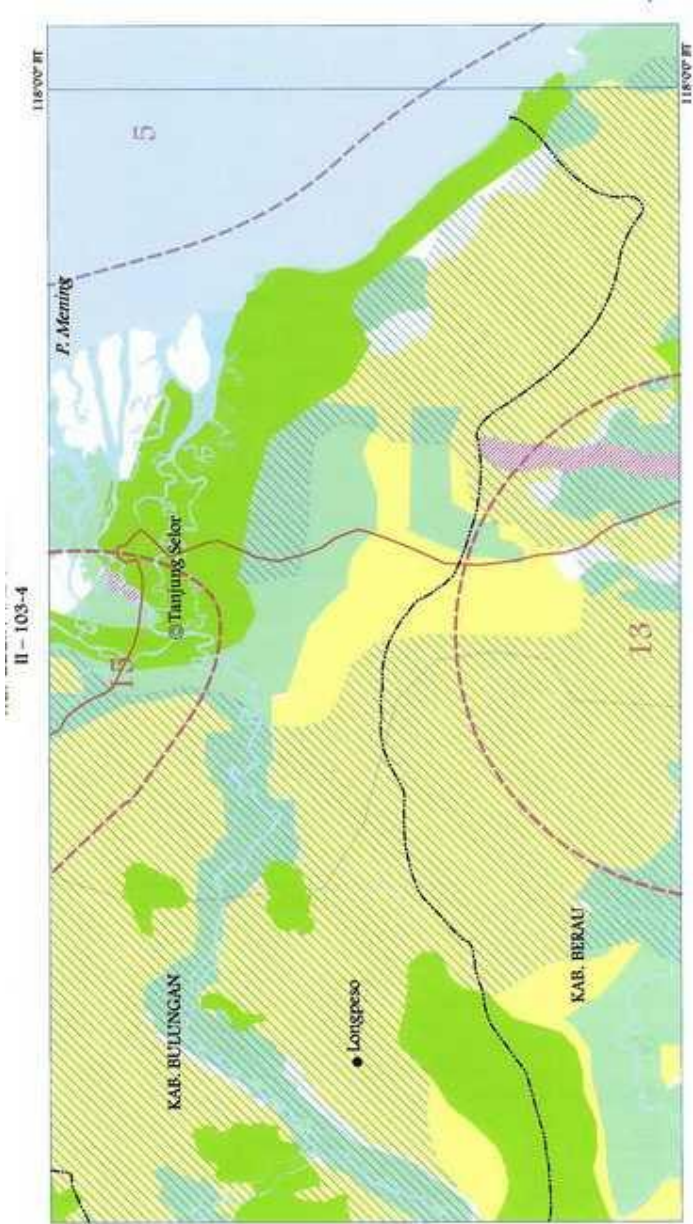


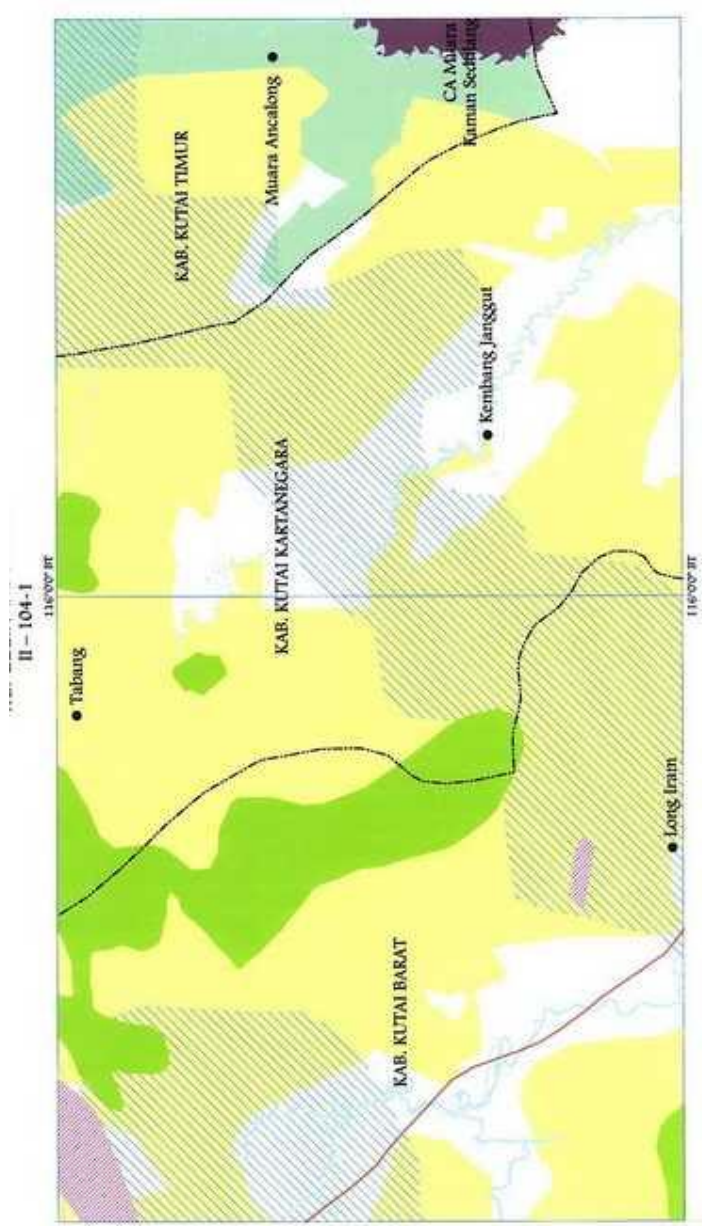


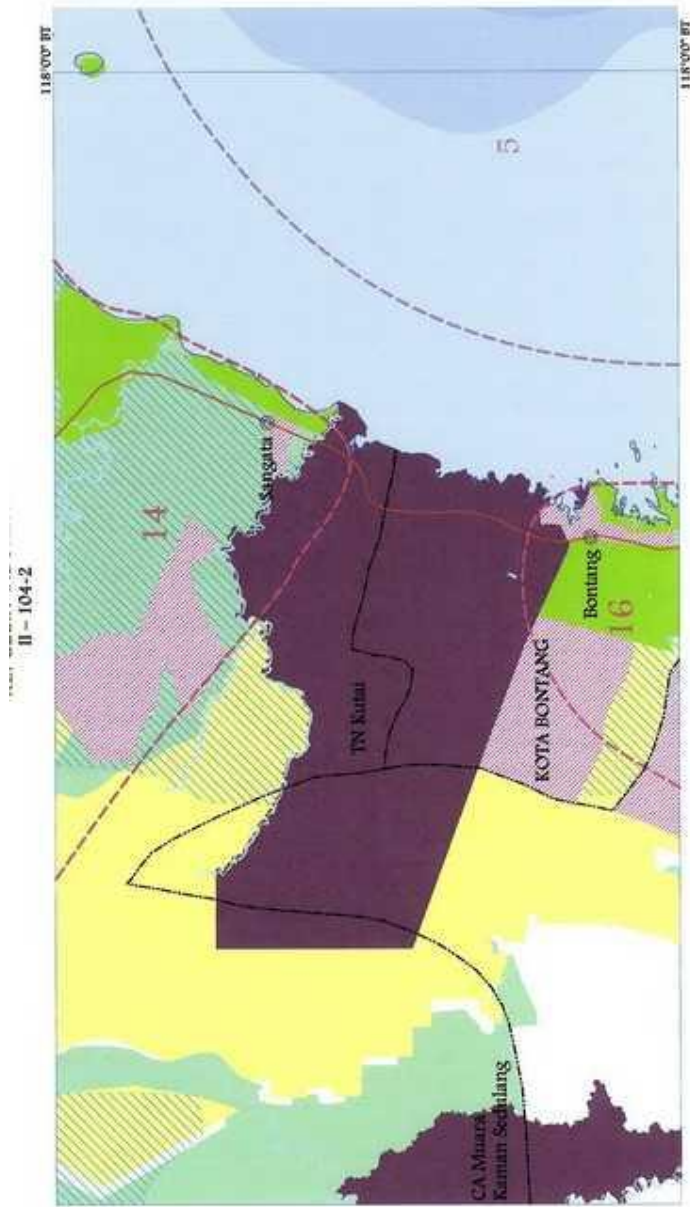


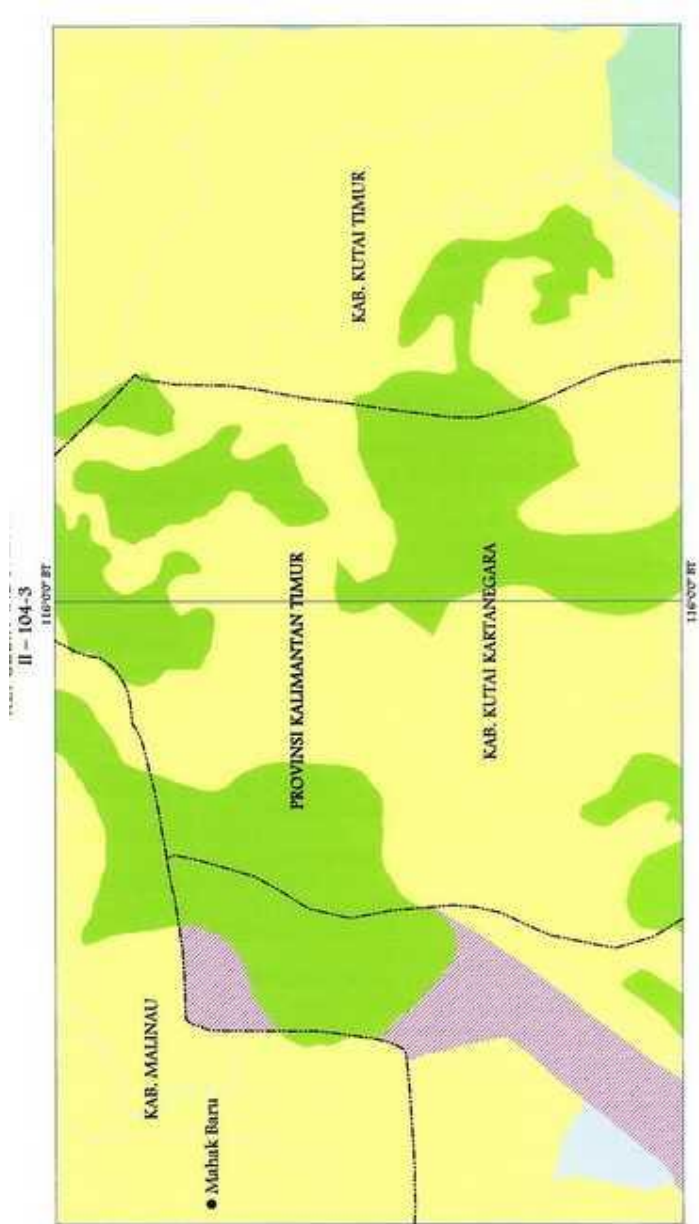


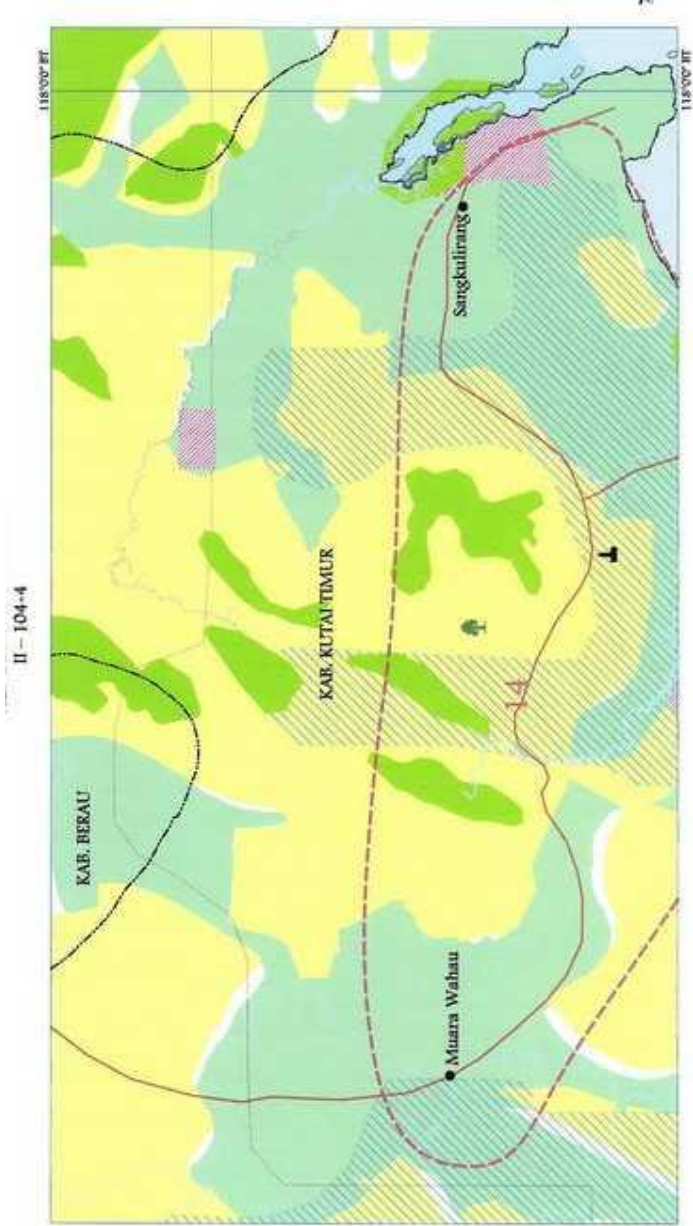


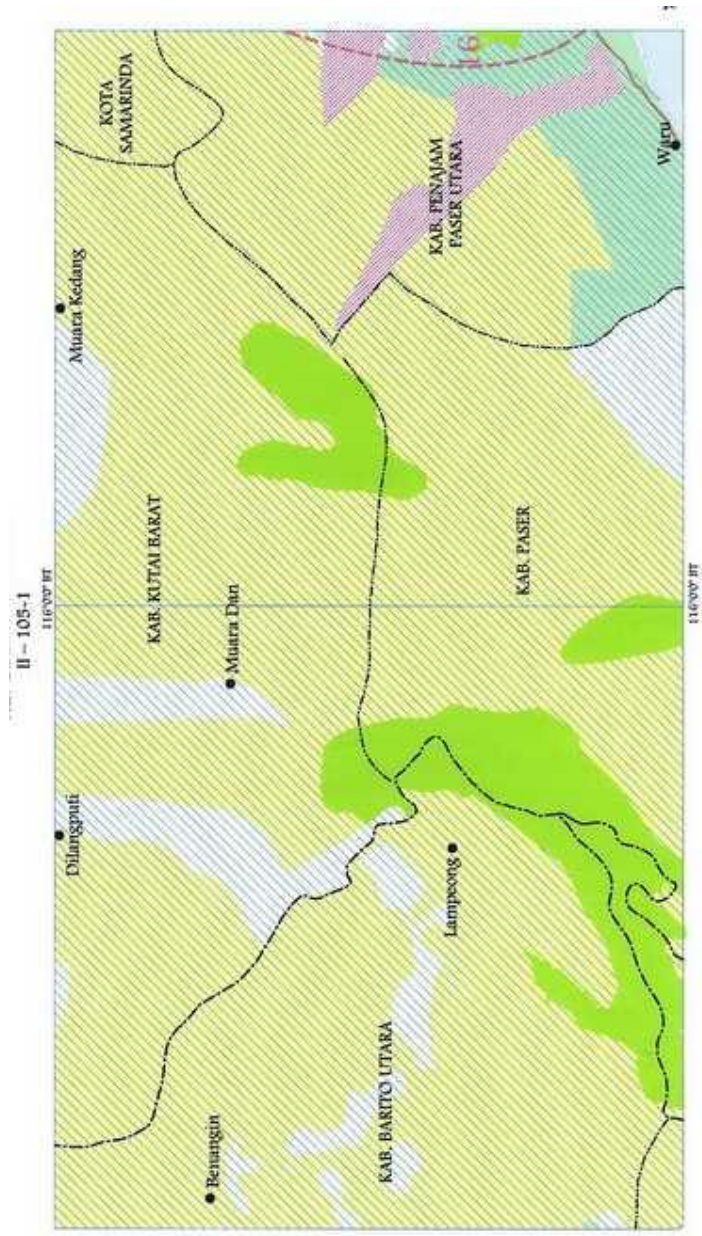


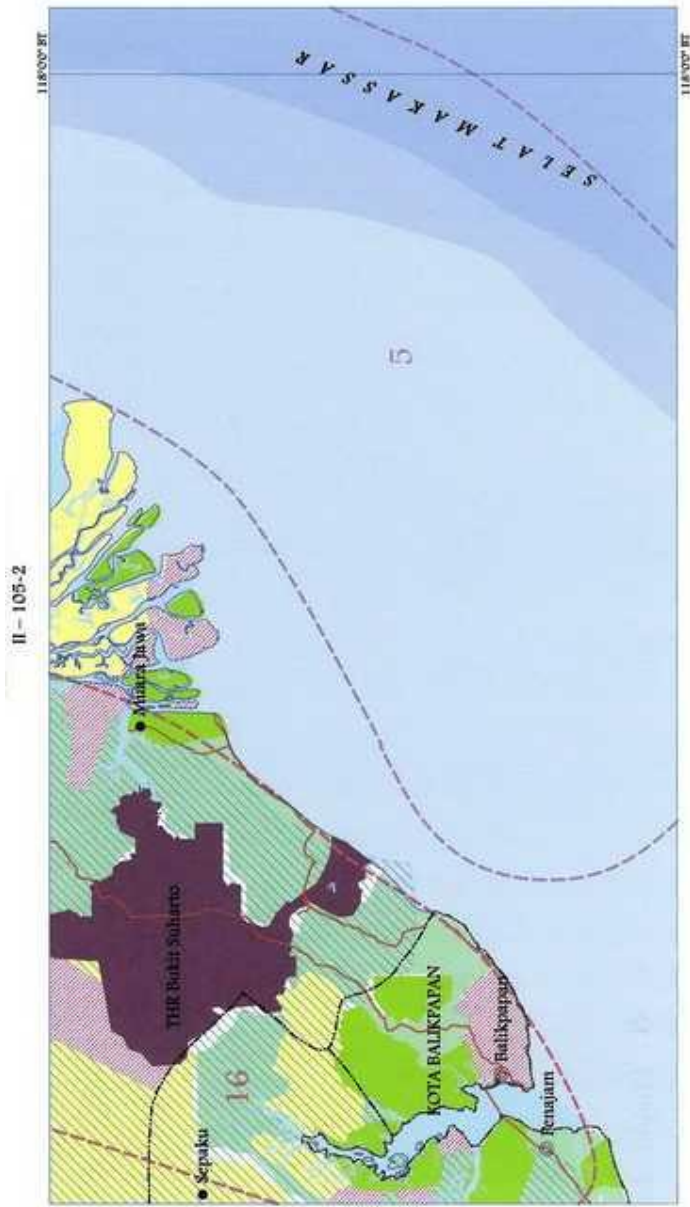


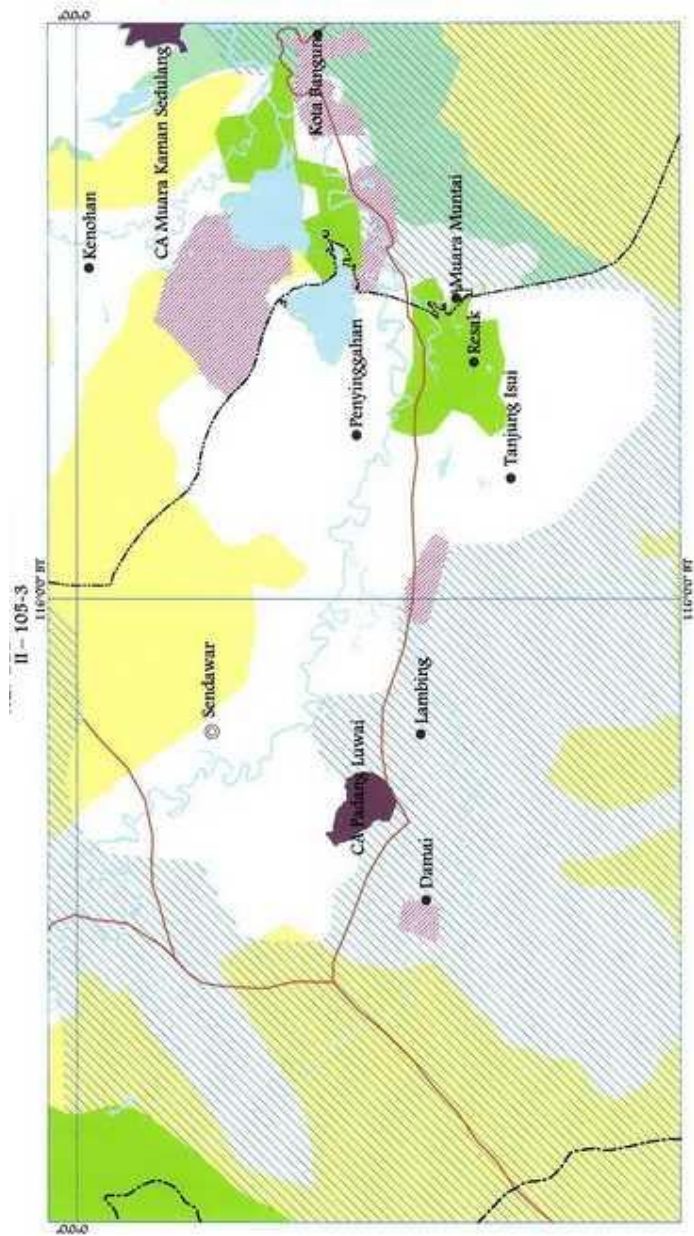


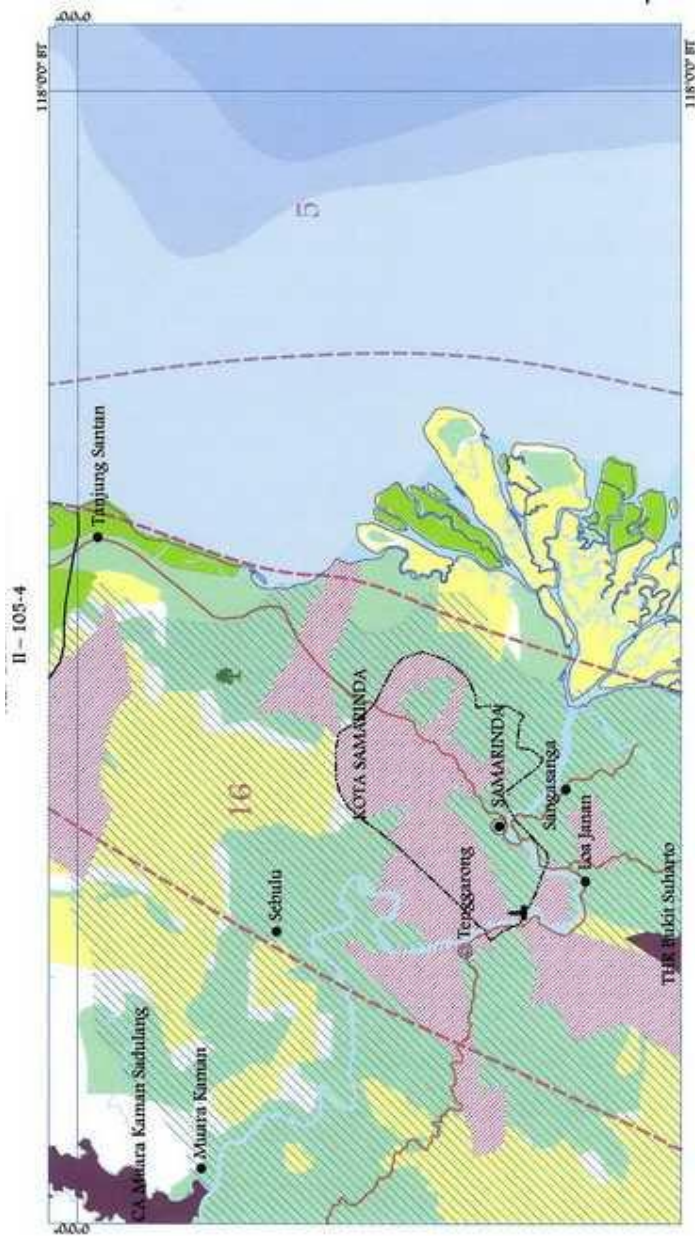


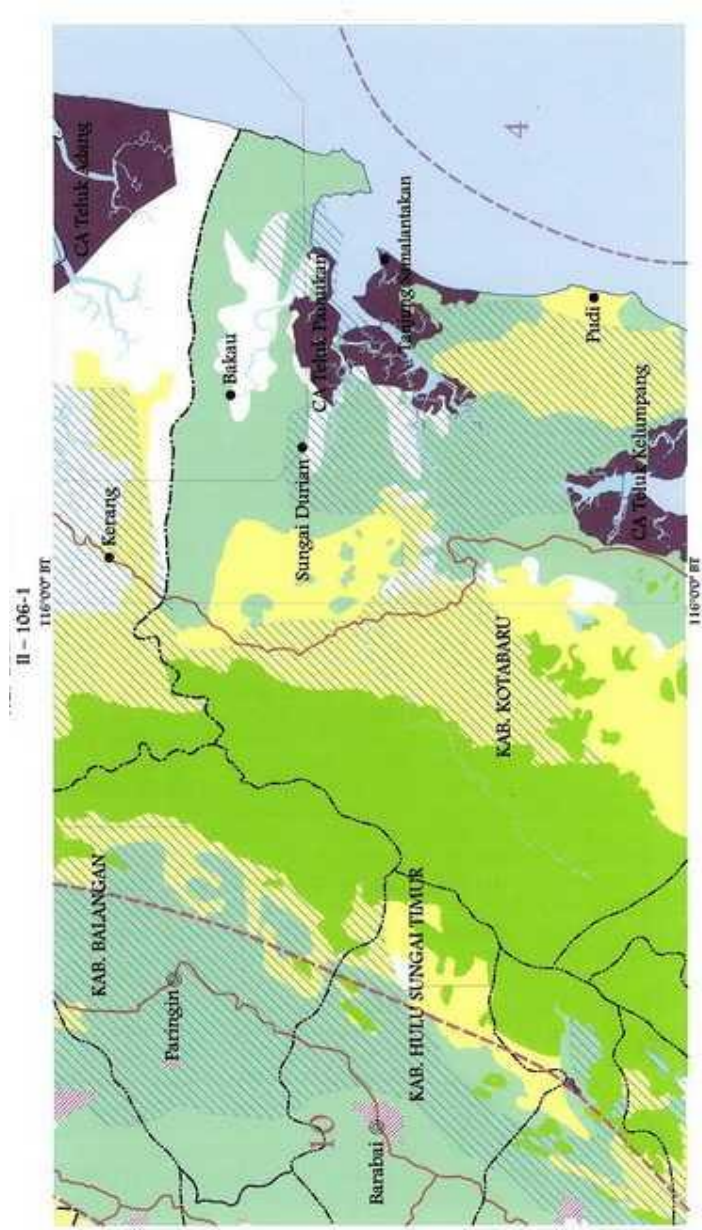


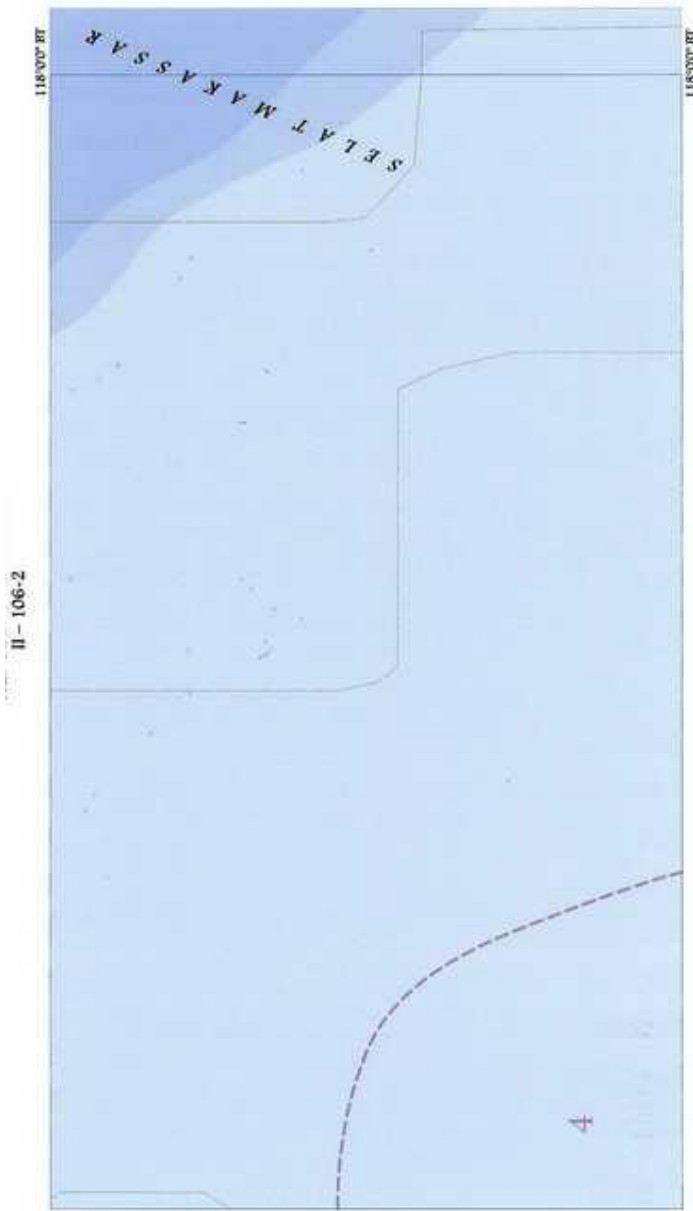


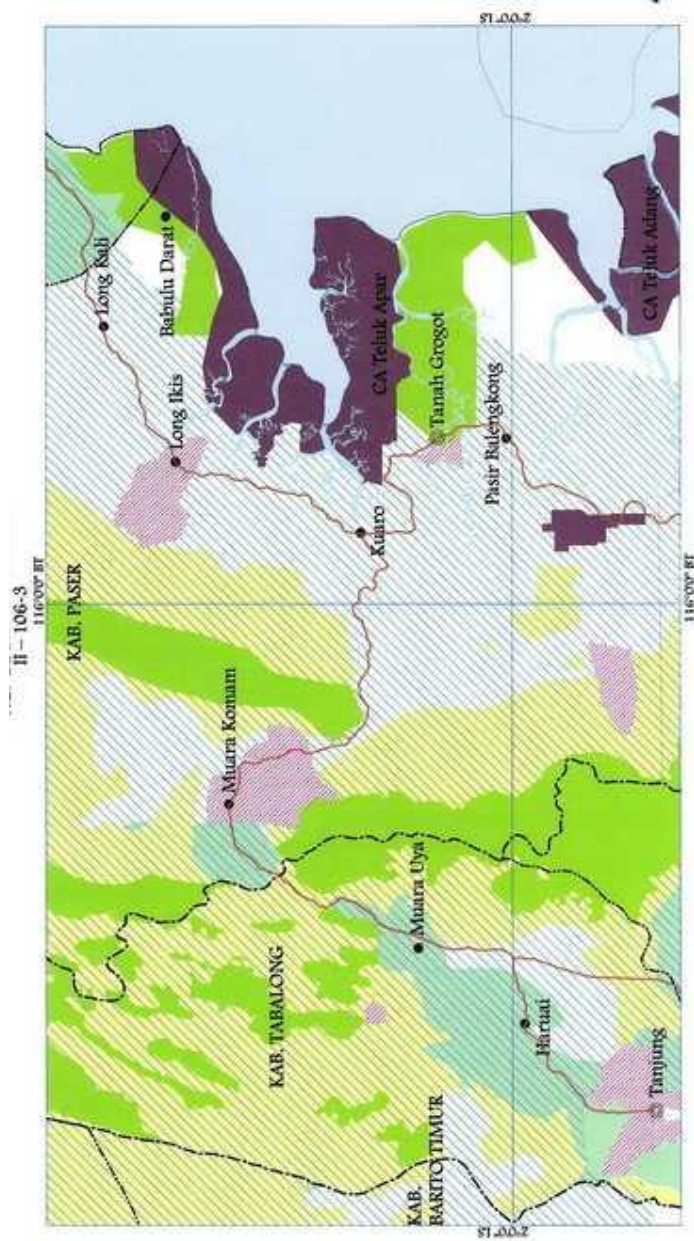




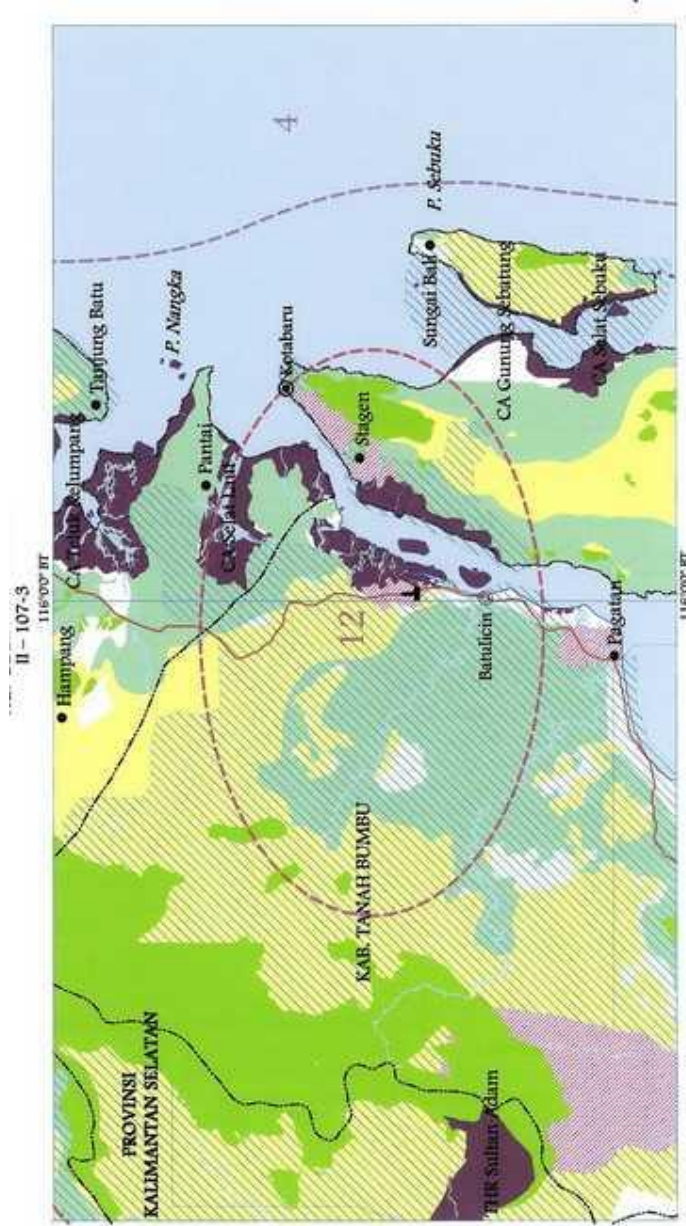


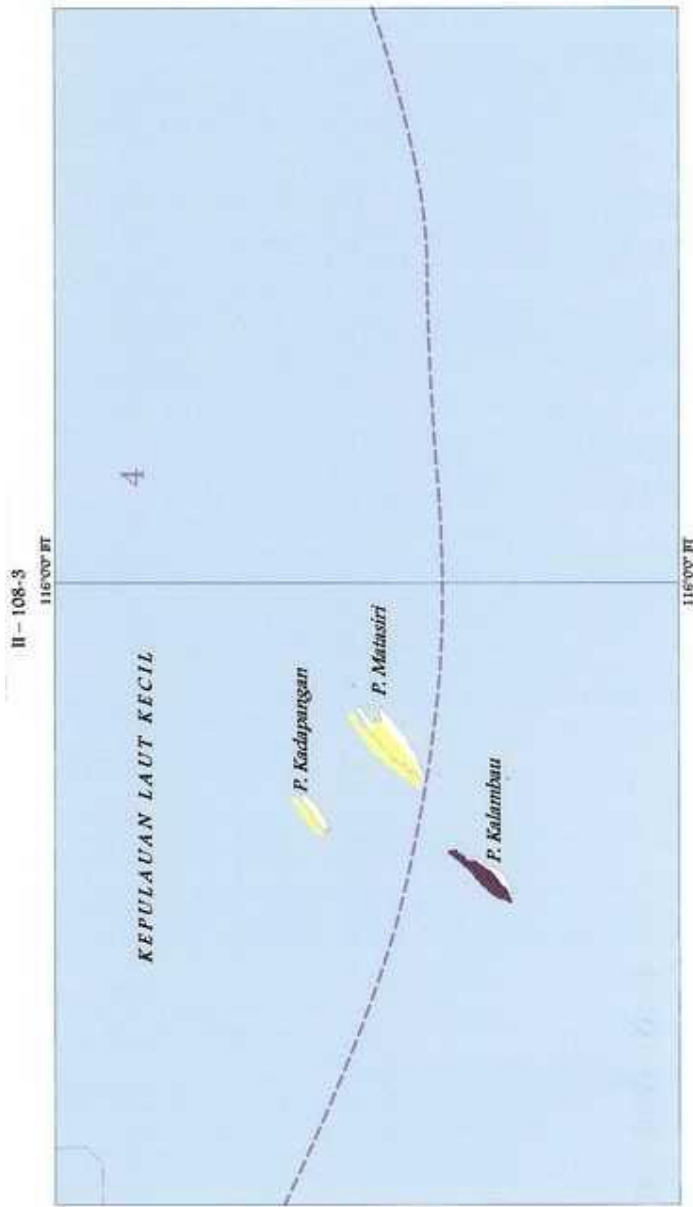


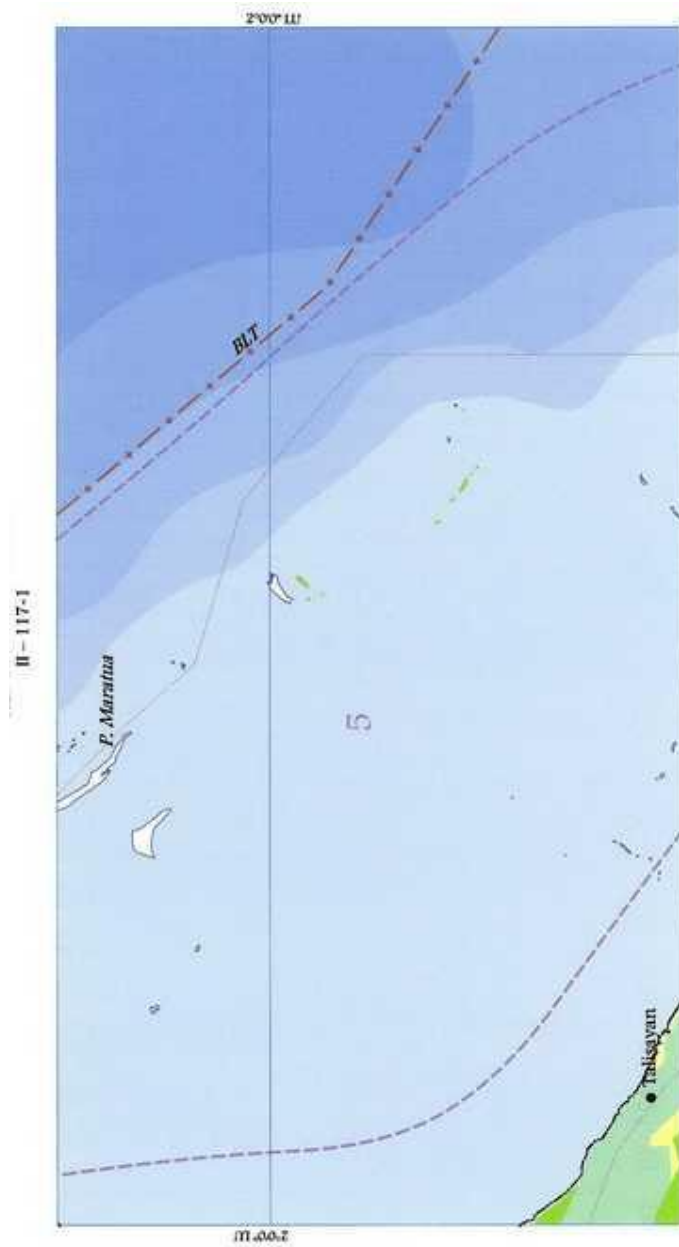


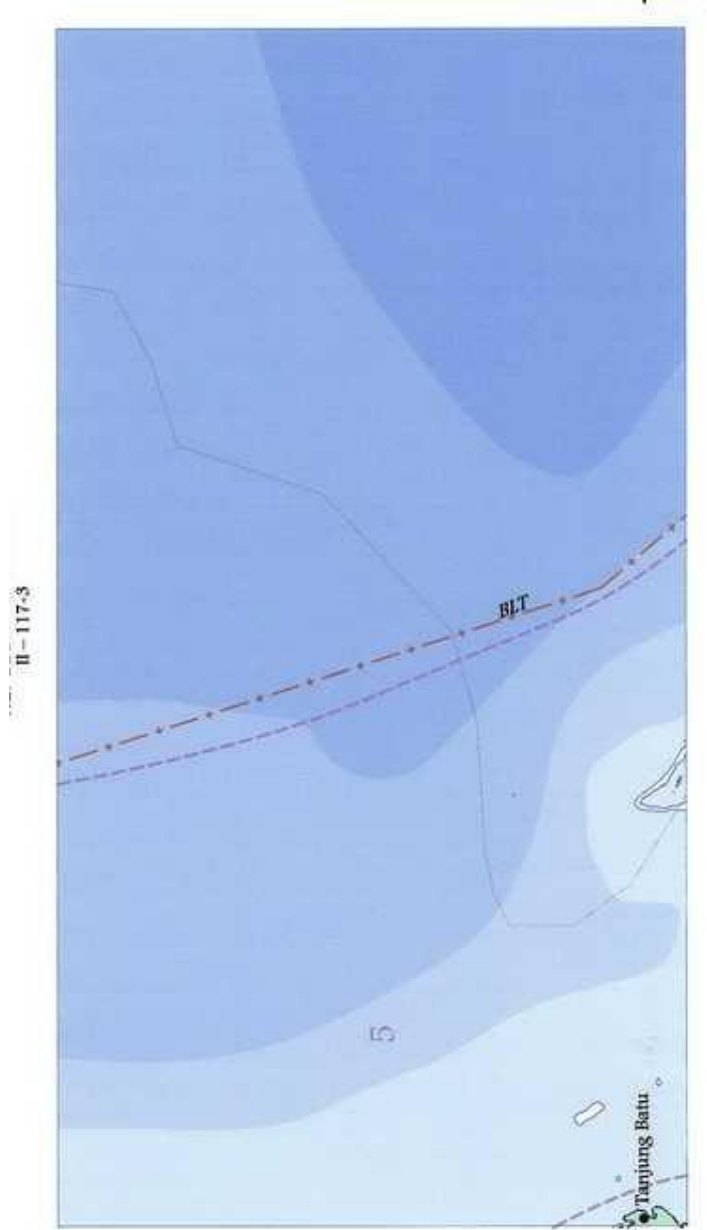


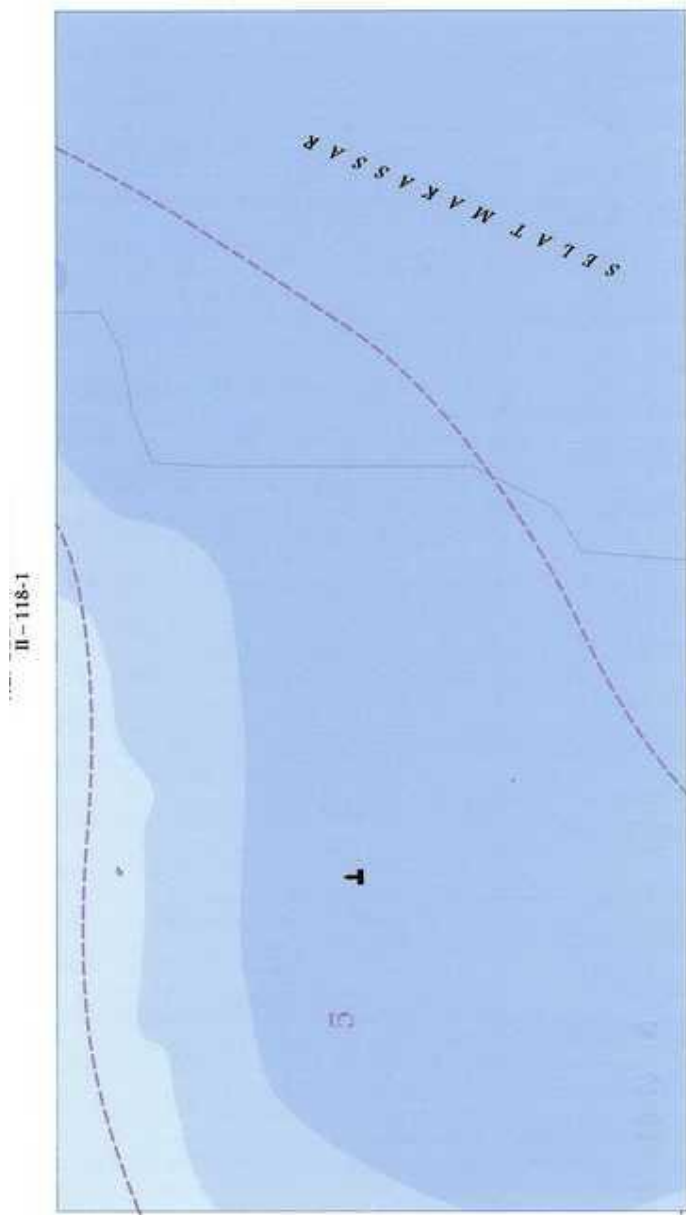


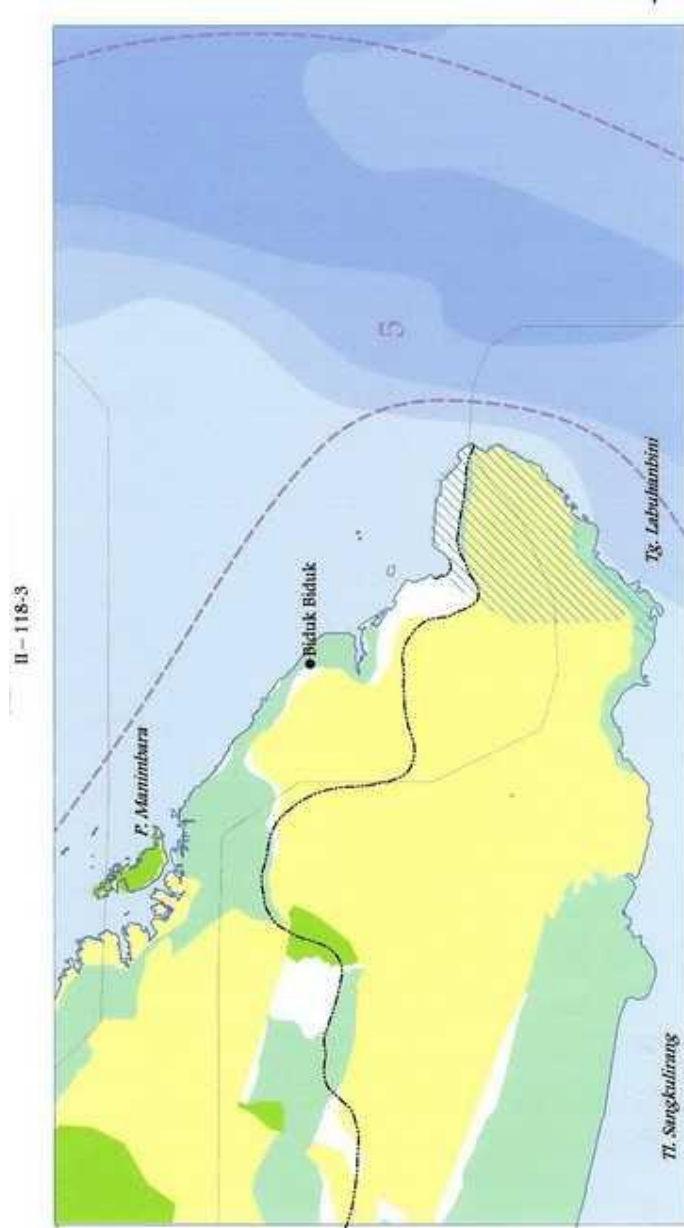














PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	IENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Kalimantan Barat	FUNGSI PELAYANAN	
I.1.	Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian - industri - perdagangan - pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi alat potensi PKN Pontianak sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi alat potensi PKN Pontianak sebagai simpul utama transportasi skala nasional alat melayani beberapa provinsi c. meningkatkan dan meningkatkan fungsi pusat kegiatan aksi dari pada PKN Pontianak yang berdekatan/menghadap badan air d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Pontianak sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa jasa pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Pontianak sebagai pusat industri pangan dan industri jasa jasa asal pertanian yang ramah lingkungan f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Pontianak sebagai pusat ekowisata dari wisata budaya g. meningkatkan perkembangan fisik PKN Pontianak untuk kelas: rumah jalan perantara perantara berkelanjutan dan kawasan bertungsi lindang h. menerapkan kelentutan pelarangan penatanaan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap bertumbuhnya PKN Pontianak i. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Pontianak sebagai pusat permukiman dengan tingkat interaktif permukiman ruang menengah dan tinggi j. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Kapuas pada PKN Pontianak yang berdekatan/menghadap badan air k. menetapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.2.	Mempayawah	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian - industri - perikanan - pariwisata 	<p>1. memantapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan KKN Pontianak dengan Bandar Udara Supadio dan Felabuar Pontianak</p> <p>2. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan KKN Pontianak, sentra produksi komoditas unggulan, Felabuar Pontianak, dan Bandar Udara Supadio</p> <p>3. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi</p> <p>4. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani KKN Pontianak</p> <p>5. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Sahuar, Udara Tegagar, Ekstra Tinggi (SETE) di KKN Pontianak yang dikembangkan dengan Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan</p> <p>6. mengembangkan jaringan transmisi di KKN Pontianak yang dikembangkan dengan Jaringan Pelayanan Pasa Pertumbuhan di Pantai Selat Kalimantan</p> <p>7. mendayagunakan sumber air pada WS Kapuas untuk melayani KKN Pontianak</p> <p>8. mengembangkan dan meningkatkan tingkat prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di KKN Pontianak yang meliputi Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>9. mengembangkan mangrove terbita Eijan (KTE) di KKN Pontianak</p> <p>10. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Mempayawah sebagai simpul kegiatan ekspor-impor yang mendukung KKN Pontianak</p> <p>11. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Mempayawah sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau kabupaten/kabupaten</p> <p>12. mengembangkan kegiatan ekonomi pada PKW Mempayawah yang berdekatan dengan bandar air</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengembangkan PKW Mempawah sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan PKW Mempawah sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan PKW Mempawah sebagai pusat wisata budaya</p> <p>g. menetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan gangguan terhadap pariwisata PKW Mempawah</p> <p>h. mengembangkan fungsi PKW Mempawah sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>i. mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Mempawah pada PKW Mempawah yang berdekatan/mengalir di badan air</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>k. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Mempawah dengan PKN Bentanak, Pelabuhan Pontianak, dan Bandar Udara Supadio</p> <p>l. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Mempawah dengan PKN Pontianak</p> <p>m. mengembangkan jaringan jalan kereta api untuk menghubungkan PKW Mempawah dengan PKN Pontianak, serta prasarana komersial, Pelabuhan Bentanak, dan Bandar Udara Supadio</p> <p>n. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKW Mempawah</p> <p>o. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SETET di PKW Mempawah yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.	Singkawang	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian - industri - perkuburan - perikanan 	<p>p. mengembangkan jaringan transmisi di PKW Mempawah yang dihubungkan dengan jaringan Pelayanan Fisat Pertumbuhan di Pulau Selat. Kalimantan</p> <p>q. mengembangkan sumber air berbasis WS untuk melayani PKW Mempawah</p> <p>r. mengembangkan dan meningkatkan tingkat prasarana dar. sarana perkotaan berskala regional di PKW Mempawah yang meliputi STAM, pengelolaan sampah, dan pengolahan air limbah.</p> <p>s. mengembangkan KIU di PKW Mempawah</p> <p>a. mengembangkan dan meningkatkan, fungsi atau petensi PKW Singkawang sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKM Pontianak</p> <p>b. mengembangkan dan meningkatkan, fungsi atau petensi PKW Singkawang sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi dan beberapa kabupaten.</p> <p>c. mengembangkan PKW Singkawang pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil kelapa sawit dan kayu yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan PKW Singkawang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan PKW Singkawang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>f. menciptakan kebutuhan pelayanan pemanfaatan ruang yang menyediakan anggaran terdapat bemurahnya. PKW Singkawang</p> <p>g. mengembangkan fungsi PKW Singkawang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>h. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalur lintas Selat. Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Singkawang dengan PKW</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.4.	Sambas	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan - Industri - Perkebunan - Perikanan 		<p>Pontianak, Palabuhan Pantianak, dan Bandar Udara di Supri dis-</p> <p>1. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Singkawang dengan PKN Pontianak</p> <p>2. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKW Singkawang dengan PKN Pontianak, sentra produksi komoditas unggulan, Pelabuhan Pontianak, dan Bandar Udara Supriko</p> <p>3. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKW Singkawang</p> <p>4. rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUPET di PKW Singkawang yang ditransmisikan dengan jaringan Transmisi Pantan Barat Kalimantan</p> <p>5. mengembangkan jaringan ferestrial di PKW Singkawang yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pusat Ferestrial di Pantan Selatan Kalimantan</p> <p>6. mengembangkan sumber air berbasis WTS untuk melayani PKW Mempawah</p> <p>7. mengembangkan dan meningkatkan ningsi prasarana darat, sarana perkotaan berskala regional di PKW Singkawang yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengolahan air limbah</p> <p>8. mengembangkan RTT di PKW Singkawang</p> <p>9. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Sambas sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Pontianak</p> <p>10. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Sambas sebagai simpul transportasi yang mendukung skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>11. mengembangkan kegiatan ekonomi pada PKW Sambas yang berdekatan/menghadap badan air</p> <p>12. mengembangkan PKW Sambas pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>e. mengembangkan PKW Sambi sebagai pusat industri pengolahan dari industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan PKW Sambi sebagai pusat industri pengolahan dari industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>g. menetapkan ketentuan peraturan peramataan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan PKW Sambi</p> <p>h. mengembangkan fungsi PKW Sambi sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemukiman ruang menengah</p> <p>i. mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Sambi pada PKW Sambi yang berdekatan/menghadap Badar air</p> <p>j. menetapkan ketentuan peraturan perataan kota yang adaptif terhadap ancaman banjir</p> <p>k. mengembangkan dan menugaskan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selat, Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Sambi dengan PKN Pontianak, Delatran Pontianak, dan Bandar Udara Supadio</p> <p>l. mengembangkan jaringan jalan kereta api untuk menghubungkan PKW Sambi dengan PKN Pontianak, sentra produksi komoditas argemone, Pakubuhan Pontianak, dan Bandar Udara Supadio</p> <p>m. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUKET di PKW Sambi yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan</p> <p>n. mengembangkan jaringan terrestrial di PKW Sambi yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayaran Pusat Pertumbuhan di Pantai Selat Kalimantan</p> <p>o. mengembangkan sumber air berbasis WS untuk melayani PKW Sambi</p> <p>p. mengembangkan dan meningkatkan tingkat prasarana dari sarana pelayanan berskala regional</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.5.	Ketapang	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian - industri - perkebunan - perikanan - kehutanan 	<p>di PKW Sambas yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengolahan air limbah.</p> <p>4. mengembangkan KIR di PKW Sambas</p> <p>5. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Ketapang sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang melibatkan PKN Pontianak</p> <p>6. mengembangkan tingkat atau potensi PKW Ketapang sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>7. mengembangkan kegiatan ekonomi pada PKW Ketapang yang berdekatan/menghadap bandar air</p> <p>8. mengembangkan PKW Ketapang sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>9. mengembangkan PKW Ketapang sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang banyak, saing dan ramah lingkungan.</p> <p>10. mengembangkan PKW Ketapang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>11. mengembangkan PKW Ketapang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>12. menciptakan ketahanan pangan pemanfaatan ruang yang menyefektifkan penggunaan lahan yang ada</p> <p>13. mengembangkan fungsi PKW Ketapang sebagai pusat perindustrian dengan tingkat industrialisasi pemanfaatan ruang menengah</p> <p>14. mengembangkan fungsi PKW Ketapang sebagai pusat perindustrian dengan tingkat industrialisasi pemanfaatan ruang menengah</p> <p>15. mengembangkan jaringan dan masa yang terintegrasi dengan Sungai Pawan pada PKW Ketapang yang berdekatan/menghadap badan air</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
16.	Putasibau	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian - kehutanan - perkotaan dan - pariwisata 	<p>k. memantapkan ketahanan, mengoptimalkan pemanfaatan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>l. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan. Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Dalam Kalimantan dan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Kutapang dengan PKN Pontianak</p> <p>m. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Kutapang dengan Pelabuhan Kutapang dan Baradar Udara Kahachi Usman</p> <p>n. mengembangkan jaringan terestrial di PKW Kutapang yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>o. mengayaukan sumber air pada WS Pawan untuk melayani PKW Kutapang</p> <p>p. mengembangkan dan meningkatkan investasi prasarana darat sarana perkelahan berskala regional di PKW Kutapang yang meliputi SPAM, perseleraan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>q. mengembangkan RTI di PKW Kutapang</p> <p>r. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Putussibau sebagai simpul kegiatan ekspor-impor yang mendukung TKN Pontianak</p> <p>s. meningkatkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Putussibau sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau bahkan ke luar negeri</p> <p>t. mengembangkan kegiatan ekonomi pada PKW Putussibau yang berkegiatan/menghadap badan air</p> <p>u. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Putussibau sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan mandiri</p> <p>v. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Putussibau sebagai pusat industri</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pengalihan hasil hutan yang baru, ya sinit dan rami. h lingkungan</p> <p>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Purussibau sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Purussibau sebagai pusat kegiatan ekowisata.</p> <p>h. menggodot likem perkembangan PKW Purussibau untuk kelastarian lahan pertanian penggar berkelanjutan dan kawasan berfungsi lindung</p> <p>i. menetapkan ketentuan perencanaan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap bermuhasinva PKW Purussibau</p> <p>j. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Purussibau sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>k. mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Kapuas pada PKW Purussibau yang berdekatan/menghadap bandar air</p> <p>l. menerapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>m. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan jaringan jalan perampunan Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Purussibau dengan PKN Pontianak</p> <p>n. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Purussibau dengan Bandar Udara Pangsuma</p> <p>o. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKW Purussibau dengan PKN Pontianak, sentra produksi komoditas unggulan dan Bandar Udara Pangsuma</p> <p>p. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUPT di PKW Purussibau yang ditanggungkar.</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.7.	Enklkong	PKW/ PKSN	<ul style="list-style-type: none"> • pelayanan pemerintahan lintas batas negara • pusat perdagangan jasa lintas batas negara - perhubungan dan komunikasi - pertanian - kesehatan - perkebunan 	<p>dengan jaringan transmisi tenaga listrik Kalimantan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan telestrada di PKW Mempawah yang dilambungkan dengan Jaringan Pelayanan Pasat Perumahan di Wilayah Uluu Kalimantan b. mendayagunakan sumber air pada WS Kapuas untuk melayani PKW Pituksiban c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana darat sarana perkebunan berskala regional di PKW Pituksiban yang meliputi SPAM, pemeclesaian sampah, dan pengolahan air limbah d. mengembangkan RTH di PKW Pituksiban e. mengembangkan dan meningkatkan Ingsi atau potensi PKW Enklkong sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendatar PKN Pontianak f. mengembangkan dan meningkatkan lingkungan atau potensi PKW/PKSN Enklkong sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan menghubungkan wilayah sekitarnya g. mengembangkan dan meningkatkan PKW/PKSN Enklkong sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramal h. meningkatkan PKW/PKSN Enklkong sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan i. mengembangkan PKW/PKSN Enklkong sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramal lingkungan j. meningkatkan ketahanan palamangan pemukiman ruang yang menyebabkan gangguan terhadap pertanian lainnya PKW/PKSN Enklkong

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
16.	Sungai	PKW - perikanan - ketahanan	<p>5. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW/PKSN Ertikong sebagai pusat permataman dengan fungsi intensitas pemanfaatan ruang mencakup</p> <p>h. mengembangkan kegiatan pertanian dan keamanan negara, permataman ekonomi, serta simulasi sosial di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia</p> <p>i. meningkatkan fungsi PKW/PKSN Ertikong sebagai pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan.</p> <p>j. mengembangkan pusat promosi investasi dan pariwisata</p> <p>k. memantapkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat</p> <p>l. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan arteri primer serta jaringan arteri strategis nasional yang terhubung dengan PKW/PKSN Ertikong</p> <p>m. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUTET di PKW/PKSN Ertikong yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan</p> <p>n. mengembangkan dan meningkatkan fungsi layanan terminal di PKW/PKSN Ertikong yang dikembangkan dengan Jaringan Pelayanan Pusat Permataman di Wilayah Utara Kalimantan</p> <p>o. merencanakan sumber air pada WS Kapuas untuk melayani PKW/PKSN Ertikong</p> <p>p. mengembangkan kawasan permataman permataman di PKW/PKSN Ertikong dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai</p> <p>q. mengembangkan ERT di PKW/PKSN Ertikong</p> <p>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi area perbatasan PKW Sanggau sebagai simpul kearah kegiatan ekspor-impor yang mendukung EKN Pontianak</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN - perkotaan - perikatan	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Sanggau sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.</p> <p>c. mengembangkan kegiatan ekonomi pada PKW Sanggau yang berdekatan/menghadap badan air</p> <p>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sanggau sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berkembang di rumah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sanggau sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sanggau sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sanggau sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap bermukanya PKW Sanggau</p> <p>i. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sanggau sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>j. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Kapuas pada PKW Sanggau yang berdekatan/menghadap badan air</p> <p>k. menetapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adapun terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>l. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, dan Jaringan Jalan Pergumpan Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Sanggau dengan PKN Perbarak, Pelabuhan Pantianak, dan Bandar Udara Sempadu</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.9.	Sintang	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian - kehutanan - perkebunan - perikanan 	<p>m. mengembangkan jaringan jalan raya untuk meningkatkan PKW Sintang dan meningkatkan PKW Pontianak, serta produksi komoditas unggulan, Pabrikas Fertiliser, dan Bandar Udara Supadio</p> <p>n. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUTET di PKW Sintang yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Tantai Karat Kalimantan</p> <p>o. mengembangkan jaringan terminal di PKW Sintang yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Utara Kalimantan</p> <p>p. menyediakan sumber air pada WS Kapras untuk melayani PKW Sintang</p> <p>q. mengembangkan dan meningkatkan tingkat prasarana darat sarana perkeriaan berskala regional di PKW Sintang yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengolahan air limbah</p> <p>r. mengembangkan KIL di PKW Sintang</p> <p>a. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Sintang sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mencakup PKN Pontianak</p> <p>b. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Sintang sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkan kegiatan ekonomi pada PKW Sintang yang berdekatan/menghadapi bandar air</p> <p>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sintang sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sintang sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sintang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>g. meningkatkan dan meningkatkan fungsi PKW Sintang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa basal pertekstil yang ramah lingkungan;</p> <p>h. menerapkan ketentuan perencanaan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap bermuhsinnya PKW Sintang;</p> <p>i. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sintang sebagai pusat permacultur, dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah;</p> <p>j. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada PKW Sintang yang berdekatan/mendekatinya;</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir;</p> <p>l. meningkatkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Sintang dengan PKN Pontianak dan Bandar Udara Suailo;</p> <p>m. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Sintang dengan Bandar Udara Suailo;</p> <p>n. mengembangkan jaringan jalan kereta api untuk menghubungkan PKW Sintang dengan PKN Pontianak, serta produksi komoditas unggas, dan Bandar Udara Sisule;</p> <p>o. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUPET di PKW Sintang yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Tanah Barat Kalimantan;</p> <p>p. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial di PKW Sintang yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Dasar Perumahan di Wilayah Utara Kalimantan;</p> <p>q. mengembangkan sumber air pada WS Kapras untuk melayani PKW Sintang;</p> <p>r. mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan berskala regional</p>

NO.	KAWASAN FERROVIAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.10.	Paloh-Aruk	PKSN	<ul style="list-style-type: none"> - pelayanan pemerkasaan lintas batas negara - pusat perdagangan - jasa lintas batas negara - perabahan dan kearifan 	<p>di PKW Sintang yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengolahan air limbah menggunakan KHL di PKW Sintang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan fungsi atau potensi PKSN Paloh-Aruk sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya b. mengembangkan kegiatan perikanan dan kepariwisataan negara, perhubungan ekonomic, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia c. mengembangkan PKSN Paloh-Aruk sebagai pusat gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan kepariwisataan d. mengembangkan pusat promosi investasi dan pemasaran e. memantapkan ruang gerak kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat f. memantapkan kerja sama perikanan paman lautan yang menyebarkan keberagumannya fungsi PKSN Paloh-Aruk g. mengembangkan fungsi PKSN Paloh-Aruk sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemukiman yang rendah dan menengah h. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terhubung dengan PKSN Paloh-Aruk i. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di PKSN Paloh-Aruk yang dihubungkan dengan jaringan transmisi Fed. dan Kalimantan j. mengembangkan jaringan terestrial di PKSN Paloh-Aruk yang dihubungkan dengan jaringan Telekomunikasi di Wilayah Utara Kalimantan k. memantapkan kawasan air berbasis WIS anak sungai di PKSN Paloh-Aruk l. mengembangkan kawasan permukiman permukiman di PKSN Paloh-Aruk dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.1.1.	Jagoibabang	PKSN	<ul style="list-style-type: none"> - pelayanan pemeriksaan lintas batas negara - pusat perdagangan-lintas lintas batas - peralihan dan keamanan. 	<p>m. meningkatkan nilai RPH di PKSN Paloh-Aruk</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan fungsi atau potensi PKSN Jagoibabang sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya b. mengembangkan kegiatan pertanian dan keamatar. negara, perubahan ekonomi, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia c. mengembangkan PKSN Jagoibabang sebagai pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepariwisataan, migrasi, karantina, dan keamanan d. mengembangkan pusat promosi investasi dan pemasaran e. memanfaatkan ruang arsitek keajar. kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan mempertalika. kondisi fisik lingkungan dar. sosial budya masyarakat. f. menarapkan kebijakan pemanfaatan ruang yang meyalahkan tanggungjawab fungsi PKSN Jagoibabang g. mengembangkan fungsi PKSN Jagoibabang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah h. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terhubung dengan PKSN Jagoibabang i. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di PKSN Jagoibabang yang dihubungkan dengan jaringan transmisi Fed. dan Kalimantan j. mengembangkan jaringan terestrial di PKSN Jagoibabang yang dihubungkan dengan jaringan Telekomunikasi dan Telekomunikasi di Wilayah Utara Kalimantan k. meningkatkan kawasan air burfusia WS anak melayai PKSN Jagoibabang l. meningkatkan kawasan permukiman di PKSN Jagoibabang dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.12.	Nanga Badau	TKSN	<ul style="list-style-type: none"> - pelayanan pemertiksaan lintas batas negara - pusat perdagangan-lintas lintas batas - perahanan dan keamanan. 	<p>m. mengembangkan fungsi atau potensi TKSN NangaBadau sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan kegiatan perikanan dan keamatar. negara, perumbuhan ekonomi, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia</p> <p>c. mengembangkan TKSN Nanga Badau sebagai pintu gerbang internasional dengan fasilitas keparawisataan, migrasi, karantina, dan keamanan</p> <p>d. mengembangkan pusat promosi kewisata, investasi, dan pemasaran</p> <p>e. memantapkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.</p> <p>f. memantapkan kegiatan perikanan perikanan laut yang mengembangkan fungsinya untuk TKSN Nanga Badau</p> <p>g. mengembangkan fungsi TKSN Nanga Badau sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah</p> <p>h. mengembangkan jaringan jalan, strategis nasional yang terhubung dengan TKSN Nanga Badau</p> <p>i. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di TKSN Nanga Badau yang dihubungkan dengan jaringan Transmisi Kalimantan Kalimantan</p> <p>j. mengembangkan jaringan terrestrial di TKSN Nanga Badau yang dihubungkan dengan Jaringan Belayuan Pusat Perumahan di Wilayah Utara Kalimantan</p> <p>k. mencari sumber air pada WS Kapuas untuk melayani TKSN Nanga Badau</p> <p>l. mengembangkan kawasan permukiman di TKSN Nanga Badau dengan dukungan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.1.3.	Jasa	PKSN	<ul style="list-style-type: none"> - pelayanan pernikahan lintas batas negara - pusat perdagangan jasa lintas batas perbatasan darat - keamanan 	<p>prasarana dan sarana yang memadai</p> <p>m. mengintegrasikan RTH di PKSN Kanga Badak</p> <p>a. mengembangkan fungsi alat polisi PKSN Jasa sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya</p> <p>b. mengurangi risiko kegiatan perbatasan darat keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia</p> <p>c. meningkatkan PKSN Jasa sebagai pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan</p> <p>d. mengembangkan pusat promosi investasi dan perusahaan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat</p> <p>f. menerapkan ketertarikan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKSN Jasa</p> <p>g. mengembangkan fungsi PKSN Jasa sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah</p> <p>h. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terhubung dengan PKSN Jasa</p> <p>i. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di PKSN Jasa yang di hubungkan dengan Jaringan Transmisi Pedalaman Kalimantan</p> <p>j. mengembangkan jaringan terestrial di PKSN Jasa yang dihubungkan dengan jaringan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Cara Kalimantan</p> <p>k. merdayagurakan sumber air pada WSS Kapuas untuk melayani PKN Jasa</p> <p>l. mengembangkan kawasan pertambangan perbukitan di PKN Jasa dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai</p> <p>m. mengembangkan RTI di PKN Jasa</p>
<p>II.</p> <p>II.1.</p>	<p>Kalimantan Tengah.</p> <p>Talangkaraya</p> <p>PKN</p> <ul style="list-style-type: none"> - pertanian - perkebunan - kehutanan - perikanan - pariwisata 		<p>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Talangkaraya sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pusat gerbang menuju kawasan industri lokal</p> <p>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Talangkaraya sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi</p> <p>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi pusat kegiatan ekonomi pada PKN Talangkaraya yang berkembang/menghadapi badan air</p> <p>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Talangkaraya sebagai pusat industri hilir pengolahan dari industri jasa hasil kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dari rumah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Talangkaraya sebagai pusat industri hilir pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan rumah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Talangkaraya sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang rumah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Talangkaraya sebagai pusat industri pengolahan dari industri jasa hasil perikanan yang rumah lingkungan</p> <p>h. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Talangkaraya sebagai pusat pengembangan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>ekswisata dan wisata budidaya</p> <p>i. menandatangani perkebunangan fisik PKN Palangkaraya untuk kestabilan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan bernuansi lindung</p> <p>j. memetakan kebutuhan pelayanan pemukiman ruang yang menyelesaikan gangguan terhidrologis bertanah: PKN Palangkaraya</p> <p>k. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</p> <p>l. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan dan insa: pada PKN Palangkaraya yang terintegrasi dengan Sungai Kahayan</p> <p>m. menerapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>n. memantapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Palangkaraya dengan Bandar Udara Tjilik Kiwut</p> <p>o. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Palangkaraya, antara provinsi Kalimantan Tengah dan Bandar Udara Tjilik Kiwut</p> <p>p. mengembangkan jaringan transportasi perhubungan untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi</p> <p>q. merelabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di PKN Palangkaraya yang dihubungkan dengan jaringan Transmisi Partai Timor Kalimantan</p> <p>r. mengembangkan jaringan terrestrial di PKN Palangkaraya yang dihubungkan dengan Jaringan Telekomunikasi Pertumbuhan di Partai Selatan Kalimantan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Kuala Kapuas	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan - Perkuburan - Kesehatan - Perikanan 	<p>s. mengoptimalkan sumber air pada WS Kabayan untuk melayani FKN Palangkaraya.</p> <p>t. mengembankan dan meningkatkan fungsi pasarana dan sarana perkotaan berskala regional di FKN Palangkaraya yang meliputi SPAM, pengalihan sampah, dan pengolah air limbah</p> <p>z. mengembangkan KTH di FKN Palangkaraya</p> <p>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi area potensi PKW Kuala Kapuas sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi dan beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kegiatan ekonomi pada PKW Kuala Kapuas yang berdekatan/menghadap badan air</p> <p>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Kuala Kapuas sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Kuala Kapuas sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Kuala Kapuas sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Kuala Kapuas sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang menyebabkan syngguan terhadap berfungsinya PKW Kuala Kapuas</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>i. meningkatkan dan meningkatkan fungsi PKW Kuala Kapuas sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>l. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan drainage yang terintegrasi dengan Sungai Kapuas dan Sungai Kahayang pada PKW Kuala Kapuas yang berdampak/mengakadap pada air</p> <p>k. menerapkan ketentuan peraturan kota yang adaptif terhadap lingkungan perumahan banjir</p> <p>l. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan lintas Selatan Utara Kalimantan yang menghubungkan PKW Kuala Kapuas dengan PKW Palangkaraya, PKN Banjarmasin, Pelabuhan Banjarmasin, Bandar Udara Ujung Kiyat dan Bandar Udara Syamsudin Noor</p> <p>m. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Kuala Kapuas dengan PKN Banjarmasin</p> <p>n. mengembangkan jaringan jalan kereta api untuk menghubungkan PKW Kuala Kapuas dengan PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, sentra produksi komoditas unggulan, Pelabuhan Banjarmasin, Bandar Udara Ujung Kiyat dan Bandar Udara Syamsudin Noor</p> <p>o. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUTTI di PKW Kuala Kapuas yang dihubungkan dengan jaringan transmisi Palangkaraya Kalimantan</p> <p>p. mengembangkan jaringan perantara di PKW Kuala Kapuas yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Dasar Perumahan di Panti Selatan Kalimantan</p> <p>q. menyediakan sumber air pada WS Parit-Kapuas untuk melayani PKW Kuala Kapuas</p> <p>r. mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Kuala Kapuas yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengalihan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Pangkajenene	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian - kehutanan - perikanan - industri - pariwisata 	<p>1. meningkatkan KTT di PKW Kuala Kapuas</p> <p>2. meningkatkan fungsi atau potensi PKW Pangkajenene sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKW Pangkajene</p> <p>3. meningkatkan fungsi atau potensi PKW Pangkajene sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>4. meningkatkan dan meningkatkan fungsi ekonomi pada PKW Pangkajene yang berkaitan/menghadapi badan air</p> <p>5. meningkatkan fungsi PKW Pangkajene sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berkarya aktif dan ramai lingkungan</p> <p>6. meningkatkan fungsi PKW Pangkajene sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramai lingkungan</p> <p>7. meningkatkan fungsi PKW Pangkajene sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramai lingkungan</p> <p>8. meningkatkan fungsi PKW Pangkajene sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berkarya aktif dan ramai lingkungan</p> <p>9. meningkatkan dan meningkatkan fungsi PKW Pangkajene sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya</p> <p>10. menerapkan ketentuan peraturan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap lingkungan PKW Pangkajene</p> <p>11. meningkatkan dan meningkatkan fungsi PKW Pangkajene sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II-4.	Bantak	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian - kesehatan - kePalanar. - pariwisata. 	<p>k. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan listrik yang terintegrasi dengan Sungai Lamandau pada PKW Pangkalan Baru yang berdekatan/menghadap Badan air</p> <p>l. menerapkan kebijakan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>m. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Palari Kalimantan yang menghubungkan PKW Pangkalan Baru dengan PKN Palangkaraya, Pelabuhan Kumai, dan Bandar Udara Iskandar</p> <p>n. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SCPT di PKW Pangkalan Baru yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Palari Timur Kalimantan</p> <p>o. mengembangkan jaringan terrestrial di PKW Pangkalan Baru yang dihubungkan dengan Jaringan Ponsel Pertambahan di Pantai Selatan Kalimantan.</p> <p>p. mendayagunakan sumber air pada WS Jelat-Kendawangan untuk melayani PKW Pangkalan Baru</p> <p>q. mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Pangkalan Baru yang meliputi STAM, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>r. mengembangkan KTH di PKW Pangkalan Baru.</p> <p>s. mengembangkan dan meningkatkan fungsi Bantak sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Palangkaraya</p> <p>t. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Bantak sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>u. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kegiatan ekonomi pada PKW Bantak yang berdekatan/menghadap badan air</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>d. mengembangkan PKW Bantok sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;</p> <p>e. mengembangkan PKW Bantok sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan dan meningkatkan peran PKW Bantok sebagai pusat industri pengolahan hasil huter yang berwawasan lingkungan</p> <p>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Bantok sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya</p> <p>h. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan gangguan terhadap berkembangnya PKW Bantok</p> <p>i. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Bantok sebagai pusat pemerintahan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>j. mengembangkan dan meningkatkan fungsi layanan dasarase yang terintegrasi dengan Xangai Barat pada PKW Bantok yang berdekatan/menghadapi badan air</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>l. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan penghubung Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Bantok dengan PKN Palangkaraya dan Bandar Udara Tjilik Kiren;</p> <p>m. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKW Bantok dengan PKN Palangkaraya, serta produksi komoditas unggulan, dan Bandar Udara Tjilik Kiren</p> <p>n. meningkatkan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT di PKW Bantok yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan</p> <p>o. mengembangkan jaringan internal di PKW Bantok yang dihubungkan dengan jaringan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.5.	Muara Teweh	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pertambangan - pertanian - pertambangan - kelautan 	<p>Pel. yanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>p. menyediakan sumber air pada WS Barito-Kapuas untuk melayani PKW Baritak mengembangkar. dar. meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Baritak yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dar. pengolahan air limbah</p> <p>r. mengembangkar KILI di PKW Buntok</p> <p>a. mengembangkar dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Muara Teweh sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Palangkaraya.</p> <p>b. mengembangkar dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Muara Teweh sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkar dan meningkatkan fungsi kegiatan ekonomi pada PKW Muara Teweh yang berdampak/menghadapi dalam air</p> <p>d. mengembangkar PKW Muara Teweh sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dar. ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkar PKW Muara Teweh sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkar dan meningkatkan fungsi PKW Muara Teweh sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkar dan meningkatkan fungsi PKW Muara Teweh sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan mineral dan batubara yang dilindungi oleh pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>h. menarapkan ketentuan peraturan perundangan ruang yang menyebabkan gangguan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>tehdapat barungsinya PKW Muara Teweh</p> <p>meningkatkan dan meningkatkan fungsi PKW Muara Teweh sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>meningkatkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Bantio pada PKW Muara Teweh yang berdekatan/menghadap badan air</p> <p>meningkatkan kualitas pemukiman kota yang adaptif terhadap ancaman banjir</p> <p>meningkatkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpul Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Muara Teweh dengan PKN Palangkaraya dan Bandar Udara Tjilik Riwut</p> <p>m. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKW Muara Teweh dengan PKN Palangkaraya, serta produksi komoditas unggulan, dar. Bandar Udara Tjilik Riwut</p> <p>n. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SLPT di PKW Muara Teweh yang dihubungkan dengan jaringan Transmisi Listrik Timur Kalimantan</p> <p>o. mengembangkan jaringan listrik di PKW Muara Teweh yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>p. mendayagunakan sumber air pada WTS Parijo-Kapas untuk melayani PKW Muara Teweh</p> <p>q. meningkatkan luas prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Muara Teweh yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>r. mengembangkan KTH di PKW Muara Teweh</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
H.6.	Sampit	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pertanian - ke-Eklatuar - perkotaan - perikanan - industri - pariwisata 	<p>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan potensi PKW Sampit sebagai simpul ketiga kegiatan ekspor-impor yang mendukung TKP Palangkaraya</p> <p>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Sampit sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi ekonomi pada PKW Sampit yang berdampak/menghadapi badan air</p> <p>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sampit sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdampak saling dan ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sampit sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sampit sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sampit sebagai pusat industri pengolahan hasil hulu yang berdampak saling dan ramah lingkungan</p> <p>h. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sampit sebagai pusat pengembangan pariwisata dan wisata budaya</p> <p>i. menciptakan ketahanan dan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Sampit</p> <p>j. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sampit sebagai pusat permukiman dengan lingkar konsultasi pemukiman ruang yang memadai</p> <p>k. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jalan-jalan dan fasilitas yang integrasi dengan Sungai Sampit pada PKW Sampit yang berdekatan/menghadapi badan air</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>l. menurapkan ketentuan penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>m. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan-Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Sampit dengan PKN Palangkaraya, PKW Pangkajene-Beun, Pelabuhan Kumai, Bandar Udara Tjilik Riwar, dan Bandar Udara Iskandar</p> <p>n. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUPT di PKW Sampit yang dirubuhkan dengan Jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan.</p> <p>o. mengembangkan jaringan transmisi di PKW Sampit yang dirubuhkan dengan jaringan Pelayanan Busa Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>p. menyediakan akan sumber air berbasis WSS untuk melayani PKW Sampit</p> <p>q. mengembangkan dan meningkatkan fungsi pasar, dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Sampit yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>r. mengembangkan RTU di PKW Sampit</p>
III.	Kalimantan Selatan		
III.1.	Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - perkembangan - pertanian - perikanan - pariwisata - industri 	<p>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Banjarmasin sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pusat kegiatan utama kawasan internasional</p> <p>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Banjarmasin sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi</p> <p>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kegiatan ekonomi pada FSN Banjarmasin yang berdekatan/menghadap badan air</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. meningkatkan dan meningkatkan fungsi PKN Banjarmasin sebagai pusat industri pengolahan karbit kelapa sawit dan karet yang berkarya sang dan ternal: lingkungan</p> <p>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Banjarmasin sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramali lingkungan</p> <p>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Banjarmasin sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan</p> <p>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Banjarmasin sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya</p> <p>h. mengembangkan perkembangan: usik PKN Banjarmasin: untuk kestabilan lahan pertanian: pasar: bertelajaran dan kawasan: bertansi: lindung</p> <p>i. memperbaiki kebutuhan pelayanan: pamaitan: ruang yang menyebarkan: gunggar: terhadap bertur: sinya: PKN Banjarmasin</p> <p>j. mengembangkan dan meningkatkan: fungsi PKN Banjarmasin sebagai pusat pemukiman: dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</p> <p>k. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan drainase yang terintegrasi dengan: Sungai: berito pada PKN Banjarmasin: yang berdekatan/mendhadap badan air</p> <p>l. menetapkan ketentuan: mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana: banjir</p> <p>m. memarjapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Banjarmasin dengan: Pelabuhan Banjarmasin: dan Bandar Udara Syamsuddin Noor</p> <p>n. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Banjarmasin: sentra: produksi komoditas unggulan, Ekabubar: Banjarmasin, dan Bandar Udara Syamsuddin Noor</p> <p>e. mengembangkan jaringan: transportasi penyeberangan untuk meningkatkan: keterkaitan: antarwilayah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.	Amuntai	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pariwisata - kesehatan - pertanian 	<p>P. meningkatkan pemangkasan tenaga kerja yang melanda PKN Barjarmasin</p> <p>q. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUTTI di PKN Banjarmasin yang dihubungkar dengan jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan</p> <p>R. mengembangkan jaringan terasial di PKN Banjarmasin yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>s. meredistribusikan sumber air berbas pada WS Barito-Kapuas untuk melayani PKN Banjarmasin</p> <p>L. mengembangkan dan meningkatkan tingkat prasarana darat sarana perkotaan berskala regional di PKN Banjarmasin yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>u. mengembangkan KLU di PKN Banjarmasin</p> <p>a. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Amuntai sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mencakup PKN Banjarmasin</p> <p>b. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Amuntai sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkan PKW Amuntai sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan PKW Amuntai sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan PKW Amuntai sebagai pusat ekowisata dan wisata budaya</p> <p>f. mengurangi ketahanan pelayanan pemerintahan yang menyebabkan gangguan terhadap pertanian lainnya PKW Amuntai</p> <p>g. mengembangkan fungsi PKW Amuntai sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.	Martapura	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - perkeluaran - perikanan - perikanan - pariwisata - industri 	<p>pemanfaatan ruang menengah</p> <p>h. memarkapkan jaringan jalan arteri primer pada lingkungan Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Amuntai dengan PKN Banjarmasin, Pelabuhan Banjarmasin, dan Bandar Udara Syamsuddin Noor</p> <p>i. membaharui jaringan transmisi tenaga listrik SUTTI di PKW Amuntai yang dihubungkkan dengan jaringan transmisi Pantai Timur Kalimantan</p> <p>j. mengembangkan jaringan terestrial di PKW Amuntai yang dihubungkan dengan Jatur, Sar. Pelayanan Pasat Perombahan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>k. mendayagunakan sumber air pada WS Barito-Kapas untuk melayani PKW Amuntai</p> <p>l. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Amuntai yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengolahan air limbah</p> <p>m. mengembangkan RTH di PKW Amuntai</p> <p>a. mengembangkan hngsi atau potensi PKW Martapura sebagai simpul kedra kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Banjarmasin</p> <p>b. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Martapura sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi dan kabupaten</p> <p>c. mengembangkan kegiatan ekonomi pada PKW Martapura yang berdekatan/menjangkit dapat badat air</p> <p>d. mengembangkan PKW Martapura sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan PKW Martapura sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>f. mengembangkan PKW Martapura sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan PKW Martapura sebagai pusat wisata budaya</p> <p>h. menciptakan iklim investasi pelabuhan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap bumiharganya PKW Martapura</p> <p>i. mengembangkan ruang PKW Martapura sebagai pusat permutakimian dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>j. mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Barito pada PKW Martapura yang berkeadilan/mengakadap badan air</p> <p>k. menetapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>l. menetapkan aturan induk urban primer pada jaringan jalan perompangan Pulau Kalimantan yang mengembangkan PKW Martapura dengan PKN Banjarmasin, Pelabuhan Banjarmasin, Bandar Udara Syamsudin Noor</p> <p>m. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mengembangkan PKW Martapura dengan PKN Banjarmasin</p> <p>n. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKW Martapura</p> <p>o. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUTTI di PKW Martapura yang dihibungkan dengan jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan</p> <p>p. mengembangkan jaringan tenaga listrik di PKW Martapura yang dikembangkan dengan Jaringan Tenaga Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>q. merencanakan sumber air pada WS Barito-Kapas untuk melayani PKW Martapura</p> <p>r. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Martapura yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengolahan air limbah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.4.	Marabahan.	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - perkembangan - pertanian - perikanan - pariwisata - industri 	<p>a. meningkatkan kinerja RTH di PKW Marabahan</p> <p>a. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Marabahan sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Banjarmasin</p> <p>b. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Marabahan sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkan PKW Marabahan sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan PKW Marabahan sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan PKW Marabahan sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan PKW Marabahan sebagai pusat wisata budaya</p> <p>g. menciptakan ketahanan pelarutan pemantauan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap bumiharganya PKW Marabahan</p> <p>h. mengembangkan fungsi PKW Marabahan sebagai pusat pernakornik, dengan lingkup intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>i. meningkatkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengalangan Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Marabahan dengan PKN Banjarmasin, Pelahhar, Banjarmasin, dan Bandar Udara Syamsuddin Noer</p> <p>j. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Marabahan dengan PKN Banjarmasin</p> <p>k. membahubisi jaringan transmisi tenaga listrik SUP di PKW Marabahan yang dihubungkan dengan jaringan transmisi Fatai Timur Kalimantan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>l. mengembangkan jaringan industri di PKW Marabahan yang dihubungkan dengan jaringan Pelayanan Fisik Pertambangan di Pematang Sialar, Kalimantan</p> <p>m. menyediakan sumber air pada WS Barito-Kapuas untuk melayani PKW Maubahan</p> <p>n. mengembangkan penerangan darat sarana perkotaan berkelas regional di PKW Marabahan yang meliputi STAM, pengelolaan sampah, dan pengolahan air limbah</p> <p>o. mengembangkan KIL di PKW Marabahan</p>
III.5.	Kotabaru	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - perkembangan - ketahanan - pertanian - perikanan - pariwisata - industri 	<p>a. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Kotabaru sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mencakup PKN Banjarmasin</p> <p>b. mengembangkan fungsi atau peran PKW Kotabaru sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkan PKW Kotabaru sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berbasis saring dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan PKW Kotabaru sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan tambakan pangsar yang ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan PKW Kotabaru sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>f. menciptakan ketahanan pangan pematang ruang yang menyediakan pangan lokal terhadap kemuragannya PKW Kotabaru</p> <p>g. mengembangkan fungsi PKW Kotabaru sebagai pusat perumahan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>h. mengembangkan dan meningkatkan fungsi lintas penerangan dan jaringan jalan lokal primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV. IV.1.	Kalmantan Timur Kawasan Perkotaan Balikpapan- Tenggarong- Samarinda-Bontang	PKN	<ul style="list-style-type: none"> - industri - perkotaan - pemerintahan - kesehatan - pendidikan - pariwisata 	<p>Kotabaru dengan PKN Banjarmasin, Kelabuhan Betaludin, dan Bandar Udara Stagen merelabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUTU di PKW Matabahan yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Datar Timur Kalimantan</p> <p>mengembangkan jaringan terrestrial di PKW Kotabaru yang dihubungkan dengan Jaringan Telekomunikasi di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>mendayagunakan sumber air berbasis W3 untuk melayani PKW Kelabari</p> <p>mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Kotabaru yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>mengembangkan KTH di PKW Kotabaru</p>
				<p>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai simpul utama kegiatan ekspedisi-por : dan panti-garbang-manuju-kaw-wasim-integrasional</p> <p>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi</p> <p>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kegiatan ekonomi pada PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang yang berdekatan/menghadapi badan air</p> <p>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>industri terpadu</p> <p>6. meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Berang sebagai industri pengolahan lanjut kelapa sawit dar. kar. yang berdaya saing dan ramah lingkungan.</p> <p>7. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Berang sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>8. meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Berang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>9. meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Berang sebagai pusat pengembangan ekowisata dar. wisata budaya</p> <p>10. mengendalikan perkembangan titik PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Berang untuk kelestarian lahan pertanian, peryan berkelanjutan dan kawasan bertanah subur.</p> <p>11. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Berang</p> <p>12. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Berang sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</p> <p>13. meningkatkan fungsi kawasan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Mahakan pada PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Berang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>yang berdekatan/menghadapi badan air</p> <p>m. menciptakan kesempatan pengaliran kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>n. memantapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dengan Bandar Udara Sepinggan, Bandar Udara Samarinda Bara, Bandar Udara Bertung, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, dan Pelabuhan Tanjung Sentan</p> <p>o. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, serta produksi komoditas unggulan, Bandar Udara Sepinggan, Bandar Udara Samarinda Bara, Bandar Udara Bontang, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, dan Pelabuhan Tanjung Sentan</p> <p>p. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi</p> <p>q. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang</p> <p>r. meningkatkan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT di PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang yang ditransmisikan dengan Jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan</p> <p>s. mengembangkan jaringan transmisi di PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pusat Perumahan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>t. mengayut-ayut sumber air pada WS Mahakam untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.2.	Tarakan	TKN	<ul style="list-style-type: none"> - perikanan - pariwisata - perkabupaten - kelurahan - pertanian - industri 	<p>4. meningkatkan fungsi pasar di kawasan perkotaan dan sarana perkotaan berskala regional di KKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Benteng yang meliputi STAM, pergelolaan sampah, dan pengolahan air limbah</p> <p>5. meningkatkan KTH di KKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Benteng</p> <p>6. meningkatkan dan meningkatkan fungsi pasar KKN Tarakan simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan industri nasional</p> <p>7. meningkatkan dan meningkatkan fungsi atau peran KKN Tarakan sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi</p> <p>8. meningkatkan dan meningkatkan fungsi KKN Tarakan sebagai pusat industri pengolahan hasil pertanian mineral, budidaya, serta minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh perusahaan lokal industri</p> <p>9. meningkatkan dan meningkatkan fungsi KKN Tarakan sebagai industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>10. meningkatkan dan meningkatkan fungsi KKN Tarakan sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>11. meningkatkan dan meningkatkan fungsi KKN Tarakan sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>12. meningkatkan dan meningkatkan fungsi KKN Tarakan sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya</p> <p>13. meningkatkan perkembangan fisik KKN Tarakan untuk kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan berfungsi hulu</p> <p>14. menerapkan ketentuan pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan terwujud</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.3.	Tanjung Redeb	PKW - industri - kebutuhan - pertumbuhan - pariwisata - perikanan.	<p>terhadap bertumbuhnya PKN Tarakan</p> <p>1. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Tarakan sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</p> <p>2. menerapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>3. memantapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Tarakan dengan Bandar Udara Juwata dan Pelabuhan Tarakan</p> <p>4. mengembangkan jaringan transportasi penyebrangan untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi</p> <p>5. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKN Tarakan</p> <p>6. mengembangkan jaringan terestrial di PKN Tarakan yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Selat Kalimantan</p> <p>7. mendayagunakan sumber air pada WS Selayar untuk melayani PKN Tarakan</p> <p>8. mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKN Tarakan yang meliputi SIAM, pengelolaan sampah, dan permasalahan air limbah</p> <p>9. mengembangkan RTU di PKN Tarakan</p>
IV.3.	Tanjung Redeb	PKW - industri - kebutuhan - pertumbuhan - pariwisata - perikanan.	<p>10. mengoptimalkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Tanjung Redeb sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Tarakan</p> <p>11. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Tanjung Redeb sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>12. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kegiatan ekonomi pada PKW Tanjung Redeb</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JEMIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>yang berkaitan dengan bidang-bidang berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Redeb sebagai pusat industri pengelahan Lada pertambangan mineral, batubara, serbuk gamping dan gas bumi yang didukung oleh pengelahan limbah industri terpadu e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Redeb sebagai pusat industri pengelahan kelapa sawit dan karet yang berkarya tinggi dan ramah lingkungan; f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Redeb sebagai pusat industri pengelahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Redeb sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berkarya tinggi dan ramah lingkungan g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Redeb sebagai pusat ekowisata dan wisata budaya h. menerapkan kebijakan, peraturan, penataan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan PKW Tanjung Redeb i. mengembangkan fungsi PKW Tanjung Redeb sebagai pusat perikanan dengan fungsi intensitas pemanfaatan ruang menengah j. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Barau pada PKW Tanjung Redeb yang berdampak/menghasilkan banjir air k. menetapkan ketentuan mengenai penataan kota yang adaptif terhadap zoncuan beaunana banjir l. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Tanjung Redeb dengan Bandar Udara Kalimantan dan Pelabuhan Tanjung Redeb m. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada jaringan

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.A.	Sungai	FKW	<ul style="list-style-type: none"> - industri - kehutanan - perambangan - pariwisata - perikanan 	<p>Jalur: Lintas Selatan Pulau Kalimantan dar. lintas perhubungan yang menghubungkan PKW Tanjung Redeb dengan PKN Tarakan, Bandar Udara Jowala, dan Pelabuhan Tarakan.</p> <p>n. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Kawasir Perkotan Balikpapan-Lenggarong-Samarinda-Bontang, serta produksi komoditas unggulan, Bandar Udara Sepitagan, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Bontang, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, dan Pelabuhan Tanjung Santan</p> <p>o. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKW Tanjung Redeb</p> <p>p. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SCTI di PKW Tanjung Redeb yang dihubungkan dengan jaringan transmisi Pantai Timur Kalimantan</p> <p>q. mengembangkan jaringan transmisi di PKW Tanjung Redeb yang dihubungkan dengan Jaringan Pusa: Perumahan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>r. mengayurakan sumber air berbasis WS untuk melayani PKW Tanjung Redeb</p> <p>s. mengembangkan dar. meningkatkan harga pasokan dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Tanjung Redeb yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>t. mengembangkan KUI di PKW Tanjung Redeb</p> <p>a. mengembangkan fungsi atau petusi PKW Sangata sebagai simpul kerja kegiatan ekspor-impor yang melibatkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Lenggarong-Samarinda-Bontang</p> <p>b. mengembangkan fungsi atau petusi PKW Sangata sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkan kegiatan ekonomi pada PKW Sangata yang berkegiatan/menghadapi badan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan 	<p>air</p> <p>d. mengembangkan PKW Sangata sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh masyarakat dalam industri terpadu</p> <p>e. mengembangkan PKW Sangata sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan PKW Sangata sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan PKW Sangata sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>h. mengembangkan PKW Sangata sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata buaya</p> <p>i. meningkatkan ketahanan pangan melalui ruang ruang yang menyebabkan gangguan terhadap keberadaannya PKW Sangata</p> <p>j. mengembangkan fungsi PKW Sangata sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>k. mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sangai Sangata pada PKW Sangata yang berdekatan/menghadap badan air</p> <p>l. meningkatkan ketahanan lingkungan penataan kota yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir</p> <p>m. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada jaringan Jalan Lintas Selatan Palca Kalimantan yang menghubungkan PKW Sangata dengan PKN</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV-3.	Nanukan	PKW/PKN	pelayanan pemerintahan lintas batas negara	<p>Kawasan Perkotaan Balikpapan-Uraingareng-Samarinda-Bertang, Bandar Udara Sepinggan, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Bontang, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, dan Pelabuhan Tanjung Saridan</p> <p>ii. mengembangkan jaringan jalan lebar hambatan yang menghubungkan PKW Saragala dengan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Uraingareng-Samarinda-Bontang</p> <p>iii. mengembangkan dan meningkatkan tinggi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Saragala dengan Pelabuhan Tanjung Saragala</p> <p>iv. mengembangkan jaringan jalan kavita api untuk menghubungkan PKW Saragala dengan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Uraingareng-Samarinda-Bontang, serta produksi kemadifitas tanggulan, Bandar Udara Sepinggan, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Bontang, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, dan Pelabuhan Tanjung Saritau</p> <p>v. meningkatkan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT di PKW Saragala yang dilubungkan dengan jaringan transmisi Pantar Umar Kalimantan</p> <p>vi. mengembangkan jaringan terestrial di PKW Saragala yang dihubungkan dengan jaringan Pelayaran Busi Pantar Umar di Pantar Selatan Kalimantan</p> <p>vii. mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani PKW Saragala</p> <p>viii. mengembangkan dan meningkatkan tinggi pasaran, dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Saragala yang meliputi SPAM, penyediaan sampah, dan pengalihan air limbah</p> <p>ix. mengembangkan KTH di PKW Saragala</p> <p>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW/PKSN Nunukan sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Lapasan</p> <p>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW/PKSN Nunukan sebagai simpul utama transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
	<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana pelayanan jasa lintas batas negara - pertahanan dan keamanan - perikanan - pariwisata - perkebunan - kesehatan - pertambangan - industri 	<p>c. mengembangkan wilayah sekitarnya; dan meningkatkan PKW/PKSN Nantikan sebagai pusat industri pengangkutan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan PKW/PKSN Nunukan sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan PKW/PKSN Nunukan sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan PKW/PKSN Nunukan sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya</p> <p>g. memajukan ketahanan polutan; dan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW/PKSN Nunukan</p> <p>h. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW/PKSN Nunukan sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang yang memadai</p> <p>i. mengembangkan kegiatan perikanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sertaumpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia</p> <p>j. meningkatkan fungsi PKW/PKSN Nunukan sebagai pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepastian, integrasi, karantina, dan keamanan</p> <p>k. mengembangkan pusat promosi investasi dan pemasaran</p> <p>l. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat</p> <p>m. mengembangkan dan memanfaatkan lintas perhubungan yang terhubung dengan PKW/PKSN Nunukan</p> <p>n. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKW/PKSN Nunukan</p>	

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.6.	Tanjung Selor	EKW	<ul style="list-style-type: none"> - perikanan - pariwisata - perkebunan - kelatamau - pertanian/bergau - industri 	<p>e. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik NUT di PKW/PKSN Numukar yang ditabungkan dengan jaringan transmisi Fedlam dan Kalimantan</p> <p>f. mengembangan dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi di PKW/PKSN Narakkan yang ditabungkan dengan jaringan layanan. Piasa Pumbuhan di Wilayah Utara Kalimantan</p> <p>g. mendayagunakan sumber air pada WS Selayap untuk melayani PKW/PKSN Numukan</p> <p>h. mengembangan kawasan peruntukan permukiman di PKW/PKSN Numukan dengan dukungan piasana dan sarana yang memadai</p> <p>i. mengembangan KTH di PKW/PKSN Narakkan</p> <p>j. mengembangan dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Selor sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Tarakan</p> <p>k. mengembangan dan meningkatkan fungsi fungsi atau potensi PKW Tanjung Selor sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau kabupaten/kabupaten</p> <p>l. mengembangan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pada PKW Tanjung Selor yang berkaitan/menghadapi badan air</p> <p>m. mengembangan dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Selor sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan mineral, hulu bara, serta minyak dan gas bumi yang ditabungkan oleh pengalihan limbah industri terpadu</p> <p>n. mengembangan dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Selor sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>o. mengembangan dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Selor sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p>

NO.	KAWASAN PEKERJAAN	JENIS PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>g. mengembangkannya dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Selor sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramai lingkungan</p> <p>h. mengembangkannya dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Selor sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya</p> <p>i. menerapkan ketentuan peraturan peramataan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Tanjung Selor</p> <p>j. mengembangkannya dan meningkatkan fungsi PKW Tanjung Selor sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>k. mengembangkannya dan meningkatkan fungsi jaringan drainase yang terintegrasi dengan Sungai Kayan pada PKW Tanjung Selor yang berdeleban/menghadap badan air</p> <p>l. memajukan kuantitas pematang kota yang adaptif terhadap bermacam kemana banjir</p> <p>m. mengembangkannya dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Tanjung Selor dengan Pelabuhan Tanjung Selor</p> <p>n. mengembangkannya dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Tanjung Selor dengan Bandara Kalimantan</p> <p>o. mengembangkannya dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan lintas penyeberangan yang menghubungkan PKW Tanjung Selor dengan PKN Tarakan, Bandar Udara Juvata, dan Pelabuhan Tarakan</p> <p>p. mengembangkannya penyalang tenaga listrik yang melayani PKW Tanjung Selor</p> <p>q. meningkatkan jaringan transmisi tenaga listrik SCITT di PKW Tanjung Selor yang ditubuhkan dengan jaringan Transmisi Palarai Timur Kalimantan</p> <p>r. mengembangkannya jaringan tenaga listrik di PKW Tanjung Selor yang ditubuhkan dengan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
TV.7.	Malinau	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - pariwisata - kebudayaan - kesehatan - pertambangan - industri 	<p>Jaringin: Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan menyediakan sumber air berbasis WS untuk melayani PKW Tanjung Selor mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Tanjung Selor yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>ii. mengembangkan KIRI di PKW Tanjung Selor</p> <p>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Malinau sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mencakup PKN Tarakan</p> <p>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi fungsi atau potensi PKW Malinau sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Malinau sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan turunan batubara, serpih minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Malinau sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berkarya sang dan ramah lingkungan</p> <p>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Malinau sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berkarya sang dan ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Malinau sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya</p> <p>g. memajukan ketahanan pelayanan pemukiman ruang yang menyediakan dukungan terhadap pertumbuhan PKW Malinau</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>f. mengembangkan fungsi PKW Malinau sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektif primer pada jaringan Jalan Jintas Selatar, Jalan Kalimantan dan jalan penyelesaian yang menghubungkan PKW Malinau dengan PKN Tarakan, Bandara Juwata dan Pelabuhan Tarakan</p> <p>h. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan PKW Malinau dan menggunakan jaringan transmisi tenaga listrik di PKW Malinau yang dihubungkan dengan jaringan transmisi tenaga listrik Kalimantan</p> <p>i. mengembangkan jaringan listrik di PKW Malinau yang dikembangkan dengan jaringan Telayan Dasa, Pertambahan di Partai Selatan Kalimantan</p> <p>j. menyediakan sumber air pada WS Sasayap untuk melayani PKW Malinau</p> <p>k. mengembangkan dan melaksanakan fungsi prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Malinau yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>l. mengembangkan RTTI di PKW Malinau</p>
TV.8.	Tarlumbis	PKW - kesehatan - pariwisata - industri		<p>a. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Tarlumbis sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Tarakan</p> <p>b. mengembangkan fungsi dan potensi PKW Tarlumbis sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkan PKW Tarlumbis sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan PKW Tarlumbis sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya</p> <p>e. menanggapi kebutuhan pelayanan permukiman ruang yang menyebabkan gangguan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.9.	Tanjung Grogot	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - perikanan - kesehatan - perlambangar - pariwisata 	<p>terhadap barungsinya PKW Tambubis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan fungsi PKW Tambubis sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah; b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengantar; Pukul Kalimantan, serta lintas pelayanan yang menghubungkan PKW Tambubis dengan PKW Tarakan, Bandar Udara hawa, dan Pelabuhan Tarakan; c. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKW Malinau; d. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di PKW Malinau yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Pedalaman Kalimantan; e. mengembangkan jaringan tenaga listrik yang dihubungkan dengan Jaringan Tenaga Listrik di Wilayah Utara Kalimantan; f. mendayagunakan sumber air pada WS Sesayap untuk melayani PKW Tambubis g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Tambubis yang meliputi SPAM, pengolahan sampah, dan pengolahan air limbah h. mengembangkan KTH di PKW Tambubis i. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Tanah Grogot sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang menghubungkan PKW Kawasar, Perkelaaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Batang j. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Tanjung Selor sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten k. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kegiatan ekonomi pada PKW Tanah Grogot yang

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>berdampak/menghambat p luidan air</p> <p>d. memacu/angkark. dan meningkatkan fungsi PKW Tanah Grogot sebagai pusat industri pengolahan hasil perambungan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh penyelesaian limbah industri terpadu</p> <p>e. mengembangkar. dan meningkatkan harga PKW Tanah Grogot sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkar. dan meningkatkan fungsi PKW Tanah Grogot sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budidaya</p> <p>k. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian terhadap berlingkarnya PKW Tanah Grogot</p> <p>l. mengembangkar. dan meningkatkan harga PKW Tanah Grogot sebagai pusat permodalan dengan tingkat insensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>j. memacu/angkark. dan meningkatkan fungsi jaringan distribusi yang terintegrasi dengan Sungai Malakam pada PKW Tanah Grogot yang berdaya saing/menghadap badan air</p> <p>k. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana banjir</p> <p>l. mengembangkar. dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Tanah Grogot dengan Pelabuhan Tanah Grogot</p> <p>m. memacu/angkark. dan meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer pada jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang menghubungkan PKW Tanah Grogot dengan PKN Kawasar. Perkebunan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, Bandar Udara Sepinggai.</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.10	Sendawar	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - perkembangan - ketahanan - pertumbuhan - pariwisata 	<p>dan Pelabahan K. Ikipayon</p> <p>L. mengembangkannya pembangkit tenaga listrik yang menyuplai PKW Tanah Grobet</p> <p>C. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik SUTI di PKW Tanah Grobet yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan</p> <p>P. mengembangkan jaringan transmisi di PKW Tanah Grobet yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Buset Perumahan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>Q. menyediakan sumber air berbasis WS untuk melayani PKW Tanah Grobet</p> <p>R. mengembangkannya darat untuk sarana dan sarana perkotaan berskala regional di PKW Tanah Grobet yang meliputi SPAM, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah</p> <p>S. mengembangkannya KIII di PKW Tanah Grobet</p>
				<p>a. mengembangkannya fungsi atau potensi PKW Sendawar sebagai simpul kegiatan ekonomi impor yang mendukung PKN Kawasar Perkotaan Balikpapan-Berserong-Samarinda-Berang</p> <p>b. mengembangkannya fungsi dan potensi PKW Sendawar sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi dan beberapa kabupaten</p> <p>c. mengembangkannya fungsi PKW Sendawar sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>d. mengembangkannya PKW Sendawar sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit dan karet yang berkarya seling dan manual lingkungan</p> <p>e. mengembangkannya PKW Sendawar sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.11	Simanaggaris	PKSW	- penerangan, - perabotan, dan - keamanan	<p>c. mengembangkan PKW Serdawar sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya</p> <p>f. menerapkan ketentuan, peraturan, pemeliharaan, ruang yang menyebabkan gangguan terhadap lingkungan PKW Serdawar</p> <p>g. mengembangkan PKW Serdawar sebagai pusat pemerintahan dengan lingkup infansitas pemerintahan ruang menengah</p> <p>h. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan, kolektor primer, jalan jaringan jalan pengumpan Jalan Kaliman dan Jaringan Jalan Tulas Tengah Jalan Kaliman dan yang menghubungkan PKW Serdawar dengan PKW Kawasar, Perbatasan Balikpapan-Lenggareng-Samarinda-Bentang, Bandar Udara, Samarinda Baru, dan Pelabuhan Samarinda</p> <p>i. mengembangkan peribangkit tenaga listrik yang melayani PKW Serdawar</p> <p>j. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKW Serdawar</p> <p>k. mengembangkan jaringan transmisi di PKW Serdawar yang diperluas dengan jaringan Pelayanan Pusat Pembangunan di Pantai Selatan Kalimantan</p> <p>l. mendayagunakan sumber air pada WS Malakam untuk melayani PKW Serdawar</p> <p>m. mengembangkan dan meningkatkan fungsi, peralatan, dan sarana, perbaikan berskala regional di PKW Serdawar yang meliputi SPAM, penyelesaian sampah, dan pengolahan air limbah</p> <p>n. mengembangkan RTU di PKW Serdawar</p> <p>o. mengembangkan fungsi atau potensi PKSW Simanaggaris sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan kegiatan pertanahan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> - pelayanan pemukiman - lintas batas negara pusat - perdagangan - jasa lintas batas - industri 	<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan PKSN Simanggaris sebagai pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan. d. mengembangkan pusat promosi investasi dan pemasaran. e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dalam memperlatihkan kemandirian fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat f. mengembangkan PKSN Simanggaris sebagai pusat industri pengolahan kelapa, arwit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan g. memperkaya ketahanan palarangan pemukiman ruang yang menyebabkan terganggunanya fungsi PKSN Simanggaris h. mengembangkan hingga PKSN Simanggaris sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah i. mengembangkan jaringan jalan kolektif nasional yang terhubung dengan PKSN Simanggaris j. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di PKSN Simanggaris yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Pedalaman Kalimantan k. mengembangkan jaringan terrestrial di PKSN Simanggaris yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pos, Pertumbuhan di Wilayah Utara Kalimantan l. mendayagunakan sumber air pada WS Seaway untuk melayani PKSN Simanggaris m. mengembangkan kawasan permukiman permukiman di PKSN Simanggaris dengan dilakukan prasarana dan sarana yang memadai n. mengembangkan RTH di PKSN Simanggaris
IV.12	Leng Midang	PKSN	<ul style="list-style-type: none"> - perkotaan - perbatasan dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan fungsi atau potensi PKSN Leng Midang sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<ul style="list-style-type: none"> - keamanan - pelayanan - pemertiksaan lintas batas negara - pusat perdagangan - jasa lintas batas - industri 		<p>b. mengembangkan kegiatan pariwisata dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia</p> <p>c. mengembangkan PKSN Long Midang sebagai pintu kerohaning internasional dengan fasilitas kapalbanar, imigrasi, karantina, dan keamaran</p> <p>d. mengembangkan pusat promosi investasi dan pemasaran</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan mempertalikan kondisi risk lingkungan dan sosial budaya masyarakat</p> <p>f. mengembangkan PKSN Long Midang sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>g. menerapkan kelenhan pelaragar, pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKSN Long Midang</p> <p>h. mengembangkan fungsi PKSN Long Midang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah</p> <p>i. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terhubung dengan PKSN Long Midang</p> <p>j. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di PKSN Long Midang yang dihubungkan dengan jaringan transmisi Kalimantan Kalimantan</p> <p>k. mengembangkan jaringan perstrial di PKSN Long Midang yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Utara Kalimantan</p> <p>l. mendayagunakan sumber air pada WS Sasayap untuk melayani PKSN Long Midang</p> <p>m. mengembangkan kawasan permukiman di PKSN Long Midang dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai</p> <p>n. mengembangkan KTH di PKSN Long Midang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.13	Long Beach	PKSN	<ul style="list-style-type: none"> - perkembangan dan keamanan dan keamanan - pelayanan pemerintahan - lintas batas negara - pusat perdagangan jasa lintas batas - industri 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan fungsi atau potensi PKSN Long Pahangai sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya b. mengembangkan kegiatan perbaruan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia c. mengembangkan PKSN Long Pahangai sebagai pintu gerbang internasional dengan fasilitas kapal, migrasi, imigrasi, karantina, dan keimigrasian d. mengembangkan pusat promosi investasi dan pemasaran e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbuka dengan mempertajam kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat f. mengembangkan PKSN Long Pahangai sebagai pusat industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan g. menetapkan ketentuan peraturan, pemanfaatan ruang yang menyebabkan terwujudnya target PKSN Long Pahangai h. mengembangkan fungsi PKSN Pahangai sebagai pusat perniagaan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah i. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terhubung dengan PKSN Long Pahangai j. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di PKSN Long Pahangai yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Pedalaman Kalimantan k. mengembangkan jaringan terrestrial di PKSN Long Pahangai yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Dasar Perumahan di Wilayah Ceraa Kalimantan l. mengayunkan sumber air pada WS Sasayap untuk melayani PKSN Long Pahangai m. mengembangkan kawasan perniagaan perniagaan di PKSN Long Pahangai dengan

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.14	Lorong Nawayar	PKSN	<ul style="list-style-type: none"> - pariwisata - pertahanan dan keamanan - pelayanan pemeriksaan lintas batas negara - pasar perdagangan jasa lintas batas - industri 	<p>diukung penerapannya dari sarana yang memadai)</p> <p>1. mengembangkan KUTI di PKSN Long Palangai</p> <p>2. mengembangkan fungsi atau potensi PKSN Long Nawayar sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya</p> <p>3. mengembangkan kegiatan perbatasan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia</p> <p>4. mengembangkan PKSN Long Nawayar sebagai pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan</p> <p>5. mengembangkan pasar investasi dan pemasaran</p> <p>6. memantapkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat</p> <p>7. mengembangkan PKSN Long Nawayar sebagai pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya</p> <p>8. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan terganggunya fungsi PKSN Long Nawayar</p> <p>9. mengembangkan fungsi PKSN Palangai sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah dan menengah</p> <p>10. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terhubung dengan PKSN Long Nawayar</p> <p>11. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di PKSN Long Nawayar yang dihubungkan dengan Jaringan Transmisi Deckaman Kalimantan</p> <p>12. mengembangkan jaringan terrestrial di PKSN Long Nawayar yang dihubungkan dengan Jaringan Pelayanan Pos dan Pertumbuhan di Wilayah Utara Kalimantan</p> <p>13. mengayaukan sumber air pada WS sesayap untuk melayani PKSN Long Nawayar.</p>

No.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				m. mengembangkan kerjasama pemerintah-Perusahaan di PKS Long Nyan dengan dukungan sarana dan sarana yang memadai n. mengembangkan KIH di PKS Long Nawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALAN NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Jaringan Jalan Lintas Sekeloa Pulau Kalimantan	celah perimer	
1.1.	Jaringan jalan lintas Sel Pinyuh-Pontianak-Uyung- Nanga Layang-Kudatangan- Peneqa-Naraga-Balik Tangkalat-Biru-Sampit- Kulabesi-Kaseongan- Pulangkaraya-Palang Piasa- Kuala Kapuas-Banjarmasin- Liang Arogaya		<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan rasional dan mendorong perkembangan di Pulau Kalimantan</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan yang menghubungkan PKN Pontianak, PKN Kutapang, PKN Barakallan Bun, PKN Sampit, PKN Palangkaraya, PKN Kuala Kapuas, dan PKN Banjarmasin-Banjarmasin</p> <p>c. memantapkan jaringan jalan yang mengaitkan PKN Pontianak dengan Pelabuhan Kuntulak atau Bandar Udara Supadio, PKN Kutapang dengan Pelabuhan Ketapung atau Bandar Udara K. Padi Usman, PKN Pangkajene dan PKN Sampit dengan Bandar Udara Iskandar atau Pelabuhan Kumai, PKN Palangkaraya dengan Bandar Udara Tjilik Kiwit, PKN Kuala Kapuas dan PKN Banjarmasin-Banjarmasin dengan Pelabuhan Banjarmasin atau Bandar Udara Syamsuddin Noor, untuk mendukung pemetaan dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalan yang melayani Kawasan Andalar, Pontianak dar. Sekitarnya, Kawasan Andalar Ketapang dan Sekitarnya, Kawasan Andalar Sampit-Pangskalalan Bun, Kawasan Andalar Kuala Kapuas, serta Kawasan Andalar Banjarmasin Kota dan Sekitarnya</p> <p>e. memantapkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat</p> <p>f. memantapkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Kelapang, Pelabuhan Kumai, dan Pelabuhan Banjarmasin</p> <p>g. memantapkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Supadio, Bandar Udara Rahadi Usman, Bandar Udara Iskandar, Bandar Udara Tjilik Kiwit, dan Bandar Udara Syamsuddin Noor</p> <p>h. memantapkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi sungai di sungai</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	SUDAH DILAKUKAN OPERASIONALISASI
			Lardak, Sungai Kapuas, Sungai Pawan, Sungai Lamanda, Sungai Mantaya, Sungai Kalangan, Sungai Kalayan, Sungai Sebangau, dan Sungai Barito
1.			<ul style="list-style-type: none"> i. mempertahankan jaringan yang terputus dengan Jaringan Penyelamatan Sabuk Utara dan Jaringan Penyelamatan Kuching Sabuk
j.			memantapkan mang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan mangrove dibatasi
k.			menetapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsinya limbung di sepanjang sisi jalan
l.			menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memiliki ketentuan ruang pengawasan jalan
1.2.	Jaringan jalan lintas Kuaro-Kadamaian-Fonstam - Balikpapan - Loa Janar - Samarinda	arteri primer	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan dan mempertahankan jaringan jalan untuk meningkatkan keberlntan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perkembangan di Pulau Kalimantan b. mempertahankan jaringan jalan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggara - Samarinda - Pontang c. mempertahankan jaringan jalan yang menghubungkan TKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Berang dengan Bandar Udara Sepinggan, Bandar Udara Samarinda Baru, Pelabuhan Balikpapan, dan Pelabuhan Samarinda, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan d. mempertahankan jaringan jalan yang melayani Kawasan Andalar - Berang-Samarinda-Tenggarong-Balikpapan-Fonstam (Bor-santabakam) dan Sekitarnya e. mempertahankan jaringan jalan yang terputus dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur f. mempertahankan jaringan jalan yang terputus dengan Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
13.	Jaringan laka. lintas Tanah Hutan-Sambas-Teris- Sungai-Selatan-Pulau Mempawah-Sel Pnyuh	Kolektor primer	<p>5. memantapkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Sepanggar dan Bandar Udara Samarinda Baru</p> <p>h. memantapkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi Sungai Mahakam</p> <p>i. memantapkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan Pengaliran Sabuk Tengah</p> <p>j. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecerahannya penguasaan ruangannya dibatasi</p> <p>k. menetapkan ketentuan pola ruang di sisi lahan yang berbatasan langsung di sepanjang sisi jalan</p> <p>l. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan</p> <p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan laka. untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, nasional dan mendukung perekonomian di Pulau Kalimantan.</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Mempawah, PKW Singkawang, dan PKW Sambas</p> <p>c. memantapkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terhubung ke Bandar Udara Paloh, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. memantapkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang melayani Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya</p> <p>e. memantapkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat</p> <p>f. memantapkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpadu dengan transportasi Sungai Sambas</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya dibatasi</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.4.	Jaringan Jalur Lintas Liang Anggang-Pelabuhan Pagatan-Bandiwin-Baturaji-Tandh Gregoi-Kuaru	Kolektif primer	<p>h. menetapkan besutuan, pelarangan dll. Lingsi lahan yang bertinggisi lindug di sepanjang sisi jalan</p> <p>i. menetapkan garis sempadan, bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalat.</p> <p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalat, untuk meningkatkan keterkaitan antarlayasan perkeada, nasional dar, mendorong perekonomian di Palat Kalimantan.</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan yang mengahubungkan PKW Katabaru dan PKW Tanah Gregoi.</p> <p>c. memantapkan dan meningkatkan Lingsi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Katabaru dengan Bardar Udara Stagen dan Pelabuhan Batulicir serta PKW Tanah Gregoi dengan Pelabuhan Tandh Gregoi, untuk meningkatkan pemataran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. memantapkan dan meningkatkan lingsi jaringan jalan yang melayani Kawasan Andalan Banjarmasin Baya dan Sekelarnya serta Kawasan Andalan Batulicir</p> <p>e. memantapkan dan meningkatkan Lingsi jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Jalat Kereta Api Lintas Selatan Palat Kalimantan Bagian Timur</p> <p>f. memantapkan dar, meningkatkan rutesi jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Batulicir, dan Pelabuhan, Tanah Gregoi.</p> <p>g. memantapkan dan meningkatkan Lingsi jaringan jalan yang terpadu dengan Bardar Udara Stager.</p> <p>h. memantapkan dar, meningkatkan rutesi jaringan jalat, yang terpadu dengan jaringan Penyeberangan Sabuk Clara</p> <p>i. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kesederuangan pengembangannya dibatasi</p> <p>j. menetapkan ketentuan, pelarangan dll. fungsi lahan yang bertinggisi lindug di sepanjang sisi</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.5.	Jaringan jalan lintas Samarinda-Batang-Sangara-Simpang Pendan-Muara Wahai-Labanan-Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Malinas-Merasaka-Sinanggaris	kolektor primer	<p>jalan</p> <p>k. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan.</p> <p>a. mengembangkan dan mempertahankan jaringan jalan untuk meningkatkan keberkahan arsitektural perkotaan nasional dan mendorong perkembangan di Pulau Kalimantan.</p> <p>b. mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Lingsar-Samarinda-Bontang, PKW Sangata, PKW Tanjung Redeb, PKW Tanjung Selor, PKW Malinas, dan PKN Sinanggaris</p> <p>c. mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Lingsar-Samarinda-Bontang dengan Bandar Udara Samarinda Baru atau Pelabuhan Samarinda, PKW Sangata dengan Pelabuhan Tanjung Sangata, PKW Tanjung Redeb dengan Bandar Udara Kalimantan-Berita atau Pelabuhan Tanjung Redeb, serta PKW Tanjung Selor dengan Pelabuhan Tanjung Selor, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang melayani Kawasan Andalan Borsamtebajam dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Tarakar-Tanjung Sabas-Numakar-Pulau Bunyu-Malinu (Lalapentema) dan sekitarnya</p> <p>e. mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Jintas Selatan Pulau Kalimantan, Bagian Timur</p> <p>f. mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Tanjung Sangata, Pelabuhan Tanjung Redeb, dan Pelabuhan Tanjung Selor</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
16.	Jaringan Jalur Lintas Tanah Hitam Temajuk	strategis nasional	<p>a. memantapkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaku dengan Bandar Udara Samarinda, Bera dan Bandar Udara Kalimantan-Berau</p> <p>b. memantapkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpaku dengan jaringan transportasi sungai di Sungai Mahakam, Sungai Kelay, Sungai Sembakung, Sungai Sekak, Sungai Sayap, dan Sungai Kayan</p> <p>c. memantapkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>d. menerapkan ketentuan pelarangan affil: fungsi lahan yang berhimpun di sepanjang sisi jalan</p> <p>e. memantapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk meningkatkan keefektifan dan cakupan pelayanan nasional dan mendorong perekonomian di Palat Kalimantan</p> <p>g. memantapkan jaringan jalan yang merupakan bagian dari ruas jalan yang menghubungkan PKW Sumbang dengan PKW Palat-Aruk</p> <p>h. mengembangkan fungsi jaringan jalan strategis nasional yang terhubung ke Bandar Udara Palat secara terpadu</p> <p>i. memantapkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>j. menerapkan ketentuan pelarangan affil: fungsi lahan yang berhimpun di sepanjang sisi jalan</p> <p>k. memantapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan.		
II.1.	Jaringan Jalat. Lintas Sisi Tengah-Sesak-Tanjung	akses primer	<p>a. mengembangkan dan mempertahankan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, nasional dan mendukung perekonomian di Palau Kalimantan.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Menapowal dan Kota Sanggau</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang melayani kawasan Andalar, Peritarak dan Sekitarnya</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan Jalat Kereta Api Lintas Selatan Palau Kalimantan Bagian Barat.</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi Sungai Landak</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecerdasan pengembangan mangunya dibatasi</p> <p>g. menetapkan keanekaragaman pelarangan alat fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan.</p>
II.2.	Jaringan Jalat. Lintas Timur, Sanggau-Sekadau-Tabellian-Nanga Unuh	kolaborasi primer	<p>a. mengembangkan dan mempertahankan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, nasional dan mendukung perekonomian di Palau Kalimantan.</p> <p>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Sanggau dan PKW Sintang</p> <p>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang melayani kawasan Andalar dan Sanggau</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
D.3.	Jaringan jalan lintas Tumbang Samba-Rabunbang-Tumbang Jutek-Kuala Kurun-Furuk-Catun-Muara Lany-Muara Leweh-Damai-Simpang-Bhasin-Resak-Kotabangun-Tegganong-Lee Janan-Samarinda	kolektor primer	<p>d. mengembangkan dan meningkatkan narasi jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat</p> <p>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi Sungai Kapuas</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang berkelanjutan pengembangan ruangannya dibatasi</p> <p>g. menetapkan kebutuhan, pelaksanaan dll. fungsi lahan yang berfungsi lindang di sepanjang sisi jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan, batasan, di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasar jalan.</p>
			<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalan untuk meningkatkan keberkalan di kawasan perkotaan, nasional dan mendukung perekonomian di Pulau Kalimantan.</p> <p>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKW Muara Tevel dengan FKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontara.</p> <p>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan FKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontara dengan Bandar Udara Samarinda Baru dan Pelabuhan Samarinda, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang melayani Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Muara Tevel, dan Kawasan Andalan Bunsantebejan dan sekitarnya</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL
II.4.	Jaringan jalan lintas Nanga Pinoh-Tumbang Nanga-Tumbang Seramang-Tumbang Sambas	strategis nasional	<p>1. mengembangkan dan meningkatkan tanggul jaringan jalan yang terpadu Pelabuhan Samarinda dan Samarinda Baru</p> <p>2. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang terpadu dengan Rambu- Rambu Baru</p> <p>3. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi sungai di Sungai Katingan, Sungai Kapayan, Sungai Barito, Sungai Kapuas, dan Sungai Mahakam</p> <p>4. memantapkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan fungsi: nilai situs memantapkan fungsi ruang yang kondusif dengan pengembangan ruang yang dibatasi</p> <p>5. menerapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang bernilai tinggi di sepanjang sisi jalan</p> <p>6. memantapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>7. mengembangkan jaringan strategis nasional untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan perkotaan nasional dan mendukung perekonomian di Pulau Kalimantan</p> <p>8. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang melayani kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Biri</p> <p>9. memantapkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan fungsi: nilai situs memantapkan fungsi ruang yang kondusif dengan pengembangan ruang yang dibatasi</p> <p>10. menerapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang bernilai tinggi di sepanjang sisi jalan</p> <p>11. memantapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p>

KCU	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III	Jaringan Jalan Lintas Utara-Dulau Kalimantan	kolektor primer	
III.1.	Jaringan jalan lintas Nagas Badak-Putussibau		<p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan rusak alih dan melorong perkembangan di Pulau Kalimantan.</p> <p>b. meningkatkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan PKSN Nagasbadak dan FKW Putussibau</p> <p>c. melaksanakan dan memulihkan investasi jaringan jalan yang melaksanakan PKW Putussibau dengan Bandar Utara Pangsuma, untuk mendukung pemukiman dan distribusi penduduk tinggalan</p> <p>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang melayani kawasan Arelatan Kayas Hulu dar Sekitarnya</p> <p>e. meningkatkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang kepada dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat</p> <p>f. meningkatkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang kepada dengan Bandar Utara Pangsuma</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan persembesannya dibatasi</p> <p>h. merencanakan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berbatasan langsung di sepanjang sisi jalan</p> <p>i. melakukan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang persembesan jalan</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.	Jalur-jalan lintas Temajuk-Aruk-Jaya, Paksi-Batang-Aruk-Jaya, Nangka-Badai	strategis nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk kawasan perkotaan nasional dan mendukung perekonomian di Pulau Kalimantan b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Paksi-Aruk, PKSN Jagatibabang, PKSN/PKW Hutikaur, PKSN Jata, dan PKSN Nangabadar c. mengembangkan jaringan strategis nasional yang melayani Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Saragau dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya d. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional dalam rangka meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keberadaan kawasan berfungsi lindung e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dalam meningkatkan fungsi-fungsi yang mendukung pembangunan nasionalnya, dibatasi f. menerapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
III.3.	Jalur-jalan lintas Palasibau-Jaya, Paksi-Long Nawar, Malinau-Long Miliang	strategis nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendukung perekonomian di Pulau Kalimantan b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Paksi-Batang, PKSN Long Pakangai, PKSN Long Nawar, dan PKSN Long Miliang c. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional dalam rangka meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia dengan memperhatikan keberadaan kawasan berfungsi lindung

KCD	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memertahi ketentuan ruang penguasaan jalan</p>
IV.	Jaringan Jalan Pengumpul di Pulau Kalimantan		<p>a. mengidentifikasi dan menetapkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendukung perkembangan di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengotomatiskan jaringan jalan yang terhubung ke PKW/TKSN Lutukong</p> <p>c. mengidentifikasi jaringan jalan yang melayani Kawasan Adalalan Sanggau</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memertahi ketentuan ruang penguasaan jalan</p>
IV.2.	Jaringan jalan lintas Tayan-Sosok	arteri primer	<p>a. mengembangkan dan mempertahankan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendukung perekonomian di Pulau Kalimantan</p> <p>b. memanfaatkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpul Pulau Kalimantan yang menghubungkan jaringan jalan lintas Selatan Pulau Kalimantan dengan jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, serta menghubungkan PKN Perantak dengan PKW Sanggau</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.B.	Jaringan jalan lintas yang Aragung-Blarajang-Kantau- Kardandung-Pantau Hambawang-Barabai- Paringin-Tanjung - Mulara Komar -Batu Sayar & Kureto	: primer	<p>c. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi Sungai Kapuas</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya menengah; difungsi</p> <p>e. menetapkan ketentuan polarisasi lahan yang bertinggisi lindang di sepanjang sisi jalan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan, bangunan, di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, rasional dan mendorong perkembangan di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKN Banjarmasin-Barjambara, PKW Marabau, dan PKW Amuntai</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKN Banjarmasin-Banjarkara dengan Bander Udara Syamsudin. Noor, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan yang melayani Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Banjarmasin</p> <p>g. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Syamsudin Noor</p> <p>h. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi Sungai Barito</p> <p>i. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya menengah dibatasi</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.4.	Jaringan jalan kelas Tanah Tiliam-Caling	kolektor primer	<p>j. menerapkan ketentuan pelarangan affil tangsi lahan yang berfungsi lindang di sepanjang sisi jalan;</p> <p>k. merencanakan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi kebutuhan ruang perawasan jalan;</p> <p>a. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Palau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung ke KSN Paloh-Aruk</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan KSN Paloh-Aruk dengan Bandar Udara Paloh, untuk mendukung pemasatan dan distribusi produk unggulan;</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Paloh</p> <p>e. memantapkan fungsi sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecondongan pengembangan nuansanya dibatasi</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelarangan affil tangsi lahan yang berfungsi lindang di sepanjang sisi jalan</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi kebutuhan ruang perawasan jalan</p>
IV.5.	Jaringan jalan lintas Tebelian-Sintang, Pattusibau	kolektor primer	<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Palau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Sintang dengan PKW Transisi Susilo dan PKW Fatusibau dengan Bandar Udara Pangsuma, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan.</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengembangkan jaringan jalan yang melayani Kawasan Andalar, Sanggau serta Kawasan Andalar Kapuas Ulu dan Sekitarnya</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan bagian baru</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Baradar Uluara Pangsuma dan Bandar Uluara Sialiti</p> <p>g. memantapkan ruang di sepanjang sisi jalan dan sekitar titik akses intermodal (menunggu) hingga hingga yang kecerdasan pembangunan utamanya di sisi</p> <p>h. menetapkan ketentuan, pelaksanaan dan tugas lahan yang bertugas hingga di sepanjang sisi jalan</p> <p>i. menetapkan garis serpadu, bangunan, di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang penguasaan jalan</p>
TV.6.	Jaringan jalan Lintas Ketapang- Nanga Tayap	kolektor primer	<p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan, untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendukung perkembangan di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung ke PKW Ketapang</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Ketapang dengan Bandar Uluara Rahadi Usman dan Telabahan Ketapang, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan yang melayani kawasan Andalar, Ketapang dan Sekitarnya</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan bagian baru</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Belahabon Ketapang</p> <p>g. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Uluara Rahadi Usman</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.7.	Jaringan jalan lintas Kabupaten-Tumbang Talok > Laksas-Simpang Sungai Asem	kolektor primer	<p>h. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi Sungai Pagar.</p> <p>i. mengembangkan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi Sungai Tengah</p> <p>j. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya menengah dibatasi</p> <p>k. menerapkan ketentuan pelarangan alat transportasi yang berbahaya di sepanjang sisi jalan</p> <p>l. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang perawat jalan</p> <p>4. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan, rasial dan merdanya perkebunan di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung ke PKN Palangkaraya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKN Palangkaraya dengan Bandar Udara Tjilik Riwet, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan yang melayani kawasan Andalan Kuala Kapuas</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Tjilik Riwet</p> <p>g. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi Sungai Kahayan</p> <p>h. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya menengah dibatasi</p> <p>i. menerapkan ketentuan pelarangan alat transportasi yang berbahaya di sepanjang sisi jalan</p> <p>j. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang perawat jalan</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.8.	Jaringan jalan lintas Muara Teweh-Anjapah-Tamirang Tayan-Kelau	Kolektor primer	<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, nasional dan mendukung perekonomian di Palau Kalimantan.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung ke PKW Muara Teweh</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang melayani Kawasan Ardalan Muara Teweh dan Kawasan Andalau Buntok</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan bagian Timur</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelarangan alit fungsi lahan yang bernilai tinggi di sepanjang sisi jalan</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan</p>
IV.9.	Jaringan jalan lintas Ewasabai-Mabaur	Kolektor primer	<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, nasional dan mendukung perekonomian di Palau Kalimantan</p> <p>b. memanfaatkan jaringan jalan yang merupakan bagian dari ruas jalan yang menghubungkan PKW Marapara dengan PKW Tanel Orayot</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan alit fungsi lahan yang bernilai tinggi di sepanjang sisi jalan</p>

KCU	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV. C.	Jaringan jalan lintas Simbang Saragat-Kerua Anyer	kelekar primer	<p>f. memanfaatkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memahami ketentuan ruang perkuasaan jalan.</p> <p>g. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan perkotaan awal dan mendukung perkembangan di Pulau Kalimantan.</p> <p>h. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKN Bantuanasir-Banjartara dengan PKW Marabahan</p> <p>i. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKN Banjarasin-Banjartara dengan Bantar Uluw, Syamsudin Noer dan Palabalan Banjarmasin, atau melakukan pemukiman dan distribusi produk unggulan</p> <p>j. mengembangkan jaringan jalan yang mencakup kawasan Karadangan dan Sekitarnya Palau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>k. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung dengan Pelabuhan Banjarmasin</p> <p>l. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung dengan Bantar Udara Syamsuddin Noer</p> <p>m. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung dengan jaringan transportasi Sungai Barito</p> <p>n. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung dengan jaringan Penyeberangan Penghubung Sabak</p> <p>o. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang mendorong pengembangan mananya dibatasi</p> <p>p. menerapkan ketentuan pelarsangan di Lintang lahan yang berfungsi melindungi di sepanjang sisi jalan</p> <p>q. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memahami ketentuan ruang perkuasaan jalan.</p>

KCU	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.1.1.	Jaringan Jalur, Lintas Simpang Perdan-Mali	Kolektif primer	<p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan perkotaar, nasional dan mendorong perekonomian di Palak Kalimantan.</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan yang merupakan bagian dari rias jalan yang menghubungkan PKW Saraga dengan Pelabuhan Malai</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang melayani kawasan Andalar Sasamawa</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Malai</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kesederhanaan pengembangannya mengnya dibatasi</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelarangan alat fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasat jalan.</p>
IV.1.2.	Jaringan Jalur, Lintas Simpang Damau-Sendawar-Leng Bangun-Leng Pahunggi	Kolektif primer	<p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan perkotaar, nasional dan mendorong perekonomian di Palak Kalimantan.</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan yang merupakan bagian dari rias jalan yang melayani PKW Sendawar</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang melayani kawasan Andalar Sasamawa</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kesederhanaan pengembangannya mengnya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan alat fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasat jalan.</p>

KCU	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.3.	Jaringan jalan linias Anjungan- Rea gkuyotig-Sanggajleeks	Kolektor primer	<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalan arterik meningkatkan keterkaitan di kawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Palau Kalimantan.</p> <p>b. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengalangan ruang dibatasi</p> <p>c. menerapkan bangunan pelarangan alit fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>d. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan.</p>
IV.4.	Jaringan jalan linias Atenaakig-Tanitimbis	strategis nasional	<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalan arterik meningkatkan keterkaitan di kawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Palau Kalimantan.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung ke PKW Tanimbis</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang melayani Kawasan Ardaalan Takapabuma dan sekitarnya</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengalangan ruang dibatasi</p> <p>e. menetapkan ketentuan pelarangan alit fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan.</p>

KCU	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.5.	Jaringan jalan lintas Palangkaraya-Bukitlali-Bantuk-Ampah	strategis rasional	<p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan arterik meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan memelihara perkembangan di Palangkaraya Kalimantan.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKN Palangkaraya dengan PKW Bantuk</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKN Palangkaraya dengan Bandar Udara Tjilik Riwut, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan yang melayani kawasan Andalan Kuala Kapuas dan Kawasan Andalar Barak</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Dalam Kalimantan Bagian Timur</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Tjilik Riwut</p> <p>g. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi sur-sai di Sungai Kapayan, Sungai Sebarasan, dan Sungai Barito</p> <p>h. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan derasar tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kesesatannya pengembangan lainnya difasilitasi</p> <p>i. memantapkan ketahanan pelarangan alih fungsi lahan yang bertinggisi lindang di sepanjang sisi jalan</p> <p>j. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.</p>
IV.6.	Jaringan jalan lintas G. Ling-Arak	strategis rasional	<p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan arterik meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan memelihara perkembangan di Palangkaraya Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung ke PKSN Palangkaraya</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.27.	Jaringan jalan lintas Sampit- Bangundana-Uluu, & Pandaran	strategis nasional	<p>c. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKSN Paloh-Paloh dengan Bandar Udara Paloh, untuk mendukung pemukiman dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan yang melayani kawasan Singsawang dan sekitarnya.</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Palau Kalimantan Bagian Barat</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Paloh</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang keserasmuan perkebunan masyarakat lokal</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarasan diik. Tangsi lahan yang berturasi lindars di sepanjang sisi jalan</p> <p>i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendukung perkembangan di Palau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang terhubung ke PKW Sampit</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Sampit dengan Pelabuhan Sampit, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan yang melayani kawasan Andalar, Sampit, Pangkalan Bun</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Palau Kalimantan bagian barat</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Sampit</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>g. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi Sungai Mentaya</p> <p>h. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan dan jalan untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan yang keverdinerungan pengembangan menggunakan teknologi yang lebih tinggi</p> <p>i. memanfaatkan ketersediaan pelayanan dan fasilitas lain yang berkaitan dengan sisi sepanjang sisi jalan</p> <p>j. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawalan jalan</p>
V.	Jalan Bebas Hambatan		
V.1.	Jaringan Jalan Sempang Perempatan-Balikpapan	Jalan Bebas Hambatan Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keberkailan dan perkembangan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani IKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Terengganey - Samarinda - Bontang sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendorong pengembangan Kawasan Andalar, Bontomatene dan Sekeloa</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan IKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Terengganey - Samarinda - Bontang dengan Bandar Udara Sepinggan dan Pelabuhan Balikpapan, untuk mendukung pemukiman dan distribusi produk pertanian</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan jalan Kota Api Lintas Selalar Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Balikpapan</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Sepinggan</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menyalah fungsi yang keverdinerungan pengembangan ruangnya dibatasi</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.	Jaringan Jalur Balikpapan - Samarinda	Jalan Bebas Hambatan Antarbata	<p>h. menerapkan kebijakan, peraturan, alih fungsi lahan yang bernilai tinggi di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan.</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Palau Kallimantan.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Pontang sebagai pusat pertumbuhan utama dan melakukan pengembangan kawasan Andalar, Bontomatenehjam dan Sekitarnya.</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Pontang dengan Pelabuhan Balikpapan, Bandar Udara Singsingam, dan Bandar Udara Samarinda Baru, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan.</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan Jalur Kereta Api lintas Selatan, Palau Kallimantan Bagian Timur.</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Balikpapan.</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Singsingam dan Bandar Udara Samarinda Baru.</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kesederhanaan, pengembangan, ruangannya dibatasi</p> <p>h. menetapkan ketentuan, pola ruang alih fungsi lahan yang bernilai tinggi di sepanjang sisi jalan bebas hambatan.</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL
V.3.	Jaringan jalan Samarinda - Tenggarong	Jalan Bebas Hambatan Antarkota	<p>1. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perkembangan di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Belitang sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan Kawasan Amalika Bunsamitchehjam dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mengkaitkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Belitang dengan Pelabuhan Balikpapan, Bandar Udara Sepinggan, dan Bandar Udara Samarinda Baru untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan jalan Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan: Baglar, Timor</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Balikpapan</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Sepinggan dan Bandar Udara Samarinda Baru</p> <p>g. memfasilitasi ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berhimpit di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>

KCU	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.4.	Jaringan jalan Sei Puyuh-Pontianak	Jalan Bebas Hambatan Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendukung perekonomian di Palang Kiri Limantan.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Pontianak sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan Ardalan Pontianak dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKN Pontianak dengan Bandara Udara Supadio dan Pelabuhan Pontianak, untuk mendukung penyesuaian dan distribusi pasokan perdagangan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang berpadu dengan jaringan jalan Kereta Api Lintas Selatan, Palang Kalimantan Bagian Barat</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang berpadu dengan Pelabuhan Pontianak</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandara Udara Supadio</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan diil, Tangsi lahan yang berfungsi melindungi di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan.</p>
V.5.	Jaringan jalan Mempawah-Sei Puyuh	Jalan Bebas Hambatan Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendukung perekonomian di Palang Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Mempawah sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan Kawasan Ardalan Pontianak dan Sekitarnya</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.6.	Jalan-jalan Perumahan Taya-C	Jalan Bebas Hambatan Antarkota	<p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan jalan Kereta Api Lintas Selatan Dalam Kalimantan, Bagian Barat;</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencapai hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lintang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p>
			<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional; dan mendorong perkembangan di Pulau Kalimantan;</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani FKN Pontianak sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan. Kawasan Adadan Pontianak dan sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan FKN Pontianak dengan Bandar Udara Supadio dar. Pekanbaru, Pontianak, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Dalam Kalimantan, Bagian Barat;</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Telabehat, Pontianak</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Supadio</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>h. menerapkan ketentuan pedoman alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memiliki ketentuan ruang penguasaan jalan</p>
V.7.	Jaringan Jalan Jilang Anggang- Pelabuhan	Jalan Bebas Hambatan Aduarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Banjarmasin-Banjarnegara sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan Kawasan Andalau Banjarmasin Raya dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Kereta Api Jilang Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas mencapai tingkat tinggi yang kondusif untuk pengembangan ruangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memiliki ketentuan ruang penguasaan jalan</p>
V.8.	Jaringan Jalan Singkawang- Mempawah	Jalan Bebas Hambatan Aduarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKW Singkawang dan PKW Mempawah sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan Kawasan Andalau Singkawang dan Sekitarnya</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.9.	Jaringan Jalur Kuala Kapuas- Banjarmasin	Jalan Bebas Hambatan Antarkota	<p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Beritang dengan Bandar Udara Sepinggan dan Pelabuhan Balikpapan, untuk mendukung pemukiman dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kota Api Lintas Selatir, Palau Kalimantan Bagian Barat</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Balikpapan</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Sepinggan</p> <p>g. memantapkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang koheren untuk pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>h. menerapkan besutuan pelarangan alat fungsi lahan yang berhitung di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, rasional dan meredakan perkoloman di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Banjarmasin-Banjarmasin dan PKW Kuala Kapuas sebagai pusat pertumbuhan, utama dan mendukung pengembangan Kawasan Banjarmasin Raya dan Sekelarnya serta Kawasan Kuala Kapuas</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Kuala Kapuas dengan Bandar Udara Syamsuddin Noer dan Pelabuhan Banjarmasin, untuk mendukung pemukiman dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatir, Pulau Kalimantan Bagian Timur</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengertubangkan jaringan jalan yang terpadat dengan Pelabahan Banjarmasin</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadat dengan Bandar Udara Syamsudin Noor</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kondusif untuk pengembangan ruangannya dibatasi</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan alat transportasi lahan yang berukuran luas, di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan</p>
V.10.	Jaringan jalan Marabahan-Banjarmasin	Jalan Bebas Hambatan Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Dalam Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Banjarmasin-Banjarmasin dan PKW Marabahan sebagai prasarana pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan Kawasan Arakalan Banjarmasin Kaya dan Sekitarnya serta Kawasan Amalalan Kuala Kapuas</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Marabahan dengan Bandar Udara Syamsudin Noor dan Pelabahan Banjarmasin untuk mendukung pemerataan dan distribusi produk uregudat</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadat dengan jaringan jalur kereta Api lintas Selatan Dalam Kalimantan bagian Timur</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadat dengan Pelabahan Banjarmasin</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadat dengan Bandar Udara Syamsudin Noor</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kondusif untuk pengembangan ruangannya dibatasi</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.1.	Jaringan Jal. Ling. Anggang- Marapara	Jalan Bebas Hambatan Antarkota	<p>h. menerapkan ketentuan pelarangan di. Tangsi lahan yang bernagasi lintang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan.</p> <p>i. menelapkan garis seropada bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, rasional dan meredakan perokonomian di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani TKW Marapara sebagai pusat pertumbuhan, utama dan mendukung pengembangan kawasan, Banjarmasin, Raya dan sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Marapara dengan Bandar Udara Syamsuddin Noor, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan Jalur Kereta Api Tirtas Selatan, Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Syamsuddin Noor</p> <p>f. memantapkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya di sisi</p> <p>g. menerapkan ketentuan pelarangan di. Tangsi lahan yang bernagasi lintang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>h. menetapkan garis seropada bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p>

KCU	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.12.	Jaringan Jalan Pelalihan - Tagalan	Jalan Bebas Hambatan Antar kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan men dorong perkembangan di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Banjarmasin-Banjarbaru dan sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan Kawasan Andalas Banjarmasin Raya dan sekitarnya serta Kawasan Andalas Batulicin</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Kereta Api Kelas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kondusif untuk pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menerapkan kesantunan pelarangan alih fungsi lahan yang berhinggah hindung di sepanjang sisi jalan bebas hambatan.</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan</p>
V.13.	Jaringan Jalan Pagatan - Bandingin	Jalan Bebas Hambatan Antar kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perkembangan di Palat Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Terengganj - Samarinda - Bontolug sebagai pusat pertumbuhan utama dan mandiri, pengembangan Kawasan Andalas Bontolug dan sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan jalan Kereta Api Kelas Selatan Palat Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kondusif untuk pengembangan ruangnya dibatasi</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.14.	Jaringan jalan Batulicin-Tarah Geygat (Kuaroi)	Jalan bebas hambatan Antarkota	<p>c. menetapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang bernilai tinggi di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, rasional dan merdanya perkembangan di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKW Tanah Grogol sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan kawasan PKW Kolaharu dengan Pelabuhan Batulicin dan PKW Tanah Grogol dengan Pelabuhan Tanah Geygat untuk meningkatkan permasalahan dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan jalan Kereta Api Lintas Selatan, Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Batulicin dan Pelabuhan Tanah Grogol</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecondongan perlebarnya dibatasi</p> <p>g. menerapkan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang bernilai tinggi di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan</p>

KCU	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.15.	Jaringan jalan Tanah Gregot-Penajene	Jalan Bebas Hambatan Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan risiko rendah dan daratan perkebunan di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengambangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKW Tanah Gregot sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan Kawasan And. L. Hamsantetajam dan sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Tanah Gregot dengan Pelabuhan Tanah Gregot, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Tanah Gregot</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas penggunaan tinggi yang kesemuanya dikembangkan secara terpadu</p> <p>g. merencanakan ketentuan pelarangan zili nunesi lahan yang berfungsi fridung di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>h. mendapatkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang yang sesuai jalan</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.16.	Jaringan jalan Samarinda-Bontang	Jalan Bebas Hambatan Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendukung perekonomian di Pulau Kalimantan.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Terengganey - Samarinda - Bontang sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendorong pengembangan kawasan Antalar, Eonsantibajam dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dengan Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Bontang, dan Pelabuhan Tanjung Samud, termasuk Terminal Blok Tuan dan Terminal Tanjung Laut, untuk mendukung penerusan dan distribusi produk unggulan.</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan jalan Kereta Api Lintas Selatan, Palau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Delabahan, Tanjung Samud, termasuk Terminal Blok Tuan dan Terminal Tanjung Laut.</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Samarinda Baru dan Bandar Udara Bontang</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang sesuai dengan pengembangan ruangannya</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelaksanaan alih fungsi lahan yang bertingkat di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi kelenturan ruang pengawasar jalan</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.17.	Jaringan Jalan Perawang-Sangats	Jalan Bebas Hambatan Antar kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Lenggarong-Samarinda-Berang dan PKW Sangata sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan Kawasan Andaker-Benzam-Jalam dan Sekitarnya serta Kawasan Ardalan Sasamawa</p> <p>c. mengembangkan jaringan bebas hambatan yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Tonilang dengan Bandar Udara Bentang, Delabahan Delabahan, Tanjung Saran, termasuk Terminal Blok Tuas dan Terminal Tanjung Laut, dan Pelabuhan Tanjung Sangata, untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk urugulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Intras Setar Dalam Kalimantan Bagian Timur</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Delabahan, Tanjung Saran, termasuk Terminal Blok Tuas dan Terminal Tanjung Laut, dan Pelabuhan Tanjung Sangat</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Kartang</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah-tinggi yang cenderung lebar persembangar ruangnya dibatasi</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan alat fungsi lahan yang bertinggai lindrig di sepanjang sisi jalan bebas hambatan.</p> <p>i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p>

NO.	JALAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.18.	Jaringan jalan Banjarmasin- Liang Anggang	Jalan kelas Hambaran Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani PKN Banjarmasin-Banjartara sebagai pusat pertumbuhan utama dan mendukung pengembangan Kawasan Industri Banjarmasin Raya dan sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKN Banjarmasin-Banjartara dengan Bandar Udara Syamsudin Noor dan Pelabuhan Banjarmasin untuk mendukung pemasaran dan distribusi produk unggulan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang terpadu dengan jaringan Jalan Kota Api Lintas Selatar Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Pelabuhan Banjarmasin</p> <p>f. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan Bandar Udara Syamsudin Noor</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecerdasan pengembangan mangrupa dibatasi</p> <p>h. mempercepat ketertarikan pelarangan alih fungsi lahan yang bertumpang tindih di sepanjang sisi jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR KERETA API NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

NO. JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur		
1.1. Jaringan jalur kereta api lintas batas negara - Samaranggari - Malinau - Tanjung Selor - Tanjung Redeb - Sanga - Bontang	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Kawasan Parbatasan Negara	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan MKN Kawasan Perbatasan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Santong, PKW Sangata, PKW Tanjung Redeb, PKW Tanjung Selor, PKW Malinau dan PKSN Samaranggari</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Antarkota-Tanjung Selor-Tanjung Sanga-Numukan-Pulau Bunyu-Mahina (Utanabumu) dan Sekitarnya, Kawasan Antalar, Bontang - Samarinda - Tenggarong - Balikpapan-Penajam dar. Sekitarnya (Bersamalebajam), Kawasan Antalar, Sangkulirang-Sanga-Ayuhara Wahana (Sasamaya), dan Kawasan Antalar-Tanjung Redeb dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan Jaringan Lintas Utara-Pulau Kalimantan, Jaringan Jalur Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Kalimantan, Beran, Bandar Udara Bontang, Pelabuhan Tanjung Santan, Pelabuhan Tanjung Selor, Pelabuhan Tanjung Sanga, Pelabuhan Malai dar. Pelabuhan Tanjung Redeb</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara</p> <p>e. membatasi pemeliharaan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat laju lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>f. membatasi timbulnya polusi antara lain dengan jalur kereta api dan jaringan jalan</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur</p>

NO. JARINGAN JALUR KERETA API	STRATEGI OPERASIONALISASI
<p>1.2. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Bojonegara-Samarinda-Balikpapan</p>	<p>kereta api</p> <p>1. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang mendukung pengembangan ruangnya difestasi</p> <p>2. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkotaan</p>
<p>1.2. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota</p>	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani FKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Beslayang</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Aradalan Bamsar,Mejayan dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah, Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Komering, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Semping, Pelabuhan Balikpapan, dan Pelabuhan Tanjung Sarijan, termasuk Terminal Blok Taan dan Terminal Tanjung Laut</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>e. membatasi jumlah perubahan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan</p>

NO.	LALINGGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>memperhatikan dampak lingkungan dan kebijakan pengembangan jaringan jalur kereta api</p>
5.			<p>memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kesederhanaan pengembangan ruangnya dibatasi</p>
h.			<p>menerapkan kelenkan pelarangan pemantauan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu keperluan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
1.3.	Jaringan jalur kereta api lintas Balikpapan - Tanah Grogot - Tanjung - Ampah	Jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PEN Kawasan Perkotaan Balikpapan - Tembung - Samarinda - Bontang dan PKW Tanah Grogot</p>
			<p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Aradalan Ponsambalam dan Sekitarnya</p>
			<p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Sepunggai, Pelabuhan Balikpapan, dan Pelabuhan Tanah Grogot</p>
			<p>d. membatasi pemantauan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat laju lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p>
			<p>e. membatasi jumlah perlintasan, terutama antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur</p>
			<p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p>

NO.	JALURAN JALUR KERETA API	JENIS	SITUASI OPERASIONALISASI
			<p>5. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya di sisi</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu keperluan operasi dan keselamatan transportasi perkotaan</p>
1.4.	Jaringan jalur kereta api lintas Ampel Muara Teveh	Jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Muara Teveh dan Kawasan Andalan Barok</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu dengan pengembangan jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan dan jaringan jalan pengumpul Pulau Kalimantan</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>e. membatasi timbulah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya di sisi</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api</p>

NO.	LALINGAN JALUR KERETA API	JENIS	SITUALI OPERASIONALISASI
15.	Jaringan jalur kereta api lintas Anpal-Buntok-Palangkaraya	Kereta Api Antarkala	<p>yang dapat mengganggu keberlangsungan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memperpanjang jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKW Buntek dan PKN Palangkaraya</p> <p>b. memperpanjang jaringan jalur kereta api untuk mendukung pengembangan Kawasan Antarkala Buntok dan Kawasan Antarkala Kapatua</p> <p>c. memperpanjang jaringan jalur kereta api yang terputus terutama dengan pengembalian jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan pengumpul Pulau Kalimantan, dan Bunkar Uluara, Uluik Kluat</p> <p>d. membina dan pematian fasilitas umum yang perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitar jalur kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan tanggisan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan ketahanan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakikan dengan tingkat utilitas menengah hingga tinggi yang keberlanjutan pengembangannya harusnya dibatasi</p> <p>h. menerapkan kesentuhan pelarangan pemanfaatan ruang pengembangan jalur kereta api yang dapat mengganggu keselamatan dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

SITUALI OPERASIONALISASI

JENIS

NO. JARINGAN JALUR KERETA API

- 1.6. Jaringan jalur kereta api lintas
Batulicin - Telalihar -
Banjarmasin - Kuala Kapuas -
Palang Patau - Palangkaraya
- Jalur Kereta Api
Antarkota
- a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Banjarmasin, PKW Kuala Kapuas, dan PKN Palangkaraya
b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalo, Batulicin, Kawasan Andalar, Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Kuala Kapuas
c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan jaringan jalur lintas selatan, jaringan jalan perompak, Bdara Kalimantan, Bandar Udara Syamsuddin Noer, Bandar Udara Tjiik Kwant, Pelabuhan Batulicin, dan Pelabuhan Banjarmasin
d. membatasi pamanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api
e. membatasi jumlah perlintasan, sehingga antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur
f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api
g. memantapkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi
h. memantapkan ketertarikan pelatungan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menunjang keberfungsian operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
- 1.7. Jaringan jalur kereta api lintas Jalur Kereta Api

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	SITUALEGI OPERASIONALISASI
18.	Samarinda-Tenggarong-Kotabangun	Antarkota	<p>Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontarag</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan, Atalala Konvensional dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan jaringan Jalur Lintas Tengah, Pulau Kalimantan, Jaringan Jalur Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Samarinda Berau dan Pelabuhan Samarinda</p> <p>d. memfasilitasi pemanfaatan ruang yang peska terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>e. memfasilitasi timbulah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur</p> <p>f. menetapkan garis sempadan langgitan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan ketahanan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang cenderung pengembangan pembangunan ruangnya dibatasi</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu keberlangsungan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
19.	Jaringan jalur kereta api lintas Muara Leweh-Furuk Cahu	Jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani PKW Muar. Leweh.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan, Andalan Muara</p>

NO.	JALUR KERETA API	JENIS	SITUALI OPERASIONALISASI
			Teweh
			<ul style="list-style-type: none"> c. merencanakan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan
			<ul style="list-style-type: none"> d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api
			<ul style="list-style-type: none"> e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan
			<ul style="list-style-type: none"> f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api
			<ul style="list-style-type: none"> g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilalukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya diutamakan
			<ul style="list-style-type: none"> h. melakukan kegiatan pelatangan pemanfaatan ruang pengembangan jalur kereta api yang dapat menunjang keberlangsungan operasi dan keselamatan transportasi perkotaan
1.8.	Jaringan jalur kereta api lintas Ampal-Banggayang	Jalur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan jaringan jalan pengunungan Pulau Kalimantan
			<ul style="list-style-type: none"> b. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	SITUALI OPERASIONALISASI
			<p>c. membatasi jumlah perlintasan, sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur.</p> <p>d. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>e. memantapkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. menerapkan ketentuan peraturan perundang-uran yang pengawasan jalur kereta api yang dapat menunjang keberhasilan operasi dan keselamatan transportasi perkotaan</p>
II.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Salat n Pulau Kalimantan Bagian Barat		
II.1.	Jaringan jalur kereta api lintas Palangkaraya-Sampit-Nanga Bulik-Nanga Tayap-Sanggau	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Palangkaraya, PKW Sampit, dan PKW Sanggau</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Sari, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Kelapang dan Sekelanya, serta Kawasan Andalan Sanggau</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan jaringan jalur Lintas Tengah, Palan Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, dan Pendar Udara Ujung Ujung</p> <p>d. membatasi pemukiman, ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lahan lintas</p>

NO.	JALUR KERETA API	JENIS	SITUASI OPERASIONALISASI
			<p>kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>c. membatasi jumlah perdinas, sedang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan.</p> <p>f. menetapkan garis sempadan tanggar di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan, dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>g. membatasi ruang di sepanjang sisi jalan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangannya dibatasi</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu keberlangsungan operasi dan keselamatan transportasi perkotaan</p>
11.2.	Jaringan jalur kereta api lintas Sanggar Pontianak	Jaringan jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk mengembangkan PKM Pontianak dengan PKW Sanggar</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Sanggar</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan jaringan jalur Lintas Tengah, Palau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Palau Kalimantan, Bandar Udara Sempadi, dan Pelabuhan Pontianak</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p>

STRATEGI OPERASIONALISASI

JENIS

NO. JARINGAN JALUR KERETA API

- c. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur;
- f. menetapkan garis sempadan langgar di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api
- g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dibuktikan dengan tingkat intensitas merengas hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi
- h. menetapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengarsunan jalur kereta api yang dapat mengganggu keberfungsian operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
- 11.5. Jaringan jalur kereta api lintas Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas-balas Negara
- Jaringan jalur Kereta Api Antar kota dan Kawasan Perbatasan Negara
- a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Pontianak, PKW Mempawah, PKW Singkawang, dan PKW Sambas
- b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Arehulu Pontianak dan Sekitarnya serta Kawasan Arehulu Singkawang dan Sekitarnya
- c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu termasuk dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara Prima Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bendur Utara Sapadu, dan Pelabuhan Pontianak
- d. membatasi paman buana ruang yang perlu adap dampak lingkungan akibat lala lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api
- e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan

jalur.

- f. menetapkan garis sempadan langgar di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan kereta api
- g. memantapkan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api dibelak dengan fungsi intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi
- h. menetapkan ketentuan peraturan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat meningkatkan keselamatan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

II.4. Jaringan jalur kereta api lintas Sumba-Bengkayang-Ngulang-Sanggau-Sintang-Putussalib

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

- a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKW Samba, PKW Sanggau, PKW Singau, dan PKW Putussalib
- b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kayasar, Andalan Singkawang dan sekitarnya, kawasan Andalan Sanggau, serta kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekelanya
- c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Pengaman Pidan Kalimantan, Bandar Udara Pangsuma dan Bandar Udara Susilo
- d. membatasi pemat batasan ruang yang perlu ada di lingkungan sekitar bila lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api

NO. JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	SITUASI OPERASIONALISASI
		<p>c. membatasi jumlah perlintasan, sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan.</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya diawasi</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu keberlangsungan operasi dan keselamatan transportasi perkotaan</p>
<p>11.5. Jaringan jalur kereta api lintas Pontianak-Ngabung</p>	<p>Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota</p>	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani PKN Pontianak</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan jalan Jalinan Jalan Tulus Tanjung, Palau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Sepadid, dan Pelabuhan Pontianak</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>e. membatasi jumlah perlintasan, sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan</p>

NO. JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>l. menciptakan garis sempadan bangkai di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat utilitas menengah hingga tinggi yang berkontribusi pengembangan ruang yang dibatasi</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pangsasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kapsa ruang operasi dan keselamatan transportasi perkotaan</p>

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI DAN PENYEKERANGAN DI PULAU KALIMANTAN

NO.	TRANSFORMASI SUNGAI DAN PENYEKERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaring-jaring Transportasi Sungai		
I.1.	Sungai Kapuas (Provinsi Kalimantan Barat)	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	<p>a. mengembangkan jaringan transportasi sungai Kapuas untuk melayani FKN Pontianak, PKW Ponsasbar, PKW Sintang, dan PKW Sanggau, dan kawasan pemukiman pada bagian hulu Sungai Kapuas</p> <p>b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kapuas yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Kroya Api Lintas Selat, Pulau Kalimantan bagian Barat, dan Jaringan Perhubungan Pergulubang Sabak</p> <p>c. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kapuas untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya</p> <p>d. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Kapuas dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Kapuas</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berkembang pada keberadaan alur pelayaran Sungai Kapuas</p> <p>f. menertakan ketentuan peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai di Sungai Kapuas</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Kapuas</p> <p>h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkaran Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkaran Keperluan Pelabuhan di Sungai Kapuas karas mendapatkan izin sesuai</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKSIAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
12.	Sungai Barito	Memungkahkan keterkaitan antarwilayah	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan jaringan transportasi Sungai Barito untuk melayani PKW Muara Taweh, PKW Barbak dan PKW Amuntai, dengan PKW Banjarmasin, dan kawasan permukiman pada bagian hulu Sungai Barito mengembangkan jaringan transportasi Sungai Barito yang terpadu dengan jaringan jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Palang Kalimantan, Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur, dan Jaringan Penyeberangan Perhubungan Sabuk meningkatkan jaringan transportasi Sungai Barito untuk melayani pengembangan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggas lainnya memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Barito dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Barito membantu pemantauan perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran Sungai Barito menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran sungai di Sungai Barito memerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Barito memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Sungai Barito untuk mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO.	URANSURURASI SUNGAI DALAM PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.	Sungai Mahakam	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	<p>a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Mahakam untuk melayani PKNW sorodewar dan TKN Kawasan Perkolahan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, dan kawasan permukiman pada bagian Hulu Sungai Mahakam</p> <p>b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Mahakam yang terpadu dengan jaringan jalan lintas selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan lintas tengah Pulau Kalimantan, jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan, dan jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>c. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Mahakam untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggas lainnya</p> <p>d. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuh. Sungai Mahakam dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Mahakam</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran Sungai Mahakam</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelayanan keadilan di ruang ulara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran sungai di Sungai Mahakam</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayanan di Sungai Mahakam</p> <p>h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Sungai Mahakam harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	URANSI FIKLISI SUNGAI DAN PENYELERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.4.	Sungai Negara	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	<p>a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Negara untuk melayani PKW Amanti dengan IKN Banjarmasin, dan kawasan permukiman pada bagian hulu Sungai Negara</p> <p>b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Negara yang terpadu dengan jaringan transportasi Sungai Barito</p> <p>c. memantapkan mangrove di dalam dan di sekitar pelabuhan. Sungai Negara dengan mempertahankan kebiasaan mangrove untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan. Sungai Negara</p> <p>d. membatasi pemanfaatan peminan yang berdampak pada keberagaman alur pelayaran Sungai Negara</p> <p>e. menetapkan ketentuan, peraturan, kegiatan di mangrove bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai di Sungai Negara</p> <p>f. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Negara</p> <p>g. memantapkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Sungai Negara harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
1.5.	Sungai Mentaya	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	<p>a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Mentaya untuk melayani PKW Sempit dengan pusat-pusat permukiman di bagian hulu Sungai Mentaya</p> <p>b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Mentaya yang terpadu dengan jaringan Jalan Jantas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Jintas Selatan Pulau</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKSIAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/ALTERNASI
	Kalimantan Bagian Barat		
c.	mengembangkan jaringan transportasi Sungai Mentaya untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya		
d.	memanfaatkan ruang di dalam darat di sekitar pelabuhan Sungai Mentaya dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan persembelangan kawasan pelabuhan Sungai Mentaya		
e.	membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran Sungai Mentaya		
f.	menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberlanjutan alur pelayaran sungai di Sungai Mentaya		
g.	menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Mentaya		
h.	memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepertahanan Pelabuhan di Sungai Mentaya Laras mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
16.	Sungai Lamanda	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	
a.	mengembangkan jaringan transportasi Sungai Lamanda untuk melayani PKW Pangkajene dan dengan pusat-pusat permukiman di bagian Hulu Sungai Lamanda		
b.	mengembangkan kinerja transportasi Sungai Lamanda yang terpacu dengan jaringan Jalan Jintas Selatan Pulau Kalimantan		
c.	mengembangkan jaringan transportasi Sungai Lamanda untuk melayani pengangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya		

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKSIAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.7.	Sungai Kelay	Meningkatkan ketertarikan antarwilayah	<p>d. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Lamandau dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Lamandau.</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan alir pelayaran Sungai Lamandau</p> <p>f. menerapkan ketentuan peraturan yang bebas di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alir pelayaran sungai di Sungai Lamandau</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Lamandau</p> <p>h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepelabuhan Pelabuhan di Sungai Lamandau Laras memadamkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kelay untuk melayani PKW Tarjoun, Kedah dengan patah-patah pemukiman di bagian hulu Sungai Kelay</p> <p>b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kelay yang terhubung dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Berau Timur</p> <p>c. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kelay untuk melayani pengangkutan Batubara, Lasi hulu, dan komoditas unggas dan lainnya</p> <p>d. memanfaatkan ruang di dalam dar. di sekitar pelabuhan Sungai Kelay dengan</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/ALIASI
1.8.	Sungai Sembakung	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	<p>memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan persembakung kawasan pelabuhan Sungai Kelay</p> <p>a. menubatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran Sungai Kelay</p> <p>b. menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan di mangrove bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran sungai di Sungai Kelay</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Kelay</p> <p>d. memantapkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Sungai Pelabuhan di Sungai Kelay harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>e. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Sembakung untuk melayani prasarana pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sembakung</p> <p>f. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Sembakung yang terpadu dengan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan jaringan jalan perhubungan Pulau Kalimantan</p> <p>g. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Sembakung untuk melayani perangkutan batubara, hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya</p> <p>h. memantapkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Sembakung dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan persembakung kawasan pelabuhan Sungai Sembakung</p> <p>i. menubatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran Sungai Sembakung.</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/ALIASI
19.	Sungai Sebuku	Memungkahkan keterkaitan antarwilayah	<p>1. menetapkan ketentuan pelayanan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alir pelayaran sungai di Sungai Sebuku</p> <p>2. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Sebuku</p> <p>3. memantapkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Sungai Sebuku yang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. menumbuhbalkan jaringan transportasi Sungai Sebuku untuk melayani pasar-pasar pemukiman di bagian hulu dengan hilir Sungai Sebuku</p> <p>5. menumbuhbalkan jaringan transportasi Sungai Sebuku yang berada dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan</p> <p>6. memantapkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Sebuku dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasi awal dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Sebuku</p> <p>7. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alir pelayaran Sungai Sebuku</p> <p>8. menetapkan ketentuan pelayanan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alir pelayaran sungai di Sungai Sebuku</p> <p>9. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Sebuku</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKSIAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.10	Sungai Sesayap	Memingkatkan keterkaitan antarwilayah	<p>8. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingsungun Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingsungun Kepentingan Pelabuhan di Sungai Sebaiknya harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>9. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Sesayap untuk melayani trasat-pusat pemukiman di bagian hulu daerah bagian hilir Sungai Sesayap</p> <p>10. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Sesayap yang sepadu dengan Jaringan Jalan Trans Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalan Tulas Utara Pulau Kalimantan</p> <p>11. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Sesayap untuk melayani pengangkutan batubara, kasil tulin, dan komoditas unggdar lainnya</p> <p>12. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Sesayap dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan penyediaan kawasan pelabuhan Sungai Sesayap</p> <p>13. menahului pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberakaan alur pelayaran Sungai Sesayap</p> <p>14. menerapkan ketentuan pelayanan kegiatan di mang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberakaan alur pelayaran sungai di Sungai Sesayap</p> <p>15. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Sesayap</p> <p>16. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingsungun Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingsungun Kepentingan Pelabuhan di Sungai Sesayap harus mendapatk izin sesuai</p>

NO.	URANSFURKASI SUNGAI DAN PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.1.	Sungai Kayan	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kayan untuk melayani PKW Tanjung Selor dengan pusat-pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Kayan mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kayan yang terpadu dengan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kayan untuk melayani pengangkutan barang-baru, fasilitas, dan komoditas unggulan lainnya memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Kayan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Kayan mendatangi pemukiman perikanan yang berkembang pada kawasan alur pelayaran Sungai Kayan menerapkan ketentuan pelayanan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah permukaan yang berdampak pada keberadaannya per pelayaran Sungai Kayan menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Kayan memanfaatkan ruang di dalam Daerah Tangkangan Kerja Pelabuhan dan Daerah Tangkangan Kepentingan Pelabuhan di Sungai Kayan harus memperhatikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1.2.	Sungai Sambas	Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> mengembangkan jaringan transportasi Sungai Sambas untuk melayani pusat-pusat

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
		keterkaitan antarwilayah	<p>Pemukiman di bagian hulu daerah bagian hulu Sungai Sambah</p> <p>mengembangkan jaringan transportasi Sungai Sambah yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan jaringan jalan lintas Utara Pulau Kalimantan</p> <p>memanfaatkan ruang di sekitar pelabuhan Sungai Sambah dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Sambah</p> <p>membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran Sungai Sambah</p> <p>menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara kelas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran sungai di Sungai Sambah</p> <p>menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Sambah</p>
1.3.	Sungai Kahayan	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	<p>memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepunung Pelabuhan di Sungai Sambah harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kahayan untuk melayani PKN Palangzaya dengan pusat pemukiman di bagian hulu Sungai Kahayan</p> <p>mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kahayan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan perintis Palau Kalimantan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan bagian Timur</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/ALIASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kahayan untuk melayani pengangkutan kalabara dan hasil hutan, dan komoditas unggulan lainnya d. memanfaatkan ruang di dalam darat di sekitar pelabuhan Sungai Kahayan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Kahayan e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan alir pelayaran Sungai Kahayan f. menetapkan ketentuan pelabuhan kegiatan di ruang pelabuhan di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alir pelayaran sungai di Sungai Kahayan g. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Kahayan h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepertahanan Pelabuhan di Sungai Kahayan Laras mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
I.14.	Sungai Sebangau	Meningkatkan ketertarikan antarwilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Sebangau untuk melayani pasar-pasar perikanan di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Sebangau b. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Sebangau dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Sebangau c. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan alir pelayaran

NO.	TRANSFORMASI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
L15.	Sungai Katingar.	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah.	<p>Sungai Sebatang</p> <ol style="list-style-type: none"> d. menerapkan kelentiar: pelatangan kegiatan di mang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada ketertarikan alur pelayaran sungai di Sungai Sebatang e. menetapkan kelentiar mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Sebatang f. memantapkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja: Ekabahon dan Daerah Lingkungan Kepentingan Ekabahon di Sungai Sebatang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			<ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Katingar untuk melayani pusat-pusat pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Katingar b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Katingar yang terpadu dengan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan c. memanfaatkan ruang di dalam darat di sekitar pelabuhan Sungai Katingar dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Katingar d. memfasilitasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran Sungai Katingar. e. menerapkan kelentiar: pelatangan kegiatan di mang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada ketertarikan alur pelayaran sungai di Sungai Katingar. f. menetapkan kelentiar mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
L.16.	Sungai Aruf	Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	<p>Kaltur, Sar.</p> <p>g. mamanisakan mang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Sungai Pelabuhan di Sungai Kelungy, harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Aruk untuk melayani pasar-pasar pemukiman di bagian hulu dengan bagian hilir Sungai Aruk</p> <p>b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Arat yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Utara-Pulau Kalimantan</p> <p>c. mamanisakan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Aruk dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Aruk</p> <p>d. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran Sungai Aruk</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan di mang nadara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai di Sungai Aruk</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Aruk</p> <p>g. mamanisakan mang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Sungai Aruk harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKSIAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
L.17.	Sungai Pawan	Memungkahkan keterkaitan antarwilayah	<p>a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Pawan untuk melayani prasarana pemukiman di bagian hulu dengan bagiar hilir Sungai Pawan</p> <p>b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Pawan yang terpadu dengan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan jaringan jalan perhubungan Pulau Kalimantan</p> <p>c. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Pawan untuk melayani pengembangan kota-kota dan hasil hutan, dan komoditi-stunggalah lainnya</p> <p>d. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Pawan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Pawan</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berpotensi pada keberadaaan alur pelayaran Sungai Pawan</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan di mang natara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran sungai di Sungai Pawan</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai kesamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Pawan</p> <p>h. melaksanakan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Sungai Pawan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
L.18.	Sungai Melawi	Memungkahkan keterkaitan antarwilayah	<p>a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Melawi untuk melayani prasarana pemukiman di bagian hulu dengan bagiar hilir Sungai Melawi</p> <p>b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Melawi yang terpadu dengan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan perhubungan Pulau Kalimantan, dan</p>

NO.	URANSFORSI SUNGAI DALAM PENYELEKSIAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL
1.19.	Sungai Kapuas (Provinsi Kalimantan Tengah)	Meningkatkan ketertarikan antarwilayah	<p>STRATEGI OPERASIONAL</p> <p>Jaringan Jalin Kereta Api Luas Seluas Pulau Kalimantan. Bagian Barat memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Melawi dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan penyambungan kawasan pelabuhan Sungai Melawi</p> <p>d. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alir pelayaran Sungai Melawi</p> <p>e. memetakan ketertarikan pelayaran kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alir pelayaran sungai di Sungai Melawi</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Melawi</p> <p>g. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Sungai Melawi harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kapuas untuk melayani PKW Kuala Kapuas dan kawasan perikanan pada bagian hulu Sungai Kapuas</p> <p>b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kapuas yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan bagian Timur</p> <p>c. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kapuas untuk melayani pengangkutan Batubara, Lasi Lulau, dan komoditas unggas dan lainnya</p> <p>d. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Kapuas dengan</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.20.	Sungai Kandilo	Memingkatkan keterkaitan antarwilayah	<p>memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Kapuas</p> <p>c. membatasi jumlah kapal perairan yang berkembang pada keberadaan alur pelayaran Sungai Kapuas</p> <p>f. menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berkembang pada keberadaan alur pelayaran sungai di Sungai Kapuas</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Kapuas</p> <p>h. membatalkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Sungai Kapuas harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
			<p>a. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kandilo untuk melayani PKW Tanah Grogot dan kawasan permukiman pada bagian hulu Sungai Kandilo</p> <p>b. mengembangkan jaringan transportasi Sungai Kandilo yang terpadu dengan jaringan jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>c. membatalkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan Sungai Kandilo dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan Sungai Kandilo</p> <p>d. membatasi pemanfaatan perairan yang berlandskap pada keberadaan alur pelayaran Sungai Kandilo</p>

NO.	TRANSFORMASI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>3. menampakkan keentusias pelayaran kegiatan di ruang udara. Bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sesuai di Sungai Kandilo</p> <p>4. menerbitkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di Sungai Kandilo</p> <p>8. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Sungai Kapuas harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
I.21.	Terusan Kelampayan	Meningkatkan keserbaitan antarwilayah.	- meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antarlalur pelayaran Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan.
I.22.	Terusan Serapat	Meningkatkan keserbaitan antarwilayah.	- meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antarlalur pelayaran Sungai Kapuas dan Sungai Barito
I.23.	Terusan Hantipan	Meningkatkan keserbaitan antarwilayah.	- meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antarlalur pelayaran Sungai Kapuas dan Sungai Barito
I.24.	Terusan Raya	Meningkatkan keserbaitan antarwilayah.	- meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antarlalur pelayaran Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan
I.25.	Terusan Tamban	Meningkatkan keserbaitan	- meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antarlalur pelayaran Sungai Kapuas dan Sungai Barito

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
126.	Terusan Besabang	Antarwilayah Meningkatkan keterkaitan antarwilayah	- meningkatkan fungsi terusan yang menghubungkan antarlalu pelayaran Sungai Kapuas dar. Sungai Kahayan
II.	Lintas Denysberungar, Antarnegara		
II.1.	Numukan-Tawar (Malaysia)	Meningkatkan keterkaitan antarnegara	<ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Numukan-Tawar untuk melayani PKW/PKS/NK dan jk. b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Lawa (Malaysia) c. mengembangkan lintas penyeberangan Numukan-Tawar untuk melayani pergerakan orang dan zat/barang d. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Numukan yang terintegrasi dengan jaringan jalan lokal dan Kelabukan Numukan e. mengembangkan lintas penyeberangan Nantakan-Tawar untuk meningkatkan keterkaitan Provinsi Kalimantan Timur dengan Tawar (Malaysia) f. memantapkan ruang di dalam dar di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan mang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan. <ol style="list-style-type: none"> g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alir pelayaran penyeberangan <ol style="list-style-type: none"> 1. menerapkan kebijakan pelabuhan kegiatan di ruang udara kelas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alir pelayaran di lintas penyeberangan Nantakan-Tawar (Malaysia)

NO.	URANSFORSIASI SINGKAL DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>1. menetapkan ketentuan mengenai besarnya dan keselamatan pelayanan di lintas penyeberangan Nantukan-Tawau (Malaysia)</p> <p>2. memantapkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Luar Pulau Kalimantan		dengan provinsi di luar Pulau Kalimantan.
III.1.	Tanjungarak-Batam (Pulau Sumatra)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Pontianak-Batam untuk melayani PKN Pulauarak</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pontianak yang terintegrasi dengan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Pelabuhan Pontianak</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Pontianak-Batam untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Pontianak-Batam untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Batam</p> <p>f. memantapkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alir pelayaran penyeberangan</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelayaran kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan</p>

NO.	TRANSKOWASI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.	Muntakan-Tarakan-Toli-Toli (Pulau Sulawesi)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<p>kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan arus pelayaran di lintas penyeberangan Penulianak-Batam</p> <ol style="list-style-type: none"> i. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Penulianak-Batam ii. memastikan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Muntakan-Tarakan-Toli-Toli untuk melayani TKW/Tarakan dan PKW/TKSM Muntakan b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Muntakan dan Tarakan yang terintegrasi dengan jaringan jalan lokal, Pelabuhan Muntakan, dan Pelabuhan Tarakan d. mengembangkan lintas penyeberangan Muntakan-Tarakan-Toli-Toli untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang e. mengembangkan lintas penyeberangan Muntakan - Tarakan - Toli-Toli untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuh penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan g. memfasilitasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan arus pelayaran

NO.	TRANSFORMASI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.	Ketapang-Manggat (Pulau Sumisera)	Memperbaiki keterkaitan antarprovinsi	<p>penyebangan</p> <p>h. menetapkan ketentuan peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberlakuan alur pelayaran, di lintas penyeberangan Nunukan-Tarakan-Tali-Tali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai keanekaragaman darat, keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Nunukan-Tarakan-Tali-Tali</p> <p>j. memantapkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
			<p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Ketapang-Manggat untuk melayani PKW Kelapas</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Bangka Belitung</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Ketapang yang terintegrasi dengan jaringan jalan pengumpul Pulau Kalimantan dan Pelabuhan Kelapas</p> <p>d. mengembangkan luas penyeberangan Ketapang-Manggat untuk melayani pengangkutan barang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Ketapang-Manggat untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabhar, penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan</p>

NO.	TRANSFORMASI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.4.	Batulicin-Barru (Pulau Sulawesi)	<p>4. memfasilitasi purnamastruktur perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</p> <p>h. menerapkan ketentuan, peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran, di lintas penyeberangan Kepulauan Marang</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Kepulauan Marang</p> <p>j. memantapkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Korp. Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Batulicin-Barru untuk melayani PKW Kota Barru</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Batulicin yang terintegrasi dengan jaringan jalan lintas Selatan-Pulau Kalimantan dan Pelabuhan Batulicin</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Batulicin-Barru untuk melayani penumpang orang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Batulicin-Barru untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi</p> <p>f. memantapkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan</p>

NO.	TRANSFORMASI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
	FUNGSI	<p>pelatihan penyeberangan</p> <p>g. membantu pemantauan perairan yang berdampak pada keberadaan ahir pelayaran penyeberangan</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelayanan kepatan di ruang udara bebas di atas perairan dan keglatar di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan ahir pelayaran di lintas penyeberangan Balikpapan -Barru</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Balikpapan -Barru</p> <p>j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lindungan Kerta Pelabuhan dan Daerah Lindungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.6.	Balikpapan-Taijra (Pulau Sulawesi)	<p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Balikpapan-Taijra untuk melayani PKK Kawasan Perikanan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Balikpapan yang terintegrasi dengan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Pelabuhan Balikpapan</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Balikpapan-Taijra untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Balikpapan-Taijra untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKSIAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/ALTERNASI
			<p>f. memanfaatkan ruang di dalam darat di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>g. membatasi pemanfaatan perairan yang berpotensi pada keberadaaan alur pelayaran penyeberangan.</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara kelas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Balikpapan-Taipu</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Balikpapan-Taipu</p> <p>j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.6.	Pusat Tak-Tanjung Pundari (Pulau Samudera)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Pontianak-Tanjung Pundari untuk melayani PKN Perikanan</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Bangka Belitung</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Pontianak yang terintegrasi dengan jaringan jalan lintas Selatam Pulau Kalimantan dan Pelabuhan Perikanan</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Pontianak-Tanjung Pundari untuk melayani pelayaran orang dan/atau barang</p>

NO.	URANSFORSIASI SINGKAL DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/ALIASI
			<p>c. meningkatkan lintas penyeberangan Pantiak-Tanjung Pandar untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sumatera</p> <p>d. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberagaman alur pelayaran penyeberangan</p> <p>h. menerapkan ketertarikan pelarangan kegiatan di mangrove bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberagaman alur pelayaran di lintas penyeberangan Pantiak-Tanjung Pandar</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Pantiak-Tanjung Pandar</p> <p>j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Tanjung Pandar harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.7.	Banjarnasin-Semarang (Pulau Jawa)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<p>a. meningkatkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Banjarnasin-Semarang untuk melayani PKN Banjarnasin-Panjarbaru</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. mengembangkan pelayanan penyeberangan di Banjarnasin yang terintegrasi dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan penyeberangan Pulau</p>

NO.	URANSFORSIASI SINGKAL DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/ALJASASI
			<p>Kalimantan, dan Pelabakan Banjarmasin</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Banjarmasin-Semarang untuk melayani pengangkutan barang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Banjarmasin-Semarang untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>g. menubuhasi paman-falim peruritan yang km-kurupak pada keberadaan alar pelayaran penyeberangan.</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelayanan kegiatan di mang utara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdamapak pada keberadaan alar pelayaran di lintas penyeberangan Banjarmasin-Semarang</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dar. keselamatan pelayanan di lintas penyeberangan Banjarmasin-Semarang</p> <p>j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.S.	Pw. Jarak-Semarang (Pulau Jawa)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dar. meningkatkan lintas penyeberangan Pontianak-Semarang untuk melayani LKN Perkarak</p>

NO.	URANSFORIASI SINGKAI DALAM PENYELEBRANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. mengembangkan pelaksanaan penyeberangan di Pontianak yang terintegrasi dengan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Pelabuhan Pontianak</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Pontianak-Samarang untuk melayani pergerakan orang dan barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Pontianak-Samarang untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa</p> <p>f. memodifikasi ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan di mangrove bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Pontianak-Samarang</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Pontianak-Samarang</p> <p>j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
01.9.	Banjarmasin-Lamongan	Meningkatkan	a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Banjarmasin-Lamongan

NO.	URANSFOLIASI SUNGAI DAN PENYELEKANGAN (Pulau Jawa)	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/IASI
		keterkaitan antarprovinsi	<p>untuk melayani PKN Banjarnasin-Banjarnbaru</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Banjarnasin yang terintegrasi dengan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan pengangkutan Pulau Kalimantan, dan Pelabuhan Banjarnasin</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Banjarnasin-Lamongan untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Banjarnasin-Lamongan untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam darat di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan mempertahankan kebutuhan ruang untuk operasional dan pemeliharaan kawasan pelabuhan penyeberangan</p> <p>g. mengefektifkan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberakalan alar pelayanan penyeberangan</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelayanan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah permukaan yang berdampak pada keberakalan alar pelayanan di lintas penyeberangan Banjarnasin-Lamongan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai keamanan darat keselamatan pelayanan di lintas penyeberangan Banjarnasin-Lamongan</p> <p>j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingsungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingsungan Kepelabuhan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	URAIAN FORKLASISUNGALDAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.10.	Balikpapan-Lamongan (Pulau Jawa)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Balikpapan-Lamongan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontalng</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Balikpapan yang terintegrasi dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Pelabuhan Balikpapan</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Balikpapan-Lamongan untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Balikpapan-Lamongan untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam darat di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memanfaatkan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Balikpapan-Lamongan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Balikpapan-Lamongan</p> <p>j. memantapkan ruang di dalam Daerah Lingkup Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkup Kerja Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan</p>

NO.	URANSFORKLASI SINGKAL DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/ALIASI
III.1.	Balikpapan-Mamutu (Tulak Sulawesi)	Memungkalkan keterkaitan antarprovinsi	<p>petaturan perundang-undangan</p> <p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Balikpapan-Mamutu untuk melayani PKN Kawasan Parkobar Balikpapan-Linggawong-Sumarindi-Benteng</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Barat</p> <p>c. mengembangkan pekabutan penyeberangan di Balikpapan yang terintegrasi dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Felabuhan Balikpapan</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Balikpapan-Mamutu untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Balikpapan-Mamutu untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabutan penyeberangan</p> <p>g. membatasi pamarlatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan</p> <p>h. menciptakan ketenuan pekarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Balikpapan-Mamutu</p> <p>i. menciptakan ketenuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Balikpapan-Mamutu</p>

NO.	URANSFURIASI SINGKAI DALAM PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.12.	Sampit-Semarang (Pulau Jawa)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<p>1. memandatkan ruang di dalam Daerah Luncuran Kerja Pelabuhan dan Daerah Luncuran Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. mengembangkan dan meningkatkan luas penyeberangan Sampit-Semarang untuk melayani PKW Sampit</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Sampit yang terintegrasi dengan Jaringan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Pelabuhan Sampit, termasuk Terminal Begerdang</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Sampit-Semarang untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Sampit-Semarang untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam darat di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran penyeberangan</p> <p>h. menerapkan ketentuan penataan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Sampit-Semarang</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas</p>

NO.	URANSFORKLASI SINGKAL DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.13.	Tarakan-Toli-toli (Pulau Sulawesi)	Meningkatkan keterkaitan antarprawinsi	<p>penyeberangan Sumpi-Samarang memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pejabat/lat. dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pejabat dan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Tarakan-Toli-toli untuk melayani PKN Tarakan.</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tarakan yang terintegrasi dengan jaringan jalan keulahan Pelabuhan Tarakan.</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Tarakan-Toli-toli untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Tarakan-Toli-toli untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam dar. di sekitar pelabuhan penyeberangan, dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberachaan alir pelayaran penyeberangan.</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan</p>

NO.	URANSFORSIASI SINGKAI DALAM PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.14.	Kumai-Kendal (Pulau Jawa)	Meminimalisir keterbatasan antarprovinsi	<p>kesulitan di bawah peraturan yang berdampak pada keberadaa. afor pelayanan di lintas penyeberangan. Tarakan-Toli-toli</p> <p>i. menetapkan ketentuan keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan. Tarakan-Toli-toli</p> <p>i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
			<p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan. Kumai-Kendal untuk melayani PKW Paraskalan Bon</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antar Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kumai yang terintegrasi dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Dalam Kalimantan dan Pelabuhan Kumai</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Kumai-Kendal untuk melayani pergerakan orang dar/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Kumai-Kendal untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan afor pelayaran</p>

NO.	URAIAN FOKUS/ASPEK DALAM PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>penyeberangan:</p> <p>h. menerapkan ketentuan peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah permukaan yang berdampak pada keamanan alat pelayaran di lintas penyeberangan Kumai-Kendal</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai keamanan darat, keselamatan pelayanan di lintas penyeberangan Kumai-Kendal</p> <p>j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.15.	Batulicin, Carongkong (Pulau Sulawesi)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Batulicin-Carongkong untuk melayani Pulau PKW Kaba Baru</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Kalimantan yang terintegrasi dengan jaringan jalan lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Pelabuhan Batulicin</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Batulicin-Carongkong untuk melayani penyeberangan orang dan/atau barang</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Batulicin-Carongkong untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/ALTERNASI
			<p>pelatihan penyeberangan.</p> <p>g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alir pelayaran penyeberangan.</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alir pelayaran di lintas penyeberangan Batiwala-Garongkong.</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayanan di lintas penyeberangan Batiwala-Garongkong.</p> <p>j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
III.16.	Bahaar-Lamongan (Pulau Jawa)	Meningkatkan keterkaitan antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Bahaar-Lamongan untuk melayani PKW Kuala Kupas.</p> <p>b. meningkatkan keterkaitan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Jawa Timur.</p> <p>c. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Bahaar yang terintegrasi dengan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan.</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Bahaar-Lamongan untuk melayani pergerakan orang dan barang.</p> <p>e. mengembangkan lintas penyeberangan Bahaar-Lamongan untuk meningkatkan keterkaitan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa.</p>

NO.	URAIAN/LOKASI SINGKAT DALAM PENYELENGKAPAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL/ASAS
		<p>f. memanfaatkan ruang di dalam darat di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>g. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran penyeberangan.</p> <p>h. menerapkan ketentuan peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran di lintas penyeberangan. Bahari-Lamungan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan. Bahari-Lamungan</p> <p>j. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingsungun Kotja Pelabuhan dan Daerah Lingsungun Kepentingan Pelabuhan Haris mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
IV.	Lintas Pelayaran untuk Membuka Keterbukaan Wilayah		
IV.1.	Mamukan-Pulau Sebatiik	Membuka keterbukaan wilayah	
		<p>a. mengembangkan dan meningkatkan lintas pelayaran Mamukan-Pulau Sebatiik untuk melayani EKW/PKSN Narakar.</p> <p>b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Mamukan dan Pulau Sebatiik yang terintegrasi dengan jaringan jalan lokal dan Pelabuhan Narakar</p> <p>c. mengembangkan lintas penyeberangan Mamukan-Pulau Sebatiik untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Mamukan-Pulau Sebatiik untuk membuka keterbukaan wilayah di Pulau Sebatiik</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam darat di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan</p>	

NO.	URANSFORSIASI SINGKAL DALAM PENYELEKANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.2.	Tanjung Redeb-Pulau Maratua	Membuka keteriselasan wilayah	<p>mempertahakan kebutuhan ruang untuk operasional dan persembahkan kawasan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>i. membantu penuntutan perairan yang berdampak pada keberakatan alur pelayanan penyeberangan</p> <p>g. menetapkan kebijakan pelayanan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah permukaan yang berdampak pada keberakatan alur pelayanan di lintas penyeberangan Nantakan-Pulau Sebantik</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai keamaran dan keselamatan pelayanan di lintas penyeberangan Nantakan-Pulau Sebantik</p> <p>i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Palabukar dan Daerah Lingkungan Kepentingan Palabukar harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>j. mengembangkan dan meningkatkan lintas penyeberangan Tanjung Redeb-Pulau Maratua untuk melayani PKW Tanjung Redeb</p> <p>k. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tanjung Redeb dan Pulau Maratua yang terintegrasi dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan lokal, dan Pelabuhan Tanjung Redeb</p> <p>l. mengembangkan lintas penyeberangan Tanjung Redeb-Pulau Maratua untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>m. mengembangkan lintas penyeberangan Tanjung Redeb-Pulau Maratua untuk membuka akses ke sistem wilayah di Pulau Maratua</p>

NO.	URANSFORSIASI SUNGAI DALAM PENYELEKSIAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONAL
			<p>c. memanfaatkan ruang di dalam darat di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>f. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran penyeberangan</p> <p>g. menetapkan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Tanjung Redeb-Pulau Maratua</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Tanjung Redeb-Pulau Maratua</p> <p>i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lindungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lindungan Kepelabuhan. Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
IV.3.	Tanjung Redeb-Pulau Sambit	Membuka keterisolasian wilayah	<p>a. mengembarkakan darat meningkatkan lintas penyeberangan Tanjung Redeb-Pulau Sambit untuk melayani PKW Tanjung Keleb</p> <p>b. mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Tanjung Redeb dan Pulau Sambit yang terintegrasi dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan, Lintas Kalimantan, Jaringan jalan lokal, dan Pelabuhan Tanjung Keleb</p> <p>c. mengembangkan lintas penyeberangan Tanjung Redeb-Pulau Sambit untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>d. mengembangkan lintas penyeberangan Tanjung Redeb-Pulau Sambit untuk membuka keterisolasian wilayah di Pulau Sambit</p>

No.	TRANSKRIBASI SUNGAILI DAN PENYEBERANGAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan</p> <p>f. memfasilitasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran pelayarannya</p> <p>g. menerapkan ketentuan, pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan darat kegiatan di bawah permukaan yang berkaitan pada keberadaan alur pelayaran di lintas penyeberangan Lamung Kedah-Pulau Sambit</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai keamanan darat keselamatan pelayaran di lintas penyeberangan Tanjung Redab-Pulau Sambit</p> <p>i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lintasan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lintasan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI TERWUJUDKAN TITANAN KEPSELABCHANAN DI PULAU KALIMANTAN

NO.	NAMA PELABUCHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Pelabuhan Utama		
1.1.	Pontianak	Pelabuhan Utama	<p>a. memantapkan pelabuhan yang melayani PKN Pontianak dan PKW Mempawah sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalar Pontianak dan sekitarnya serta Kawasan Andalar Lani Pontianak dan sekitarnya</p> <p>b. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW Saribas dan PKW Singkawang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalar Singkawang dan sekitarnya</p> <p>c. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW Sanggau dan PKW Singang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalar Sanggau</p> <p>d. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW Putussibau sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalar Kapuas Hulu dan sekitarnya</p> <p>e. mengembarkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Ahar Lani Kepulauan Indonesia I</p> <p>f. memantapkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, jaringan jalur pengumpan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Naglan Barak, Jaringan penyeberangan sabuk utara, jaringan penyeberangan penghubung Sabak dan Bandar Udara Saraidi</p> <p>g. memanfaatkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>h. menetapkan ketentuan pelangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdaya pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>i. memelihara pemeliharaan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.2.	Banjarbaru	Pelabuhan Utama	<p>i. mengembangkan Terminal Kelas dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. memantapkan pelabuhan yang melayani PKN Banjarmasin, PKW Marabahan, dan PKW Marapura sebagai pusat pengembang kawasan Andalan Kalimantan Raya dan Sekitarnya</p> <p>b. memantapkan pelabuhan yang melayani PKN Pelangkaunya dan PKW Kuala Kapuas sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Kuala Kapuas</p> <p>c. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW Amuntai sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Kalimantan dan Sekitarnya</p> <p>d. mengembangkan akses dan jasa kapal bahaman di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>e. memantapkan pelabuhkar yang terpadu dengan pengembangan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur, dan Bandar Udara Syamsudin Noor</p> <p>f. memanfaatkan ruang bersama pelabuhan zona kepentingan perahuman dan keamanan negara</p> <p>g. menerapkan ketentuan, peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberakalan, jalur transportasi laut</p> <p>h. membuka pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingskarung Keria Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>i. mengembangkan Terminal Kelas dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
13.	Balikpapan Utama	<p>a. memantapkan pelabuhan yang melayani FKN Baring-Balikpapan-Tenggarong-Samarinda sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bontang - Samarinda - Tenggarong - Balikpapan - Penajam (Ponsamabalam) dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Jati Belatang-Tarakan dan Seldiarnya</p> <p>b. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW Muara Taweh sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Muara Taweh</p> <p>c. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW Buntok sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Buntok</p> <p>d. memantapkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Jalur Kepulauan Indonesia II</p> <p>e. memantapkan pelabuhar yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan lintas Selatan Utara Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah, Pulau Kalimantan, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bayan Timur, jaringan penyeberangan Sabuk Tengah, Lintas penyeberangan antarprovinsi (Balikpapan-Mamuju), dan Bandar Udara Sepinggai</p> <p>f. memantapkan ruang bersama pelabuhan guna keperluan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>g. meneruskan kelentuan pelayanan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berlatar belakang keefektifan jalur transportasi laut</p> <p>h. memantapkan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepelabuhan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peruntukan perundang-undangan</p> <p>i. memantapkan Terminal Khusus dan Terminal Anjak Kopering dan Sa diri dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.4.	Tarakan	Pelabuhan Utama	<p>a. memanfaatkan pelabuhan yang melayani PKN Tarakan, PKW Malinau, dan PKW Tarahmbis sebagai pusat pengembangan Kawasan Anklab Tarakan-Tanjung Selas-Nunukan.-Palau Banyu-Malinau (Tarapuhame) dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan (ant Bontang-Tarakam dan Sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. memanfaatkan pelabuhan yang berpeda dengan pengembangan jaringan jalan lokal, jaringan penyeberangan sungai atau, dan Bandar Udara Juwata</p> <p>d. memanfaatkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan perikanan dan keamanan negara</p> <p>e. menerapkan ketentuan pengamanan kegiatan di ruang udara lepas di atas badan air yang berlatar pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>f. memfasilitasi pemantauan ruang di dalam Daerah Lingkaran Kerja Pelabuhan dan Daerah Jirgintangan Kepulauan Kelabahan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengembangkan Terminal Klasas dan Terminal untuk Kepentingan. Sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
II.	Pelabuhan Pengampul	Pelabuhan Pengumpul	<p>a. memanfaatkan pelabuhan yang melayani PKW Ketapang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Kutapan dan Sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia I</p> <p>c. memanfaatkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan, jaringan penyeberangan sabrak tengkal, dan Bandar Udara Rahadi Usmar.</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Kunir, termasuk Terminal Bumiharjo	Pelabuhan Pengumpul	<p>d. memantapkan marag bersama pelabuh guna kepentingan perikanan, dan keamanan negara.</p> <p>e. menciptakan ketertarikan pelabuhan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berlampak pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkaran Kerja Pelabuhan dan Daerah Jirgkingan</p> <p>Keperluan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengembangkan Terminal Kelasus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
			<p>a. memantapkan pelabuhan yang meliputi PKW Pangkalan Bun sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun serta Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang</p> <p>b. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alir Laut Kepulauan Indonesia I</p> <p>c. memantapkan pelabuh yang terpeda dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, lintas penyeberangan antarprowinsi (Kianai-Kendal), dan Bandar Udara Iskandar</p> <p>d. memantapkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan perikanan dan keamanan negara.</p> <p>e. menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berlampak pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkaran Kerja Pelabuhan dan Daerah Jirgkingan</p> <p>Keperluan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengembangkan Terminal Kelasus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

STRATEGI OPERASIONALISASI		
NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI
II.3.	Banlicitr.	Pelabuhan Pengumpul
		<p>a. memanfaatkan pelabuhan yang melayani PKW Kolabari sebagai pusat pengembangan Kawasan Ardalari Banlicitr. dan Kawasan Ardalari Laut Dalam Laut</p> <p>b. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. memanfaatkan pelabuhan yang terpadat dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Dalam Kalimantan dan jaringan penyeberangan selat-lake tengah</p> <p>d. memanfaatkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan perikanan, dan keamanan negara</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berlandaskan pada keberaturan jalur transportasi laut</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Tinggi Pelabuhan harus memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengembangkan Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepenitengar. Sendiri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perburuan perikanan-gaund-rigan</p>
II.4.	Sampit, termasuk Terminal Pagandang	Pelabuhan Pengumpul
		<p>a. memanfaatkan pelabuhan yang melayani PKW Sampit sebagai pusat pengembangan Kawasan Ardalari Sampit-Tungkal-Bun</p> <p>b. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. memanfaatkan pelabuhan yang terpadat dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Dalam Kalimantan dan jaringan lintas penyeberangan antarprovinsi</p> <p>d. memanfaatkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan perikanan dan keamanan negara</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berlandaskan pada keberadaan jalur transportasi laut</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.5.	Numukan	Pelabuhan Pengumpul	<p>f. membalasi pemeliharaan ruang di dalam Daerah Lingkup Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkup Kerja Kepentingan Pelabuhan; harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengembangkan Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
			<p>a. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW/PKSN Numukan, PKW Muhiwa, dan PKW Tumbuhis sebagai pusat pengembangan kawasan Aradalan Tapanbuna dan Sekitarnya serta Kawasan Aradalan Lari Bemang, Tarakar, dan Sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Jalur Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. memantapkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan penyeberangan sabuk utara dan Bandar Udara Numukan</p> <p>d. memanfaatkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan perikanan dan keamanan negara</p> <p>e. menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>f. membalasi pemeliharaan ruang di dalam Daerah Lingkup Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkup Kerja Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengembangkan Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.6.	Samarinda.	Pelabuhar. Pengumpul.d	<p>a. memantapkan, pelabuhan yang melayani PKN Bontang-Balikpapan/Tenggarong, Samarinda sebagai pusat pengembangan Kawasan. Andalan Pontianbejani dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Lari; Rongjung-Turkan dan Sekitarnya</p> <p>b. memantapkan, pelabuhan yang melayani PKW Muara Teweih sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Muara Teweih</p> <p>c. mengembangkan akses dan jasa kapal-bahan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>d. memantapkan, pelabuhar. yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur, dan Bandar Udara Samarinda Baru</p> <p>e. memantapkan, mangrove bersama, pelabuhan guna kepentingan perikanan, dan keamanan negara.</p> <p>f. memantapkan, ketertarikan, pelayanan kegiatan di ruang udara lepas di atas badan air yang berlatar-pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>g. memantapkan, pemantauan, mangrove di dalam Daerah Lingkaran Kerja Pelabuhan dan Daerah Jangkauan Kepertahanan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>h. mengembangkan, Terminal Kelasus dan Terminal untuk Kepertahanan. Sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
11.7.	Tarajang Sangata.	Pelabuhar. Pengumpul	<p>a. memantapkan, pelabuhan yang melayani PKW Sangata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sangkudirang-Sangata-Muara Wahana (Sasamawa) serta Kawasan Andalan Lari Pontang-Tarakan dan Sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan, akses dan jasa kapal-bahan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. memantapkan pelabuhar yang terpadat dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Selatan Dulat Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Dulat Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. memanfaatkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan perabuhan dan keamanan negara</p> <p>e. menerapkan ketentuan peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berlandas pada keberadaan jajar transportasi laut</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkaran Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkaran Kepentingan Pelabuhan harus merapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengembangkan Terminal Klusis dan Terminal untuk Kepentingan Samudri di kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
11.8.	Tanjung Redeb	Pelabuhar Punggurput	<p>a. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW Tanjung Redeb sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tanjung Rekoh dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selatan 2-Terakan dan Sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan akses dan bisa kepelayanan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. memantapkan pelabuhar yang terpadat dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Dulat Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Dulat Kalimantan Bagian Timur, dan Bandar Telara Kalimantan-Berat</p> <p>d. memantapkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan perabuhan dan keamanan negara</p> <p>e. menerapkan ketentuan peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berlandas pada keberadaan jajar transportasi laut</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkaran Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkaran Kepentingan Pelabuhan harus merapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
119.	Tirah Grogot	Pelabuhan Pengumpul	<p>g. mengembangkan Terminal Kerasa dan Terminal untuk Kepenirnggar. Sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW Timah Grogot sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Eksosum-bahan dan Sekitarnya</p> <p>b. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW Bantik sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bantik</p> <p>c. memantapkan pelabuhan yang melayani PKW Amanlai sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kelangan dan Sekitarnya</p> <p>d. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alur Lari Kepulauan Indonesia II</p> <p>e. memantapkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Dalam Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Kalimantan Bagian Timur</p> <p>f. memantapkan riarig bersama pelabuhan guna kepentingan perahahan dan keamanan negara</p> <p>g. menetapkan ketentuan pelabuhan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang terlampaui pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>h. memantapkan pemantapan ruang di dalam Daerah Lingkaran Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkaran Kepenirnggar Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>i. mengembangkan Terminal Kerasa dan Terminal untuk Kepenirnggar. Sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

STRATEGI OPERASIONALISASI		
NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI
II.10.	Tanjung Selor	Pelabuhar, Pengumpul
		<p>a. memantapkan, pelabuhan yang melayani PKW Tanjung Selor, PKW Madinar, dan PKW Tumbuhbis sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tapambuna dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Ponting-Tarakan dan Sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan akses dan jasa kepakabruhan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. memantapkan pelabuhar yang terpadat dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Dalam Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. memantapkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan perahuamir dan keamanan negara</p> <p>e. menerapkan kelenjar, pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keefektifan jalur transportasi laut</p> <p>f. membuat pemantapan ruang di dalam Daerah Lingkaran Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkaran Kerja dengan Pelabuhan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengembangkan Terminal Kelas dan Terminal untuk Kepentingan, sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan</p>
II.11.	Tanjung Sarzan, termasuk Terminal Blok Tuam dan Terminal Tanjung Laut	Pelabuhar, Pengumpul
		<p>a. memantapkan pelabuhar yang melayani IKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Korlong sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bontakabalam dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Latakan dan Sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan akses dan jasa kepakabruhan di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. memantapkan pelabuhar yang terpadat dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Dalam Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur, dan Bandar Udara Bontang</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. memanfaatkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan perikanan, dan keamanan negara.</p> <p>e. menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berlandas pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>f. memfasilitasi pemantauan ruang di dalam Daerah Lingkaran Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepelabuhan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengembangkan Terminal Klusis dan Terminal untuk Kepentingan Samudra dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
II.12.	Maluku	Pelabuhan Pengumpul	<p>a. memanfaatkan pelabuhan yang melayani PKW Sangata sebagai pusat pengembangan Kawasan Adalalan Sasamawa serta Kawasan Adalalan Lari Bontang-Tarakau dan Sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di sepanjang Alir Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. memanfaatkan pelabuhan yang terpadat dengan pengembangan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan pengumpul, Pulau Kalimantan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. memanfaatkan ruang bersama pelabuhan guna kepentingan perikanan, dan keamanan negara.</p> <p>e. menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berlandas pada keberadaan jalur transportasi laut</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>1. membatasi pemandangan ritang di dalam Daerah Lingkkrngan Kerja Pelabuhan dan Daerah Jirnglaangan Kersudirngan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2. mengembangkan Terminal Khasa dan Terminal untuk Kependirngan. Sendiri dilabnanakan sesuai dengan kebutuhan per-tanan perundangan-undangn</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO RAMBANG YUDHONYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEBANDARUDARAAN DI PULAU KALIMANTAN

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
f.	Sepinggan	Kondar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer	<p>a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana pemungjung fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang</p> <p>b. mewajibkan fungsi pelayanan untuk mendukung Kawasan Andalar Tarjung Bedeh dan Sekitarnya, Kawasan Andalar Sangkulirang-Sungai-Muar-Wahau (Susimawau), Kawasan Andalar Tarakan-Lamung Salas-Numukan-Pulau Bantu-Mahura (Lataparbuma) dan Sekitarnya, Kawasan Andalar Ba Bang-Samarinda-Tenggaring-Balikpapan-Penajam dan Sekitarnya (bersambeljam), serta Kawasan Andalar Laut Bontang-Batuken dan sekitarnya.</p> <p>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalur lintas Selatan-Pulau Kalimantan darat-jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan-Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. memantapkan bandar udara untuk melayani Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata, wisata budaya, darat-industri</p> <p>e. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>f. memantapkan fasilitas pokok darat fasilitas pemukiman bandar udara</p> <p>g. memantapkan koridor di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>h. memantapkan ruang dekuar memperhatikan batas-batas EKOZ dan batas-batas kawasan kebisingan.</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
2.	Supadio	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder	<p>a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang tinggi pelayanan PKN Pontianak</p> <p>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Supadio untuk mendukung Kawasan Arlaban Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singsawang dan Sekitarnya, Kawasan Arlaban Kelumpang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kapuas Indah dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan Lant Poniakan dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Kutapang dan Sekitarnya</p> <p>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan, lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan, Pulau Kalimantan Bagian Barat</p> <p>d. memantapkan bandar udara untuk melayani PKN Pontianak sebagai pintu perhubungan internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi, wisata budaya, dan industri</p> <p>e. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan perhubungan dan keamanan negara</p> <p>f. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>h. memantapkan ruang dengan memperhatikan batas-batas EKOP dan batas-batas kawasan kebisingan</p>
3.	Syamsudin Noer	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder	<p>a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang tinggi pelayanan PKN Banjarmasin</p> <p>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Syamsudin Noer untuk mendukung Kawasan Andalan Kandangur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banjarmasin Kaya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Fatubien, serta Kawasan Andalan Laut Polak Laut</p> <p>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan, lintas</p>

NO.	NAMA BANDAR CIKAMA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Selatan Pulau Kalimantan dar. Jaringan Jauh Kereta Api Lintas Selatar. Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. memanfaatkan bandar udara untuk melayani IKN Banjarmasin sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi, wisata budaya, dan industri</p> <p>e. memanfaatkan bandar udara untuk pemantauan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>f. memanfaatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>h. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan belis-luas RKNOP dan belis-luas kawasan kehutanan</p>
4.	Samarinda Baru	Bandar Udara Kongkumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder	<p>a. mengembangkan bandar udara sebagai prasarana perantara fungsi pelayanan IKN Kawasan Pektokan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang</p> <p>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Samarinda Baru untuk mendukung Kawasan Andalan Ponsamabaja dan Sekelarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakon dan Sekelarnya</p> <p>c. mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dar. Jaringan Jauh Kereta Api Lintas Selatar. Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. mengembangkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembangkan fasilitas pokok dar fasilitas perantara bandar udara</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan, pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KROF dar batas-batas kawasan kehisingan</p>
5.	Pakeh Bandar Udara Pengampul dengan Skala Pelayanan Tersier		<p>a. memelihara bandar udara sebagai prasarana perantara fungsi pelayanan PKSN Pakel -Aruk</p> <p>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Pakel untuk mendukung Kawasan Ardalam Singkawang dan Sekitarnya</p> <p>c. memelihara bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan, Jintas Selayan Pakel Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Jintas Selayan Pakel Kalimantan bagian Barat</p> <p>d. memelihara bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan udara perintis untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi</p> <p>e. memelihara bandar udara untuk pemanfaatan, bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>f. memelihara fasilitas pokok dan fasilitas perantara bandar udara</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan, pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>h. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KROF dan batas-batas kawasan kehisingan</p>

No.	Nama Bandar Udara Civita	Jenis	Strategi Operasionalisasi
6.	Panglima	Bandar Udara Tengjung dengan Skala Pelayanan Tertsier	<p>STRATEGI OPERASIONALISASI</p> <ol style="list-style-type: none"> memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang bagi pelayanan PKW Pribadi meningkatkan fungsi pelayanan Bandar Udara Panglima untuk mendukung Kawasan Ardalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat memantapkan bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan udara perintis untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi memantapkan Bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memantapkan ruang dengan memperhatikan batas-batas EKOP dan batas-batas kawasan kabupatén
7.	Susilo	Bandar Udara Tengjung dengan Skala Pelayanan Tertsier	<ol style="list-style-type: none"> memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang bagi pelayanan PKW Simlang meningkatkan fungsi pelayanan Bandar Udara Susilo untuk mendukung Kawasan Ardalan Saranggau dan Sekitarnya memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			keamanan negara
			e. memanfaatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.
			f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas RKKWP dan batas-batas kawasan bebisingar.
8.	Rahadi Usman:	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier	<p>a. memanfaatkan bandar udara sebagai prasarana penunjang tinggi pelayanan PKW Kelaspang</p> <p>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Rahadi Usman mendukung Kawasan Ardidan Kotapang dan Sekitarnya, serta Kawasan Anakalan Laut Kotapang dan Sekitarnya</p> <p>c. memanfaatkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalat. Lintas Selatan dan Jaringan Jajar-Kerata Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. memanfaatkan Bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>e. memanfaatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara:</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas RKKWP dan batas-batas kawasan bebisingar.</p>
9.	Tjilik Riwut	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala	<p>a. memanfaatkan bandar udara sebagai prasarana penunjang tinggi pelayanan PKN P. Langkayu</p>

NO.	NAMA BANDAR CUDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Pelayaran Tersier		<p>b. mewujudkan tingkat pelayanan Bandar Udara Tjilik Kharu mendukung Kawasan Ardalan Sampit-Pangkalan Baru, Kawasan Ardalan Buntok, Kawasan Andalan Muara Tewehi, dan Kawasan Andalan Kuala Kapuas</p> <p>c. menampilkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan, lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kerja Api lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat</p> <p>d. menampilkan bandar udara untuk melayani PKN Pulogkayu sebagai pintu gerbang internasional dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata, wisata budaya, dan industri</p> <p>e. menampilkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan perhubungan dan keamanan negara</p> <p>f. menampilkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>h. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas EKKW dan batas-atas kawasan kebisingan.</p>
10.	Iskandar Bangampal dengan Skat Pelayaran Tersier		<p>a. menampilkan bandar udara sebagai prasarana penunjang langsung pelayanan PKW Pangkalan Baru</p> <p>b. mewujudkan tingkat pelayanan Bandar Udara Iskandar untuk mendukung Kawasan Ardalan Sampit-Pangkalan Baru dan Sekelarnya, serta Kawasan Andalan Lant Kuala Pembuang</p> <p>c. menampilkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan, lintas Selatan Pulau Kalimantan</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.	Stasiun Bandar Udara Pongumpal dengan Skala Pelayaran Terster	Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> d. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara e. memantapkan fasilitas pokok dar fasilitas penunjang bandar udara. f. memantapkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. memantapkan ruang dengan memperhatikan batas batas KKOP dan batas-batas kawasan kelurahan. <ul style="list-style-type: none"> a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Kota Baru dan Kawasaa Andalan Laut Pulau Laut. b. memantapkan bandar udara yang terpeda dengan jaringan Jalur Lintas Selatan Pulau Kalimantan d. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara e. memantapkan fasilitas pokok dar fasilitas penunjang bandar udara f. memantapkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. memantapkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOP dan batas-batas kawasan kelurahan.
12.	Pawati Bandar Udara	Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Tarakan

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		Pengumpul dengan Skala Terbatas dan Tersier	<p>b. mewujudkan fungsi pelayanar bandar udara sebagai pendukung Kawasan Andalan Tanjung Baran dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Lini Pontang-Tambora dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan. Ikal Palau, Tekong</p> <p>d. mengembangkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>e. mengembangan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. memajukan mang dengan memperhatikan belis-belas EKOP dan baik seluas kawasan kabisrayat.</p>
13.	Kalimantan-Beran	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayaran Tersier	<p>a. menetapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanar PKW Tanjung Redeb</p> <p>b. mewujudkan fungsi pelayanar Bandar Udara Kalimantan-Beran untuk mendukung Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Lini Pontang-Tarakan dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan. Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan. Pulau Kalimantan Bagian Timur</p> <p>d. menetapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>e. memajukan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>1. memantapkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan, pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KEOB dan batas-batas kawasan kebisingan.</p>
14.	Mamukan	Bandar Udara Pengumpan dengan Skala Pelayanan Primer	<p>a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW/PKSN Mamukan.</p> <p>b. mewujudkan fungsi pelayanan Bandar Udara Mamukan untuk mendukung Kawasan Ardalan Tapanuli Utara dan Sekitarnya, serta Kawasan Ardalan Laut Bontang-Lauakan dan Sekitarnya.</p> <p>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan lokal</p> <p>d. memantapkan bandar udara yang mendukung pelayanan angkutan udara perintis untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertergisolasi dan terisolasi</p> <p>e. memantapkan bandar udara untuk pemantauan, bersama kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>f. memantapkan fasilitas pelok dan fasilitas perantara bandar udara</p> <p>g. memantapkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>h. memantapkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KEOB dan batas-batas kawasan kebisingan.</p>
15.	Bontang	Bandar Udara Pengumpan dengan Skala Pelayanan Tersier	<p>a. memantapkan bandar udara sebagai prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perbatasan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang</p>

No.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mewujudkan tinggi pelayanan Bandar Udara berlingkang untuk mendukung Kawasan Andalan Sasamawa, Kawasan Andalan Bongsamabojum dan sekitarnya, serta Kawasan Andalan Jari-Ecutang-Turakan dan sekitarnya</p> <p>c. memantapkan bandar udara yang terpadu dengan pengembangan jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan dan Jaringan Jalur Kevit. Api Julus Selatan Pulau Kalimantan bagian timur</p> <p>d. memantapkan bandar udara untuk pemanfaatan bersama kepeninggar, pertamanan dan keamanan negara</p> <p>e. memantapkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara</p> <p>f. memantapkan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas KKOUP dan batas-batas kawasan kebisingan.</p>

FRSIDIEN RUTUBLIK INDONESIA.

DR. H. SUSILO RAMBANG YUDHOCYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.1.	Jaringan Transmisi Minyak dan Gas Bumi Tanjung Sarjan-Kulai Karangsapa-Bontang		<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanjung Sarjan-Kulai Karangsapa-Bontang, jaringan distribusi Samarinda, dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani PKN Kawasan Perkebunan-Tanggulang-Samarinda-Bontang</p> <p>b. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanjung Sarjan-Kulai Karangsapa-Bontang, jaringan distribusi Samarinda dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani Kawasan Andalan Bontang - Samarinda - Tanggulang - Balikpapan - Palang (Resi Sarjan-Jajam) dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi</p>
1.2.	Jaringan Transmisi Minyak dan Gas Bumi Kulai Timur-Penajam Paser Utara-Paser-Kotabaru-Tanah Bumbu-Tarah Laut	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kulai Timur-Penajam Paser Utara-Paser-Kotabaru-Tanah Bumbu-Tarah Laut, jaringan distribusi Banjarbaru dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani PKN Kawasan Perkebunan Balikpapan-Tanggulang-Samarinda-Bontang, PKW Limat-Grogot, d.t.r. PKW Kotabaru</p> <p>b. mengembangkan jaringan transmisi minyak dan gas bumi nasional Kulai Timur-Penajam Paser Utara-Paser-Kotabaru-Tarah Bumbu-Tarah Laut, jaringan distribusi Banjarmasin, dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani Kawasan Andalan Bontang-Bontang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Bontang</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.	Jaringan Transmisi Minyak dan Gas Bumi Tanah Liat-Banjir Baru-Banjarmasin-Barito-Kuala Kapuas-Pulang Ketawayangin-Timur-Seruyan-Ketawayangin Barat-Lamandau-Ketapung-Pontanak dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKW Kuala Kapuas, PKW Marabahan, dan PKW Marluare.	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Tanah Liat-Banjir Baru-Banjarmasin-Barito-Kuala Kapuas-Pulang Ketawayangin-Timur-Seruyan-Ketawayangin Barat-Lamandau-Ketapung-Pontanak, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontanak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKW Kuala Kapuas, PKW Marabahan, dan PKW Marluare.</p> <p>b. mengembangkan jaringan transmisi minyak dan gas bumi nasional Tanah Liat - Banjar Baru - Banjarmasin - Barito Kuala - Kapuas - Palang Pisau - Kalingan - Kolawaringin Timur - Seruyan - Ketawayangin Barat - Lamandau - Ketapung - Pontanak, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontanak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekelarnya, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Sampit-Fangkalan Ban, serta Kawasan Andalan Pontianak dan Sekelarnya</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi</p>
1.4.	Jaringan Transmisi Minyak dan Gas Bumi Kalana-Pontianak-Palangkaraya-Banjarmasin	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Natuna-Pontianak-Palangkaraya-Banjarmasin, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, dan PKW Kuala Kapuas</p> <p>b. mengembangkan jaringan transmisi minyak dan gas bumi nasional Natuna-Pontianak-Palangkaraya-Banjarmasin dan Kalimantan Timur-Sumatera, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekelarnya</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPTIMALISASI
II.	Pembangkit Tenaga Listrik		c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi
II.1.	Pembangkit Listrik Berbasis Energi Baru Berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru	<p>a. mengembangkan: PLTU Tanah Grogol, PLTU Kozz Banggai, PLTU Muara Jawa/Telake Balibapari, PLTU Kallim Bari, PLTU Pelung, PLTU Malak, PLTU Numban, PLTU Peran, PLTU Tanjung Sekor, PLTU Kallim, PLTU Parit Bara, PLTU Tombiak,</p> <p>PLTU Pantai Kara-kara Sirkawang, PLTU Asam-asam, PLTU Sirkawang Baru, PLTU I Kalleng, PLTU Sampit, dan PLTU Cambang</p> <p>b. mengembangkan: PLTG Kallim-Deaking, PLTG Seripal, dan PLTG Tanjung Batu</p> <p>c. mengembangkan: PLTGU Sangra, PLTGU Tanjung Kuala, PLTGU Tanjung Selar, dan PLTGU Malinau</p> <p>d. mengembangkan: PLTMG Bontang</p> <p>e. mengembangkan: PLTGU Bangkai dan PLTGU Tanjung Batu</p> <p>f. menerapkan ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain</p>
II.2.	Pembangkit Listrik Berbasis Energi Terbarukan Berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan	<p>a. mengembangkan: PLTA Pade Kembang, PLTA Nanga Pinoh, PLTA Kisan, PLTA Telake, PLTA Riam Kanan, PLTA Sekeloa, PLTA Seayap, PLTA Kayan, PLTA Kelai, PLTA Bohi dan Bohi II, serta PLTA M.Nar</p> <p>b. mengembangkan: PLTM Merasap I</p> <p>c. mengembangkan: PLTB dan PLTS di Pular Sebaik, Pular Maratua, dar Pular Sambil</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	<p>Pembangkit Listrik Tenaga Air Hidro (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)</p> <p>Pembangkit Listrik pada Minit Tambang Kawasan Pertambangan Batubara</p>	<p>Pembangkit Listrik Pada Minit Tambang</p>	<p>d. menerapkan ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain</p> <p>a. mengembangkan pembangkit listrik pada mata tambang kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Putih, Kabupaten Marang Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Paringginegara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nalikau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Katingan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kutabara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Puchung Tengah, dan Kabupaten Tapin.</p> <p>b. menerapkan ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain</p>
III.	<p>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik</p>		
III.1.	<p>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Kalimantan</p>		
III.1.1.	<p>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Lampung, Radeb-Sungala-Selar-Tanjung Radeb</p>	<p>Jaringan Transmisi Pengiriman Tenaga Listrik Sauran</p>	<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Tanjung Selor-Tanjung Radeb-Sungala-Bontang-Lergoreng untuk melayani FEW Tanjung Selor, FEW Tanjung Radeb, dan FEW Sungala</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Sungala-Bontang-Langgareng	Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Selat-Tanjung Raleb-Sungala-Bontang-Langgareng untuk melayani Kawasan Andalan Talapuhutan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lajang Kedei dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Samawa, serta Kawasan Andalan Bongsantekalam dan Sekitarnya</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai pelayanan pemantauan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan</p>
III.1.2.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Samarinda-Balikpapan-Tambora-Grogot	Jaringan Transmisi Pengumpulan Tenaga Listrik Saharan Utara (SUTT)	<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Samarinda-Balikpapan-Tambora-Grogot untuk melayani PKN Samarinda, TEN Balikpapan, dan PKW Tanah Grogot</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Samarinda-Balikpapan-Tambora-Grogot untuk melayani Kawasan Andalan Sangkulirang-Sungala-Muara Wabau, serta Kawasan Andalan Bontang-Samarinda-Lingsarong-Balikpapan-Penajam</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemantauan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.1.3.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Kuala Kapuas-Palangkaraya-Sampit-Pangkalan Bui	Jaringan Transmisi Pengumpulan Tenaga Listrik Saharan Utara Tegangan Tinggi (SUTT)	<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Kuala Kapuas-Palangkaraya-Sampit-Pangkalan Bui untuk melayani PKN Palangkaraya, PKW Kuala Kapuas, dan PKW Pangkalan Bui</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Kuala Kapuas-Palangkaraya-Sampit-Pangkalan Bui untuk melayani Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bui dan Kawasan Andalan Kuala Kapuas</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemantauan ruang bebas di</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.1.4.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Kuala Kapuas-Buntok-Muara Teveh	Jaringan Transmisi Peragungan Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<p>sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Kuala Kapuas-Buntok-Muara Teveh untuk melayani PKW Kuala Kapuas, PKW Buntok, dan PKW Muara Teveh</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Kuala Kapuas-Buntok-Muara Teveh untuk melayani Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan MuaraTeveh, dan Kawasan Andalan Kuala Kapuas</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemenuhan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
III.1.5	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Martapura-Amuntai	Jaringan transmisi Peragungan Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Martapura-Amuntai untuk melayani PKW Martapura dan PKW Amuntai</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Martapura-Amuntai untuk melayani Kawasan Andalan Kandangan, dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya.</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemenuhan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
III.2.	Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan		
III.2.1.	Jaringan Transmisi Listrik Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas	Jaringan Transmisi Utama Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan	<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas-Frikong-Sungay-Sekada-Sintang-Talassila untuk melayani PKW Pontianak, PKW Mempawah, PKW Singkawang, PKW Sambas, PKW/PKSN Frikong, PKW Sanggau, dan PKW Singar.</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Jalur transmisi tenaga listrik untuk melayani Sekeloa-Sintang-Putussibau	Jenis Transmisi (SUTET)	<p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani Sekeloa-Sintang-Putussibau dan sekitarnya, kawasan Andalan dan sekitarnya, serta kawasan Andalan, Sanggau dan sekitarnya</p> <p>c. memperpanjang jalar transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.3.	Jalur transmisi Perbatasan Kalimantan		
III.3.1.	Jaringan Transmisi Untuk Melayani Pusat Kegiatan Kawasan Perbatasan Negara	Jaringan Transmisi	<p>a. mengembangkan jaringan transmisi untuk melayani pusat kegiatan perbatasan negara di PKSN Paloh-Arak, PKSN Janggala, PKSN Mariga Balau, PKSN P. Klong, PKSN Jaso, PKSN N. Mukai, PKSN Simanggang, PKSN Long Mulu, g. PKSN Long P. hanyi, dan PKSN Long Nawang</p> <p>b. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.3.2.	Jaringan Transmisi Untuk Melayani Pulau Kecil	Jaringan Transmisi	<p>a. mengembangkan jaringan transmisi untuk melayani pulau-pulau kecil di Pulau Marau, Pulau Sembit, Pulau Miang Besar, Kepulauan Lata Kecil, Pulau Gelam, Pulau Bawa, dan Kepulauan Karimata</p> <p>b. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OTTIRASIONALISASI
III.4.	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik		
III.4.1.	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pulau Kalimantan Dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pulau Jawa	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pulau Kalimantan Dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Nasional	<p>a. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Kalimantan dan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Jawa untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik nasional</p> <p>b. menerapkan ketentuan mengenai penerapan pemantapan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.4.2.	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pulau Kalimantan dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Sulawesi	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	<p>a. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Kalimantan dan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Sulawesi untuk mendukung sistem penyediaan tenaga listrik nasional</p> <p>b. menerapkan ketentuan mengenai penerapan pemantapan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Jaringan Terrestrial	Jaringan Terrestrial	
1.1.	Jaringan Kelayanan Pusat-pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan		<p>a. mengembangkan jaringan terrestrial yang melayani PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-kontang, PKN Tarakan, PKW Sambas, PKW Singkawang, PKW Mempawah, PKW Kelapang, PKW Tangkalan Bun, PKW Sampit, PKW Kuala Kapuas, PKW Buntok, PKW Madau Teveh, PKW Marabahan, PKW Marluhen, PKW Amulai, PKW Kotabaru, PKW Tanah Garoet, PKW Sndawai, PKW Sangata, PKW Tanjung, Kedei, PKW Tanjung Selor, PKW Malinau, dan PKW/PKSN Nunukan</p> <p>b. mengembangkan jaringan terrestrial yang melayani kawasan Andalan Fontanak dan sekitarnya, kawasan Andalan Sempit-Pangkalan Bun, kawasan Andalan Buntok, kawasan Andalan Muarateweh, kawasan Andalan Kuala Kapuas, kawasan Andalan Kondangan dan sekitarnya, kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan sekitarnya, kawasan Andalan Batuicin, kawasan Andalan Tanjung Kedei dan sekitarnya, kawasan Andalan Sangkulirang - Sangata - Madau Wihau (Susamawa), kawasan Andalan Tarakan - Tanjung Salas - Nunukan - Pulau Bunyu - Malinau (Talapuharna) dan sekitarnya, serta kawasan Andalan Kotifang - Samarinda - Tenggarong - Balikpapan - Pangsam (Bomsunbajam) dan sekitarnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pencapaian menara pemancar telekomunikasi yang memperluangkan sepek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.2.	Jaringan Pelayanan Pusat-pusat Pertumbuhan di Wilayah Utara Kalimantan	Jaringan Terestrial	<p>a. mengembangkan jaringan terestrial yang melayani PKN Pontianak, PKW Sanggau, PKW Sintang, PKW Puteussihau, PKN Long Nawang, PKN Long Amlang, PKW/PKN Nuntikan, PKW/PKN Entikong, PKN Taloh-Amlak, PKN Jagoababang, PKN Jara, dan PKN Muga Badau</p> <p>b. mengembangkan jaringan terestrial yang melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya. Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Lalauabuma dan Sekitarnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p>
II.	Jaringan Satelit		
II.1.	Jaringan Satelit Kawasan Perbatasan Negara. Kawasan Tertinggal dan Terisolasi. termasuk Pulau-Pulau Kecil	Jaringan Satelit	Mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis satelit di Pulau Marabau, Pulau Sambit, Pulau Miang Besar, Kepulauan Laut Kecil, Pulau Gelam, Pulau Baya, dan Kepulauan Karimata

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU KALIMANTAN

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Wilayah Sungai (WS)		
1.1.	WS Sesayap	WS Lintas Negara	<p>a. membaygunakan sumber air pada WS Sesayap untuk melayani PER Turun, PKW Malinau, PKW Lantambis, PKW/FKSN Numukar, dan FKSN Long Michang</p> <p>b. mendayagunakan sumber air pada WS Sesayap untuk melayani Kawasan Andalan Tarakan, Tanjung Selas, Narakon, Pulau Bunyu, dan Malinau (Tut. pantamu) dan Sekitarnya</p> <p>c. merehabilitasi DAS Sesayap yang sudah kritis</p> <p>d. mengembalikakan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat menganggu fungsi Sungai Sesayap, Sungai Sebakung, Sungai Sebakti, Sungai Sekata, Sungai Sembalem, Sungai Simanggaris, Sungai Nuteh, Sungai Simudan, Sungai Taii, Sungai Sekata, Sungai Limang Kayan, Sungai Ansan, dan Sungai Belayau</p> <p>e. mengembarkar kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan narasi lindung kawasan</p> <p>f. mengembarkar kawasan di sekitar WS Sesayap secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di Negara Malaysia</p> <p>g. mempertakutkan lusan dar. tutupan vegetasi pada kawasan berhutan di daerah hulu DAS Sesayap, DAS Sebakung, DAS Sebakti, DAS Sekata, DAS Sembalem, DAS Simanggaris, DAS Nuteh, DAS Simudan, DAS Taii, DAS Sekata, DAS Limang Kayan, DAS Ansan, dan DAS Belayau yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap air</p> <p>h. mengembarkar prasarana dan sarana penyanggungan dan pengendalian banjir serta bangunan penempatan pantai pada WS Sesayap</p> <p>i. memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduk untuk memperahankan daya tampung air</p>

NO.	JARINGAN SUMBER LAYANAN AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> j. mengembangkan program insiasi teknis pada daerah irigasi untuk meningkatkan hasil n lahan pertanian perikanan k. mengembangkan layanan irigasi pascatan air l. mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan perbatasan negara, kawasan selingkar dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil yang berpenghuni
1.2.	WS Kapuas	WS Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. mendayagunakan sumber air pada WS Kapuas untuk melayani PKN Pontianak, PKW Palsambau, PKW/TKSN Lutkong, PKW Sanggau, dan PKW Sintang b. mendayagunakan sumber air pada WS Kapuas untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekelarnya, Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekelarnya, serta Kawasan Andalan Sanggau c. merehabilitasi DAS Kapuas, DAS Landak, dan DAS Nipah yang sudah kritis d. mengembalikan pemanfaatan mangrove pada sempadan sungai yang dapat meningkatkan fungsi Sungai Kapuas, Sungai Ambawang, Sungai Kubu, Sungai Landak, Sungai Nipah, Sungai Paduan, Sungai Penut, Sungai Tayan, Sungai Sekadan, Sungai Sepauk, Sungai Tempanak, Sungai Melawai, Sungai Silat, Sungai Palim, Sungai Sibau, Sungai Mendalam, dan Sungai Keripan e. mengembangkan kawasan di sekitar WS dengan cara menjaga kelestarian lingkungan darat, langit, dan lautan kawasan f. memperbaiki lahan-lahan dan kegiatan wisata pada kawasan berhutan di daerah hulu (DAS Kapuas, DAS Ambawang, DAS Kubu, DAS Landak, DAS Nipah, DAS Paduan, DAS Penut, DAS Kapas, DAS Manau, DAS Kerawang, DAS Melendang, dan DAS Safai yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap air g. mengembangkan prasarana dan sarana penanggulangan dan penyelamatan banjir serta membangun pemukiman pada WS Kapuas h. memelihara dan mengembangkan bendungan beerta waduk untuk mempertahankan daya

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>ampung air</p> <ul style="list-style-type: none"> i. mengembangkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk meningkatkan luas lahan pertanian peragan j. mengembangkan jaringan irigasi pasang surut k. mengembangkan piasarana dan sarana air baik untuk kawasan perbatalan negara serta kawasan terintegrasi dan terisolasi
1.3.	WS Pawan	WS Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. mendayagunakan sumber air pada WS Pawan untuk melayani PKW Kelayang b. mendayagunakan sumber air pada WS Pawan untuk melayani Kawasan Anakkar, Kutapang dan Sekilanya c. merehabilitasi DAS Pawan yang sudah kritis d. mengendalikn pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat menggangu fungsi Sungai Simpang, Sungai Semanlong, dan Sungai Semanai e. mengembangkan kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kestabilan lingkungan dan fungsi lindung kawasan f. memperhalankan hutan dan tutupan vegetasi pada kawasan berhungsi lindung di daerah hulu DAS Pawan, DAS Simpang, DAS Semanlong, dan DAS Semanai yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyimpan air g. mengembangkan per sarana dan sarana pemangku lingkungan dan perpendahan ke ririr serta bangunan pengaman dan pantai pada WS Pawan h. memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduk untuk mempertahankan dayaampung air i. mengembangkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk meningkatkan luas lahan pertanian peragan

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.4.	WS Serayan	WS Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> j. mengembangkan jaringan irigasi pasang surut k. mengembangkan presipitasi dan sarana air baku untuk kawasan tertinggal dan terisolasi
1.4.	WS Serayan	WS Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. mendayagunakan sumber air pada WS Serayan untuk melayani PKW Pangkalan Bar b. mendayagunakan sumber air pada WS Serayan untuk melayani Kawasan Andalit Sampit-Kaygalan Baru c. merehabilitasi DAS Serayan yang sudah kritis d. melaksanakan pemantauan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengancam fungsi Sungai Serayan e. mengembangkan kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan f. mempertahankan hutan bakau dan hutan vegetasi pada kawasan berhampiran sungai di daerah hulu DAS Serayan yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap air g. mengembangkan prasarana darat, sarana penanggulangan dan pengendalian banjir serta bangunan pengaman pantai pada WS Serayan h. memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduk untuk mempertahankan dayaampung air i. mengembangkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian j. mengembangkan jaringan irigasi pasang surut k. mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan tertinggal dan terisolasi
1.5.	WS Kahayan		<ul style="list-style-type: none"> a. mendayagunakan sumber air pada WS Kahayan untuk melayani PKN Palangka Raya b. mendayagunakan sumber air pada WS Kahayan untuk melayani Melayani Kawasan Andalit

NO.	JARINGAN SUMBER LAYANAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kategori: s</p> <ul style="list-style-type: none"> c. merehabilitasi DAS Kelayan yang sudah kritis d. mengendalikar pemutilaian ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau e. mengembangkan kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindurug kawasan f. mempertahankan luas dan fungsi vegetasi pada kawasan berfungsi lindurug di daerah hulu DAS Kelayan dan DAS Sebangau yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap air g. mengembangkan prasarana dan sarana penanggulangan dan pengendalian banjir serta bangunan pengaman dan pantai pada WS Kahayan h. memelihara dan mengembangkan bendungan beserta Waduk Merantau, Waduk Tumbang, Jutul untuk mempertahankan daya lumpur air i. mengembangkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian pangan j. mengembangkan jaringan irigasi pasang surut k. mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan tertinggal dan terisolasi
1.6.	WS Malakam	WS Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. mendayagunakan sumber air pada WS Malakam untuk melayani meliputi: PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan -Tenggarong-Samarinda-Tesotang, dan PKW Serdawai b. mendayagunakan sumber air pada WS Malakam untuk melayani melayani Kawasan Ardalan Bontang-Samarinda-Tenggarong-Balikpapan-Penajam (Ponsamlebajam) dan Sekitarnya c. merehabilitasi DAS Malakam yang sudah kritis d. mengendalikar pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi Sungai Malakam, Sungai Sembeta, Sungai Seripat, dan Sungai Semai

NO.	JARINGAN SUMBER LAYANAN AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan kawasan di sekitar WS dengan b.t.p menjaga kestabilan lingkungan dan fungsi lindung kawasan d. mempertahankan frasa dan intai-pati vegetasi pada kawasan berfungsi lindung di daerah hulu DAS Mahakam, DAS Sembaja, DAS Senipah, dan DAS Semoi yang memiliki kemampuan fungsi untuk meresapkan air e. mengembangkan prasarana darat, sarana penanggulangan dan perendahan banjir serta membangun persampahan pantai pada WS Malakam f. memelihara dan mengembangkan bendungan beserta Waduk Kelian, Waduk Manggat, Waduk Benanga, dan Waduk Wain untuk memperahankan daya tampung air g. mengembangkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk meningkatkan luas lahan pertanian pangan h. mengembangkan jaringan irigasi pasif, sarai i. mengembangkan prasarana darat, sarana air baik untuk kawasan perbatasan negara serta kawasan terpinggal dan terisolasi
1.7.	WS Jelai-Kerdawang	WS Jelai- Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. menelayanankan sumber air pada WS Jelai-Kerdawang untuk melayani PKW Tangkalan Bun b. mendayagunakan sumber air pada WS Jelai-Kerdawang untuk melayani Kawasan Ardalan sampai-Fangkalan Bun c. menandatangani Perencanaan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengembangkan fungsi Sungai Jelai dan Sungai Kerdawang d. mengembangkan kawasan di sekitar WS dengan b.t.p menjaga kestabilan lingkungan dan fungsi lindung kawasan e. mempertahankan hiasan dan tutupan vegetasi pada kawasan berfungsi lindung di daerah hulu DAS Jelai dan DAS Kerdawang yang memiliki kemampuan fungsi untuk meresapkan air

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
f.			mengembangkan kawasan di sekitar WS Jelai-Kardawang secara seluas-luasnya dengan pemantauan rutin pada WS di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah
g.			mengembangkan prasarana dan sarana penanggulangan dan percontadahan banjir serta bangunan pengamanaran pantai pada WS Jelai-Kardawang
h.			memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduk untuk mempertahankan daya tampung air
i.			mengembangkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk meningkatkan laasar lahan pertanian perasan
j.			mengembangkan jaringan irigasi pasang surut
k.			mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk kawasan lertinggal dan terisolasi
l.	WS Barito Kapuas	WS lintas Provinsi	mendayagunakan sumber air pada WS Barito Kapuas untuk melayani PEN Banjarmasin, PKW Kuala Kapuas, PKW Bintok, PKW Muara Teweh, PKW Martapura, PKW Manabahan
m.	WS Barito Kapuas	WS lintas Provinsi	mendayagunakan sumber air pada WS Barito Kapuas untuk melayani Kawasan Andalan Bintok, Kawasan Andalan Muara Teweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Kandungan dan Selilanya, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya
n.	WS Barito Kapuas	WS lintas Provinsi	memelihara DAS Kapuas (Kalitjo) dan DAS Barito yang sudah kritis
o.	WS Barito Kapuas	WS lintas Provinsi	mengembangkan pemukiman rumpun pada sempadan sungai yang dapat menggantikan fungsi Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Murung, Sungai Martapura, Sungai Kiam Karan, S. Riam Kawa, Sungai Negara, Sungai Tapin
p.	WS Barito Kapuas	WS lintas Provinsi	mengembangkan kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi hidrologi kawasan
q.	WS Barito Kapuas	WS lintas Provinsi	mempertahankan hutan dan tutupan vegetasi pada kawasan berhungsi hidrologi di daerah hulu

NO.	JARINGAN SAMBUNG LAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Marung, DAS Marapeta, DAS Kiam Kanar, DAS Kiam Kiwa, DAS Negara, DAS Ambawang, DAS Kubu, DAS Lutak dan DAS Tapir yang memiliki kemampuan fungsi untuk menyerap air</p> <p>g. mengembangkan kawasan di sekitar WS Barito Kapuas secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>h. mengembangkan prasarana dan sarana penyangkutan dan pengendalian banjir serta membangun pemukiman pantai pada WS Barito Kapuas</p> <p>i. memelihara dan mengembangkan bendungan beserta Waduk Kiam Kanar untuk mempertahankan daya tampung air</p> <p>j. mengembangkan jaringan irigasi kelas pada Di Riam Kanau, Di Tapir, Di Telaga Janggut dan Di Sungai Bangor untuk meningkatkan luas lahan pertanian pasang</p> <p>k. mengembangkan jaringan irigasi pasang surut</p> <p>l. mengembangkan prasarana dan sarana air-batu untuk kawasan terlinggah dan terisolasi</p>
II.	Cekungan Air Tanah (CAT)		
II.1.	CAT Paleh	CAT Unlas Negara	<p>a. memanfaatkan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT Paleh untuk melayani PKW Sambas, PKW Singkawang, dan Kawasan Andalan Singkawang dan sekitarnya secara terkendali dengan tetap menjaga fungsi kawasan</p> <p>b. mengidentifikasi pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT Paleh untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan intrusi air laut</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	CAT Tanjungsekor	CAT Linas Negara	<p>a. memanfaatkan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT Tanjungsekor untuk melayani PKW Tanjung Selor, Kawasan Anak Lela Tanjung Kudat dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Brakan-Tanjung Sada-Namukan-Palau Barya-Malindu dan Sekitarnya secara terkendali dengan tetap menjaga fungsi kawasan.</p> <p>b. meningkatkan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT Tanjungsekor untuk menghindari terjadinya penunasan, maka tanah dan instruksi air laut</p>
II.3.	CAT Palangkaraya-Banjarmasin.	CAT Linas Provinsi	<p>a. memanfaatkan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT Palangkaraya-Banjarmasin untuk melayani PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin PKW Pangkalan Bun, PKW Sampit, PKW Klati, Kapuas, PKW Marabahan, PKW Marabau, PKW Bukitak, Kawasan Andalan Sempit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Bukitok, Kawasan Andalan Murai Leweh, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, dan Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya secara terkendali dengan tetap menjaga fungsi kawasan</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT Palangkaraya-Banjarmasin, untuk menghindari terjadinya penunasan maka tanah dan instruksi air laut</p>
II.4.	CAT Muarapayang	CAT Linas Provinsi	<p>a. memanfaatkan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT Muarapayang secara terkendali dengan tetap menjaga fungsi kawasan.</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT Muarapayang untuk menghindari terjadinya penunasan maka tanah dan instruksi air laut</p>

NO.	JARINGAN NUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
115.	CAT Muara Labai	CAT Jantar Provinsi	<p>a. memanfaatkan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT Muara Labai untuk melayani PKW Muara Teweih dan kawasan Andalan Muara Teweih secara terkendali dengan tetap menjaga fungsi kawasan</p> <p>b. mengidentifikasi pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah CAT Muara Labai untuk menghindari terjadinya penumpukan muka tanah dan intrusi air laut</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan yang Mendukung Perindugan	Kawasan yang Mendukung Perindugan terhadap Kawasan Bawahannya	<p>a. melindungi dan memberikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Marang Kayu, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pulang Pisan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Parito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balaragan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Belitang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>b. mempertahankan kawasan konservasi hutan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Parito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kutai, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balaragan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Belitang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS
		<p style="text-align: center;">STRATEGI OPERASIONALISASI</p> <p>a. mengidentifikasi kegiatan kemanusiaan yang pada kawasan lindungan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Munnung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kutai-gau, Kabupaten Pulang Pisan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Panti Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hahu Sungai Tengah, Kabupaten Uluh Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nuanukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Huluayan, dan Kabupaten Kutai Kartasegara</p> <p>b. merehabilitasi kawasan berhungsi lindungan yang berdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau dilindungi pada kawasan lindungan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Panti Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Uluh Sungai Tengah, Kabupaten Hahu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nuanukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Huluayan, dan Kabupaten Kutai Kartasegara</p> <p>c. mempertahankan permukiman masyarakat adat dan menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak terjangkau kawasan berhungsi lindungan dilakukan pada kawasan berhungsi lindungan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Munnung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Selatan, Kabupaten Nuanukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Huluayan, dan Kabupaten Kutai Kartasegara</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.2.	Kawasan Bergambut	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahan	<p>Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balang, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barai, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="407 218 435 1165">f. mengembangkan kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam <li data-bbox="435 218 462 1165">g. mengadakan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung <li data-bbox="462 218 490 1165">h. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu laas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap <li data-bbox="490 218 599 1165">i. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luas tetap, tidak mengganggu fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat <li data-bbox="599 218 818 1165">a. memperahankan luas dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan dilakukakan pada kawasan Bergambut di Kabupaten Sambas, Kabupaten Intararak, Kabupaten Kribu Kayu, Kabupaten Kayong Ulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Ketawaringin Timur, Kabupaten Kutayung, Kabupaten Dulang Pinar, Kabupaten Bario Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Ulu Sungai Ulu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Panyungan, dan Kabupaten Nunukan <li data-bbox="792 218 820 1165">b. mengembangkan kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam <li data-bbox="820 218 870 1165">c. mengembangkan material ahmer yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.	Kawasan Resapan Air	Kawasan yang Menyerikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawasanya.	<p>d. menerapkan ketentuan mengenai peraturan seluruh kegiatan yang berpotensi mengancam tata air dan ekosistem air</p> <p>a. mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan resapan air, khususnya pada Hulu Sungai Barito, Hulu Sungai Kalayan, Hulu Sungai Kalangan, Hulu Sungai Kapuas, Hulu Sungai Melawi, Hulu Sungai Seruyan, Hulu Sungai Sesayap, Hulu Sungai Sembakung, Hulu Sungai Bernu, Hulu Sungai Kayan dan Hulu Sungai Mahakam</p> <p>b. mengundulikan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air dilakukan pada Hulu Sungai Barito, Hulu Sungai Kapayan, Hulu Sungai Kalangan, Hulu Sungai Kapuas, Hulu Sungai Melawi, Hulu Sungai Serayan, Hulu Sungai Sesayap, Hulu Sungai Sembakung, Hulu Sungai Bernu, Hulu Sungai Kayan dan Hulu Sungai Mahakam</p> <p>c. memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menakar, limpasan air hujan</p> <p>d. menyediakan sumbu resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada</p> <p>e. menerapkan prinsip zero defor policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diijinkan lainnya</p>
11.	Kawasan Perlindungan Sempadan Pantai	Kawasan Perlindungan Sempadan	<p>a. mengelola/pertanian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai dilakukan pada sempadan pantai di pesisir barat, pesisir selatan, dan pesisir timur Pulau Kalimantan</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.2.	Sempadar Sungai	Kawasan Perlindungan Setempat	<p>b. memanfaatkan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTTH)</p> <p>c. mengembangkan prasarana dan sarana yang telah atau sedang struktural alami dan struktural buatan.</p> <p>d. membekali pendidikan bagi masyarakat hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi perahu dan barisan untuk keperluan umum sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan</p> <p>e. melakukan kegiatan mengenai pelanggaran pendidikan bangunan selain sebagai rumah diutamakan pada rumah</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelanggaran semua jenis kegiatan yang dapat meruntuhkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan</p> <p>g. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sempadan Sungai Kapuas, sempadan Sungai Ambawang, sempadan Sungai Kubu, sempadan Sungai Landak, sempadan Sungai Nipah, sempadan Sungai Puchuan, sempadan Sungai Periti, sempadan Sungai Tayan, sempadan Sungai Sekadau, sempadan Sungai Sepauk, sempadan Sungai Tempunak, sempadan Sungai Melawi, sempadan Sungai Silat, sempadan Sungai Palim, sempadan Sungai Sibau, sempadan Sungai Merdelam, dan sempadan Sungai Keriau di WS Kapuas 2) sempadan Sungai Pawan, sempadan Sungai Simpang, sempadan Sungai Sembawang, dan sempadan Sungai Samudri di WS Pawan 3) sempadan Sungai Seruyan di WS Serayar.

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>4) sempadan Sungai Kahayan dan sempadan Sungai Selatiga di WS Kalayan</p> <p>5) sempadan Sungai Mahakam, sempadan Sungai Sambaja, sempadan Sungai Seripah, dan sempadan Sungai Semel di WS Mahakam</p> <p>6) sempadan Sungai Selayub, sempadan Sungai Sekelug, sempadan Sungai Sekelub, sempadan Sungai Sekelut, sempadan Sungai Simbangaris, sempadan Sungai Nohoh, sempadan Sungai Simalar, sempadan Sungai Fai, sempadan Sungai Sekata, sempadan Sungai Lintang Kayan, sempadan Sungai Ansam, dan sempadan Sungai Belayat di WS Selayub</p> <p>7) sempadan Sungai Jelai dan sempadan Sungai Kerdawangan di WS Jelai-Kerdawangan</p> <p>8) sempadan Sungai Kapuas, sempadan Sungai Barito, sempadan Sungai Marang, sempadan Sungai Martapura, sempadan Sungai Kiam Karan, sempadan Sungai Edam Kiva, sempadan Sungai Negara, dan sempadan Sungai Tapin di WS Barito-Kapuas</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk RTH</p> <p>c. membatasi pendirian bangunan hanya untuk memnujng fungsi lama: rekreasi</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai peraturan bangunan kecuali bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>e. meniadakan larang sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Kawasan Perlindungan Setempat	<p>a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau dilakukan pada kawasan sekitar Danau Seranang, Danau Sekan, Danau Befida, Danau Genali, Danau Tungg, Danau Bangkai, Danau Bilin, Danau Cambala, Danau Garing, Danau Kambaran, Danau Lamaf, Danau Meperai, Danau Kaya, Danau Gatal, Danau Kemarai, Danau Terusan, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Semayang, Danau Sembahih, dan Danau Tele</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar waduk dilakukan pada kawasan sekitar Waduk Kelian, Waduk Siam Kanai, Waduk Lembakan, Waduk Maragar, Waduk Wain, Waduk Benanga, Waduk Merancang, dan Waduk Tumbang Jatih</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk RULI</p> <p>d. membalas pendirian bangunan hanya untuk memanjang fungsi lama rekreasi</p> <p>e. memaypkar ketentuan peraturan perundang-undangan kembali bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. menetapkan lebar sempadan danau atau waduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya		

NO.	KAWASAN JUNJUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.1.	Suaka Alam Laut		
III.1.1.	Suaka Alam Laut Sambas (Kalimantan Barat)	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Laut Sambas b. memantapkan rangkang untuk wisata alam sampai mengaktifkan bentuk bentang alam c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membalasi pendidikan bagi umum hanya untuk mempromosikan kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Laut Sambas e. menerapkan ketentuan pelarangan pendidikan bangunan selain bangunan untuk memanjang kegiatan wisata alam
III.1.2.	Suaka Alam Laut Pulau Sebantik (Kalimantan Timur)	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Sebantik b. memanfaatkan rangkang untuk wisata alam hanya mengubah bentuk bentang alam c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membalasi pendidikan bagi umum hanya untuk mempromosikan kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Laut Pulau Sebantik e. menerapkan ketentuan pelarangan pendidikan bangunan selain bangunan untuk memanjang kegiatan wisata alam
III.2.	Suaka Marzas: twa		

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS Kawasan Suaka Alam	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.1.	Suaka Margasatwa Lamandau (Kalimantan Tengah)	Kawasan Suaka Alam	<p>a. mempertahankan dan memelihara luas Suaka Margasatwa Lamandau</p> <p>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan, hewan, jamur, ikan, dan kompos) dan semua endemik kawasan (terutama orang utan, bekantan, ewa-ewa, burung madu, rusa, dan kancil) pada Suaka Margasatwa Lamandau</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Lamandau</p> <p>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Lamandau</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>f. menetapkan ketentuan pelarangan terhadap Penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Suaka Margasatwa Lamandau</p>
III.2.2.	Suaka Margasatwa Pelahari Marapuru (Kalimantan Selatan)	Kawasan Suaka Alam	<p>a. mempertahankan dan memelihara luas Suaka Margasatwa Pelahari Marapuru</p> <p>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama bekantan, rusa, hanya muara, paok ulu, elang banded, elang laut, perat putih, elang tikus, dan langau kengtung) pada Suaka Margasatwa Pelahari Marapuru</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p>

NO.	KAWASAN PENDUNG NASIONAL	JENIS STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.3.	Suaka Margasatwa Kuala Lepak (Kalimantan Selatan.)	<p>sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Peliharaan Martawa</p> <ol style="list-style-type: none"> membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Peliharaan Martawa; menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Suaka Margasatwa Peliharaan Martawa <ol style="list-style-type: none"> mempertahankan dan merehabilitasi buasan Suaka Margasatwa Kuala Lepak melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama kebinatangan) pada Suaka Margasatwa Kuala Lepak mamanfaatkan mang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Kuala Lepak membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Kuala Lepak mencukupkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.	Cagar Alam dan Cagar Alam Lari		<p>menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>f. menerapkan ketertarikan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dari pelepasan satwa yang bukan merupakan barbitar dan satwa endemik kawasan Suka Mangrove-wa Kuala Luyuk</p>
III.3.1.	Cagar Alam Mander (Kalimantar Barat)	Kawasan Suka Alam	<p>a. memperabankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Mander</p> <p>b. melindungi dan melindungi keanekaragaman hayati tumbuhan (termasuk meranti, jelutung, keladan, mabang, kebaca, ramin, berbagai jenis anggrek, dan karuing sonar) dan satwa endemik kawasan (termasuk owa, kera, berbagai maula, rusa, landak, alap-alap dan burung enggang Hitam) pada Cagar Alam Mander</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Mander</p> <p>d. rehabilitasi pendidikan bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata, dan sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Mander</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelaksanaan bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dari pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Mander</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.2.	Cagar Alam Gunung Raya Pasi (Kalimantan Barat)	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan Cagar Alam Gunung Raya Pasi b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama bunga rafflesia inau madag, bunga rafflesia padma, bunga bintang, bunga jenis anggrek, maratti) dan satwa endemik (terutama ayam hutan, burung madu, burung anaut, rangkaps, bangkaraku, inang, babi hutan, burung merah, burung bertang, burung kera ekor panjang, kakayandak, pelanduk, tenggiling, ular hijau, ikan tenggiling, biawak, burung, mizan dahan dan rusa) pada Cagar Alam Gunung Raya Pasi c. mempertahankan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Gunung Raya Pasi d. rehabilitasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Gunung Raya Pasi e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk memajang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan polipasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan darat satwa endemik kawasan Cagar Alam Gunung Raya Pasi
III.3.3.	Cagar Alam Maara Kendawangan (Kalimantan Barat)	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan Cagar Alam Maara Kendawangan b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama meranti, ulin, dan jelutung) dan satwa endemik kawasan (terutama bekantur, penyu belimbing

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>kura-gading dan beberapa jenis primata) pada Cagar Alam Muara Kendawangan memantapkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Muara Kendawangan</p> <p>d. rehabilitasi perikanan, bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Muara Kendawangan</p> <p>e. memantapkan kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukar merupukar tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Muara Kendawangan.</p>
III.3.4.	Cagar Alam Niyat-Perrissen (Kadimantau, Barak)	Kawasan Siska Alam	<p>a. memperbaharui dan merehabilitasi kawasan Cagar Alam Niyat-Perrissen.</p> <p>b. melindungi dan memantapkan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama anggrek) dan satwa endemik kawasan (termasuk orang utan, cwa, dan bera ekor panjang) pada Cagar Alam Niyat-Perrissen</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Niyat-Perrissen</p> <p>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Niyat-Perrissen</p> <p>e. memantapkan kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.3.	Cagar Alam Bukit Sapat Hawang (Kalimantan Tengah)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"> i. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman, tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukar merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Nyut-Ferriasar. ii. memperahankan dan merehabilitasi hutan Cagar Alam Bukit Sapat Hawang iii. melindungi dan melindungi keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama meranti, baraknai, agahis, bangkawang, keruing, nyatoh, kampas, ulir, angsrek krafar) dan satwa endemik kawasan (terutama orang utan, owa-owa, beruang madu, rusa, kanoel, kijang, macan dahan, biawak Kalimantan, burung ranyekny) pada Cagar Alam Bukit Sapat Hawang iv. memfasilitasi ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Bukit Sapat Hawang v. merabahi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Bukit Sapat Hawang vi. menerapkan ketentuan pelarangan bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam vii. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukar merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Bukit Sapat Hawang
III.3.6.	Cagar Alam Bukit	Kawasan Suaka	<ol style="list-style-type: none"> viii. memperahankan dan merehabilitasi hutan Cagar Alam Bukit Tangkaling

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Tangkiling (Kalimantan Tengah)	Alam	<ul style="list-style-type: none"> b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (termasuk anggrek) dan satwa endemik kawasan (sebagian utara) pada Cagar Alam Bukit Tangkiling c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Bukit Tangkiling d. membatasi peredaran bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Bukit Tangkiling e. menerapkan ketentuan pelarangan pembangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam f. menetapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukar, merusak, tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Bukit Tangkiling
III.3.7	Cagar Alam Pararawen I/II (Kalimantan Tengah)	Kawasan Saaka Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. memperbaharui dan melestarikan kawasan Cagar Alam Pararawen I/II b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan pada Cagar Alam Pararawen I/II c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Pararawen I/II d. membatasi peredaran bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Pararawen I/II e. menerapkan ketentuan pelarangan pembangunan selain bangunan untuk

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.8.	Cagar Alam Muara Kaman Sedilang (Kalimantan Timur)	Kawasan Suaka Alam	<p>memanjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>f. menciptakan ketertarikan pelangan terhadap penanaman dan pelepasan satwa yang bukar, mempatar tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Parawen I/II</p> <p>g. memperzihkan dan merehabilitasi hasan Cagar Alam Muara Kaman Sedilang</p> <p>h. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama pesat) pada Cagar Alam Muara Kaman Sedilang</p> <p>i. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Muara Kaman Sedilang</p> <p>j. rehabilitasi perdirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Muara Kaman Sedilang</p> <p>k. menerapkan ketentuan, peraturan, pendidikan, kegiatan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>l. menerapkan ketentuan peraturan terhadap penanaman, tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukar, mempatar tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Muara Kaman Sedilang</p>
III.3.9.	Cagar Alam Tadang Juwai (Kalimantan Timur)	Kawasan Suaka Alam	<p>g. memperzihkan dan merehabilitasi hasan Cagar Alam Padang Juwai</p> <p>h. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan anggrek hitam, anggrek merpati, dan anggrek tebu dan satwa endemik kawasan pada Cagar</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.10.	Cagar Alam Teluk Apar (Kalimantan Timur)	Kawasan Suaka Alam	<p>Alam Padang, Luwai</p> <ol style="list-style-type: none"> mengembangkan kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam melarang kegiatan selain kegiatan pelestarian, penelitian, pendidikan, dan wisata alam menetapkan ketentuan pelarangan terhadap pendirian bangunan dan pelepasan satwa yang bukar merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Padang Luwai mempertahankan dan merehabilitasi luas Cagar Alam Teluk Apar melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (Kerajaan Kalimantan) pada Cagar Alam Teluk Apar mengembangkan kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Apar membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Apar menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan pelestarian, penelitian, pendidikan, dan wisata alam menerapkan ketentuan pelarangan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Teluk Apar

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.11.	Cagar Alam Teluk Adang (Kalinantan Timur)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"> memperbahankan dan merehabilitasi hutan Cagar Alam Teluk Adang melihara dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama bekantan) pada Cagar Alam Teluk Adang memfasilitasi ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu Cagar Alam Teluk Adang merehabilitasi perikanan bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Teluk Adang
III.3.12.	Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebraku (Kalimantan Selatan)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"> mempertahankan dan merehabilitasi hutan Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebraku melihara dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama bekantan, kumbang tongkong, kumbang kecil, kumbang kuning, elang laut, perut putih dan rata udang) pada Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebraku memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
10.3.13.	Cagar Alam Teluk Pamantik (Kalinantar Selatan)	Kawasan Sazaka Alam	<p>sepanjang tidak menganggu fungsi Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebaku</p> <ol style="list-style-type: none"> d. membatasi peredaran bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pererifinan, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak menganggu fungsi Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebaku e. menerapkan ketentuan, peraturan, pendidikan bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam f. menerapkan ketentuan peraturan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan siswa yang bukan merupakan tumbuhan dan siswa arkanik kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebaku <ol style="list-style-type: none"> a. memperhaluskan dan merehabilitasi hiasan Cagar Alam Teluk Pamantik b. melindungi dan mekstarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan endemik kawasan terutama satwa buaya, maara, bekantak, rusa/payau, kumbang, burung longkong, elang bondol, elang laut, dan raja udang) pada Cagar Alam Teluk Pamantik c. memantapkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak menganggu fungsi Cagar Alam Teluk Pamantik d. membatasi peredaran bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pererifinan, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak menganggu fungsi Cagar Alam Teluk Pamantik e. menerapkan ketentuan peraturan bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.14.	Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan (Kalimantan Selatan)	Kawasan Suaka Alam	<p>f. menetapkan ketentuan pelarangan terhadap pemanfaatan tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan darat, satwa endemik kawasan Cagar Alam Teluk Pantukan</p>
			<p>a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan</p> <p>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (kekantikan, rasi, pelanduk kecil, banggai tenggorok, pebuk ukur, kurchul kecil, dan elang banded) pada Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan</p> <p>c. memantapkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan</p> <p>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan</p> <p>e. menetapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap pemanfaatan tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan darat, satwa endemik kawasan Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan</p>
III.3.15	Cagar Alam Laut Kepulauan Kalimantan	Kawasan Suaka Alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan Cagar Alam Laut Kepulauan Kalimantan</p> <p>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati biota laut pada Cagar Alam Laut</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL (Kalimantan, Barat)	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.4.	Kawasan Pulau Belitung	Kawasan Pelestarian Alam	<p>Kepulauan Karimata:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. memantapkan pusat untuk kegiatan, penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu Cagar Alam Lari Kepulauan Karimata d. membatasi perburuan beracun hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu Cagar Alam Lari Kepulauan Karimata e. memantapkan kegiatan perburuan beracun selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam f. menerapkan ketentuan perburuan beracun sesuai peraturan, bila lain yang bukan merupakan biota lain endemik kawasan Cagar Alam Lari Kepulauan Karimata <p>Kawasan Pulau Belitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan kawasan perburuan beracun di wilayah pesisir untuk perlindungan pantai dar. kelestarian biota lain dilindungi pada kawasan pantai berburuan beracun di wilayah pesisir Kabupaten Belitung, Kabupaten Kota Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kutubang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Palar, Hutan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Tanah Lari, Kabupaten Kolabang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Pagar, Kabupaten Pengajaran Daser Utara, Kabupaten Kidal Timur, Kabupaten Derit, Kabupaten Brhungan, dan Kabupaten Mumukar b. memantapkan ruang untuk kegiatan, penelitian, pendidikan, dan wisata alam

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.	Taman Nasional		<p>sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan, perlu beri perhatian bakau</p> <ol style="list-style-type: none"> c. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau d. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau memunculi ekosistem bakau
III.5.1.	Taman Nasional Betung Keruhun (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan Taman Nasional Betung Keruhun b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem lahan basah, danau, hutan rawa air tawar, dar. hutan kapur tropis pada Taman Nasional Betung Keruhun c. menanam dan/atau melindungi kegiatan wisata alam berupa mengubah bentuk alam d. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Betung Keruhun untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi pemaduk asli di zona penyangga, derajat. kawasan tetap, tidak mengatur/kegiatan fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan. keta. e. menetapkan ketentuan mengenai peltaragar. kegiatan budi daya di zona inti f. menetapkan ketentuan mengenai peltaragar. kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu habitat vegetasi di zona penyangga
III.5.2.	Taman Nasional Danau Sentarum (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan Taman Nasional Danau Sentarum b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna khas danau air tawar sebagai bagian dari ekosistem lahan basah darat, hular. rawa air tawar dan

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>hutan hujan tropik, antara lain meliputi tumbuhan khas bambusa/tegakawang, jelutung, ramai, meranti, keruing, dan kayu ulin serta fauna ikan, endemik air tawar Kalimantan, seperti ikan arwana dan arwana merah pada Taman Nasional Danau Sentarum</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tarpa mengubah bentang alam</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Danau Sentarum untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi pendobrak asli di zona penyangga dengan luas tetap, tidak mengganggu fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai peraturan kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai peraturan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu tarpa wisata di zona penyangga</p>
III.5.3.	Taman Nasional Gunung Palung (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<p>a. mempertahankan dan melestarikan ekosistem Taman Nasional Gunung Palung</p> <p>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna khas ekosistem hutan bakau, hutan rawa, rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan pematang, papaka, dan hutan pegunungan, antara lain meliputi burung angsak, jelutung, ramai, damar, palak, raras, kayu ulin dan satek bekantar, erang utan, kizak, beriang madu, berak, slampan, bakang, rangkong budak, karai, ayam hutan, menggading, buay, sim</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tarpa mengubah bentang alam</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.4.	Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah; b)	Kawasan Pelestarian Alam	<p>Gantung Palang untuk kegiatan buadi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luas tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan buadi daya di zona inti</p> <p>f. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan buadi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</p>
			<p>a. memperahankan dan merehabilitasi haasar Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya</p> <p>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem lahan basah darat, hutan rawa air tawar dan hutan hujan tropik terutama macam dahan, cabang klan, berang, rinda, lalang merah, kukar, rasi sambar, baji & terbang, dan masing belakang pada Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya.</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah beriang alam</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya untuk kegiatan buadi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luas tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan buadi daya di zona inti</p> <p>f. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan buadi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</p>
III.5.5.	Taman Nasional Tanjung Pating	Kawasan Pelestarian Alam	<p>a. memperahankan dan merehabilitasi haasar Taman Nasional Tanjung Pating</p> <p>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem hutan hujan tropis</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL (Kalimantan Tengah)	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.6.	Taman Nasional Sanggau (Kalimantan Tengah)	Kawasan Pelestarian Alam	<p>dalam rangka melindungi serta merawat dan melindungi Taman Nasional Tanjung Puting</p> <ol style="list-style-type: none"> c. memantapkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa merusak bertampek alam d. menerapkan ketentuan pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Tanjung Puting untuk kegiatan budidaya hanya dibuktikan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luas tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budidaya di zona inti f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu balokan vegetasi di zona penyangga <ol style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan merehabilitasi hutan Taman Nasional Sebangau b. melindungi dan melindungi konservasi keanekaragaman hayati tumbuhan hutan hujan tropis seperti meranti dan jehating dan satwa endemik kawasan termasuk antara lainka (terutama orang utan, buaya, dan gajah beserta habitat alaminya) pada Taman Nasional Sebangau c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah bertampek alam d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Sebangau untuk kegiatan budidaya hanya dibuktikan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luas tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budidaya di zona inti

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.7.	Taman Nasional Kayan Mentawai (Kalimantan Timur)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"> f. menerapkan ketentuan mengenai peraturan buki daya yang bertujuan melindungi tutupan vegetasi di zona penyangga
			<ol style="list-style-type: none"> a. memperbaharui dan merehabilitasi hutan Taman Nasional Kayan Mentawai b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem lahan basah darat, hutan rawa air tawar dan hutan hujan tropik (termasuk budi daya, beruang madu, trenggiling, macan dahan, landak, dan rusa sambar) pada Taman Nasional Kayan Mentawai c. memantapkan ruang untuk kegiatan wisata alam terhadap beruang madu d. memantapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Kayan Mentawai untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi perkebunan asli di zona penyangga dengan lahan tetap, tidak mengganggu lingkungan kawasan, dan di bawah pengawasan ketat e. menetapkan ketentuan mengenai peraturan buki daya di zona inti f. menetapkan ketentuan mengenai peraturan buki daya yang bertujuan melindungi tutupan vegetasi di zona penyangga
III.5.8.	Taman Nasional Kutai (Kalimantan Timur)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"> a. memperbaharui dan merehabilitasi hutan Taman Nasional Kutai b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati hutan tropis dan ekosistemnya (termasuk orang utan, owa-owa, kijang, beruang madu, macan dahan, bekantan, dan banteng) pada Taman Nasional Kutai c. memantapkan ketentuan untuk kegiatan wisata alam tanpa mengganggu beruang madu d. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Kutai

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.6.	Taman Hutan Raya		<p>untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luas tetap, tidak mencangkup fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.</p> <p>a. menerapkan kebijakan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan budi daya yang berpotensi mengancam keberlanjutan vegetasi di zona penyangga</p>
III.6.1.	Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kalimantan Selatan)	Kawasan Pelestarian Alam	<p>a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam</p> <p>b. memonitor dan mengawasi untuk pemeliharaan, pemeliharaan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Taman Hutan Raya Sultan Adam</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan selain kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Taman Hutan Raya Sultan Adam</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p>
III.6.2.	Taman Hutan Raya Bukit Sihar'o	Kawasan Pelestarian Alam	<p>a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sihar'o</p> <p>b. memonitor dan mengawasi untuk pemeliharaan, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL (Salibantau, Timor)	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.			<p>mengganggu fungsi Taman Hutan Raya Bukit Suhuarta</p> <p>e. menerapkan ketentuan, peraturan, kegiatan, selain kegiatan, penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>d. membuat pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Taman Hutan Raya Bukit Suhuarta</p> <p>e. menerapkan ketentuan, peraturan, pendidikan, penelitian selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p>
III.7.1	Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut Taman Wisata Alam Belimbing (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelastarian Alam	<p>a. mempertahankan dan rehabilitasi luasan Taman Wisata Alam Belimbing</p> <p>b. menilai lantak rintang untuk wisata alam dan pa mengubah bentuk bentang alam</p> <p>c. menetapkan ketentuan peraturan, kegiatan selain kegiatan, wisata, alam</p> <p>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Belimbing</p> <p>e. menerapkan ketentuan peraturan, pendidikan, bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata, alam</p>
III.7.2.	Taman Wisata Alam Asransang (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelastarian Alam	<p>a. mempertahankan dan rehabilitasi luasan Taman Wisata Alam Asransang</p> <p>b. memantapkan rintang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam</p> <p>c. menerapkan ketentuan, peraturan, kegiatan, selain kegiatan, wisata alam</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.3.	Taman Wisata Alam Durgun (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"> d. memfasilitasi pendirian bangunan, hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Asuanang e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam
III.7.4.	Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. memperhatikan dan memelihara nilai hiasan Taman Wisata Alam Durgun b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. memfasilitasi pendirian bangunan, hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Durgun e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.5.	Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (Kallimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<p>menunjang kegiatan wisata alam</p> <ol style="list-style-type: none"> mempertahankan dan merehabilitasi faunan Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam
III.7.6.	Taman Wisata Alam Tarjung Keluang/Telik Keluang (Kallimantan Tengah)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"> mempertahankan dan merehabilitasi faunan Taman Wisata Alam Tarjung Keluang/Telik Keluang memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Tarjung Keluang/Telik Keluang menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam
III.7.7.	Taman Wisata Alam Pelalihan Tanah Laut	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"> mempertahankan dan merehabilitasi faunas Taman Wisata Alam Pelalihan Tanah Laut memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam

NO.	KAWASAN INDUNG NASIONAL (Kallimantan Selatan.)	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.8.	Taman Wisata Alam Laut Bengkayang (Kalmantan Barat)	Kawasan Pedestrian Alam	<ul style="list-style-type: none"> b. merupakan ketuntasan pelaksanaan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menarajang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Delaihari Tanah Laut e. menetapkan ketentuan pelarangan: pendirian bangunan selain bangunan untuk menarajang kegiatan wisata alam
III.7.8.	Taman Wisata Alam Laut Bengkayang (Kalmantan Barat)	Kawasan Pedestrian Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan perkebunan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Laut Bengkayang b. memantapkan ruang untuk wisata alam hanya mengubak bentuk berjang alam c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menarajang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Laut Bengkayang e. menetapkan ketentuan: pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menarajang kegiatan wisata alam
III.7.9.	Taman Wisata Alam Laut Betara (Kalmantan Timur)	Kawasan Pedestrian Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Laut Betara b. memantapkan ruang untuk wisata alam hanya mengubak bentuk berjang alam c. menetapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menarajang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Laut Betara

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.10.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Barat-Selatan dan Pulau Sembilan (Kalimantan Selatan)	Kawasan Pelestarian Alam	<p>e. menerapkan ketentuan pelajaran pendidikan bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam</p> <p>a. mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Barat-Selatan dan Pulau Sembilan</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam</p> <p>c. menerapkan ketentuan pelajaran selain kegiatan wisata alam</p> <p>d. membatasi pendidikan bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelajaran bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam</p>
III.8.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	<p>a. melindungi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan di Gerbang Tua Sejaran, Keraton Kerajaan Layan, Rumah Adat Belang Panjang, Keraton Sanggau, Keraton Kerajaan Sintara, Tugu Khududhiwa, Laksaka, Pasar Terapung Dayak Meratus, Bukit Bara Kasongan, Keraton Kutai Kartanegara, Kampung Masyarakat Suku Dayak Dayak Kumuq Qhong di Tarjung Isuy, dan Kampung Masyarakat Suku Dayak Koryak di Desa Cagar Wisata Tampang, serta benda, bangunan, struktur atau situs lainnya yang didapatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan</p> <p>c. menetapkan ketentuan pelajaran kegiatan kejar dan pendidikan bangunan yang tidak sesuai</p>

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.	Kawasan Kawat-Bencana Alam	Kawasan Kawat-Bencana Alam	<p>dengan fungsi kawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada kawasan perkotaan rasional yang rawan banjir dilakukan di Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Pontianak, Kota Mempawah, Kota Kelapang, Kota Puhassaban, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala Kurus, Kota Pangkajene, Kota Dumai, Kota Muara Teweh, Kota Sampit, Kota Martapura, Kota Marabahan, Kota Tanjung Kedeo, Kota Sangata, Kota Tanjung Selor, dan Kota Tanah Sirogi mempromosikan kebanahan mengenai pendirian belah ketupat banjir memanfaatkan ruang daratan banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian banjir mempromosikan ketertarikan mengenai pelatihan pemanfaatan ruang bagi kegiatan perumahan dan fasilitas umum pending lainnya, terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi
V.	Kawasan Lindung Geologi		
V.1.	Kawasan Cagar Alam Geologi		
V.1.1.	Kawasan Cagar Alam Geologi yang memiliki keunikan	Kawasan Lindung Geologi	<ol style="list-style-type: none"> merehabilitasi dan melestarikan kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan kawasan dan tesis dilakukan di Kabupaten Kota Timor memanfaatkan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.1.2.	Kawasan Cagar Alam Geologi yang memiliki keunikan bentuk geologi	Kawasan Lindung Geologi	<ul style="list-style-type: none"> c. membatasi kegiatan pertambangan untuk penelitian arkeologi dan geologi d. menerapkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan.
V.2.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	Kawasan Lindung Geologi	<ul style="list-style-type: none"> a. memperlakukan ruang kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan bentuk geologi yang berada di kawasan karst di kawasan karst Singkilhany (Kabupaten Kutai Timur), Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, Kabupaten Duhungar, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten T. bahang, dan Kabupaten Tapani b. memanfaatkan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata
V.2.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	Kawasan Lindung Geologi	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan perkembangan kegiatan budidaya pertanian pada kawasan rawan bencana alam geologi dilakukan pada: <ul style="list-style-type: none"> 1) kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Terai, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan 2) kawasan rawan seismik di Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sempang, Kabupaten Lamandau, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, Kabupaten Sanggau, Kota Samarinda, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Muarung Raya, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Kutai, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu

NO.	KAWASAN TUNJUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>3) Kawasan rawan tsunami di pesisir timur Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidjung, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan</p> <p>b. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan sarana pemantauan bencana, serta penelapapan standar bangunan gedung untuk memonitoring dampak akibat bencana alam geologi dilakukan pada:</p> <p>1) Kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidjung, dan Kabupaten Nunukan</p> <p>2) Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Malawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kutuas Hulu, Kabupaten Kutai, Kabupaten Seraya, Kabupaten Jamadana, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, Kabupaten Sengaja, Kota Samarinda, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Marang Raya, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>3) kawasan rawan tsunami di pesisir timur Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidjung, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan</p> <p>c. memantapkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana</p> <p>d. membalas pendiman bangunan kembali untuk kepentingan pemukiman ancaman bencana dan kepentingan umum</p>

STRATEGI OPERASIONALISASI	
NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL, JENIS, dan KAWASAN LINDUNG Lainnya
V.3.	<p>Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah</p> <p>Kawasan Lindung Geologi</p> <ol style="list-style-type: none"> mengendalikan perkembangan kegiatan buadi daya terbangun pada kawasan membahai air tanah dilakukan pada kawasan imbrakar air tanah di CAT Paleh, CAT Tamiang Sehor, CAT Palangkaraya-Banjarmasin, CAT Marapayang, dan CAT Manara Lahai memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan buadi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada memerapkan prinsip <i>zero shella Q policy</i> terhdap setiap kegiatan buadi daya terbangun yang diajukan izinya.
VI.	Kawasan Lindung Lainnya
VI.1.	<p>Kawasan Lindung Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> mempertahankan dan melestarikan sistem teha air dan ekosistem alamiah pada kawasan ransar dilaktikan di kawasan Ransar Daman Danan Sentanun menetapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung
VI.2.	<p>Terumbu Karang</p> <p>Kawasan Lindung Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> menperlebarikan, melestarikan, dan mengembangkan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang dilakukan pada terumbu karang di wilayah perairan Pulau Ean jang, Pulau Terawan, Pulau Kaban, Gasing, Aling, Gusan g Arula, Gasing Awing, Gasing Earas Basah, dan Karang Anyir Seber. memanfaatkan ruang untuk kawasan penuntutan pariwisata bahari menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan dan

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.3.	Koridor Ekosistem	Kawasan Lindung Laut/Cyfa	<p>pengambilan terumbu karang</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan selam perangkap ikan dan pengambilan terumbu karang yang dapat menimbulkan pencemaran air</p>
VI.3.	Koridor Ekosistem	Kawasan Lindung Laut/Cyfa	<p>1. mendapatkan koridor ekosistem amburkayu suaka alam dan pelestarian alam meliputi:</p> <p>1) koridor ekosistem bakau dan estuari yang menggabungkan antar ekosistem daratan tinggi, yaitu Cagar Alam Bukit Sapat Hawang, Taman Nasional Ekuung Keruh, Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Bukit Bakka Bukit Raya, dan Taman Nasional Kayan Mentarang</p> <p>2) koridor ekosistem bekatuan, gabon, gajah, dan orang utan yang menghubungkan antar ekosistem daratan rendah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koridor ekosistem Suaka Margasatwa Lamanda, Cagar Alam Gunung Raya Pasi, Taman Nasional Gunung Palung, Taman Nasional Tarung Puring, dan Taman Wisata Alam Tanjung Kelangs - koridor ekosistem Cagar Alam Pararawen I/II Cagar Alam Bukit Tenekeling, dan Taman Nasional Sebangau - koridor ekosistem Cagar Alam Mander, Cagar Alam Muara Kendawangan, Cagar Alam Nyat-Perrissen, Taman Wisata Alam Belirabung, Taman Wisata Alam Aerasang, dan Taman Wisata Alam Pingar - koridor ekosistem Cagar Alam Muara Kemir Sebulang, Cagar Alam Parung Lawal, dan Taman Nasional Kutai

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>3) koridor ekosistem berupa embankment yang menghubungkan antar kawasan pesisir, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koridor ekosistem Cagar Alam Teluk Apar, Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sekuku, Cagar Alam Sungai Talan dan Sungai Bulan, dan Cagar Alam Teluk Pematikan - koridor ekosistem Taman Irian Raya Sultan Adam dan Taman Wisata Alam Pleihari Tarah Lari <p>b. menggalakan pemanfaatan ruang kegiatan hudi daya dengan prinsip berkelanjutan pada kawasan koridor ekosistem dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) koridor ekosistem bekantar dari orang utan yang menghubungkan antarekosistem dataran tinggi, yaitu Cagar Alam Bukit Supit Hawang, Taman Nasional Betung Karuhun, Taman Nasional Danau Seramau, Taman Nasional Bukit Bukal-Eukit Raya, dan Taman Nasional Kayan Mentarang 2) koridor ekosistem bekantar, gibbon, gajah, dan orang utan yang menghubungkan antarekosistem dataran rendah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - koridor ekosistem Suaka Margasatwa Lemunaha, Cagar Alam Gunung Raya Pasi, Taman Nasional Gurung Pahang, Taman Nasional Tarung Pating, dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang - koridor ekosistem Cagar Alam Pararawen I/II, Cagar Alam Bukit Tangkilang, dan Taman Nasional Sebangau - koridor ekosistem Cagar Alam Mander, Cagar Alam Muara Kendawangan, Cagar Alam Nyit-Terrissen, Taman Wisata Alam Belimbing, Taman Wisata

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>Alam Agung, dan Taman Wisata Alam Danau Koridor ekosistem Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Cagar Alam Padang Jawa, dan Taman Nasional Kutai</p> <p>5) koridor ekosistem burung endemik yang menghubungkan antar ekosistem pesisir, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koridor ekosistem Cagar Alam Teluk Apar, Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Teluk Kempung, Nelayan-Selat Sebak, Cagar Alam Sungai Jalar, dan Sungai Bulau, dan Cagar Alam Teluk Patukan - koridor ekosistem Taman Harau Baya Sultan Adam dan Taman Wisata Alam Pileh-lari Tanah Laut <p>6) mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan sebagai pendukung koridor ekosistem dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan antar ekosistem daratan tinggi, yaitu Cagar Alam Bukit Sapat Hayung, Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Darat Sentarum, Taman Nasional Bukit Baka-Baki Raya, dan Taman Nasional Kayu Mentarang 2) koridor ekosistem bekantan, gibbon, gajah, dan orang utan yang menghubungkan antar ekosistem dataran rendah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - koridor ekosistem Suaka Margasatwa Lamandau, Cagar Alam Gunung Kaya Pasi, Taman Nasional Gunung Palung, Taman Nasional Tanjung Paku 85, dan Taman Wisata Alam Tanjung Kuhar.

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> - koridor ekosistem Cagar Alam Pararewon I/II, Cagar Alam Bukit Tangkilings, dan Taman Nasional Sebangau - koridor ekosistem Cagar Alam Mulus, Cagar Alam Muara Kankawangan, Cagar Alam Miyut-Pamwasar, Taman Wisata Alam Belimbing, Taman Wisata Alam Astarsung, dan Taman Wisata Alam Daryagan - koridor ekosistem Cagar Alam Muara Kamar, Sehalang, Cagar Alam Padang Luwai, dan Taman Nasional Kutai <p>3) koridor ekosistem burung endemik yang menghubungkan antauekosistem pesisir, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koridor ekowisata Cagar Alam Teluk Apar, Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut-Selat Sebuka, Cagar Alam Sungai Lalar, dan Sungai Eulau, dan Cagar Alam Teluk Puntakan - koridor ekosistem Taman Hutan Raya Sultan Adam dan Taman Wisata Alam Pleihari Tarah Isat. <p>d. membatasi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hanya untuk memperlakukan habitat bagi satwa yang bermigrasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundang-undangan.</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN BUTU DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

NO	KAWASAN BUTU DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan Terbukukan Hutan	Kawasan Butu Daya	<p>4. mengembangkan kawasan peruntukan hutan yang ditubung dengan industri pengolahan dengan prinsip berkelanjutan dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Jenjak, Kabupaten Pempin, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lamau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Falam, Kabupaten Garung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Parit Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Uluh Sangai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Narakam dan Kabupaten Malinau</p>

NO	KAWASAN TERTU PADA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
b.			<p>mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan dengan meningkatkan fungsi ekologis di kawasan peruntukan hutan dilindungi pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Uluh, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landaui, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kalingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabaka & Kabupaten Bakong, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapau, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kolabaru, Kabupaten Landak, Kabupaten Lanah Liat, Kabupaten Banjar, Kabupaten Paser, Kabupaten Pempang, Kabupaten Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau</p> <p>c. mengabdikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Uluh, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landaui, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten</p>

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
2.	Kawasan Perbukitan Perforian	Kawasan Budi Daya	<p>Kapasas, Kabupaten Marang Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Talaung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Bharu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Lasea, Kabupaten Pongkor, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Narakar, dan Kabupaten Malinau</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan negara sumber daya kehutanan</p> <p>e. membatasi peredaran benangkar hanya untuk memuliyak kegiatan pemanfaatan hasil hutan</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pembelian bangunan selain untuk memanjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.</p> <p>g. memperbolehkan kawasan perbukitan perforian beririgasi, rawa pasang surut dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan L.H.R. pertanian pasang berkalamper. dilakukan pada kawasan perbukitan perforian di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kelapang, Kabupaten Saragau, Kabupaten Singkawang, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,</p>

NO	KAWASAN TERTU PADA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Samarinda, Kota Tenggarong, dan Kabupaten Malinau</p> <p>b. mengacu dalilkan alih fungsi lahan kawasan pertanian peruntukan pertanian sawah menjadi non sawah dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Saranggau, Kabupaten Singkawang, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Palang, Pesisir, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Samarinda, Kota Tenggarong, dan Kabupaten Malinau</p> <p>c. mengembangkan kawasan pertanian sesuai dengan kesesuaian lahan serta kelangkaan rawa darat lahan kering/tadah hujan dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Saranggau, Kabupaten Singkawang, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Palang Pesisir, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota</p>

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>d. Samarinda, Kota Terengganu, dan Kabupaten Malinau mengembangkan kawasan Budi daya perkebunan kelapa sawit dengan prinsip tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dilakukan di Kabupaten Paser, Kabupaten Barat, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Berau Selatan, Kabupaten Darfo Ulu, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kutabaru, Kabupaten Ulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Mahaling, Kabupaten Sambas, Kabupaten Pambak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekeloa, Kabupaten Kutai Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kutai Selatan, Kabupaten Berau Utara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kutabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Ulu Sungai Selatan, Kabupaten Ulu Sungai Tengah, Kabupaten Ulu Sungai Utara, Kabupaten Mahaling, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota</p>	
		<p>e. mengembangkan kawasan Budi daya perkebunan karet dengan prinsip berkelanjutan dilakukan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekeloa, Kabupaten Kutai Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kutai Selatan, Kabupaten Berau Utara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kutabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Ulu Sungai Selatan, Kabupaten Ulu Sungai Tengah, Kabupaten Ulu Sungai Utara, Kabupaten Mahaling, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota</p>	

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
3.	Kawasan Perantukan Perikanan	Kawasan Budi Daya	<p>Samarinda</p> <p>f. menandatangani perkembangan kawasan budi daya perikanan kelapa sawit dan karet yang menggunakan kawasan berfasilitas lingkungan dilakukan pada kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartasegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bario Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Ulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Liat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kutabumi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Ketawangginj, Timor, Kabupaten Kelawaringin, Berau, Kabupaten Kutajung, Kabupaten Palangka, Kabupaten Kutai Baya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bangkayung, Kabupaten Sambas, dan Kota Palangkaraya</p> <p>g. menandatangani mang untuk permukaan petani dengan kepadatan rendah</p> <p>h. menerbitkan ketentuan mengenai pelarangan ahli fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana lainnya</p> <p>i. mengembangkan sistem produksi perikanan dengan memperhatikan potensi lesani dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Tanah Grogot, Palau Alang, Kabupaten Kutabara, Kabupaten Tarai Rambu, Kabupaten Tanah Liat, Kabupaten Banjar, Kabupaten Bulungan, dan Kota Samarinda</p> <p>b. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat dilakukan di Kabupaten</p>

NO	KAWASAN TERTU PADA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Pektarak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kutaijar, Kota Palangkaraya, Kabupaten Bario Selatan, Kabupaten Kutawaringin Barat, Kabupaten Banjar, Kabupaten Uluh Sangai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Muaraka, Kabupaten Peralam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Buhang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan.</p> <p>c. mengembangkan kegiatan pertanian horti oleh-oleh dengan memperlebar daya dukung dan dayaampung lingkungan hidup dilakukan pada kawasan perkebunan perikanan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kutawaringin Barat, Kabupaten Sernayan, Kabupaten Kapuas, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Paser Utara, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bulungan</p> <p>d. mengerdalikan kegiatan perikanan tangkap pada kawasan perikanan yang memiliki terumbu karang dilakukan di wilayah pesisir Kota Tanah Segel, Kabupaten Kutabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, serta wilayah pesisir Pulau Kalimantan, Pulau Atas, Pulau Penata, Pulau Lemukutan, Pulau Tinkabasar, Pulau Larat Bagian Selatan, Kepulauan Derawan, Kepulauan Bala-balakan dan Kepulauan Sangkhirang</p>	

NO	KAWASAN BUDHI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
4.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan Budi Daya	<p>e. memanfaatkan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kecepatan rendah</p> <p>f. memanfaatkan ruang untuk kawasan permukiman dan/atau kawasan satelit hijau</p> <p>g. memanfaatkan sumberdaya perikanan agar tidak melebihi potensi lahan</p> <p>a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi dengan mempertajam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:</p> <p>1) kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Burekayong, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kepulauan Sumbawa, Kabupaten Sekeloa, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kendi Raya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Paljebana, Kota Marabau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Takalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kota Kendawangan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Lamau, Kabupaten Kelawaringin Barat, Kabupaten Kowaringin Timur, Kabupaten Kalingar, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sakamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Faser, Kabupaten Serau, Kota</p>

KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bongan, Kabupaten Malinau, dan Kota Balikpapan</p> <p>2) kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Marang, Kabupaten Kutawaringin Barat, Kabupaten Kutawaringin Timur, Kabupaten Saktamara, Kabupaten Kalawaringin Barat, Kabupaten Kalawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Malinau, Kabupaten Numukin, Kabupaten Balinggar, Kabupaten Berati, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Perajem Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Tarakan, Kota Bentang, Kota Samarinda, Kabupaten Labalang, Kabupaten Limangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin</p> <p>3) kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Marang Bays, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Berati,</p>

NO	KAWASAN TERTU PADA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS
		<p>Kabupaten Nurukan, Kabupaten Bidung, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Samundra, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser</p> <p>b. mengacu daftar perkembangan kawasan perlintasan yang meliputi: 1) kawasan yang difungsikan sebagai meliputi:</p> <p>1) kawasan perantaraan pembangunan miral di Kabupaten Pohnanok, Kabupaten Lamak, Kabupaten Benekayang, Kabupaten Saingan, Kabupaten Siriang, Kabupaten Kelapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Ulu, Kabupaten Kutai Raya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjarbaru, Kota Martapura, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanak Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kota Kendawangan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Lamardak, Kabupaten Ketawanggin Barat, Kabupaten Ketawanggin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Paser, Kabupaten Etnan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kota Balikpapan</p> <p>2) kawasan perantaraan pembangunan barabara di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kutai Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten</p>

NO	KAWASAN BUDHI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Ladak, Kabupaten Pektarak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kutai, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Mahkota, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bontokar, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kalimantan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Ulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarbaru</p> <p>3) kawasan peruntukan pertambangan gas minyak dan gas bumi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Marang Raya, Kabupaten Barito Ulu, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kutabara, Kabupaten Lempit, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser</p>

NO	KAWASAN TERTU PADA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS
		<p>c. melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca tambang pada kawasan peruntukan perlanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan ekosistem dilakukan pada:</p> <p>1) kawasan pertambangan mineral di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Kota Tayan, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kutaiyang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekeloa, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bujur, Kabupaten Bengkayang, Kota Martapura, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Karangas, Kabupaten Bujur, Kota Kerinci, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kolowarung Baru, Kabupaten Kelawarung Timur, Kabupaten Kalingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Maara Jaweh, Kabupaten Buntok, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Marang Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kota Balikpapan.</p> <p>2) Kawasan peruntukan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pektaranak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Murung Raya,</p>

NO	KAWASAN BUDI BAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
5.	Kawasan Bani Daya Perantukan	<p>Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kalimantan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Buntok, Kota Kuala, Kabupaten Malinau, Kabupaten Numakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Pongkor, Kabupaten Paser, Kabupaten Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Labakeng, Kabupaten Balikpapan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak menzeatuga fungsi alur pelayanan yang diwariskan pemerintah perundang-undangan</p> <p>e. menerapkan penyatuan kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dar, marilaat serta keselamatan, antara risiko dan manfaat</p> <p>f. membatasi pendirian bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan keselamatan daerah</p>	<p>3. mengembangkan kawasan perantukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri</p>

NO	KAWASAN BUDIDAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Industri		<p>terpaku dilakukan pada kawasan peruntukan industri di kawasan peruntukan industri di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontarig, Kota Tarakan, Kota Sanggau, Kota Buntok, Kota Muara Teweh, Kota Marapure, Kota Tanjung Redeh, Kota Sanggala, dan Kota Tanjung Selor</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan meliputi:</p> <p>1) pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan karet pada kawasan peruntukan industri di Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Terengganong, Kota Samarinda, Kota Bontarig, Kota Mempawah, Kota Singawang, Kota Sambas, Kota Kutapang, Kota Pottussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala Kapuas, Kota Pangkajene, Kota Buntok, Kota Muara Teweh, Kota Sampit, Kota Amurta, Kota Martapura, Kota Mahabahan, Kota Kelabari, Kota Saragata, Kota Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kota Mahau, Kota Tarah Grogot, Kota Sandayar, Kota Simanggang, Kota Long Midang, dan Kota Long Pahangai</p> <p>2) pengembangan industri pengolahan hasil hutan pada kawasan peruntukan industri di Kota Pantiak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Terengganong, Kota Samarinda, Kota Kelapang, Kota Pucassihau, Kota Sanggala, Kota Sampit, Kota Mahau, Kota Tamlambis, dan Kota Sandayar</p> <p>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan lazam, pangau dan perikanan meliputi:</p>

NO	KAWASAN BUDHI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>1) pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan pada kawasan peruntukan industri di Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, Kota Singkawang, Kota Kutaiwang, Kota Puyusiban, Kota Sanggau, Kota Kuala Kapuas, Kota Bunkar, Kota Muara Lingsih, Kota Sampit, Kota Amuntai, dan Kota Kotakara</p> <p>2) pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan pada kawasan peruntukan industri di Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, Kota Kawasar Perkonan, Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Pontang, Kota Tarakan, Kota Singkawang, Kota Kutaiwang, Kota Sanggau, Kota Panykalan Baku, Kota Kuala Kapuas, Kota Kotabaru, Kota Tanjung Kedondong, dan Kota Sangata</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya</p> <p>e. membatasi pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan permukiman industri</p>
6.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan Budi Daya	<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekantan, muntir, dugayok, serta satwa dan tumbuhan endemik kawasan lainnya dilakukannya pada kawasan ekowisata di Suka Mangrove, Taman Nasional Ulu Buru dan Ketawaringin Barat-Kabupaten Sukamara, Taman Nasional Betung Kerinci, Kabupaten</p>

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>Kapas Haha), Tamar Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Tamar Nasional Gunung Pahang (Kabupaten Kayong Utara-Kabupaten Ketapang), Tamar Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi-Kabupaten Sintang-Kabupaten Katingan), Taman Nasional Tanjung Daring (Kabupaten Kutawaringin Barat-Kabupaten Seruyan), Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Kutayan-Kabupaten Pulang Pisis-Kota Palangkaraya), Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau-Kabupaten Muamuk-Kabupaten Bulungan), Taman Nasional Inai (Kabupaten Kutai Timur-Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Betung), Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Banjar-Kabupaten Tana Tidore), Taman Hutan Raya Baki Suluho (Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Paser Utara), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sintang), Tamar Wisata Alam Amarsang (Kabupaten Sambas), Tamar Wisata Alam Dungan (Kabupaten Sambas), Tamar Wisata Alam Gurang Melintang (Kabupaten Sambas), Tamar Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (Kabupaten Sintang), Taman Wisata Alam Tanjung Keluaq/Teluk Keluang (Kabupaten Kutawaringin Barat), dan Taman Wisata Alam Palohari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut)</p> <p>E. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dilakukan pada kawasan ekowisata di Saka Margasatwa Lamadau (Kabupaten Kutawaringin Barat-Kabupaten Sakarrua), Taman Nasional Belang Kerilun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Gunung Pahang (Kabupaten Kayong Utara-Kabupaten Ketapang), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya</p>	

NO	KAWASAN BUDHI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>(Kabupaten Melawi-Kabupaten Kutai, Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kutai-Kabupaten Seruyan), Taman Nasional Sebangau (Kabupaten Kutai-Kabupaten Pulang Pisan-Kota Palangkaraya), Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau-Kabupaten Nantikan-Kabupaten Buhang), Taman Nasional Kutai (Kabupaten Kutai Timur-Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Betung), Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kabupaten Berau-Kabupaten Tanah Laut), Taman Hutan Raya Paksi Suharto (Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Penajam Paser Utara), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Astansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Daryun (Kabupaten Sintang), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Bukit Kalam Komplek (Kabupaten Sintang), Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kabupaten Keluwarangin Barat), dan Taman Wisata Alam Telantari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut)</p> <p>c. mewilangkan kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan dilakukan di Kabupaten Maresak Suku Dayak Benua Obeng di Pempang Isuy (Kabupaten Kutai Berau), Kabupaten Masyarakat Suku Dayak Kenyah di Desa Gagar Wisata Pempang (Kota Samarinda), dan Kampung Masyarakat Suku Dayak Meratus di Loksado (Kabupaten Hulu Sungai Selatan)</p> <p>d. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan antara kawasan ekowisata, wisata budaya, obyek wisata lainnya, dan kawasan perkotaan rasional meliputi prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan:</p>

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>1) kawasan ekowisata Taman Nasional Betulug Kerinci (Kabupaten Karau Uluah), Taman Nasional Danau Seraiung (Kabupaten Karau Uluah), Taman Nasional Gunung Palung Raya (Kabupaten Kutai), Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kabupaten Melawi-Kabupaten Sintang-Kabupaten Kutai), Taman Wisata Alam Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Asansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Dungan (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Bukit Kelan Komplek (Kabupaten Singang), wisata budaya, dan obyek wisata lainnya dengan Kota Pontianak</p> <p>2) kawasan ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau-Kabupaten Nunukan-Kabupaten Buhang), Taman Nasional Kerinci (Kabupaten Kutai Timur-Kabupaten Kerinci Karawang-Kota Pontianak), Kampong Masyarakat Sukoh Dayak Beruang di Tanjung Isay (Kabupaten Kerinci Barat), Kampong Masyarakat Suku Dayak Kerayak di Desa Cagar Wisata Pampang (Kota Samarinda), obyek wisata lainnya dengan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda</p> <p>3) kawasan ekowisata Suaka Margasatwa Lamandau (Kabupaten Kutawaringin Barat-Kabupaten Sukamara), Taman Nasional Lampung Fiqirig (Kabupaten Kutawaringin Barat-Kabupaten Seriyang), Taman Nasional Seberau (Kabupaten Kutai-Kabupaten Kutai Timur-Palang Pisau-Kota Palangkaraya), dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kabupaten Kutawaringin Barat), wisata budaya, dan obyek wisata lainnya dengan Kota Palangkaraya</p>

NO	KAWASAN BUDHI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>4) kawasan ekowisata Taman Wisata Alam Felaihari Tanah Lari (Kabupaten Tanah Lari, Kampong Masyaraka Sakti Dayak Meratus di Jolleso (Kabupaten Indragiri Seling), wisata budaya, objek wisata lainnya dengan Kota Banjarmasin</p> <p>c. mengembangkan pusat jasa pariwisata di kawasan perkotaan dilakukan di Kota Fortifikasi Kota Pakarkaway, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda</p> <p>d. memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dayaukung dan dayaampung lingkungan</p> <p>e. mempromosikan rang untuk perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau</p> <p>f. membatasi pendirian bangunan lainya untuk menunjang kegiatan pariwisata</p> <p>g. menenapkan kebijakan mengenai peraturan pendirian bangunan dalam untuk menunjang kegiatan pariwisata</p>
7.	Kawasan Perbukitan Permukiman	Kawasan Budi Daya	<p>a. mengembangkan kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang ditunjuk oleh prasarana dan sarana perkotaan yang sudah terdapat ancaman bencana banjir dilakukannya di Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Tarakan, Kota Balikpapan, Kota Tenggara, Kota Samarinda, Kota Benteng, Kota Mempawah, Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota Kelayang, Kota Dusunsbau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala Kapuas, Kota Pongkajene, Kota Baritak, Kota Muara Teweh, Kota Sampul, Kota Amuntai, Kota Marapau, Kota Mambau, Kota Kabaena, Kota Tanjung Redab, Kota Sangafa, Kota Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kota Malinau, Kota Tuluambis, Kota Lamal</p>

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMPILIKHILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Gringsel, dan Kota Sendawar</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntakan permukiman di kawasan perbatasan negara. termasuk pulau-pulau kecil perlu dukungan prasarana dan sarana yang dimulai dilakukan di Kot. Paksi-Arak, Kota Jember, ms. Kot. Nanyo Kidul, Kot. Bantorejo, Kot. Jasi, Kota Nunukan, Kota Simanungkar, Kota Long Midang, Kota Long Pahangai, Kota Long Nawar, Pulau Sebauk, Pulau Sembil, dan Pulau Maratua</p> <p>c. menetapkan rencana penatapan amplex bangunan</p> <p>d. memapkan kontribusi mengenai penatapan lalu arak-kar bangunan</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai penatapan kelengkapan bangunan dan lingkungan</p> <p>f. menetapkan ketentuan mengenai penatapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. L. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN ANDALAN DI PULAU KALIMANTAN

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perikanan - Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta jasa yang pesisir dan sarana b. mengabdikan ahli tenaga lahan pada Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian pada Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan PKN Pontianak dan PKW Mempawah sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, yang melayani ternak d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan perikanan, serta jaringan piasarana dan sarana e. meningkatkan keterkaitan antara pusat kegiatan industri di Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya dan keterkaitan antara pusat kegiatan industri dengan PKN Pontianak dan PKW Mempawah sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya yang dilayani terutama oleh Pelabuhan Perikanan f. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perikanan, serta jaringan pesisir dan sarana g. mengabdikan perkembangan kegiatan perikanan pada Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya yang berpusat di kawasan pesisir pantai bertani bakau, tambak karang, kawasan pesisir, dan air pelayaran h. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKN Pontianak dan PKW Mempawah sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, yang melayani terutama oleh Pelabuhan Perikanan atau Bandar Udara Supadio i. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR LINGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>melakukan pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;</p> <p>i. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan pariwisata serta antara pusat kegiatan pariwisata dan PKN Perjarak dan PKW Mempawah sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, yang melayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak dar. Bandar Udara Supadio</p> <p>k. menerapkan kebijakan mengenai indikator areal, peraturan zonasi untuk kawasan perikanan, pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>l. menerapkan kesatuan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang antar-sektor unggulan</p>
2.	Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perkebunan - Perikanan 	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pergelahan hasil pertanian, perumakmar, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>b. mengendalikn alih fungsi lahan pada Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian pada Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan PKW Singkawang dan PKW Sambas sebagai pusat pengembangan kawasan andalan Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, yang melayani terutama oleh Bandar Udara Supadio atau Pelabuhan Pontianak</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>e. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan industri di Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dan keterkaitan antara pusat kegiatan industri dengan PKW Singkawang dan PKW Sambas sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya yang</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>dilayani terutama oleh Pelabuh Pontianak</p> <p>f. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, perumahan, serta jaring-jala prasarana dan sarana</p> <p>g. meningkatkan ketertarikan pusat kegiatan perkebunan daerah PKW Singkawang dan PKW Sambas sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan yang terlayani terutama oleh Pelabuh Pontianak dan Bandar Udara Supadio</p> <p>h. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perumahan, serta jaring-jala prasarana dan sarana</p> <p>i. meningkatkan ketertarikan pusat kegiatan perikanan daerah PKW Singkawang dan PKW Sambas sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan yang terlayani terutama oleh Pelabuh Pontianak atau Bandar Udara Supadio</p> <p>j. menerapkan ketenar, mengenai tindakan anahan perikanan zonaal untuk kawasan perikanan perikanan, perkebunan, perikanan, dan industri</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana pemangjang di bar-sektor unggulan</p>
3.	Kawasan Andalan Kefapang dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perkebunan - Perikanan - Kehutanan 	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, perumahan, dan jaring-jala prasarana serta sarana</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang mengganggu fungsi ekologis hutan</p> <p>c. meningkatkan ketertarikan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan pada Kawasan Andalan</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Ketapang dan Sekitarnya dengan PKW Ketapang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Ketapang</p> <p>d. memgembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, permutikman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>e. memgembangkan alih fungsi lahan pada Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Baladi Usman atau Pelabuhan Ketapang</p> <p>f. meningkatkan kelengkapan pusat kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, permutikman serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Ketapang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Ketapang</p> <p>i. memgembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permutikman serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>j. memingkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Ketapang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Ketapang atau Bandar Udara Baladi Usman</p> <p>k. memgembangkan kawasan permutikman industri pengolahan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang berdaya saing dar. rama. lingkungan</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OTORASIONALISASI
4.	Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Kehutanan - Perkebunan 	<p>l. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>m. meningkatkan keterkaitan antarprasarat kegiatan industri di Kawasan Andalan Kutapang dan Sekitarnya dan keterkaitan antara pusat kegiatan industri dengan PKW Kotapang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kutapang dan Sekitarnya yang dilayani terutama oleh Bandar Lelaia Babahi Usnuah atau Pelabuhan Kutapang</p> <p>n. menerapkan ketentuan mengenai indikasi antrak perikanan zonaasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri</p> <p>o. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian kualifikasi pemukiman ruang, serta peminat faham prasarana dan sarana pemarkang antarsektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggular, kehutanan, termasuk kegiatan industri peternakan hasil hutan, permukiman, dan jaringan prasarana serta sarana</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kegiatan sektor unggular, kehutanan, yang mengganggu fungsi ekologis hutan</p> <p>c. meningkatkan keterampilan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan pada Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya dengan PKW Pruasibon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya dengan sektor unggular, kehutanan, yang berlayari terutama oleh Pelabuhan Pambarak</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengalihan hasil pertanian, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>e. mengendalikan ahli faham pada Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
5.	Kawasan Andalan Sanggau	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Kehutanan - Perkebunan - perikanan 	<p>f. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan pada Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya dengan kawasan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, yang dilayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak</p> <p>g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Pesisiran sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, yang dilayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perikanan perikanan darat perkebunan</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana darat sarana penunjang antara sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, pemukiman, dan jaringan prasarana serta sarana</p> <p>b. mengembangkan pengembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang mengintegrasikan fungsi ekologis hutan</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan pada Kawasan Andalan Sanggau dengan PKW Sanggau dan PKW Sintang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sanggau dengan sektor unggulan kehutanan, yang dilayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>d. mengembangkan kawasan Andalan Saragau untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta layanan prasarana dan sarana</p> <p>e. mengembalikannya alih fungsi lahan pada Kawasan Andalan Saragau dengan sektor unggulan pertanian</p> <p>f. memindahkan lokasi kegiatan pertanian pada Kawasan Andalan Saragau dengan PKW Saragau dan PKW Sintang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Saragau dengan sektor unggulan pertanian, yang melayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak</p> <p>g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, permakaman, serta layanan prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan ketertarikan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Saragau dan PKW Sintang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Saragau dengan sektor unggulan perkebunan, yang melayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak atau Bandara Udara Susilo</p> <p>i. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permakaman, serta layanan prasarana dan sarana</p> <p>j. meningkatkan ketertarikan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Saragau dan PKW Sintang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Saragau dengan sektor unggulan perikanan, yang melayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak atau Bandara Udara Susilo</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perikanan keludanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan</p> <p>l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang untuk sektor unggulan</p>	

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
6.	Kawasan Andalan Laut Fortiatak dan Sekitarnya	- Perikanan - Pariwisata	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perumukiran, serta jaringan prasarana di darat;</p> <p>b. meningkatkan ketekaitan pusat kegiatan perikanan dengan FKN Pontianak sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak atau Bandar Udara Supadio;</p> <p>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendidikan pariwisata, perumukiran, serta jaringan prasarana di darat;</p> <p>d. meningkatkan keterkaitan antara pusat kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan FKN Pontianak sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Fortiatak dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Pontianak dan Bandar Udara Supadio;</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai indikasi aralan peralihan zonaasi untuk kawasan perikanan perikanan dan pariwisata</p> <p>f. menetapkan ketentuan mengenai penanganan konflik pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang antar sektor unggulan</p>
7.	Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya	- Perikanan - Pariwisata	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perumukiran, serta jaringan prasarana di darat;</p> <p>b. mengendalikn perkembangan kegiatan perikanan pada Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan yang berorientasi memaksimalkan kawasan panti berbudaya bakan, terutama karang, kawasan pesisir dan alur pelayaran</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Kelapang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Kelapang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>perikanan, yang melayani terutama oleh Pelabuhan Ketapang atau Bandar Udara Ketapang</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendidikan pariwisata, pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>e. meningkatkan keterkaitan antar-pusat kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKW Ketapang sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Laut Ketapang dar. Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, yang meliputi terutama oleh Pelabuhan Ketapang dan Udara Kaladi Usman</p> <p>f. menetapkan ketentuan mengenai arahan peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perikanan dan pariwisata</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian koridor pemukiman, ruang serta pemanfaatan prasarana dar. sarana penunjang antar-sektor unggulan</p>
8.	Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Buih	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Kehutanan - Perkebunan - Perikanan - Industri - Pariwisata 	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan, kehutanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, perikanan, dan jaringan prasarana serta sarana</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang mengganggu fungsi ekologis hutan</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan dengan PKW Pangkalan Buih dan PKW Sampit sebagai pusat pengembangan Kawasan. Andalan Sampit-Pangkalan Buih dengan sektor unggulan kehutanan yang melayani terutama oleh Pelabuhan Kalang</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perikanan, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>e. mengendalikan alih fungsi lahan pada Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Buih dengan sektor unggulan perikanan</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>f. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian padi Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan-Bun dengan PKW Pangkalan Bun dan PKW Sampit sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan sektor pertanian, yang terlayani terutama oleh Pelabuh Kumai</p> <p>g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, pemukiman, serta layanan prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Pangkalan Bun dan PKW Sampit sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan sektor unggulan perkebunan, yang terlayani terutama oleh Pelabuh Kumai</p> <p>i. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, pemukiman, serta layanan prasarana dan sarana</p> <p>j. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Pangkalan Bun dan PKW Sampit sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dengan sektor unggulan perikanan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Kumai, Bandar Udara Ikaradar, dan Bandar Udara Tiklik Kiwat</p> <p>k. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan pemukiman, serta layanan prasarana dan sarana</p> <p>l. meningkatkan keterkaitan antara pusat kegiatan industri di Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dan keterkaitan antara pusat kegiatan industri dengan PKW Sampit dan PKW Pangkalan Bun sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun yang dilayani terutama oleh Pelabuhan Kumai</p>	

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
9.	Kawasan Andalain Buntok	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perkebunan - Kehutanan - Pariwisata 	<p>m. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata, termasuk kegiatan pembukaan pariwisata, permukiman, serta latihan pesiarana dan sarana</p> <p>n. meningkatkan kerjasama antar pusat kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKW P. ngkalar. Bun sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalain S. mpit-P. ngkalar. Bun dengan sektor unggulan pariwisata, yang melayani terutama oleh Pelabahan Kiama dan Bandar Udara Iskandar</p> <p>o. menerapkan, kofentuar, mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perumahan, kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>p. men erapkan kebijakan mengenai pengembangan koridor permukiman ruang arda perumahan dan prasarana dan sarana penunjang arda sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan, kehutanan, termasuk kegiatan industri pengalihan asal hulu, perumukiman, dan jaringan prasarana sar'a sar'a</p> <p>b. mengembangkan perkembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang mengganga fungsi ekologis hular</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan pada Kawasan Andalain Buntok dengan PKW Buntok sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalain Buntok dengan sektor unggulan kehutanan, yang melayani terutama oleh Pelabahan Banjaranasin</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengalihan hasil pertanian, perumukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>e. mengendalikn alih fungsi lah ar pada kawasan andalain Buntok dengan sektor unggulan pertanian</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian pada kawasan andalain Buntok dengan PKW</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Buntok sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan. Buntok dengan sektor unggulan pertanian, yang melayani terutama oleh Pelabuhar Barakarmasih.</p> <ol style="list-style-type: none"> g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengalihan hasil perkebunan, pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana h. meningkatkan keterampilan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Buntok sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Buntok dengan sektor unggulan pariwisata, yang melayani terutama oleh Pelabuhar Banjarmasin i. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendidikan pariwisata, pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana j. meningkatkan kontribusi aktifitas pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKW Buntok sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Buntok dengan sektor unggulan pariwisata, yang melayani terutama oleh Pelabuhar Banjarmasin dan Bandar Udara Tjilik Elwal k. menetapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perantakan kehutanan, pertanian, dan perkebunan l. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang aktifitas sektor unggulan
10.	Kawasan Andalan Muara Teweh.	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perkebunan - Perambangan - Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, pemukiman, dan jaringan prasarana dan sarana b. meningkatkan perkembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang menggabungkan fungsi ekologis hutan. c. meningkatkan keterampilan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan pada Kawasan Andalan Muara Teweh dengan PKW Muara Teweh sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Muara Teweh dengan sektor unggulan kehutanan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Samarinda</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perumahan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>e. memandatkan ahli fungsi lahan pada Kawasan Andalan Muara Teweh dengan sektor unggulan pertanian</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian pada Kawasan Andalan Muara Teweh dengan PKW Muara Teweh sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Muara Teweh dengan sektor unggulan perkebunan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Samarinda</p> <p>g. mempromosikan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Muara Teweh sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Muara Teweh dengan sektor unggulan perkebunan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Samarinda</p> <p>i. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pertambangan <i>midsize</i> dengan mempraktikkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>j. memandatkan ahli kawasan pertambangan</p> <p>k. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan PKW Muara Teweh sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Muara Teweh dengan sektor unggulan pertambangan yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Samarinda</p> <p>l. menetapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perantukan</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.	Kawasan Andalau Kuala Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perkebunan - Kehutanan - Perikanan 	<p>m. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan, khususnya, dan portabandungan, menerapkan, kelenturan, mengenai pengendalian konflik pemantapan, ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana pemertanian, dan sarana pemertanian, dan sarana pemertanian.</p> <p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan, khususnya, dan portabandungan, menerapkan, kelenturan, mengenai pengendalian konflik pemantapan, ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana pemertanian, dan sarana pemertanian.</p> <p>b. meningkatkan perkembangan kegiatan sektor unggulan, khususnya, dan portabandungan, menerapkan, kelenturan, mengenai pengendalian konflik pemantapan, ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana pemertanian, dan sarana pemertanian.</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan, khususnya, dan portabandungan, menerapkan, kelenturan, mengenai pengendalian konflik pemantapan, ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana pemertanian, dan sarana pemertanian.</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan, khususnya, dan portabandungan, menerapkan, kelenturan, mengenai pengendalian konflik pemantapan, ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana pemertanian, dan sarana pemertanian.</p> <p>e. mengendalikan alih fungsi lahan pada Kawasan Andalau Kuala Kapuas dengan sektor unggulan, khususnya, dan portabandungan, menerapkan, kelenturan, mengenai pengendalian konflik pemantapan, ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana pemertanian, dan sarana pemertanian.</p> <p>f. meningkatkan ketahanan pusat kegiatan pertanian pada Kawasan Andalau Kuala Kapuas dengan PKN Palangkaraya dan PKN Kuala Kapuas sebagai pusat pengembangan kawasan Andalau Kuala Kapuas dengan sektor unggulan, khususnya, dan portabandungan, menerapkan, kelenturan, mengenai pengendalian konflik pemantapan, ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana pemertanian, dan sarana pemertanian.</p> <p>g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan, khususnya, dan portabandungan, menerapkan, kelenturan, mengenai pengendalian konflik pemantapan, ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana pemertanian, dan sarana pemertanian.</p> <p>h. meningkatkan ketahanan pusat kegiatan pertanian dengan PKN Palangkaraya dan PKN Kuala</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kapas sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kuala Kapuas dengan sektor unggulan perkebunan yang terlayani terutama oleh Pelabuhar. Faktor utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permutiakan, serta jaringan pemasaran dan sarana; meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKN Palungkaraya dan PKW Kuala Kapuas sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kuala Kapuas dengan sektor unggulan perikanan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhar. Benjarmasin atau Bandar Udara Ijlik Kibati; menerapkan ketentuan indikasi anjuran peraturan zonasi untuk kawasan perantaraan kehutanan, perikanan, perkebunan dan perikanan; menerapkan ketentuan mengenai pengendalian kendik pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang antar sektor unggulan
12.	Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Perlanthangan - Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permutiakan, serta jaringan pemasaran dan sarana mengendalikan perkembangan kegiatan perikanan pada Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang dengan sektor unggulan perikanan yang berpotensi masuk kawasan pantai berhadapan bakau, terutama karang, kawasan pesisir, dan jalur pekayaran meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Pangkajene. Bin sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang dengan sektor unggulan perikanan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Kianat atau Bandar Udara Iskandar mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pertambangan <i>offing</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permutiakan, serta jaringan prasarana dan sarana

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<ul style="list-style-type: none"> c. meningkatkan kawasan perikanan pertambakan f. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pembangunan dengan PKW Pangkalan Bin sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalannya Kuala Penampang dengan sektor unggulan pertambangan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Kumai g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pariwisata, perikanan, perikanan, serta jaring perikanan dan sarana k. meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKW Pangkalan Bin sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalannya Pulau Kuda Pembuang dengan sektor unggulan pariwisata, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Kumai dan Bandar Udara Iskandar i. menerapkan ketenar mengenai indikasi arah perubahan zonaasi untuk kawasan perikanan perikanan, pertambangan, dan pariwisata j. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian kondisi pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana darat, sarana penunjang antar sektor unggulan 	STRATEGI OPERASIONALISASI
13.	Kawasan Andalannya Kandangun dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perkebunan - Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta jaringan pasar-pasar dan sarana b. mengembalikannya fungsi lahan pada Kawasan Andalannya Kandangun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian pada Kawasan Andalannya Kandangun dan Sekitarnya dengan PKW Amuntai sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalannya Kandangun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian yang terlayani terutama oleh Pelabuhan

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
14.	Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perkebunan - Pariwisata - Perikanan 	<p>Tanah Grogot dan Pelabuhan Banjarmasin</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, perumahan, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>e. meningkatkan ketertarikan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Amuntai sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, yang meliputi kegiatan Telabahan Tanah Grogot dan Pelabuhan Banjarmasin</p> <p>f. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendidikan pariwisata, perumahan, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>g. meningkatkan ketertarikan inti pusat kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKW Amuntai sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, yang meliputi kegiatan Telabahan Tanah Grogot dan Pelabuhan Banjarmasin</p> <p>h. merencanakan ketertarikan inti arahan peraturan zonasi untuk kawasan perumahan dan perumahan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai indikator pengendalian konflik pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang antara sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perumahan, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan perumahan, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>c. mengendalikannya alih fungsi lahan pada Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan permukiman pada Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan PKN Banjarmasin, PKW Martapura, dan PKW Marabahan sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, yang terlayani terutama oleh Pelabuh Banjarmasin;</p> <p>e. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan permukiman dengan PKN Banjarmasin, PKW Martapura, dan PKW Marabahan sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, yang terlayani terutama oleh Pelabuh Banjarmasin;</p> <p>g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;</p> <p>h. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;</p> <p>i. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan permukiman dengan PKN Banjarmasin, PKW Martapura, dan PKW Marabahan sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Banjarmasin Raya dengan sektor unggulan perikanan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin atau Bandar Udara Syamsuddin Noor;</p> <p>j. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dari permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;</p> <p>k. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan industri di Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya dan keterkaitan antara pusat kegiatan industri dengan kawasan perkotaan PKN Banjarmasin, PKW Martapura, dan PKW Amuntai sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya yang dilayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin.</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>l. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan peningkatan pariwisata, permukiman, serta layanan pasarana dan sarana</p> <p>m. meningkatkan keberkahan antara pusat kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKN Banjarmasin, PKW Marjapur, dan PKW Marabahan sebagai pusat pengembangan di Kawasan Andalan Banjarmasin Kaya dan sekitarnya dengan seliter unggulan pariwisata, yang berlayari terdapat oleh Pelabuhan Banjarmasin dan Bandar Udara Syamsudin Noor</p> <p>n. menerapkan ketentuan, mengemasi indikasi arah dan peraturan zonasi untuk kawasan perumahan pertanian, perkotaan, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>o. men erapkan ketentuan mengenai pengembalian konflik pemanfaatan ruang serta penumbuhan prasarana dan sarana penunjang antar sektor unggulan</p>
15.	Kawasan Andalan Batulicir	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - Kehutanan - Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan 	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan, termasuk kegiatan industri pengalasan hasil hutan, perikanan, dan jaringan pasarana serta sarana</p> <p>b. merencanakan perkembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang menggengga fungsi ekologis hutan</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan pada Kawasan Andalan Batulicir dengan PKW Kotabaru sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Batulicir dengan sektor unggulan kehutanan, yang terlayari terutama oleh Pelabuhan Batulicir</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengalasan hasil perikanan, perikanan, serta jaringan pasarana dan sarana</p> <p>e. merencanakan alih fungsi lahan pada Kawasan Andalan Batulicir dengan sektor unggulan pertanian</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>f. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian pada Kawasan Andalan Batulicin dengan PKW Kotabaru sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Batulicin dengan sektor unggulan pertanian, yang meliputi terutama oleh Pelabahan Batulicin</p> <p>g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Kotabaru sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Batulicin dengan sektor unggulan perkebunan yang meliputi terutama oleh Pelabahan Batulicin</p> <p>i. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>j. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Kotabaru sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Batulicin dengan sektor unggulan perikanan yang meliputi terutama oleh Pelabahan Batulicin dan Bandar Udara Syamsuddin Noor</p> <p>k. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>l. meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan industri di Kawasan Andalan Kawasan Andalan Batulicin dan keterkaitan antara pusat kegiatan industri dengan PKW Kotabaru sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Batulicin yang meliputi terutama oleh Pelabahan Batulicin dan Bandar Udara Syamsuddin Noor</p> <p>m. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>n. meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKW Kotabaru sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Batulicin dengan sektor unggulan pariwisata, yang meliputi terutama oleh Pelabahan Batulicin dan Bandar Udara Syamsuddin</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		Negeri	<p>c. menerapkan ketenair, mengenai indikasi arahan peruntukan untuk kawasan peruntukan kesehatan, perikanan, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian kondisi pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana darat sarana penunjang, antara sektor unggulan</p>
16.	Kawasan Andalan Laut Pulau Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Perikanan - Perikanan 	<p>a. memajukan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perikanan, serta jaringan prasarana dan sarana;</p> <p>b. mengidentifikasi perkembangan kegiatan perikanan pada Kawasan Andalan Laut Pulau Laut dengan sektor unggulan perikanan yang berpotensi masuk kawasan pantai berbudaya, bakau, terumbu karang, kawasan pesisir dan hilir pelabuhan</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan pada Kawasan Andalan Laut Pulau Laut dengan PKN Banjarmasin sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Pulau Laut dengan sektor unggulan perikanan yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin atau Bandar Udara Syamsuddin Noor</p> <p>d. memajukan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembangunan tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>e. memajukan kawasan perikanan perikanan</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan PKN Banjarmasin sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Pulau Laut dengan sektor unggulan perikanan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Banjarmasin</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peruntukan zonasi untuk kawasan perikanan</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
17.	Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Kehutanan - Pertanian - Pariwisata - Perikanan 	<p>perikanan, dan pertambangan; menerapkan ketentuan mengenai pengendalian konflik pemantapan ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana pemertanian di sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, perikanan, dan jaringan pemasaran serta sarana pengangkutan perikanan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang menggunakan fungsi ekologis hutan;</p> <p>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perikanan, serta jaringan pemasaran dan sarana;</p> <p>c. meningkatkan keterampilan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan pada Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan PKW Tanjung Redeb sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan sektor unggulan kehutanan, yang terlayani terutama oleh Pelabahan Tanjung Redeb</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pertambangan <i>existing</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perbukitan, serta jaringan pemasaran dan sarana rehabilitasi kawasan pertambangan pertambangan</p> <p>e. meningkatkan keterampilan pusat kegiatan pertambangan dengan PKW Tanjung Redeb sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan, yang terlayani terutama oleh Pelabahan Tanjung Redeb</p> <p>f. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perikanan, serta jaringan pemasaran dan sarana</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="264 218 427 1329">i. meningkatkan keterkaitan, prestasi kegiatan perikanan pada Kawasan Andalan Tanjung Kedeb dan Sekitarnya dengan dengan PKW Tanjung Kedeb sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tanjung Kedeb dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Kedeb atau Bandar Udara Kalimantan-Berau <li data-bbox="427 218 508 1329">j. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan perumahan, serta jaringan prasarana dan sarana <li data-bbox="508 218 589 1329">k. meningkatkan keterkaitan, atraktifitas kegiatan industri di Kawasan Andalan Tanjung Kedeb dan Sekitarnya dan keterkaitan antara pusat kegiatan industri dengan PKW Tanjung Kedeb sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tanjung Kedeb dan Sekitarnya yang dilayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Kedeb dan Bandar Udara Kalimantan-Berau <li data-bbox="589 218 670 1329">l. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana <li data-bbox="670 218 751 1329">m. meningkatkan kesempatan aktifitas kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKW Tanjung Kedeb sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tanjung Kedeb dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Kedeb dan Bandar Udara Kalimantan-Berau <li data-bbox="751 218 833 1329">n. menerapkan kebijakan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata <li data-bbox="833 218 885 1329">o. menerapkan kebijakan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan ruang serta perumahan prasarana dan sarana penunjang antarsektor unggulan 	

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
18.	Kawasan Andalan Sangklirang, Sanggata, dan Muara Wahau (Sasamawa)	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Perikanan - Perkebunan - Kehutanan - Perambutan - Perikanan laut - Pariwisata 	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggas, ketutanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, permukiman, dan jaringan prasarana serta sarana</p> <p>c. meningkatkan perkembangan kegiatan sektor unggas, ketutanan yang menggunakan fungsi ekologis hutan</p> <p>d. meningkatkan keterampilan pusat kegiatan sektor unggas ketutanan dengan PKW Sanggata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sasamawa dengan sektor unggulan ketutanan, yang melayani terutama oleh Pelabahan Tanjung Sanggata dan Pelabahan Malei</p> <p>e. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggas perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>f. meningkatkan keterampilan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Sanggata sebagai pusat layanan terutama oleh Pelabahan Tanjung Sanggata dan Pelabahan Malei</p> <p>g. meningkatkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterampilan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Sanggata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sasamawa dengan sektor unggulan perikanan, yang melayani terutama oleh Pelabahan Tanjung Sanggata, Pelabahan Malei, atau Bandar Utara Sepirangan</p> <p>i. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembangunan tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hilir, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>j. merhabilitasi kawasan peruntukan pertambangan</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>k. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>l. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan industri di Kawasan Andalan Sasamawa dan keterkaitan antar pusat kegiatan industri dengan PKW Sangata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sasamawa yang dilayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata dan Pelabuhan Maloi</p> <p>m. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan PKW Sangata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sasamawa dengan sektor unggulan terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata dan Pelabuhan Maloi</p> <p>n. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>o. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKW Sangata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sasamawa dengan sektor unggulan pariwisata, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata, Pelabuhan Maloi, dan Bandara Udara Sepitagan</p> <p>p. meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan industri serta pusat kegiatan industri dengan PKW Sangata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sasamawa dengan sektor unggulan industri, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tanjung Sangata, Pelabuhan Maloi</p> <p>q. menetapkan ketentuan mengenai alokasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata</p> <p>r. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian untuk pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang di harsektor unggulan</p>	

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
19.	Kawasan Andalan Tarakan, Tarjung Selas, Nunukan, Pulau Banyak, dan Malinau (Tataparburnau) dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Pariwisata - Perkebunan - Kehutanan - Perlintas - Industri 	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan: kehutanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, perikanan, dan jaringan prasarana serta sarana;</p> <p>b. mengembangkan perkembangan: kegiatan sektor unggulan kehutanan yang menggunakan fungsi ekologis hutan;</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan pada Kawasan Andalan Tataparburnau dan Sekitarnya dengan PKN Tarakan, PKW Nunukan, PKW Malinau, dan PKW Tanjung Selor sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tataparburnau dan Sekitarnya dengan sektor unggulan kehutanan yang terutama oleh Telabular, Tarakan, dan Pulau Banyak Nunukan;</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, perikanan, serta jaringan prasarana dan sarana;</p> <p>e. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan PKN Tarakan, PKW Nunukan, PKW Malinau, dan PKW Tanjung Selor sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tataparburnau dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, yang terutama oleh Telabular, Pulau Banyak Tarakan dan Pulau Banyak Nunukan;</p> <p>f. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perikanan, serta jaringan prasarana dan sarana;</p> <p>g. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKN Tarakan, PKW Nunukan, PKW Malinau, dan PKW Tanjung Selor sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tataparburnau dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, yang terutama oleh Telabular, Tarakan, Pulau Banyak Nunukan, Bandar Udara Nunukan, dan Bandar Udara Uluwala;</p> <p>h. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perlintasan, termasuk kegiatan industri pengolahan perlintasan, lokasi pembangunan <i>airway</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perumudiran, serta jaringan prasarana dan sarana</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>1. memhabilitasi kawasan perantaraan pertumbuhan</p> <p>l. meningkatkan keterampilan pusat kegiatan perambangan dengan PKN Tarakan, PKW Nunukan, PKW Mahina, dan PKW Tanjung Selor sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Talapurburna dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan, yang terlayani terutama oleh Pelabihan Tarakan dan Pelabihan Nunukan</p> <p>k. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>l. meningkatkan keterkaitan antar-pusat kegiatan industri di Kawasan Andalan Talapurburna dan sekitarnya dan ketahanan antara pusat kegiatan industri dengan PKN Tarakan, PKW Nunukan, PKW Mahina, dan PKW Tanjung Selor sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Talapurburna dan sekitarnya yang dilayani terutama oleh Pelabihan Tarakan dan Pelabihan Nunukan</p> <p>m. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>n. meningkatkan keterkaitan antar-pusat kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKN Tarakan, PKW Nunukan, PKW Mahina, dan PKW Tanjung Selor sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Talapurburna dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, yang terlayani terutama oleh Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Nunukan, dan Bandar Udara Juwata</p> <p>o. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>p. menetapkan ketentuan, mengawasi implementasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perantaraan ketahanan, pertambangan, perikanan, pertumbuhan, industri, dan pariwisata</p> <p>q. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan ruang serta pemanisalan</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
20.	Kawasan Andalan Bontung, Samarinda 'Unggulang' – Balikpapan – Penajam dan Sekitarnya (Ransanibajajam)	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Perkebunan - Perikanan - Kehutanan - Perikanan - Pariwisata 	<p>prasarana dan sarana pemenuhan kebutuhan sektor unggulan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil hutan, permukiman, dan jaringan prasarana serta sarana c. meningkatkan perkembangan kegiatan sektor unggulan yang mempunyai fungsi ekologis hutan d. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan sektor unggulan kehutanan pada Kawasan Andalan Ransanibajajam dengan PKN Kawasan Perkebunan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontung sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan. Konsentrasi di sektor sektor unggulan kehutanan, yang melayani terutama oleh Pelabuhan Samarinda, Bontung, Tarah Grogol, Tarjung Sarjan, dan Balikpapan e. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana f. meningkatkan kerjasama pusat kegiatan perkebunan dengan PKN Kawasan Perkebunan Tenggarong-Samarinda-Bontung sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Banaambajajam dengan sektor unggulan perkebunan, yang melayani terutama oleh Pelabuhan Man.A.M., Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Tanjung Sekel, Pelabuhan Tanjung Ruluh, Pelabuhan Tanjung Sangata, Pelabuhan Samarinda, Bandar Udara Sepinggar, Bandar Udara Nunukan, Bandar Udara Jawaia, Bandar Udara Kalimantan-Berau, Bandar Udara Bontang, dan Bandar Udara Samarinda Bara g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>industri pengolahan hasil perikanan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana;</p> <p>f. meningkatkan ketersediaan pasar kegiatan perikanan dengan PKN Kawasan Perikanan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bensamichajam dengan sektor unggulan perikanan yang terdapat terutama oleh Pelabuhan Balikpapan atau Pelabuhan Samarinda</p> <p>g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pertambangan lalutg dengan memperkukuh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>h. membaharui kawasan pertambangan pertambangan</p> <p>i. meningkatkan ketersediaan pasar kegiatan pertambangan dengan PKN Kawasan Perikanan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bensamichajam dengan sektor unggulan perikanan yang terdapat terutama oleh Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda</p> <p>j. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>m. meningkatkan ketersediaan untuk pasar kegiatan industri dan kerajinan pasar kegiatan industri dengan PKN Kawasan Perikanan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bensamichajam dengan sektor unggulan industri yang terdapat terutama Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda</p> <p>n. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>o. meningkatkan ketersediaan untuk pasar kegiatan pariwisata serta pasar kegiatan perikanan dengan PKN Kawasan Perikanan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bensamichajam dengan sektor unggulan pariwisata, yang</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR	STRATEGI OPERASIONALISASI
		LINGGULAN	berbagai lembaga oleh Pelabahan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, dan Bandar Udara Sepunggai
p.			menetapkan ketentuan, memona indikasi arakan petataran zona untuk kawasan perikanan kehutanan, perkebunan, perikanan, perikanan, dan pariwisata
q.			menetapkan ketentuan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan ruang serta pemanfaatan prasarana darat sarana penunjang antar sektor unggulan
21.	Kawasan Andalan Laut Pontang, Tarakan dan Sekitarnya	- Perikanan - Pertambangan - Pariwisata	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perikanan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>b. mengabdikan perkembangan kegiatan perikanan pada Kawasan Andalan Laut Pontang-Tarakan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan yang berpotensi masuk kawasan pantai bertani bakau, tumbuh karang, kawasan pasang, dan arus pelayaran</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKN Kawasan Perikanan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan yang terlayani terutama oleh Bandar Udara Bontang, Pelabuhan Bontang dan Pelabuhan Maloi</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan, pertambangan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pemukiman yang dapat memperhatikan daya dukung dan dayaampung lingkungan hidup, pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p> <p>e. merehabilitasi kawasan perikanan pertambangan</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan PKN Kawasan Perikanan-Tenggarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan, pertambangan yang terlayani</p>

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR LINGKUP	STRATEGI OPERASIONALISASI
4.			<p>terutama oleh Pelabuhan Bontang dan Pelabuhan Mahakam</p> <p>menyembangkan kawasan kawasan untuk kegiatan pariwisata, termasuk kegiatan pendidikan pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana</p>
5.			<p>meningkatkan keterkaitan antarpusat kegiatan pariwisata serta pusat kegiatan pariwisata dengan PKN Kawasan Perkerasan Balikpapan-Itungkarong-Samarinda-Bontang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Lari Bontang-Tarakon dan Sekitarnya dengan sektor angkutan pariwisata, yang melayani terutama oleh Bandara Mahakam, Pelabuhan Bontang dan Pelabuhan Mahakam</p>
6.			<p>memerapkan ketentuan mengenai indikator arakan penataan zona untuk kawasan perikanan perikanan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata</p>
7.			<p>memerapkan ketentuan mengenai pengendalian kualifikasi pemukiman ruang serta pemantapan prasarana dan sarana penunjang antar sektor angkutan</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

INDUKSI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2013- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG NASIONAL							
A.	SISTEM PERKOTAAN NASIONAL							
1.	Percepatan Pengembangan Kota-kota Utama Kawasan Perbatasan							
1.1.	Pengembangan/ 1. PKN Bantikang penguatan fungsi		<p>Operasionalisasi</p> <p>Perwujudan Sistem Perbatasan Nasional di Pulau Kalimantan (I.7.1)</p>	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah				
					<p>Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparbud), Kementerian Perhubungan (Kemhub), Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Kementerian Keuangan (Kemendik), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Keluarian (Kemendagri), Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Perhubungan (Kemperin), Kementerian (Kemperin), Kementerian</p>			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PEWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
					Tenagaqunat. Daeral. Terlinsyal (Kemen LPTD, Kementerian Pevlagnggar (Kemandag), Kementerian Pevlntingan (Kamutulu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kesen ESDM), Kepolisian, Negara Republik Indonesia (KEMAR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Nasional Pengelala Pertabatan (BNPT), Pemerintahah Daerah (Pemda), dan/atau swasta (Kemen PU, Kemenudagri, Kememparekruf, Kementan, Kemankumham, Kemankaca, Kemendes, Kemen KP, Kemenien, Kemuperin, Kemperper, Kemtan ITT, Kernet, ISDM, Kernetdag, KemtanPub, Kemankarotno,				
		2. PRSN Niamukan	Lempiran III Stralegi Operasionalisasi Pevwajudan Sistem Pevkaban Nasional di Pulau Kalimantan (V.5.)	APDN, APBD, dan/atau Sumbar lain yang sah					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.2.	Pengembangan baru	3. FESN Faldah-Aruk	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Kalimantan (1.10.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	PUJRI, BPN, BNPT, Pemda, dan/atau Swasta Kemen PU, Esmeraldasri, Kemen perkeras, Kementerian, Kemen kumham, Kemenkeu, Kemenkes, Kemen KE, Kementan, Kemen. at., Kementerian, Kemaupera, Kemen PDI, Kemen dag, Kemen labi, Kemen Kominfo, PUJRI, BPN, BNPT, Pemda, dan/atau Swasta				
		4. FESN Jagatfalarang	Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Kalimantan (1.11.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kamanulagr, Kemaupera, kemenhan, Kemen kumham, Kemenkeu, Kemen kas, Kementerian, Kemenk. d., Kemen PDI, Kometperm, Kemenag, Kemendagri, Kemenhab, Komkerkesmitjo, PUJRI, BPN, BNPT, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			di Pulau Kalimantan (IV.1.1)		Ketuan PDT, Kementerian, Kementerian, Kemendagri, Kemendagri, Komarkominfo, POLRI, BPK, BNPP, Feinda, dan/atau Swasta				
8.	EKSN Long Midas		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.1.2)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kementerian, Kemendagri, Kementerian, Kemendagri, Kementerian, Kemendagri, Kementerian, Kemendagri, POLRI, BPK, BNPP, Feinda, dan/atau Swasta				
9.	EKSN Long Pakarigi		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.1.3)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kementerian, Kemendagri, Kementerian, Kemendagri, Kementerian, Kemendagri, POLRI, BPK, BNPP, Feinda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			di Pulau Kalimantan (01.5)		Ketentubb, Kementerian, BPN, Pernda, dan/atau Swasta				
3.	PKW Annuhaji		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Pasokan Nasional di Pulau Kalimantan (01.2)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kerjen PU, Kemenulagri, Kementerian, Kerentanan, ESDM, Kemendag, Ketentubb, Kementerian, BPN, Pernda, dan/atau Swasta		■		
4.	PKW Marakapura		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Pasokan Nasional di Pulau Kalimantan (01.3)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kerjen PU, Kemenulagri, Kementerian, Kerentanan, Kementerian, ESDM, Kemendag, Kemertab, Ketentubb, BPN, Pernda, dan/atau Swasta		■		
5.	PKW Marubehan		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Pasokan Nasional di Pulau Kalimantan (01.4)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kerjen PU, Kemendagri, Kementerian, Kerentanan, Kerentanan, Kementerian, ESDM, Kemendag, Kemertab, Ketentubb, BPN, Pernda, dan/atau Swasta		■		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SILABUS PINDAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
6.	FKW Saragata		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkokohan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.4.)	ATDN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketjen PU, Kementan, Kemperindag, Kementerian, BPN, Pemda, dan/atau swasta Ketjen PU, Kementan, Kemperindag, Kementan, Kemperindag, Kementerian, BPN, Pemda, dan/atau swasta	█			
7.	DEW N. ukau		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkokohan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.5.)	ATDN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketjen PU, Kementan, Kemperindag, Kementan, Kemperindag, Kementerian, BPN, Pemda, dan/atau swasta Ketjen PU, Kementan, Kemperindag, Kementan, Kemperindag, Kementerian, BPN, Pemda, dan/atau swasta	█			
8.	FKW Tambora		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkokohan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketjen PU, Kementan, Kemperindag, Kementerian, BPN, Pemda, dan/atau swasta	█			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			(III.1.)		Ketendagri, Kemendagri, Kemendiknas, Kemendikbud, Kemendikpora, BPN, Kominfo, dan/atau Swasta				
	4. FKN Kawasan Perkotaan Balikpapan, Tesnggarayang, Samarinda, Bontarung		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkoasan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.1.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemendiknas, Kemendikbud, Kemendikpora, BPN, Kominfo, dan/atau Swasta	█			
	5. FKN Tarakan		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkoasan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.2.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemendiknas, Kemendikbud, Kemendikpora, BPN, Kominfo, dan/atau Swasta	█			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			di Bidang Keefektifan (1.7)		Kemendagri, Kemendagri, PDD, Kemen ESDM, Kanceldag, Kemendagri, Keminkominfo, PUIKRI, UPR, BNPB, Pemda, dan/atau Swasta				
	01. PKW Kuala Lumpur		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Bidang Keefektifan (1.2.1)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemantan, Kemperair, Kemar, KP, Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri, Kemen ESDM, Keminkominfo, BPN, Pemda, dan/atau Swasta				
	11. PKW Pengkajenean		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Bidang Keefektifan (1.3.1)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemantan, Kemperair, Kemar, KP, Kemendagri, Kemendagri, Kemen ESDM, Keminkominfo, BPN, Pemda, dan/atau Swasta				
	12. PKW Buntok		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Bidang Keefektifan (1.3.1)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemantan, Kemperair, Kemar, Kemendagri, Kemendagri, Kemen ESDM, Keminkominfo, BPN, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			(11.4.)					
	13. PKW Minora Teswel.		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Kalimantan (11.5.)	APEN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah		█		
	14. PKW Sampul.		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Kalimantan (11.5.)	APEN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah		█		
	15. PKW Kolabara		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Nasional di Pulau Kalimantan (11.5.)	APEN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah		█		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PROYEKSI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
16.	PKW Lanting Redde		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwajidan Sistem Perkoasan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.3.)	APUN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketenn PU, Kemendagri, Kemempri, Kemer. Ind, Kemempkrat, Kamen KP, Kemendag, Kemer. Hub, Kemer. ESDM, Kemerkonind, BIN, Pernda, dan/atau Swasta	■			
17.	PKW Lanting Selor		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwajidan Sistem Perkoasan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.6.)	APUN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketenn PU, Kemendagri, Kemempri, Kemer. Ind, Kemempkrat, Kemendag, Kemer. Hub, Kamen KP, Kemendag, Kemempkrat, Ketenn ESDM, Kemerkonind, HPN, Pernda, dan/atau Swasta	■			
18.	PKW Malinau		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwajidan Sistem Perkoasan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketenn PU, Kemendagri, Kemempri, Kemendag, Kemempkrat, Kemempkrat, Kemendag, Kemer. Hub, Kamen ESDM, Kemerkonind, BIN, Pernda, dan/atau Swasta	■			
19.	PKW Tanah Grogot		Lampiran III Strategi Operasionalisasi Perwajidan Sistem Perkoasan Nasional	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketenn PU, Kemendagri, Kemempri, Kemer. Ind, Kemerkonind, Kemempkrat, Kemendag, Kemempkrat, Kemendag	■			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.2.	Pengembangan baru	1. TKW Seudekwar	di Pulau Kalimantan (DVB)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenhub, Kemen ESDM, Kementerian.go. BIN, Petenda, dan/atau Swasta			
B.	SISTEM JALANGAN TRANSPOKIASI NASIONAL							
1.	Sistem Transportasi Darat							
1.1.	Jaringan Jalan Nasional							
1.1.1.	Jaringan Jalan Arteri Primer							
1.1.1.a.	Pemantapan jaringan jalan arteri primer	Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang menghubungkan Sel Puyuh-Potlunak-Tayan-Nanga Tayap-	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (D.V. IC)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen PI, Pemda, dan Swasta			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kualangan- Tenggara-Naraga Balik-Dangkalan Eon-Sampit- Kedabesi- Kasongan- Falangkaraya- Palang-Tidar- Kuala-Kapas- Banjarmasin- Kiang-Anggang 2. Jaringan Jalan Lintas Selatan Pala-Kalimantan yang menghubungkan Kuala-Kuderman- Eran-Jam- Balikpar-Lee Janan-Samarinda	Kaupiran JV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan 4.2.1	APUS, APRI, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketren PU, Permda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
I.1.1.b.	Pengembangan jaringan jalan arteri primer	1. Jaringkar, Jalur Lintas Terpadu, Jalan Kalimantan yang menghubungkan Sei Puyuh, Sosok-Tanjung	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (II.1.)	APEN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemda, PC, Pemda, dan/atau Swasta			
		2. Jaringan jalan pengumpul, Jalan Kalimantan yang menghubungkan Tanjung-Balai Karangan-Balikeng	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.1.)	APEN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemda, PC, Pemda, dan/atau Swasta			
		3. Jaringan jalan pengumpul, Jalan Kalimantan yang menghubungkan Tayan-Sosok	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.2.)	APEN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemda, PC, Pemda, dan/atau Swasta			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENJANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	<p>Peningkatan Singkawang, Sei Darat, Mempawah-Sei Piryuk</p> <p>2. Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang menghubungkan Laut & Anggang Belahari-Pagarhar-Batohim-Batuji-Tambak Agung-Kotaro</p>		<p>Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (L4)</p>	<p>APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah</p>	<p>Kemren PU, Pemda, dan/atau Swasta</p>				
	<p>3. Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan yang mengintegrasikan</p>		<p>Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan</p>	<p>APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah</p>	<p>Kemren PU, Pemda, dan/atau Swasta</p>				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN				
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027	
1.1.2.b.	Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan kolektor primer	Samarinda, Bontaluk, Sengatak, Simpang, Bendau, Muara Welau, Lebanan, Tanjung Redeb, Zujung, Seler, Malinau, Mensabang, Simanggasari	<p>1. Jaringan jalan</p> <p>2. Jarak Berjalan</p> <p>Pulang Kalimantan yang</p> <p>menyediakan</p> <p>Tanjung-</p> <p>Sekeloa-</p> <p>Tabelian-Nauaga</p> <p>Prach</p>	<p>Kampiran IV</p> <p>Strategi</p> <p>Operasionalisasi</p> <p>Perwujudan</p> <p>Jaringan Jalan</p> <p>NSI</p> <p>di Kalimantan (II.2.)</p>	<p>APBN, APBD, dan/atau</p> <p>Sumber lain</p> <p>yang sah</p>	Kemkominfo, Pemdak, dan/atau	Sosastak		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	2. Jalinan jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan yang mengembangkan Tambahan Samba- Rambahang. Tambahan Jalan- Kuala Karau- Pulau Calau- Mura Isurung- Mura Tevoh- Dama-Simpang Blasul-Besak- Kolabangur- Tanggurung-Ivi Jalan-Samarinda		Landmark IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (J.3.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemal. PU, Pemda. dan/atau Swasta			
	3. Jalinan jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan yang mengembangkan		Landmark IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemal. PU, Pemda. dan/atau Swasta			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Marga Balaui Palasibau	Nasional di Pulau Kalimantan (III.3.)	APEN, ATED, dan/atau sumber lain yang sah				
	4. Jaringan jalan per-gampong Pulau Kalimantan yang interkoneksi Tanah Hilir Galing		Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jalan dan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.4.)					
	5. Jaringan jalan per-gampong Pulau Kalimantan yang interkoneksi Teluk-Silang-Patasibau		Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.5.)	APEN, AFBU, dan/atau Sumber lain yang sah				
	6. Jaringan jalan per-gampong Pulau Kalimantan yang interkoneksi Kelapans-Nangsa		Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jalan dan	APEN, AFBU, dan/atau Sumber lain yang sah				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Tayap	Nasional di Pulau Kalimantan (IV.6.)						
	7. Jaringan jalan perampasan Pulau Kalimantan yang meningkatkan mutu, jembatankat, Babau, bang, Tiandar, S. Takken-Takaras-Simpang Saragai Asem		Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.7.)	APDN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketben PU, Pemda, dan/atau Swasta				
	8. Jaringan jalan perampasan Pulau Kalimantan yang menghubungkan Merau, Tayeh, Ampah-Itimang Layau, Kelak		Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.8.)	APDN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketben PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWJUDIAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		3. Jaringan jalan per-gampan Dalam Kalimantan yang menghubungkan Etabat-Mabuan	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwajidan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.9.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketnen PU, Pemda, dan/atau Swasta			
		10. Jaringan jalan per-gampan Palang Kalimantan yang menghubungkan I. Simpang Sempur-Evaya Araya	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwajidan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.10.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketnen PU, Pemda, dan/atau Swasta			
		11. Jaringan jalan per-gampan Palang Kalimantan yang	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwajidan Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketnen PU, Pemda, dan/atau Swasta			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		1. Simpang Pangkal-Makau	Nasional di Pulau Kalimantan (IV.1.1)						
		22. Jaringan jalan per-sampitan Palang Kalimantan yang menghubungkan 1. Simpang Darat- Serdang Leng Bangsar-Jang Falmang	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.1.2)	ALUN, ABUL, dan/atau Sponsor lain yang sah	Ketern PU, Pemda, dan/atau Swasta				
		23. Jaringan jalan per-sampitan Palang Kalimantan yang menghubungkan	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau	APEN, AFRU, dan/atau Sponsor lain yang sah	Ketern PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.1.3.4.	Jaringan Jalan Pengembangan Jaringan Jalan Strategis nasional	1.1.3.4.1. Ajaran-Belekayang Saranggudin 2. Jaringan Jalan Jalan Strategis Dulu Kalimantan yang yang mengembangkan Jalan di Kalimantan Tempak	Kalimantan (IV.3.3) Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (L6.1)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemset: PU, Pemda, dan/atau Swasta				
	2. Jaringan Jalan Lintas Wilayah Pulau Kalimantan yang mengembangkan Nangsa Dineh- Tumbang Nangsa- Tumbang Tumbang Samling		Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (II.4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemset: PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		3. Jaringan Jalan Liris Ular Pulau Kalimantan yang mengembangkan Tanjung-Arik- Jagababang- Brikeng-Jasa- Nanga Bahu	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (II.2.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta			
		4. Jaringan Jalan Liris Ular Pulau Kalimantan yang mengembangkan Purusaba-Lang- Cahangai-Lang- Nawang- Malina-Lang- Midang	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (II.3.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		5. Jaringan jalan perampasan Puluat Kalimantan yang menghubungkan: Merasitong, Tantiumbis	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jalu-sun Jalan Nasier al di Pulau Kalimantan (IV.3.4.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketnen PU, Pemuda, dan/atau Swasta				
		6. Jaringan jalan perampasan Puluat Kalimantan yang menghubungkan Palangkaraya- Bakili-Batuok-Ampah	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jalu-sun Jalan Nasier al di Pulau Kalimantan (IV.3.3.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketnen PU, Pemuda, dan/atau Swasta				
		7. Jaringan jalan perampasan Puluat Kalimantan yang menghubungkan: Galing, Aruk	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jalu-sun Jalan	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketnen PU, Pemuda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		8. Jaringan jalan perampunan untuk kaum cacat yang menghubungkan Sampul-Bogondoyong-Ciwang Baradatu.	Nasional di Pulau Kalimantan (IV.1.6.) Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.1.7.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketren PU, Pemda, dan/atau Swasta				
1.1.4. 1.1.4.a.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan	Jaringan jalan bebas hambatan Simpang Puskam-Balikpapan	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.1.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketren PU, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan	Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (IV.1.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain	Ketren PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Samarinda	Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.2.1)	yang sech					
	3. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Samarinda-Tenggarong		<p>Isuripran JV</p> <p>Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.2.A)</p> <p>Isuripran JV</p> <p>Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.4.1)</p>	APUN, APBU, dan/atau Sumber lain yang sech	Kerenn PU, Pemuda, dan/atau Swasta	■			
	4. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Sei Turyul-Pontianak		<p>Isuripran JV</p> <p>Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.4.1)</p>	APUN, APBU, dan/atau Sumber lain yang sech	Kerenn PU, Pemuda, dan/atau Swasta	■			
	5. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Mempawah-Sel Pinyah		<p>Isuripran JV</p> <p>Strategi Operasionalisasi Perwujudan</p>	APUN, APBU, dan/atau Sumber lain yang sech	Kerenn PU, Pemuda, dan/atau Swasta			■	

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
6.	Jaringan Jalar Bebas Hambatan Pontianak-Tayan		Jaringan Jalar Nasional di Pulau Kalimantan (V.5.) Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalar Nasional di Pulau Kalimantan (V.6.) Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalar Nasional di Pulau Kalimantan (V.7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemren PU, Pemda, dan/atau Swasta				
7.	Jaringan Jalar Bebas Hambatan Ilang-Anggang-Pelalihan			APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemren PU, Pemda, dan/atau Swasta				
8.	Jaringan Jalar Bebas Hambatan Singkawang-		Lampiran IV Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain.	Kemren PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Mempawah	Persiapan dan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.8.)	yang sah.					
	9. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Kuala Kapuas-Banjarmasin.		Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.9.)	APUN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemari PU, Pemda, dan/atau Swasta		■		
	10. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Marabahan-Banjarmasin.		Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.10.)	APUN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemari PU, Pemda, dan/atau Swasta		■		
	11. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Liang Ayyang-		Lampiran IV Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain	Kemari PU, Pemda, dan/atau Swasta		■		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Matlapura	Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.1.1.)	yang sah				
	12. Jaringan Jalan Ekspres Hambatan Telerahar-Pagatan		Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.1.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah		■		
	13. Jaringan Jalan Ekspres Hambatan Pagatan-Balihit		Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.1.3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah		■		
	14. Jaringan Jalan Ekspres Hambatan Balihit-Tanah Gregoi (Kunari)		Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah		■		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Jalan, Jalan Nasional di Pulau Kallimantan (V.14.4)						
	5.5. Jaringar, Jalan Ebes Hambatan Tanah Geogel - Penaqum		Insipran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kallimantan (V.15)	APN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kerem PU, Pemda, dan/atau Swasta		■		
	5.6. Jaringar, Jalan Ebes Hambatan Samudra, Bontang		Insipran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kallimantan (V.16)	APN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kerem PU, Pemda, dan/atau Swasta		■		
	5.7. Jaringar, Jalan Ebes Hambatan Bontang, Sungai		Insipran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kerem PU, Pemda, dan/atau Swasta		■		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		1.8. Jaringan Jalan Balak Hantakan Fejo masir - Liang Auggang	Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.17.1) Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.18.)	AUN, APBD, dana/atau Sumber lain yang sah	Ketern. P.C, Pemuda, dan/ atau Swasta				
1.2.	Jaringan Jalur Kereta Api Nasional								
1.2.1.	Jalur Kereta Api Antarkota dan Kawasan Perbatasan								
1.2.1.a.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur	1. Jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Balak negara- Samaragamis - Mahin-an diujung Selen-Tarjeng Radeb- Sanyakalirang- Sangata-Ikawang	Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (0.1.)	APBN, APBD, dana/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Pemuda, dan/ atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	2. Jaringan idar kereta api yang menghubungkan Pontianak-Samarinda-Balikpapan.		Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (1.2.)	APDN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketentub, Feuda, dan/atau Swasta	■			
	3. Jaringan idar kereta api yang menghubungkan Balikpapan-Tanah Segel-Tanjung-Anpal.		Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (1.3.)	APDN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketentub, Feuda, dan/atau Swasta	■			
	4. Jaringan idar kereta api yang menghubungkan Ampah-Khuara Tevel.		Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (1.4.)	APDN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketentub, Feuda, dan/atau Swasta	■			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	5. Jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Ampuh-Bantik-Palangkaraya		Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (1.5.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta	█			
	6. Jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Balikpapan-Delitihari-Banjarnawir-Kuala Kayumas-Palangkaraya-Palangkaraya		Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (1.6.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta	█			
	7. Jaringan jalur kereta api yang menghubungkan % marinda-		Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta	█			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Tertinggalan- keabangan	Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (0.7.j)						
	8. Jaringan Jalur kereta api yang menghubungkan Malaya, Taweh-Parak Utara		Lampiran V Strategi Operasionalisasi Persejajaran Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (0.8.j)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta				
	9. Jaringan Jalur kereta api yang menghubungkan Anapodi-Bungkuang		Lampiran V Strategi Operasionalisasi Persejajaran Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (0.9.j)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.2.1.b.	Perencanaan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat	1. Jaringan jalur kereta api yang melubuhkan Palangkaraya-Sampit-Nanga Bulik-Nanga Tayap-Sanggau 2. Jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Sanggau-Pontianak	Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (II.1.) Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (II.2.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah.	Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta				
		3. Jaringan jalur kereta api yang melubuhkan Pontianak-Mempawah-Singkawang-Batas Nantais-batas negara.	Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (II.3.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah.	Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		4. Jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Sambas-Perangkat-Ngabang-Sintang-Futussibau	Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (II.4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kabupaten, Ponda, dan/atau Swasta				
		5. Jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Dentanak-Ngabang	Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Pulau Kalimantan (II.5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kabupaten, Ponda, dan/atau Swasta				
1.3.	Jaringan Transportasi Sungai dan Penyeberangan								
1.3.1.	Transportasi Sungai								
1.3.1.4.	Pengembangan jaringan transportasi sungai	Sungai Kapuas (Provinsi Kalimantan Barat), Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Nagai,	Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kabupaten, Ponda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PUKWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sungai Mentaya, Sungai Lantun dan, Sungai Kelay, Sungai Sembukan, Sungai Seluku, Sungai Sesayap, Sungai Kayan, Sungai Sambas, Sungai Kahayan, Sungai Selarogan, Sungai Kairuan, Sungai Aru, Sungai Esawan, Sungai Melawi, Sungai Kapuas 4Diversa Kalimantan Tengah, dan Sungai Kantiko	Transporasi Sungai dan Pengembangan di Pulau Kalimantan (L. 15/2012)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Penda, dan/atau Swasta				
1.3.1.b	Pengembangan kerusu	Terusan Kalimantan, Terusan Serayu, Terusan Hantyan, Terusan Raya,	Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Terwujudu						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Tanah Tambak, dan Terusan Basah	Jaringan Transporasi Sungai dan Penyeberangan di Pulau Kalimantan (L.1.1.26.1)					
1.3.2.	Transporasi Penyeberangan							
1.3.2.1.	Lintas Penyeberangan Antar Negara							
1.3.2.1.a.	Pengembangan dan peningkatan fungsi	Penyeberangan Nutrikan-Tawau (Malyasia)	Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transporasi Sungai dan Penyeberangan di Pulau Kalimantan (L.1.1)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemda, dan/atau Swasta			
1.3.2.2.	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Pulau Kalimantan dengan							
1.3.2.2.a.	Pengembangan dan peningkatan fungsi	Penyeberangan Facilianak-Balam	Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan	provinsi di luar Pulau Kalimantan APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemda, dan/atau Swasta			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Jaciusdan Transporasi Sungai dar Penyeberangan di Pulau Kalimantan (III.1.1)						
	2. Lintas penyeberangan Marubau Tarakan-Teliti Tuli		Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jembatan Transporasi Sungai dar Penyeberangan di Pulau Kalimantan (III.2)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendab, Pemda, dan/atau Swasta				
	3. Lintas penyeberangan Ketapung-Manggar		Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jembatan Transporasi Sungai dar Penyeberangan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendab, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		4. Lintas perkeretaapian Balikpapan-Garut	di Pulau Kalimantan (III.3) Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transportasi Sungai darat. Penyeberangan di Pulau Kalimantan (III.4)	APEN, ATEP, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta				
		5. Lintas perkeretaapian Balikpapan-Taripa	Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transportasi Sungai darat. Penyeberangan di Pulau Kalimantan (III.5)	APEN, APEO, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
6.	Linis penyelenggaraan Pontrenak Jalilung Pandat.		Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kerjasama Transportasi Sungai dan Persebaran di Palau Kalimantan (01.6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta				
7.	Linis penyelenggaraan Kerjasama Sengkang		Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kerjasama Transportasi Sungai dan Persebaran di Palau Kalimantan (01.7.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta				
8.	Linis penyelenggaraan Pontrenak-Sengkang		Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Jatidisan Transparansi Sukses dan Peningkatan di Palang Merah Indonesia (III.8.)						
		3. Lintas perkeretaaan Banjarbaru- Lampungan	Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jatidisan Transparansi Sukses dan Peningkatan di Palang Merah Indonesia (III.8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemda, dan/atau Swasta				
		10. Lintas perkeretaaan Esik- Lampungan	Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jatidisan Transparansi Sukses	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemda dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		1.1. Lirisas per sebaran ikan di Kabupaten Maramba	dan. Peayebearangan di Pulau Kalimantan (III.1C.1) Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwajidan Fasilitas Transporasi Sungai dan Peayebearangan di Pulau Kalimantan (III.11.1)	APUN, APBL, dan/atau Sponsor Isin yang sah	Kementub, Kemda, dan/atau Swasta				
		1.2. Lirisas peyebearangan Sampil Semarang	Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwajidan Fasilitas Transporasi Sungai dan Peayebearangan di Pulau Kalimantan (III.11.1)	APUN, APBL, dan/atau Sumber Isin yang sah	Kementub, Kemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		3. Lintas pelayanan Tangkisan-Telipili	Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jembatan Transporasi Sungai dan Penyeberangan di Pulau Kalimantan (III.13.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta				
	4. Lintas penyeberangan Kuala Rendat		Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jembatan Transporasi Sungai dan Penyeberangan di Pulau Kalimantan (III.14.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta				
	5. Lintas penyeberangan Bachtih-Garengkong		Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Jaringan Transporasi Sarungai dan Pelaybeberangan di Pulau Kalimantan. (III.15.)						
		1. Lintas penyeberangan. Balau-Lamongan	Lampiran VI Skatensi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transporasi Sarungai dan Pelaybeberangan di Pulau Kalimantan. (III.16.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenduk. Pemuda, dan/atau Swasta				
1.3.2.3.	Lintas Penyeberangan untuk Membuka Keterisolasian Wilayah								
1.3.2.3.a.	Pengembangan dan peningkatan fungsi	1. Lintas penyeberangan. Nambak-Pulau Setatik	Lampiran VI Skatensi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemenduk. Pemuda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Transportasi Sarungai dan Perseberangan di Pulau Kalimantan. (IV.1.)						
2.	Linze penyeberangan: Tanjung Belub-Pulau Maratua		Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transportasi Sarungai dan Perseberangan di Pulau Kalimantan. (IV.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemda, dan/atau Swasta				
3.	Linze penyeberangan: Tanjung Belub-Pulau Sambit		Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transportasi Sarungai	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.	Sistem Transportasi Laut								
2.1.	Tatanan Keperluan								
2.1.1.	Pelabuhan Utama								
2.1.1.a.	Pemantapan pelabuhan utama	1. Pelabuhan Perikanan 2. Pelabuhan Banjarmasin.	<p>Lampiran VI Strategi Operasionalisasi Perwajidan Tatanan Keperluan di Pulau Kalimantan (D.L.)</p> <p>Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwajidan Tatanan Keperluan, dll.</p>	APDN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemendikbud, dan/atau Swasta	█	█		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.	Pelatihan Balikpapan	Balikesperan.	Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwajidan Talamun Kepulauan, di Pulau Kalimantan (1.2.)	APDN, APBD, dan/atau Sumber Isin yang sah	Ketentub, Feunda, dan/atau Swasta		■		
4.	Pelatihan Tarakan	Tarakan	Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwajidan Taraman Kepulauan, di Pulau Kalimantan (1.4.)	APDN, APBD, dan/atau Sumber Isin yang sah	Ketentub, Feunda, dan/atau Swasta		■		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.1.2. 2.1.2.a.	Pelabuhan Pengumpul Pemanfaatan pelabuhan pengumpul	1. Pelabuhan Kelapahe	Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatahan Kepelabuhanan di Pulau Kalimantan (01.1.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta	█			
		2. Pelabuhan Karimata, termasuk terminal Bamitjarjo	Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatahan Kepelabuhanan di Pulau Kalimantan (01.2.)	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta	█			
		3. Pelabuhan Samudera	Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatahan	APEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendub, Pemda, dan/atau Swasta	█			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
4.	Pelabuhan Niurakati		Kepelabuhanan di Pulau Kalimantan (1.3.) Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Talianan Kepelabuhanan di Pulau Kalimantan (1.5.)	APUN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Ketentub, Kemda, dan/atau Swasta			
5.	Pelabuhan Samarinda		Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Talianan Kepelabuhanan di Pulau Kalimantan (1.6.)	APUN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendab, Kemda dan/atau Swasta			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
6.	Pelabahan Tanjung Saragata		Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kepulauan di Pulau Kalimantan (11.7)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta	█			
7.	Pelabahan Tanjung Rodeb		Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kepulauan di Pulau Kalimantan (11.8)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta	█			
8.	Pelabahan Tanah Grosok		Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta	█			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Talangan Kapelaburahan di Pulau Kalimantan (1.2)					
		9. Pelalabuan Tanjung Selor	Kauripan VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Talangan Kapelaburahan di Pulau Kalimantan (1.2)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah		■		
		10. Pelalabuan Tanjung Santak, Terminel Lhek Tuan dan Terminel Tanjung Laut	Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kapelaburahan di Pulau Kalimantan (1.2)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah		■		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.1.2.b.	Pengembangan pelatihan pengumpul	1. Telabuban, Sampit termasuk Terminal Eggingdung	Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Terminal Kepulauan Kalimantan (II.4.)	APEN, AFD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemdik, dan/atau Swasta	█			
		2. Pelabuhan Mafu	Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Terminal Kepulauan Kalimantan (II.2.)	APEN, AFD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemdik, dan/atau Swasta		█		

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027	
3.	Sistem Transportasi Udara									
3.1.	Bandar Udara Pengumpul									
3.1.1.	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer									
3.1.1.a.	Pemantapan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer	Bandar Udara Sepirangan	<p>Langkapan VIII</p> <p>Strategi Operasionalisasi Perwujudan Lelanaan Kabupaten/madaraan di Pulau Kalimantan (1.)</p>	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta					
3.1.2.	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder									
3.1.2.a.	Pemantapan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder	Bandar Udara Sepirangan	<p>Langkapan VIII</p> <p>Strategi Operasionalisasi Perwujudan Lelanaan Kabupaten/madaraan di Pulau Kalimantan (2.)</p>	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.1.2.b.	Pengembangan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder	Bandar Udara Samarinda Baru	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tolakan Kebutuhan rudaaran di Pulau Kalimantan (S) Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tolakan Kebutuhan rudaaran di Pulau Kalimantan (4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendhub, Pemula, dan/atau Swasta				
3.1.3. 3.1.3.1.	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier Pemantapan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan	1. Bandar Udara Paloh	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tolakan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendhub, Pemula, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	Bekasier								
		2. Bandar Udara Fatmahanik	Kelembagaan di Pulau Kalimantan (6.) Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kelembagaan di Pulau Kalimantan (6.)	APUN, APBL, dan/atau Sponsor Isin yang sah	Kemendagri, Kemda, dan/atau Swasta				
		3. Bandar Udara Sulo	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kelembagaan di Pulau Kalimantan (7.)	APUN, APBL, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	4.	Bandar Udara Rudali Usman	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tamanan Kebudayaan di Pulau Kalimantan (8)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendhub, Pemda, dan/atau Swasta	█			
	5.	Bandar Udara Tjilik Riwut	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tamanan Kebudayaan di Pulau Kalimantan (9)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendhub, Pemda, dan/atau Swasta	█			
	6.	Bandar Udara Iskandar	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tamanan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendhub, Pemda, dan/atau Swasta	█			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Kebudayaan di Pulau Kalimantan (10.1)						
		7. Bandar Udara Sraget.	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kebudayaan di Pulau Kalimantan (11.)	APUN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemdik, dan/atau Swasta		■		
		8. Bandar Udara Kalimantan-dituru	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kebudayaan di Pulau Kalimantan (13.)	APUN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemdik, dan/atau Swasta	■			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PUKWUJULAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		9. Bandar Udara Murakan	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugu Monumen Kebandjaradarsar di Palang Kalimantan (14)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta		■		
		10. Bandar Udara Bentang	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugu Monumen Kebandjaradarsar di Palang Kalimantan (15)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta		■		
3.1.3.1.	Pengembangan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan keperker	Bandar Udara, Jawa	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugu Monumen Kebandjaradarsar di Palang Kalimantan (16)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Pemda, dan/atau Swasta				■

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
C.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional							
I.	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi Nasional		Lampiran IX Strategi	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
1.1.	Pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi	Tanjung Sautau-Kuala Karangkajene-Kabupaten Pangajene-Makassar	Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (1.1.1, 1.2.1.3, 1.4.1)					
	Jaringan transmisi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional	Timor-Panijam Pasay Pulau-Papua Kotabaru-Tanah Buntar-Larak-Lant, Tarak-Lantik-Lajar Kerinci-Banjarnasin-Bukit-Kuala Kapuas-Takung Pisau-Karangan Kotawaringin Timor-Sarungat Kotawaringin Barat Lampung						
					Kerinci ESUM, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.2.	Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi serta transmisi tenaga listrik di kawasan Kalimantan	Kelapang, Pontianak, Natuna-Pontianak-Palangan-Karaya - Banjarbaru	Rampitan IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (1.1.2, 1.3, 1.4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Korporasi BUMN, Komen FU, Pemda, dan/atau Swasta			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PUKWUJUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kelapa, s-Bontolanak, Natiana-Benturanak-Palar-gkaraya, Barimasaah							
2.	Pembangkit Tenaga Listrik								
2.1.	Pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru	1. PLTU Tanah Grogot, PLTU Kota Bangor, PLTU Mbuara Jawa/Teluk Balikpapan, PLTU Kalimantan, PLTU Penang, PLTU Melak, PLTU Nirmakar, PLTU Berak, PLTU Tampang Sebat, PLTU Kaliau, PLTU Parit Barit, PLTU Tonilauak, PLTU Pantai Kara-kara	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (ILC)	ATEN, APBD, dan/atau Sumbat lain yang sah	Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sirgkawang, PLTU Asam- asam, PLTU Sirgkawang, Batu, PLTU Kalieng, PLTU Sampit, dan PLTU Gambir							
2.	TITG Kalimantan- Peking, PLTG Senjaya, dan PLTG Tanjung Batu		Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (II.1.)	AEBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kabupaten Ponda, dan/atau Swasta				
3.	TITGB Sangaila, PLTGB Lampung Redeb, PLTGB Tanjung Selor, dan PLTGB Malinau		Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (II.1.)	AEBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemari ESDM, Ponda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PUKWUJULAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.2.	Pembangkit listrik berbasis energi terbarukan	4. PLTMG Bonuarq	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional (JREK) Kalimantan (I.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemari ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
		5. PLTGU Fortkema dan PLTGU Tanjung Batu	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional (I.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemari ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
		1. PLTA Fack, Kembangar, PLTA Masya Tinel, PLTA Kusan, PLTA Tefel, PLTA Rian Kasan, PLTA Sebakti, PLTA Sasayati, PLTA Kayar, PLTA	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional (I.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemari ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PUKWUJULAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.3.	Pengerbangan pembangkit Listrik pada muhil, lambang kawasan pertambangan batubara	1. Kelat, ILTA, Eok I dan Bol. II, serta ILTA M Noor	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (IL21)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kem. ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. PETA Mawasap 1							
2.3.	Pengerbangan pembangkit listrik pada muhil, lambang kawasan pertambangan batubara	3. PETA dan PETS di Pulau Sebantik, Pulau Maratun, dan Pulau Sambit	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (IL21)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kem. ESDM, Pemda, Badan Penetapan, dan Ditengkaljian Teknologgi (BPPT), dan/atau Swasta				
		4. Pengerbangan pembangkit listrik pada muhil, lambang kawasan pertambangan batubara	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (IL21)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kem. ESDM, Pemda, BPPT, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Hulu, Kabupaten Maupe Raya, Kabupaten Berau Utara, Kabupaten Pareo Timur, Kabupaten Ceraug Mas, Kabupaten Mafinu, Kabupaten Muniken, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Karawangsari, Kabupaten Kutai Burai, Kabupaten Pensjau Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Tubaliung,						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik								
3.1.	Rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan	Kabupaten Belangan, Kabupaten Kutubara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jalinan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (2011-2014)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Keruan ES/DM, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.	Transmisi Tenaga Listrik SUTTI Samudra-Rafflesia-Tengah-Singot.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik SUTTI Samudra-Rafflesia-Tengah-Singot.	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (O1.1.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemren ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
3.	Transmisi Tenaga Listrik SUTTI Kuala Kepri-Pulau-Karaya-Sampit-Pangkalan Bar.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik SUTTI Kuala Kepri-Pulau-Karaya-Sampit-Pangkalan Bar.	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (O1.1.3.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemren ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
4.	Transmisi Tenaga Listrik SUTTI Kuala Kepri-Batok-Mutara Teseh.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik SUTTI Kuala Kepri-Batok-Mutara Teseh.	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (O1.1.4.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemren ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
5.	Transmisi Tenaga Listrik SUTTI	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik SUTTI	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemren ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.2.	Rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan	Marapour, Amuntai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Saharan Utara Tegangan Elctra Tinggi (SUTED) Lentianak Memyawah- Sungkawang- Sambas- Sunggau Sekadau Sintang-Puchisselwa	Jadisan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (01.2.5.) Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Penyelidikan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (01.2.5.)	yang sah APUN, APBL, dan/atau Sponsor lain yang sah	Ketren ESUM, Pemda, dan/atau Swasta				
3.3.	Pengembangan Jaringan Transmisi Pedalaman Kalimantan	PKSN Palih-Arak, PKSN Jagobabang, PKSN Nanga Badau, PKSN Entekang, PKSN Jusa, PKSN Numukan, PKSN Simanggarik, PKSN Long Midang,	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Penyelidikan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (01.3.1.)	APSN, APBL, dan/atau Sponsor lain yang sah	Ketren ESUM, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		PKSN Long Palang, dan PKSN Long Nawang	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (III.3.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemren ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
3.4.	Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pulau Kalimantan dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pulau Jawa	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (III.4.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemren ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PURWUJULAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		2. Intisakeneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Puluhan Kabupaten dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Puluhan Sulawesi	Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional (di Peta Kalimantan (III.4.2.))	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemari, ESDM, Pemda, dan/atau Swasta				
D. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL.									
1.	Jaringan Terestrial								
1.1.	Pengembangan jaringan pelayanan pusat-pusat pertumbuhan di pulau selatan Kalimantan	Jaringan terestrial yang menghubungkan PKN Pongkorak, PKN Palangkaraya, PKN Buntarwasiti, PKN Kawasar, Perbatasan Balikpapan - Tanggarong-	Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Telekomunikasi di Pulau Kalimantan. (I.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemari, Kominfo, Pemda, dan/atau Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Samarinda Dombaru, PKN Tarakan, FKW Samba, FKW Sukawangi, FKW Mempawah, FKW Kelapas, FKW Pankajene Benu, PKW Sampit, FKW Kuala Kapuas, FKW Buntok, FKW Muara Tuweh, PKW Maranhão, PKW Maranhão, PKW Amuntagi, FKW Kotabaru, FKW Tarap, Cinggis, FKW Seridawan, PKW Sangala, FKW Takitok, Beale, FKW Tanjung Selayar, PKW Melina, dan						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>PKW/FKSN</p> <p>Nuruklau, serta masyarakat di Kawasan Andalan-Pembarok dan Sekelarnya, Kawasan Andalan Saungdi-Tanjaklat, Bm. Kawasan Andalan Bur Isk, Kawasan Andalan Mitratengsel, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Kandangan dan Sekelarnya, Kawasat, Andalan, Bantarmasin Raya dan Sekelarnya, Kawasan Andalan Bantudin, Kawasan Andalan, Talang Betei dan</p>						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sekeloa, Kawasat. Andalar, Sangkilir, Sanggalih, Mera, Wadai (Sugawati), Kawasat Andalan Tarakan-Larung, Salas-Mutakhir, Tulau Bayu, Mahina, (Cafapambama) dan sekitarnya, dan Kawasat Andalan Rantau, Sarimada, Tanggarang, Is. Hupapan-Panjam (Bansamelahani) dan sekitarnya.						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.2.	Pengembangan jaringan pelayanan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah utara Kalimantan	Jarinasu terestrial yang mengubungkan PKN Portapak, PKW Sanggen, PKW Silarang, PKW Puchasibaca, PKSN Long Nawang, PKSN Long Michang, PKW/PKSN Muarakai, PKW/PKSN Brikong, PKSN Palsh-Anak, PKSN Jeggababaras, PKSN Jasa, dan PKSN Naraga Bakti serta melayani Kawasan Anak-anak dan Perempuan, Kawasan Anak-anak Sirgkawang dan	Leaupaku X Srasasi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Telekomunikasidi Pulau Kalimantan (1.2.)	APUN, ATBU, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Go. Ternak, dan/atau Swasta				

NO.	INDUKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sekitarnya. Kawasan Andalan Sarunggahu dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Tatapannya dan sekitarnya							
2.	Jaringan Satelit								
2.1.	Pengembangan jaringan satelit kawasan perbatasan negara, kawasan keritinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil	Pulau Marauha, Pulau Saubit, Pulau Miang fiasir, Kepulauan Lepu Kooli, Pulau Uelani, Pulau Fawa, dan Kepulauan Karimata	Lampiran A Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi di Pulau Kalimantan (II.1.)	APBN, APBD, dan/ atau Sumber lain yang sah	Kem. Kominfo, Pemda, dan/ atau Swasta				

NO.	INDUKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027	
E	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR									
I.	Wilayah Sungai (WS)									
I.1.	Pengembangan wilayah sungai (WS) strategis nasional	WS Kapuas, WS Pawan, WS Seruyan, WS Kahayan, WS Mahakam	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Jaringan Sumber Daya Air di Pulau Kalimantan (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, dan 1.6.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta					
I.2.	Pengembangan WS lintas provinsi	WS Jelai-Kendawangan, WS Barito Kapuas	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Jaringan Sumber Daya Air di Pulau Kalimantan (1.7 dan 1.8.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendagri, Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PUKWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027	
1.3.	Pengembangan WS lintas negara	WS Sebarang	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Jaringan Sumber Daya Air di Pulau Kalimantan: (1.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemend PU, Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta					
2. Cekungan Air Tanah (CAT)										
2.1.	Pemenuhan CAT lintas provinsi	CAT Perkotaan, CAT Banjarnegara, CAT Muarareyang, dan CAT Muara Lela	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Jaringan Sumber Daya Air di Pulau Kalimantan: (1.3., 1.4., dan 1.5.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemend ESDM, Pemda, dan/atau Swasta					
2.2.	Pemenuhan CAT lintas negara	CAT Besh dan CAT Tanjungseor	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Jaringan Sumber Daya Air di Pulau Kalimantan: (1.1., dan 1.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemend ESDM, Pemda, dan/atau Swasta					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
II	PERWUJUDAN POLA RUANG NASIONAL								
A.	Kawasan lindung								
1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan buwahnya								
1.1.	Perindungan dan pelestarian kesatekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan di kawasan hutan lindung	Kawasan hutan lindung di Kabupaten Kupas, Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lantada, Kabupaten Marang, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Selatan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Tana Tenger, Kabupaten	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (L.I.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemahut, Kementerian Lingkungan Hidup (KEMEN LH), Permda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.2	<p>Pemertahanan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya</p>	<p>Kabupaten Huli, Sangai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Mahakam, Kabupaten Murahan, Kabupaten Kutai Baru, Kabupaten Berau, Kabupaten Buntar, Kabupaten Kutai Kertanegara</p>	<p>Kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketawang, Kabupaten Lombok, Kabupaten Matang Raya,</p>	<p>Laopirai XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Lululintas Nasional di Pulau Kalimantan (L.L.)</p>	<p>ADP, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah</p>	<p>Kementan, Kemmen LII, Petoda, dan/atau Swasta</p>			

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisang, Kabupaten Kamasa, Kabupaten Bario, Seladau, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Uluu, Kabupaten Sanggau Tengah, Kabupaten Hahu, Sanggau Selatan, Kabupaten Toi, Kabupaten Bantayan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Mahkota, Kabupaten Marau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Ferrata, Kabupaten Bulungan dan							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERJUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.3.	Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung	Kabupaten Kutai Kartanegara Kawasan Hutan Muhung di Kabupaten Kutai Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Laudak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Garut, Mas. Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulau Tiada, Kabupaten Kutai, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjari, Kabupaten Kolobaru, Kabupaten Tapani, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu	Lampiran XII Str. 2/2 Operasionalisasi Purwajalan Pestisidan Kawasan Lindung Nasional di Pala Kalimantan (L.I.)	APBN, APBD, donor atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Kemen III, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.4.	Rehabilitasi kawasan bertungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau	Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Dadu, dan Kabupaten Tarakan, Kabupaten Buntar, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Bawah, dan Kabupaten Kutai Kartanegara	Jambaran VII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (L.L)	APEN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Kemen LH, Kementan, PUMDA, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Mas, Kabupaten Kotilinggong, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Korpri, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Baujar, Kabupaten Kozabara, Kabupaten Tapii, Kabupaten, Kota Sanggau, Kota, Kabupaten Uluu Sanggau Selatan, Kabupaten Talalang, Kabupaten Balamang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten, Malinau, Kabupaten, Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Elongau, dan Kabupaten Kutai						

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJULAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.3.	Pemertahanan pertumbuhan masyarakat adat dan menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak menganggu kawasan berfungsi lindung	Karangsanga Kawasar, berfungsi lindung di Kabupaten Karas Hohu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Melawi, Kabupaten Kutapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisan, Kalimantan Kapuas, Kalimantan Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kutabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,	Lampiran XII Strateji Operasionalisasi Perwujudan Pefestaran Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan.	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendal, Kemendagri, Kemendikbud, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.6.	Pemertahanan luas dan pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan	Kabupaten Talaeng, Kabupaten Bakayari, Kabupaten Kolabari, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Berau, Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (L2)	APRN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kominfo, Kemendagri, Kemendikbud, dan/atau instansi terkait				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PIWUJUDIAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.7.	Pemertahanan dan meningkatkan tangsi kawasan resapan air, khususnya pada titik sungai	Kecamatan: Batu, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Timor, Kabupaten Dudatq, Ulu, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Hidu Sungai Uara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Balingari, dan Kabupaten Yamikan.	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwakilan Pelebaran Kawasan Luhang Nasional di Dulu Kalimantan (L.3)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kominfo, Kominfo PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.8.	Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air	hulu Sungai Serayu, hulu Sungai Sembakung, hulu Sungai Berau, hulu Sungai Krayan, dan hulu Sungai Malakani	Kawasan resapan air pada hulu Sungai Badio, hulu Sungai Kahayan, hulu Sungai Katingan, hulu Sungai Kapuas, hulu Sungai Melawai, hulu Sungai Serayan, hulu Sungai Serayu, hulu Sungai Sembakung, hulu Sungai Berau, hulu Sungai Krayan, dan hulu Sungai Malakani	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan lindung N-sieral di Pulau Kalimantan (1.3)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendhut, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendiknas, Kemendiklatpar, Kemendikpora, Kemendikpres, Kemendikristmas, Kemendikwasdiknas, Kemendikwasdikpora, Kemendikwasdikpres, Kemendikwasdikristmas, Kemendikwasdikwasdiknas, Kemendikwasdikwasdikpora, Kemendikwasdikwasdikpres, Kemendikwasdikwasdikristmas			

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2. 2.1.	Kawasan Perhidangan Sempai Pengendalian perikanan ruang pada sempai pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempai pantai	Sempai-sempai di pesisir barat, pesisir selatan, dan Pesisir timur Palang Kalimantan	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Hidran Nasional di Pulau Kalimantan (II.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kem: III, Kem: PL, Kem: KP, Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta				
2.2.	Pengendalian perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempai	Sungai-sungai pada WS Kapuas, WS Lawan, WS Seruyan, WS Kakayan, WS Mahakam, WS Serayu, WS Jelai-Kendawangan, dan WS Barito-Kapuas	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Hidran Nasional di Pulau Kalimantan (II.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kem: III, Kem: PL, Pemda, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.3.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau yang berpotensi mengancam dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau	Danau Sentaruni, Danau Bekuan, Danau Belida, Danau Gendeh, Danau Tangi, Danau Bangkaka, Danau Binu, Danau Cendek, Danau Garings, Danau Bembulan, Danau Limat, Danau Miparu, Danau Raya, Danau Galah, Danau Kerambuh, Danau Terasar, Danau Jumpang, Danau Melirang, Danau Semayang, Danau Sembuluh, dan Danau Lobo	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan. (01.3.)	APDN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan/atau Swasta				
2.4.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar	Waduk Belitan, Waduk Rim Karar, Waduk Lambakan, Waduk Manggar,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APDN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	waduk yang berbetensi menganggau dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar waduk	Waduk Wairu, Waduk Benansa, Waduk Merancang, dan Waduk Tambiansi, Luluh	Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (II.3.)						
3.	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya								
3.1.	Rehabilitasi dan Pemertapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional								
3.1.1.	Taman Nasional	Taman Nasional Belung-Kuntui, Taman Nasional Darau-Sekelaran, Taman Nasional Bukit Baka-Bakit Raya, Tatuat, Nasional Taraias Pating-Tamar, Sistem Sebangau, Taman Nasional Kayan-Melaraung, Taman Nasional	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (II.4.1., II.4.2., II.4.4., II.4.5., II.4.6., II.4.7., II.4.8.)	APUN dan AED	Kemenbrat, Keman PU, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemendikbud), dan Pemda				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kulisi Taman Nasional Gunung Palang	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (III.4.3.)	AUN dan AP3D	Kemendiklat, Kemendikraf, dan Pemuda		■		
3.2.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional								
3.2.1.	Sauka Alam Lari	Sauka Alam Lari Sungs dan Sauka Alam Lari Palang Sebatik	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (III.1.1., III.1.2.)	APFN dan AEDD	Kemendiklat, Kemendikraf, dan Pemuda	■			
3.2.2.	Sauka Mangrove	Sauka Mangrove Lembang dan Sauka Mangrove Pefathari Maris para	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan	APFN dan AP3D	Kemendiklat, Kemendikraf, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kemendikraf, dan Pemuda		■		

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2014- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Suka Marganatha Kuala Luruk	(III.2.1., III.2.2.) Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (III.2.8.)	AUN dan APED	Kemendal, Kemperparat.kraf, Kemendikbud, Kemend. PU, Kementerian Riset dan Teknologi (Kominfo), dan Emida		■		
3.2.3.	Cagar Alam	Cagar Alam Gunung Raya Fasi, Cagar Alam Niyat- Permisen, Cagar Alam Pararawan I/II, Cagar Alam Tebuk Apur, Cagar Alam Tebuk Aalang, Cagar Alam Tebuk Kampung, Sate, Lauti-Selat, Sebukri, dan Cagar Alam Sungai Ular dan Sungai Bulat.	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (III.2.2., III.2.4., III.3.7., III.3.10., III.3.11., III.3.12., III.3.14.)	APUN dan AEDD	Kemendat, Kemperparat.kraf, Kemendikbud, Kemend. PU, Kemendiktel, dan Permaka		■		

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Cagar Alam Maneker, Cagar Alam Muara Kondrangan, Cagar Alam Bukit Supit, Ilawatus, Cagar Alam Bukit Teluk Pematang	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (III.3.1, III.3.3, III.3.5, III.3.6, III.3.8, III.3.9, III.3.13.)	APHN dan APHD	Kemendikbud, Kemendikraf, Kemendikbud, Kemendikraf, Kemendikbud, dan Kemendikraf				
3.2.4.	Cagar Alam Leat	Teluk Pematang Cagar Alam Leat Kepulauan Karimata	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (III.3.1, 3, 5)	APHN dan APHD	Kemendikbud, Kemendikraf, Kemendikbud, Kemendikraf, dan Kemendikbud				
3.2.5.	Taman Urban Raya Bukit Suharjo	Taman Urban Raya Bukit Suharjo	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan	APHN dan APHD	Kemendikbud, Kemendikraf, Kemendikbud, Kemendikraf, dan Kemendikbud				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Taman Hutan Raya Sultan Adam	Lindung Nasieral di Pulau Kalimantan (III.6.2.) Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasieral di Pulau Kalimantan (III.6.1.)	AUN dan APED	Kementerian, krai, Kementerian, Keren PU, Kementerian, dan Kemdi.				
3.2.6.	Taman Wisata Alam Gunung Melintang	Taman Wisata Alam Gunung Melintang	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasieral di Pulau Kalimantan (III.6.2.)	AUN dan APED	Kementerian, krai, Keren PU, dan Kemdi				
		Taman Wisata Alam Belimbing, Taman Wisata Alam Astambul, Taman Wisata Alam	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan	AUN dan APED	Kementerian, krai, Keren PU, dan Kemdi				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.2.7.	Taman Wisata Alam Laut	Duragan, Taman Wisata Alam Bukit Kelan Komplek, Taman Wisata Alam Tanjung Kelumpang, Teluk Kapanan, dan Taman Wisata Alam Pefatihari Tamah Laut	Lampiran Nasir al Ah Fajal Kofirman (III.7.1, III.7.2, III.7.3, III.7.3, III.7.4, III.7.7)	ATRN dan APBD	Kementerian, Kementerian Kelautan dan Perikanan				
3.3.	Pemerintahan Kawasan Pantai	wilayah pesisir Kabupaten	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/atau	Kementerian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPEKASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.4.	Pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Tinnet, Kabupaten Berau, Kabupaten Buhungan, dan Kabupaten Narakar Gereja Tua Sejau, Keraton Kerjajar, Tayan, Rumah Adat Betang Panjang, Keraton Saragga, Keraton Karalagar, Sintang, Uluu Khamahawa, Leksade, Pasar Taremping Dayak Meratus, Balai Batu Kasimam, Keratan Kuala Kartanegara, Kampuang Maraukat, Suku Dayak Benuaq Oheng, dar, Kampuang Muayarakat, Suku	Lampiran XII Skema, Operasi, aliansi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindang Nasional di Pulau Kalimantan (ULIS)	AIRN, ATDD, dan / atau Sumber lain yang sah	Kemendikbud, Kemeri PU, Kemendikbud, Kemendikbud, dan / atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PAKWU/PUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
4.	Kawasan Rawan Bencana Alam	Dayak Kenyah, serta bendu, barungan, sruktur atau situs lainnya yang di-siapkan sesuai dengan ketentaaan perataraat, perataraat dan g-mudugan.	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Penyelidikan Pelestarian Kawasan Lintang Nasional di Pulau Kalimantan. (IV)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemeter, PU, Kemeter LIL, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pemda, dan/atau Swasta.				
4.1.	Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada kawasan perkotaan rawan banjir	Kawasan perkotaan rawan banjir di Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Tangerang, Kota Samarinda, Kota Banjar, Kota Mempawah, Kota Kutai Pungg, Kota Tenggarong, Kota							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PIKRU/ujudan	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sanggan, Kela Sirkapa, Kota Kuala Kapuas, Kela Pangkalan Baru, Kota Bartok, Kota Murai Teweh, Kota Sampit, Kota Marabau, Kota Matanahan, Kota Tanjung Reuleh, Kota Sangara, Kota Tanjung Seleh, dan Kota Tanah Grogot							
5	Kawasan Lindung Geologi Kawasan Cagar Alam Geologi Rehabilitasi dan pelestarian kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan batuan dan fosil	Kabupaten Kutai Tumar	Lampiran XII Strategi Parwajadan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (N. 1.1)	APBN dan APBD	Kemari PU, Kemari ESDM, Kemari wknkr, dan Kemari				

NO	INDIKASI PROGRAM LITSIAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
5.1.2.	Pemerintahan fungsi kawasan cagar alam geologi yang memiliki kearifan bentang alam berupa karst	Kawasan karst di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, Kabupaten Buntar, Kabupaten Nalikar, Kabupaten Barito Utara-Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Tapin	Lampiran XII Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasiona Irib Pulau Kalimantan (v.1.2.1)	AUTN dan APBD	Kemari PU, Kemari TSDM, Kemari-ekonomi, dan Kemari-				
5.2.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi								
5.2.1.	Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbagun pada kawasan rawan bencana alam geologi dan penyelenggaraan upaya mitigasi	1. Kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Berau, Kabupaten Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Tengah, dan Kabupaten Kutai Barat	Lampiran XII Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasiona Irib Pulau Kalimantan (v.2.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemari PU, Kemari III, BNUIS, BMDK, Kemari-ekonomi Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu							
		A. Kawasan perdes sawani di peasis Jalur Kabupaten Kuala Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanu Tiding, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bontang, dan Kota Tarakan.	Lampiran XI Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan IV.2.1	dan/atau Sumber lain	Kemari PU, Kemari LH, ENPH, EMKG, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
5.3.	Kawasan yang Memerlukan Perlindungan Terhadap Air Tanah								
5.3.1.	Pengendalian perkembangan budidaya terbangun pada kawasan intubasi air tanah	Kawasan imbuhan air tanah di CAT Fakih, CAT Tanjung Selor, CAT Puhugkaraya, Banjarbasih, CAT Marapayang, dan CAT Mbatu Laha	Lampiran XII Strategi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan. (V.3.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kantor ESDM, Kemda, dan/atau Swasta				
6.	Kawasan Lindung Lainnya								
6.1.	Pencertakan dan pelestarian sistem tata air dan ekosistem alamiah pada kawasan intubasi	Kawasan Ransar Durau Sentarim	Lampiran XII Strategi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan. (VI.1.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kantor PU, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri, dan/atau Swasta				
6.2.	Pencertakan, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem	terumbu karang di Laut Berau Pulau Panjung, Pulau Derawan, Pulau Kakabenu, Gawang Aling, Ceseq, Aruba,	Lampiran XII Strategi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kantor PU, RKP, KEMENDUKH, Kemendagri, Kemendagri, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FUKWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
6.3.	<p>terumbu karang</p> <p>Penetapan koridor ekosistem antar-kawasan suaka alam dan pelestarian alam, pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan Budi daya dengan prinsip berkelanjutan pada kawasan yang merupakan kawasan koridor ekowisata, serta pengembangan prasarana yang</p>	<p>Georgi Awang, Geron & Baras Usad., dan Karang Anye Saben</p> <p>1. Koridor ekosistem antar-kawasan antar-kawasan yang menghubungkan antar-ekowisata dalam tingkat, yaitu koridor suaka alam yang menghubungkan Cagar Alam Bukit Tiga Ilawung, Taman Nasional Bukit Kezhua, Taman Nasional Gunung Semarung, Taman Nasional Bukit Rakabakit Raya, dan Taman Nasional Kayar.</p>	<p>(VI.2.)</p> <p>Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindang Nasional di Pulau Kalimantan (VI.3.)</p>	<p>APFN, APED, dan/atau Sumber lain yang sah</p>	<p>Kemae TC, KemenLH, Kemarpublikasi, Pemda, dan/atau Swasta</p>				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	ramah lingkungan sebagai pendukung koridor ekosistem	Menaraung 2. Koridor ekosistem belantan, gibber, satahi, dar. urung uran yang menghubungkan antar ekosistem daratan rendah, yaitu: a. koridor ekosistem yang menghubungkan Saraka Masyasatwa Lamandak, Cagar Alam Gunung Raya Pasi, Talang Nasional Gunung Palang, Hutan Nasional Tarung Pulus, dan Hutan	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwilayah. Pelaksanaan Kawasan Lindung Nasional di Pulau Kalimantan (VLK)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan RI, Kementerian, KEMPHN LIL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Wisata Alam Tranjing, Kertang E. koridor ekosistem yang menghabungkan Cagar Alam Larasewen I/II, Cagar Alam Bukit Taqshiling, dan Taman Nusien I Selarayu G. koridor ekosistem yang menghabungkan Cagar Alam Marabou, Cagar Alam Meru Kerulawangat, Cagar Alam Nyut-Perussan, Taman Wisata Alam Belimbing.							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PIKWTU/ULAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Taman Wisata Alam A. Amansudin, dar. Taman Wisata Alam Durgar d. koridor ekosistem yang menghubungkan Cagar Alam Masara Kaman Sedulaga, Cagar Alam Tadala, level dar. Taman Nasional Kru'i							
		3. Koridor ekowisata berujung edukatif yang menghubungkan antarekorektor pasar, yaitu a. koridor ekowisata yang	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pesisiran Kawasan Lintang Nasional Di Pulau Kalimantan. (VI.3.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kementerian Kemendikbud, dan Kemendagri				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		mengembangkan Cagar Alam Teluk Arar, Cagar Alam Teluk Arar, Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sabuku, Cagar Alam Sungai Jalan dan Sungai Ihalar, Cagar Alam Teluk Pantukan E. koridor ekosistem yang mengembangkan Taman Hutan Rasya Sultan Aklam dan Taman Wisata Alau Delahari							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
B.	Kawasan Budi Daya								
1.	Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional								
1.1.	Kawasan peruntukan hutan								
1.1.1.	Pengembangan kawasan peruntukan hutan yang didukung dengan industri pengolahan dengan prinsip berkelanjutan	Tanah Laut Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Saranggah, Kabupaten Kelampayan, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lantaka, Kabupaten	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (C.)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendhut, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sukamara, Kabupaten Kecamatan Tingin Barab, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kecamatan Tinjau, Kabupaten Kutai, dan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Guntur, Mas, Kabupaten Kutai, s, Kabupaten Murung, Kays, Kabupaten Barito Pany, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Batu ngar, Kabupaten Uluu Sanyai Tengah, Kabupaten Uluh Sungai Selayan, Kabupaten Tapic, Kabupaten Bar. Ist,							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.1.2.	Pemertahanan kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan	Kabupaten Kota Bharu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanaid, Kabupaten Banjar, Kabupaten Paser, Kabupaten Penukuan Paser Utara, Kabupaten Kutai Barui, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Derang, Kabupaten Balangan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Kadidaya yang Memiliki Nilai	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendit dan/atau Pemda				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	<p>salwa endemic kawasan dengan meningkatkan fungsi ekologis di kawasan peruntukan hutan</p>	<p>Fortianak, Kabupaten Saragaga, Kabupaten Kalarang, Kabupaten Sekeloa, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Ulai, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kabupaten Kabupaten Barak, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Timor, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pulang Pasar, Kabupaten Guruk, Mas,</p>	<p>Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (1)</p>					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Kupas, Kabupaten Marang Raya, Kabupaten Bariss (P.ri), Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangai, Kabupaten Ihala Sungai Tengah, Kabupaten Uluhi Sungai Sel. am, Kabupaten Tapu, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kot. Baria, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten User, Kabupaten Pongajene Papar (P.ri), Kabupaten Karai Barat, Kabupaten							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PARWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
I.1.3.	Pengendalian perubahan pertumbuhan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan	Kudat Kalimantan, Kabupaten Karan Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bahau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Bahilaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (I)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kemendagri dan/atau Pemda				
		Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekeloa, Kabupaten Singaloa, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kalno							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Raya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kuala, Kabupaten Pulang Piar, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kupas, Kabupaten Marang Raya, Kabupaten Bukit Ulu, Kabupaten Garito Seldin, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Pangeran, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONAL/ASASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
I.2.	Kawasan peruntukan pertanian	Sungai Selatan, Kabupaten Tepah, Kabupaten Barjat, Kabupaten Kolakara, Kabupaten Tanah Bambu, Kabupaten Tanah Liat, Kabupaten Barjat, Kabupaten Paser, Kabupaten Delajau Paser Utara, Kabupaten Kutai Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Ikroa, Kabupaten Bahugai, Kabupaten Naimukan, dan Kabupaten Malinau							
I.2.1.	Pencertakan	Kabupaten Sambas	Lampiran XIII	APRN, APBD,	Kementerian Pertanian				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	<p>leasan kawasan pertanian peruntukan benihgasi, rawa pasang surut dan sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan</p>	<p>Kabupaten Perintak, Kabupaten Sangkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Saranggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Paling Pisau, Kabupaten Barisan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu</p>	<p>Strategi Operasionalisasi Penyajidan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (2)</p>	<p>dan/atau Sumber lain yang sah</p>	<p>(Kementerian), Kereni FU, dan/atau Pemda</p>				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PIKRU/PUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.2.2.	Pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian sawah menjadi non sawah	Sungai Uzos, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kutubartu, Kota Samarinda, Kota Tenggarong, dan Kabupaten Malinau Kabupaten Sambas, Kabupaten Tanjung, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sungkawang, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito	Lampiran XII Strategi Operasional- isasi Perencanaan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (2)	APDN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian dan/atau Provinsi				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Tunar, Kabupaten Padang Pesisir, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapir, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hahay, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kabuharu, Kota Samarinda, Kota Terengganu, dan Kabupaten Malinau							
1.2.3.	Pengembangan kawasan pertanian sesuai	Kabupaten Sambas, Kabupaten Puntarak, Kabupaten	Program XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan	A/RN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemumar, Pemda, Komen PI, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	kesuksesan lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadak hijau	Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kalayung, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Sukawati, Kabupaten Sokanera, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Palang Pisan, Kabupaten Barisan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapai, Kabupaten Ulu, Sungai Selatun, Kabupaten Ulu, Sungai Jenyah, Kabupaten Ulu, Sungai Ulu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah	yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan. (2)					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PIKRU/ UJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
I.2.4.	Pengembangan kawasan budi daya pekebunan kelapa sawit dengan prinsip tata kelola pekebunan kelapa sawit yang berkelanjutan	Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kelantan, Kota Samarinda, Kota Terengganu, dan Kabupaten Malinau	Program XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Industri yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (2)	APRN, APBD, dan/atau Sumbangan yang sah	Kementerian, Petinda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PIKWTUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
I.2.5.	Pengembangan kawasannya budi daya	Barito Utara, Kela Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kalimantan, Kabupaten Saranggau, Kabupaten Kelantan, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Lanjak Kabupaten Sambas, Kabupaten Saranggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kalimantan	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain	Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	perkebunan karet dengan prinsip berkelanjutan	Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sangkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kutai Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Tulianduk, Kabupaten Kesawan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kesbar, Kabupaten Bantar, Kabupaten Tanah Bumbu,	Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (2)	yang sah				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PARWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
I.2.6.	Pengendalian perkembangan kawasan budi daya	Kabupaten Tapin, Kabupaten Uluu Sungai Selat, Kabupaten Uluu Sungai Tengah, Kabupaten Uluu Sungai Uluu, Kabupaten Kalong, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Baru, Kabupaten Kerai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutajam Paser Utara, Kota Bengkayang, dan Kota Samarinda	Lampiran XIII Strategi Operasional- Isasi Perwujudan Kawasan Budidaya	APBN, APBD, dan/atau Sumber Lain yang sah	Kementerian dan/atau Lembaga				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	perkebunan kelapa sawit dan karet yang menggariskan kawasan beruntung lindung	Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Daric Uata, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Bujur, Kabupaten Tapani, Kabupaten Uluja, Sungai Selatun, Kabupaten Tanaoh Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kutai, Kabupaten Katingan, Kecamatan Timor, Kabupaten Kesawan, Kabupaten Kutai, Kabupaten	yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan. (2)					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Tengkayang, Kabupaten Sambas, dan Kot. Palangkaraya							
1.3.	Kawasan peruntukan perikanan								
1.3.1.	Pengembangan sarana produksi perikanan dengan memperhatikan potensi lestari	Wilayah perikanan pesisir Kabupaten Pontianak, Kabupaten Tengkayang, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Raya, Kabupaten Tanah Grogot, Puluhan Alena, Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (3)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kem. KP, Pinda. dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kesabaran, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Buntaring, Kota Samarinda, Uluu Kalimantan, Enklu Dewala, Pulau Lembeh, Pulau Tirabusan, Pulau Lampegan, Selat, Kalimantan, Uluu, Kepulauan Bala, bekkau dai, Kepulauan, Sangkhirang, Pesisir Barat Pulau Kalimantan, Pesisir Selatan, Pulau Kalimantan, dan Pesisir Timur Pulau Kalimantan							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PIWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.3.2.	Pengembangan kawasan metropolitan berbasis masyarakat	Kabupaten Sambas, Kabupaten Kutai Hulu, Kabupaten Sangayay, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pagar, Disai, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Darit Sabar, Kabupaten Karangnunggal Barat, Kabupaten Banjar, Kabupaten Habi Sungai Ular, Kabupaten Kutai Long, Kabupaten Kutubaru, Kabupaten Tarai.	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (3)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PARWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		La.L. Kabupaten Tanah Empat, Kabupaten Malinau, Kabupaten Narakkan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartasegara, Kabupaten Bihing, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan							
1.3.3.	Pengembangan kegiatan peningkatan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Kabupaten Sumbes, Kabupaten Tanahbaki, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sukunura, Kabupaten Kotawaringin Barat,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Kawasan Bialidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (2)	APBN, APBD, dan/ atau Sumber lain yang sah	Kemen KP, KEMEN LH, Pemda, dan/ atau Swasta.				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PARWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten. Seruyan, Kabupaten. Kapuas, Kota. Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten. Tanah Bumbu, Kabupaten. Kotabaru, Kabupaten. Pongkor, Paser Utara, Kota Samarinda, Kabupaten. Kutai Timur, dan Kabupaten. Balikpapan							
1.3.4.	Pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang	Kota Tarak, Gresik, Pulau Ahus, Kabupaten. Kotabaru, Kabupaten. Tanah Bumbu, Kabupaten. Tanah Laut, Kabupaten. Banjar, Kabupaten. Delia Mahakam, Pulau	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Bialidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (2)	APBN, APBD, dan/ atau Sumber lain yang sah	Kemen KP, KEMEN LH, Pemda, dan/ atau Swasta.				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kamarnya, Pulau Penala, Pulau Lemukutau, Pulau Hinalbesar, Pulau Laut Bagian Selatan, Kepulauan Derawan, Kepulauan Balabakan dan Kepulauan Sangkililing, Pesisir Bukit Pulau Kalimantan, Pesisir Selatan, Pulau Kalimantan, Pesisir Kalimantan, dan Pesisir Timur Pulau Kalimantan							
1.4. 1.4.1.	Kawasan pertumbuhan kawasan pertumbuhan mineral, batubara, serta	Kawasan pertumbuhan kawasan pertumbuhan mineral di Kalimantan Pantiarak,	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Industri yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Kemen ESDM, KEMEN LH, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Kalapaerab, Landak, Kalimantan; Kalimantan; Bengkayang, Kalapaerab, Sanggau, Kalapaerab, Sintang, Kalapaerab, Kolapans, Kalapaerab, Sambas, Kalapaerab, Sekeloa, Kalapaerab, Melawi, Kalapaerab, Kayong Utara, Kabupaten Kota Raya, Kalapaerab, Bantar, Kalapaerab, Bantarlama, Kofu Marakpara, Kalapaerab, Hulu Sangai Sekeloa, Kalapaerab, Tabalong.	Pulau Kalimantan: (4)						

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Tarai, Lauti, Kabupaten Tanjung Barmba, Kabupaten Hulu Sangai Tengah, Kabupaten Kalabaran, Kabupaten Banjar, Kota Kualaungan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Tamanrindu, Kabupaten Kawayanngar Barat, Kabupaten Kotawaringin, Timor, Kabupaten Kangar, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung						

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Mas. Kota Malang, Pewel., Kabupaten Batik Selatan, Kabupaten Barito Umur, Kalimantan Muzung Raya, Kabupaten Kupuas, Kabupaten Caser, Kabupaten Barau, Kota Samarinda, Kabupaten Kotai Karanggaya, Kabupaten Kotai Umur, Kabupaten Kotai Barat, Kabupaten Buhangan, Kabupaten Malinau, dan Kota Belitupati	Lampiran XII Strategi Operasionalis- fikasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/atau Sumbat lain	Kem. Per. Keman. ES/DM, Emala, dan/atau swasta				
		2. Kawasan perkotaan, perkotaan perkotaan							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		bandara di Kalipateh, Sintang; Kalipateh, Karwas Ihulu, Kalimantan Adelawa, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kalipateh, Lendah, Kalipateh, Kuntarak, Kalipateh, Santarak, Kalipateh, Murangry, Kalipateh, Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kalipateh, Gamang Mara, Kabupaten, Sakmara, Kalipateh, Kalawangit, Barat, Kalipateh	Kawasan budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan(4)	yang sah				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Bengkulu, Kota Samarinda, Kabupaten, Tabalong, Kabupaten, Bulungan, Kabupaten, Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapar, Kabupaten Hulu Sungai Uluang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin							
		3. Kawasan Perantakar Perambangan	Lampiran XIII Strategi Operasional- isasi Perambangan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain	Kementerian, Kaizen ISDM, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanjung Bambi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Barau, Kabupaten Nau, Kabupaten Kabupaten Belunggan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Berau, Kabupaten Kutai Karyaegara, Kabupaten Samarinda, Kabupaten Kutai Pasir Ulu, dan Kabupaten Paser							
I.4.2.	Pengendalian perkembangan kawasan	1. Kawasan Perumahan Perumahan Perumahan	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perumahan	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain	Kementerian, Kementerian (SDM, Perda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	pertambahan yang menganggu kawasan berfungsi lindung	mirrored di Kabupaten Kuntalar, Kabupaten Landak, Kabupaten Dompak, Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kutai, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekeloa, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kutai Raya, Kabupaten Berau, Kabupaten Banjarmasin, Kota Marangau, Kabupaten Idu	Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (4)	yang sah					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sungai Selatan, Kalangit, Tubalong, Kaltapetar, Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kaltapetar, Hulu Sungai Tengah, Kaltapetar, Kolaka, Kaltapetar, Banjar, Kota Kendawangan, Kaltapetar, Kapuas Hulu, Kalimantan Laut, Kaltapetar, Kaltapetar, Barau, Kalimantan Kaltapetar, Tirmer, Kabupaten Katingan, Kaltapetar, Seruyan, Kaltapetar.							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI TERJADUAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Z. Kawasan perantaraan pembangunan terutama di Kabupaten Simlasang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pektaranak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Darido Ulu, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Badakaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (4)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian ESUM dan/atau P.midi				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2017- 2018- 2019	II 2019	III 2020- 2021	IV 2025- 2027
		Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten, Kotawaringin Barat, Kabupaten Kolowarungie, Timor, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Bontol, Kuala, Kabupaten Malinau, Kabupaten, Mundakau, Kabupaten, Ranggen, Kabupaten, Berang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kusi Karauçana, Kabupaten, Kutai							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Baruf, Kabupaten Perajam Paser Uluara, Kabupaten, Paser, Kalimantan Tarakan, Kota Domang, Kota Samarinda, Kabupaten, Tabalong, Kabupaten, Baramun, Kabupaten, Kotabaru, Kabupaten Tarab Tanjung, Kabupaten Tanda Laut, Kabupaten, Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Bengali, Kabupaten Ippin, Kabupaten Hulu Sungai Uluara, Kabupaten, Hulu							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI TERJADUAL	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sungai Selaman, dan Kota Barindakari 3. Kawasan perikanan Pembangunan minyak dan gas bumi di Kabupaten Situngki, Kabupaten Marang Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Damar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Badidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan(4)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian ES/DM, dan/atau P.mdb				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Uluas, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tatal, Laua, Kabupaten Tanah Bamba, Kabupaten Balangan, Kabupaten Barera, Kabupaten Kabupaten Mamukan, Kabupaten Balangan, Kabupaten, Kabai Tanjung, Tanjung, Kabupaten Kerinci, Kabupaten, Kabai Kartanegara, Kabupaten Samarinda, Kabupaten, Tanjung							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.4.3.	Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pusta tumbang pada kawasan pertambangan pertambangan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem	Feair Ciara, dan Kabupaten Paser Kawasan peruntukan perikanan di Kalimantan Pontianak Kabupaten Lantada, Kota Layati, Kabupaten Ikerang yang Kabupaten Sanggah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kutayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melau, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Industri yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Dalam Kalimantan (1)	ATB, ATEP, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kementerian, Kemen FSDM, Ponda, dan/atau swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kidul Raya, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Kota Adiwarman, Kabupaten Kendengati, Jatiroto, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Liris, Kabupaten Tanah Rambu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kota Kendangsari, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin.						

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Baraf, Kabupaten Kawarlingi, Timor, Kabupaten Karangar, Kabupaten Serayan, Kabupaten Sakamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Muara Tawoh, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kota Batu, Kabupaten Buchitan, Kabupaten Melina, dan Kota Balikpapan							
		Z. Kawasan perantakar pembangunan kutubata di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kutai, Hebi, Kabupaten Maw, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Lantak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Murung Raya,	<p>Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Merupakan Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (A)</p>	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kementerian, Kemen, ESDM, Pmd, dan/atau Regerasi				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Adas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin, Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kutubang, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kutub, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Malinau, Kabupaten Numakan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Betara.						

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kalapaer, Kutai Timur, Kalimantan Kutai Kalimantan, Kalapaer, Kutai Barat, Kalimantan Pelajam Pasag Utara, Kalimantan Paser, Kalimantan Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kalapaer, Tabalong, Kalapaer, Balitagan, Kalapaer, Kalapaer, Kalapaer, Kalapaer, Tarat Pangkajene, Kabupaten Tanah Laut Kalapaer Banjar, Kalapaer Hulu Sungai Teuqah,							

NO	INDIKASI PROGRAM UYAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Tapini, Kabupaten Dhoho Kabupaten Uluwu, Kabupaten Dhoho Sungai Selatan, dan Kota Banjarbaru							
I.5	Kawasan peruntukan industri								
I.5.1.	Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu	Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Tarakat, Kota Sanggau, Kota Bintulu, Kota Mizara Teweh, Kota Marpura, Kota Tanjung Kidib, Kota Sanggau, dan Kota Tanjung Selor	Jamparan XII Strategi Operasional- Disesi Perwujudan Kawasan Industri yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan. (5)	APBN, APBD, dan/atau Sumber Lain yang sah	Kementerian, Kemen PU, KEMEN LRT, Pernda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.5.2.	Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan yang bernilai tinggi dan ramah lingkungan	..Peningkatan industri pengolahan kelapa sawit dan karet pada kawasan peruntukan industri di Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Mempawah, Kota Sengauwang, Kota Sambau, Kota Kapuas, Kota Pulasan, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Industri yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (5)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kapuas, Kota Pangkalan, Ibum, Kota Buntok, Kota Munara Tewek, Kota Sampit, Kota Amanah, Kota Martapura, Kota Marabahan, Kota Karabaru, Kota Sungai, Kota Nunakari, Kota Tarat Gayat, Kota Serakawar, Kota Simanggis, Kota Lery, Mandau, dan Kota Long Pahangai	Lampiran XII Strategi Operasional- isasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Datar Kalimantan (5)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemampuan, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Pengembangan industri pengolahan hasil hutan pada kawasan perantaban industri di Kota							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
I.5.3.	Pengembangan kawasan peruntakan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian terutama pangan pada kawasan pertanian tanaman pangan dan perikanan	1. Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian terutama pangan pada kawasan pertanian tanaman pangan dan perikanan	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (5)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Penda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PARWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Barjarmasin, Kota Singke wangi, Kota Keapang & Kota Puntisibau, Kota Sanggau, Kota Kuala Kupur, Kota Buntok, Kota Muara Taweh, Kota Sampit, Kota Amuntan, dan Kota Kelabari	Lampiran XIII Strateji Operasionalisasi Derivudan Kawasan Berhadaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (3)	APUN, APUN, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Pemda, dan/atau Swasta				
		2. Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan pada kawasan perikanan industri di Kota Pontianak, Kota Barjarmasin, Kota Kayuan, Perkebunan Balikpapan-							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PAKWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2014-2019	II 2015-2019	III 2020-2024	IV 2025-2027
1.6 1.6.1.	Kawasan pertumbuhan dan pemanfaatan kawasan ekowisata berbasis ekosistem kehidupan orang utan, bekatian,	Tenggarong, Samarindak, Borau, Kota Tarak, Kota Singkawang, Kota Ketapang, Kota Sanggau, Kota Pongkajene, Kota Kuala Kapuas, Kota Kalatena, Kota Tanjung Kechil, dan Kota Sangata	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Hutan yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (8)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah.	Kementerian, Kementerian, Pemda, dan Zaitan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	infeksi, angorek, serta sava dan tumbuhan endemik kawasan lainnya	Danu, Sarungro (Kabupaten Karang Putih), Taman Nasional Gunung Palang (Kabupaten Kayokg, Utara), Kabupaten Korpatek), Temen Nasional Bukit Bekal Bukit Raya (Kabupaten Melaligi- Kabupaten Sinzang- Kabupaten Karangam), Taman Nasional Tanjung Puting (Kabupaten Kutawaringin Barat- Kabupaten Seruyan), Taman Nasional Selatanga (Kabupaten Kalimantan-Kabupaten Pulang Pisau-Kel.						

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Palangkaraya), Taman Nasional Kayan Mentawai, Kabupaten Mahakam- Kabupaten Nalikai, Kabupaten Bulungan, Tana- Nasional Kutai Kabupaten Kutai Ulu- Kabupaten, Kutai Kartanegara- Kota Sarung, Taman Hutan Raya Sultan Adam Kabupaten Banjar- Kabupaten Tanah Laut) dan Taman Hutan Raya Bukit Selaric (Kabupaten Kutai Kartanegara- Kabupaten Penj- Paser Utara), Taman Wisata Alam						

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Belimbing (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Asuansang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Dungar (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (Kabupaten Sintang), Taman Wisata Alam Tatalak Kelumpang/Telek Kulawang (Kabupaten Kutawaringin Barak), dan Taman Wisata Alam Pesisiran Tanah Laut (Kabupaten Tatalak, Lau.)						

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2014- 2019	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.6.2.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekowisata pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan	Satka Mangrove Lumadati (Kabupaten Kotawaringin Barat-Kabupaten Sukamara), Timor Nasional Fozang, Keritihari (Kabupaten Tamar, Nasional Kapuas Uluah), Danau Sentarom (Kabupaten Kapuas Hilir), Tanjung Nasional Gunung Uluwung (Kabupaten Kayong Utara-Kabupaten Kutubung), Tamar, Nasional Baki Bekar, Ezyk (Kabupaten Melawi-Kabupaten Sukang-Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (5)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan/Kemendikbud, Kemendagri, Kemendiknas, Kemendikbud, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Katingani, Taman Nasional Tanjung Puling (Kabupaten Kawereng), Kabupaten Seruyan, Tandanu Nasional Selarasau							
		(Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Pulang Pisau-Kec. Pulungkaraya), Taman Nasional Kayan Mentarang (Kabupaten Malinau - Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara), Taman Nasional Kinabalu (Kabupaten Kudat Umar-Kabupaten Kota Kinabalu - Kota Belaga), Taman Hutan Raya							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sultan Adam (Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut) dan Taman Hutan Raya Bekti Sukarie (Kabupaten Kutai Kartanegara- Kabupaten Pengajam Paser Utara), Taman Wisata Alam Kstinting (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Asauwang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Daratat (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kabupaten Sambas), Taman Wisata Alam Bukit Kelau Komplek,							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJULAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.6.3.	Pelastarian kawasan permukiman berbasis budaya Kalimantan	(Kabupaten Sintang), Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kabupaten Kotawaringin Barat), dan Taman Wisata Alam Pelahhari Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut)	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Pesisir Perwilayahan Kawasan Padiudaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (6)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemampuan dan Tamb.				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
I.6.4.	<p>Penyembangunan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan antar-kawasan kawasan ekowisata, wisata budaya, obyek wisata lainnya, dan kawasan perkotaan nasional</p>	<p>Masyarakat Saka Dayak Meratus di Lokasda (Kabupaten Hulra Sarangani Kalimantan). Kawasan ekowisata Taman Nasional Betung-Kanthun (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu), Taman Nasional Gunung Palung (Kabupaten Kayong Utara), Kabupaten Kotapango, Tamar Ekka-Baki Raya (Kabupaten Melawi-Kabupaten Singarag-Kabupaten</p>	<p>Lampiran XIII Laporan, XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (6)</p>	<p>ADEN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah</p>	<p>Kemendikbud, Kemendagri, Kemendiknas, dan/atau Swasta</p>				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Katirgar, Taman Wisata Alam Belimbing (Kakapaten Sambas), Taman Wisata Alam Assausang (Kakapaten Sambas), Taman Wisata Alam Dungan (Kakapaten Sambas), Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kakapaten Sambas), Taman Wisata Alam Bakti Kelam Komplek (Kakapaten Sambas), wasabi Bradaya, obyek wisata lain-lain.							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		dengan Kofa Pentamak Z. Kawasan ekowisata Taman Nasional Kawasan Adirarang, Kabupaten Malinau-Kabupaten Sarawak - Kubupaten Belaga, Tamar, Nasamal Kufai Kabupaten Kutai Luhur-Kabupaten Kusi Kalimantan - Kota Benteng, Kampung Masyarakat Suka Dayak Emsan Chang di Parlung Isay (Kabupaten Kusi Barito), Kampung Masyarakat Suka							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Dayak Kenyah di Desa Cagar Wisata Kampung Kota Samarinda), obyek wisata lainnya, deugget Kota Bulitkempau dan Kota Samarinda 3. Kawasan ekowisata Suaka Margasatwa Lamarditu (Kalapaten Kotawaringin Barat-Kalapatem Sukamara), Taman Nasional Lanjut Pating (Kalapatem Kotawaringin Barat-Kalapatem Semayon), Taman Nasional Sebangga (Kalapatem							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Katinggar - Kabupaten Pelang Pisan -Kek. P. Langkamatyab. dir Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Telik Keluang (Kakapaten Kolawarungin (kurut) wisata Pradaya, obyek wisata kimyawi, danggri kofa Pelungkaraya 4. Kawasan ekowisata Taman Wisata Alam Pelangari Karah Laut (Kakapaten Lanak Layat), Kompong Masjidkal Suka Dugak Meratus di						

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	prasarana dan sarana	Konang, Mempawah, Singkawang, Sambas, Kelapaang, Pangsajau, Sanggau, SULENG, Kota KOTA Kapuas, Fatmahan, Kota Buntok, Kota Muara Tawar, Kota Sampit, Kota Amuntai, Kota Marangau, Kota Marabahan, Kota Ketabau, Tanjung Redeb, Kota Sanggau, Kota Nariukan, Tanjung Selor, Mahau, Tanahbris, Kota Tanah Grogol, dan						
	pekerjaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.7.2.	Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai	Kota Sendawar Pulau Aruk, Bagoibabang, Badau, Pulokor, Jawa, Nulukan, Siman, Sgaris, Mudar, S, Palaragan, Nawang, Sebakik, Nambit, dan Mantota	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Bualleya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Kalimantan (7)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemeri PU, Pemuda, dan/atau Swasta				
2	Kawasan Andalan								
2.1.	Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan hutan	Kawasan Andalan	Lampiran XIV	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendhut, Kemempurim, Pemda,				
2.1.1.	1. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan kehutanan termasuk	Kuala Kapras serta Kawasan Andalan Kapras Hulu dan sekitarnya	Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Kalimantan (4, 1)						

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	kegiatan industri pengolahan hasil hutan, perumukinan, dan jaringan prasarana serta sarana	Kawasan Anak-lar, Kotapang dan sekitarnya, kawasan Ardalam Sanggah, Kawasan Anak-lar, Sampit Tangkalan Baru, Kawasan Ardalan Maare, Tewet, Kawasan Aradalan Bahalicin, Kawasan Anak-lar Tanjung Releb dan sekitarnya, kawasan Ardalan Sanggah-Sanggah-Mara Wiliat (Susumawel), Kawasan Anak-lar Tarakan-Tanjung Sakas-Namukan-Pulau Pongor-Malliau	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Anak-lar di Pulau Kalimantan (3, 5, 8, 10, 15, 17, 18, 19, 20)	APIN, APHO, dan/atau sumber lain yang sah	Kemahat, Kemamparin, Fomda, dan/atau swasta				
	2. Pengendalian perkembangan kegiatan sektor unggulan kehutanan yang menggunakan fungsi ekologis hutan								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sekeloa, serta Kawasan Andalar, Dondang Samarinda, Tenggarung, Balikpapan-Penajam dan Sekeloa (Bonsa misalajam)							
		Kawasan Andalar, Daruck	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalar di Pulau Kalimantan (9)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kepentral, Kemuncipin, Pemda, dan/atau Swasta				
2.2.	Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan								
2.2.1.	Pengembangan kawasan atraktif kegiatan sektor unggulan pertanian, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian,								
		1. Kawasan Andalar Pontianak dan Sekeloa serta Kawasan Andalar Kating yang dan Sekeloa	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalar di Pulau Kalimantan (1, 3, 1)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemertan., Kementerin, Kemert. PU, Pemda, dan/atau Swasta.				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER FENDANAAN	INSTANSI PELAKSAKA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	perbukitan, serta jaringan prasarana dan sarana								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2013- 2014	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		2. Kawasan: Atakdan sirkawang dar. Selilannya, Kawasan: Atakdan Kapuas Hulu dari Sekitarnya, Kawasan: Ardalen Sanggau, Kawasan: Andak, Samnit- Pangkalan-Ban, Kawasan: Ardalen Bintok, Kawasan Andak, Muara Teweh, Kawasan Andak, Kuala Kapuas, Kawasan: Andak, Kandungan dan Selilannya, Kawasan: Atakdan Kampar, Raga dari Sekitarnya, serta Kawasan Andak, Suluheiu	Lampiran XIV Strategi Operasionalis- isasi Perwujudan Kawasan: Ardalen, di Pulau Kalimantan (2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 14, 15)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Kemer. PU, Pemda, dan/atau Swasta.				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2014- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Andalar, Kandangan dan Sekelarnya, Kawasan A. A. Adnan Kemarmasir Raya dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalar, Keridim							
2.3.	Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan								
2.3.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan, perumukiman, serta jaringan prasarana dan sarana	1. Perkebunan Kelapa sawit di Kawasan Andalar, Singkawang dan Sekitarnya, Kandangan, Kumpang dan Sekitarnya, Kawasan Aradain Sarangan, serta Kawasan Aradain Kempit-Pangkalan Bui	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalar di Pulau Kalimantan (2, 3, 5, 8)	APEN, AEDD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendar, Kemuperin, Kemari, TU, Pemula, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	3. Perkejaran kelaps- seweit di Kawasan Andalar, Kawasan Ihulu dan Sekeloa.	Perkejaran kelaps- seweit di Kawasan Andalar, Kawasan Ihulu dan Sekeloa.	Lampiran XIV Strategi Operasional- isasi Terwujudan Kawasan Andalan di Pulau Kalimantan (1, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 20)	APRN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemantan, Kemperin, Kemn PT, Penda. dan/atau swasta				
	Kawasan Andalan Harau, Kawasan Andalar, Mirza Teseh, Kawasan Andalar, Kuala Kapuas, Kawasan Andalar Kandangan dan Sekeloa.	Kawasan Andalan Harau, Kawasan Andalar, Mirza Teseh, Kawasan Andalar, Kuala Kapuas, Kawasan Andalar Kandangan dan Sekeloa.							
	Kawasan Andalan Batuniasih Baya dan Sekeloa, serta Kawasan Andalar.	Kawasan Andalan Batuniasih Baya dan Sekeloa, serta Kawasan Andalar.							
	Sanggulung- Sanggulung Wali	Sanggulung- Sanggulung Wali							
	(Sasamwad, serik	(Sasamwad, serik							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kawasan: Adakahu Bonlar, S. Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, Pensiarni dan Sekitarnya (Bersamabejain)	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Adakahu di Pulau Kalimantan (C.3, 18)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Kemenan P.C., Pemda, dan/atau Swasta				
	4. Perkebunan kelapa sawit di Kawasan Adakahu Beudlelin dan Kawasan Adakahu Tarakan-Tanjung Salas-Namukan-Pulau Bunyu-Adakahu (Lekap, buana) dan sekitarnya								
	Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perkebunan,	1. Perkebunan karet di Kawasan Aradalin Singkawang dan Sekitarnya,	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Adakahu di Pulau Kalimantan C.	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Kemenperin, Kemenan P.C., Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kecamatan Andalar, Sirkeliring-Sugala-Muara Wala (Bisnisasa), serta Kawasan Andalar Banting-Samudra, Penggaruan, Kelipayan-Kerajam dan Sekitarnya (Bonsambajang)	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan, Anak-anak di Pulau Kalimantan (15, 18)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemendag, Kemendagri, Kemendikbud, Kominfo, Kemenaker, Kemenkumham, Kemenlu, Kemenperin, Kemen PU, Ponda, dan/atau Swasta				
		R. Pekanbaru kerinci di Kawasan Andalar, Banting dan Kawasan Andalar, Tarakan Tanjung Sales Narakar, Duku Banyu-Mulimura (Tanjungbamat dan Sekitarnya							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2013- 2014	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.4. 2.4.1	Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan penikinan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan penikinan, termasuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, perumukiman, serta jaringan prasarana dan sarana	1. Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya. Kawasan Andalan Kepulauan dan Sekitarnya. Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Bantulcin 2. Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, Kawasan Andalan Tarakan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lant Puluhan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lant Dalam Laut, Kawasan	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pulau Kalimantan (1, 3, 4, 13)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemren RI, Kemperpin, Kemar, PU, Pemda, dan/atau Swasta.				
			Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Kalimantan (2, 5, 6, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemren KP, Kemperpin, Kemar, PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>Andalan Tanjung Rebbydar Sekeloa Raya Kawasari Arbilan Sengkaliran Sengkalir-Mitra Wadisa (Sasamawal) Kawasin Al-Jalal Tarakat-Taqiqat Salas-Nurakati Kawasin Ar-Rahar Rontan Samundia- Tanggayung Balikpapan-Penajam dan Sekeloa (Borani-Subjani), serta Kawasari Andalan Lela Rontan-Karakam dan Sekeloa</p>							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2014- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		4. Kawasan Andalas latar belakang dan Sekelarnya, Kawasan Andalas Samudra-Pangkajene dan sekitarnya Andalas Kaala Kapuas	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalas di Pulau Kalimantan (7, 8, 21)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen KP, Kementerian, Kemen. PU, Pemda, dan/atau Swasta.				
2.5.	Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertambangan								
2.5.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, termasuk kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan <i>Asifing</i> dengan memperhatikan daya dukung	1. Kawasan Andalas: Tanjung Bedeh dan Sekelarnya, Kawasan Andalas: Sanggailitau, Sarukale-Muara Wabau (Sasumawe), Kawasan Andalas: Tarakan-Tanjung Selayu-Nunukan, Pulau Banyak-Mafira (Talapantama) dan Sekelarnya, Kawasan	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalas di Pulau Kalimantan (7, 18, 19, 20, 21)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kementerian, Kementerian, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2013- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	dan daya tangung lingkungan hidup, pertumbuhan, serta jaringan prasarana dan sarana	<p>Andalar, Buntar, Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, Perajam dan sekitarnya (Kamsantelajam), serta Kawasan Andalar, Lat dan sekitarnya</p> <p>2. Kawasan Andalar Lat Klat, Pematang dan Kawasan Andalar Lat Pulau Laut</p> <p>3. Kawasan Andalar Merau Tegeh</p>	<p>Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalar di Pulau Kalimantan (12, 16)</p> <p>Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalar di Pulau Kalimantan (10)</p>	<p>APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah</p> <p>AUDN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah</p>	<p>Kemen ESDM, Kementerian, Komdis, Pemda, dan/atau Swasta</p> <p>Kemen ESDM, Menteri, Kementerian, Komdis, Pemda, dan/atau Swasta</p>				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.3.2.	Rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan	1. Kawasan Andalan Tanjung Kidoh dari Sekeloa, Keresan Andalan Sangkilirang, Satek, Muara Wadai (Sasumawa), Keresan Andalan Tarakan-Lanjari, Satek-Nurukan, Pulau Buntar, Malinau (Tarapniburna) dan Sekizany, Keresan Andalan Bontang, Samarinda, Tenggarong Balikpapan, Perjam dan Sekizany (Boranutejano);	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Keresan Andalan di Pulau Kalimantan (17, 18, 19, 20, 21)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen ESUM, Kemenhut, Kementerian, Kemen PUP, Pemda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERJUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		serta Kawasan Andalau, Tarakan Berlaur, Tarakan dan sekitarnya. 2. Kawasan Andalau Tarat Kuala Pembatangdar, Kawasan Andalau Laut Dalam Laut.	Lampiran XIV Strategi Operasional- isasi Perwujudan Kawasan Andalau di Pulau Kalimantan (12, 16)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen KSDM, Kemenhut, Kemempert., Kemari PU, Pemda, dan/atau Swasta.	■			
		3. Kawasan Andalau Muaru Teveh	Lampiran XIV Strategi Operasional- isasi Perwujudan Kawasan Andalau di Pulau Kalimantan (10)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemen KSDM, Kemenhut, Kemempert., Kemari PU, Pemda, dan/atau Swasta.		■		
2.6.	Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan industri								
2.6.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri dan permukiman,	1. Kawasan Ataklan Pantarak dan Sekitarnya, Kawasan Ataklan Kamparmasir Raya	Lampiran XIV Strategi Operasional- isasi Perwujudan Kawasan Ataklan di Pulau Kalimantan (1,	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemempert., Kemari PU, Pemda, dan/atau Swasta.		■		

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER FENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	serta jaringan prasarana dan sarana	dan Sekeloa, Kawasan Andalain Saragkulin, Saragkulin-Muaru Wafan (Sasamaw), Kawasan Andalain Tarakan-Tarjal, Sals Nuzukat, Pulau Burayu Mahinru (Talapanbama) dan Sekeloa, serta Kawasan Andalain Borluang - Sasarinda, Tenggaraung Hafikrapan Peragam dan Sekeloa, (Bansamelaqim)	14, 18, 19, 20)					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2019- 2020- 2024	IV 2025- 2027
		2. Kawasan: Atakalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan: Atakalan Sampit-Pangkalanyan, Kawasan: Andalan, Bantelin, serta Kawasan Andalan Panjang Rekoh dan Sekitarnya	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan: Atakalan, di Pulau Kalimantan (2, 8, 15, 17)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta.		■		
		3. Kawasan: Atakalan Kekayangan dan Sekitarnya	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan: Andalan di Pulau Kalimantan (3)	APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta.			■	

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2018	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.7. 2.7.1.	Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pariwisata, termasuk kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana	1. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata Lokasi: di sekitar kawasan wisata di Kabupaten Batulicli 2. Kawasan Andalan Lokasi: di sekitar kawasan wisata di Kabupaten Batulicli	Lanjutan XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Kalimantan (17)	APIN, AUPD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Kemen RI, Kemen PU, FEMDA, dan/atau Swasta		■		
		1. Kawasan Andalan Lokasi: di sekitar kawasan wisata di Kabupaten Batulicli 2. Kawasan Andalan Lokasi: di sekitar kawasan wisata di Kabupaten Batulicli	Lanjutan XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Kalimantan (17)	APIN, AUPD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kementerian, Kemen RI, Kemen PU, FEMDA, dan/atau Swasta		■		

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI FERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.	Kawasan Andalan Rante, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembang, Kawasan Andalan Kandungan dan Sekelarnya, Kawasan Andalan Sasakulirak, Sasak-Muar, Wahau (Gasmawad), Kawasan Andalan Tarakon, Tarjang Salak, Narakat, Dalan Buryu, dan Malimau (Tarapmburna) dan Sekelarnya, Kawasan Andalan Romang – Suarindak – Tenggarong	Kawasan Andalan Rante, Kawasan Andalan Laut Kuala Pembang, Kawasan Andalan Kandungan dan Sekelarnya, Kawasan Andalan Sasakulirak, Sasak-Muar, Wahau (Gasmawad), Kawasan Andalan Tarakon, Tarjang Salak, Narakat, Dalan Buryu, dan Malimau (Tarapmburna) dan Sekelarnya, Kawasan Andalan Romang – Suarindak – Tenggarong	Lampiran XIV Strategi Operasional- isasi Ferwujudan Kawasan Andalan di Pulau Kalimantan (2, 12, 13, 18, 19, 20, 21)	APRN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah	Kemampuan, Komen KP, Komen PI, Pmda, dan/atau Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER FENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Malikapurin Perajam dan Sekelareya Ukomsartekajamj, serta Kawasar, Andhlan Juy ² Romiang – Tarakan dan, Sekelareya							

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO